



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup yang layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, perlu perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah yang sistematis, terpadu dan menyeluruh tingkat Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pedoman dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 5);
4. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 45 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu Di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 45);

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPd, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kota.
11. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
12. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Penduduk Miskin adalah orang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya.

BAB II RPKD

Pasal 2

RPKD dimaksudkan sebagai landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

RPKD bertujuan:

- a. memberikan pedoman atau panduan dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah yang sistematis, terpadu dan menyeluruh di tingkat Daerah;
- b. menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan ke dalam konteks penyelesaian permasalahan kemiskinan di Daerah;
- c. meningkatkan kinerja antar lembaga serta instansi penanggulangan kemiskinan serta membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Daerah menuju profesionalisme dan pencapaian yang terukur dan terarah; dan
- d. meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kondisi Umum Wilayah;
 - c. Profil Kemiskinan Kota Salatiga;
 - d. Program Prioritas;
 - e. Wilayah Prioritas;
 - f. Monitoring Dan Evaluasi;
 - g. Penutup.
- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh TKPK Kota bersama dengan instansi terkait dari setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPK Kota berkoordinasi dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Juli 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KOTA
SALATIGA TAHUN 2023-2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan baik sosial maupun ekonomi untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi, yang meliputi permasalahan kesejahteraan ekonomi, kapasitas maupun inklusi sosial (Wagle, 2008). Kemiskinan terdiri dari segala bentuk ketidakadilan, yang merupakan sumber pengucilan sosial, dalam distribusi kondisi kehidupan yang esensial bagi martabat manusia (Asselin, 2009). Adapun kebutuhan dasar manusia tercermin dalam dimensi antara lain pendapatan, pendidikan, kesehatan, nutrisi/makanan, sanitasi/air bersih, pekerjaan, rumah, akses terhadap aset produktif, akses terhadap pasar dan partisipasi dalam komunitas (Asselin, 2009). Pandemi COVID-19 yang terjadi selama dua tahun ke belakang juga terbukti memberikan dampak pada kondisi kemiskinan di Indonesia, salah satunya adalah hilangnya pekerjaan dan pendapatan masyarakat karena adanya penutupan atau pengurangan aktivitas ekonomi (Suryahadi et al., 2020).

Upaya penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari perencanaan wilayah tentunya membutuhkan dasar studi ilmiah dengan menggunakan analisis yang tepat untuk dapat kemudian merencanakan tindakan maupun aksi penanggulangan kemiskinan yang nyata. Upaya penanggulangan kemiskinan daerah merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Adapun payung hukum untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yakni Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Pada tahun 2020 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Amanat yang tertuang dalam kebijakan ini perlu dilanjutkan pada level kabupaten/kota, dalam hal ini Kota Salatiga untuk mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang ada. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu di Kota Salatiga dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Oleh karenanya, perlu

disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga dengan periode waktu 5 tahun mulai 2023 hingga 2027.

Dalam menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan penting untuk melihat bagaimana tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Setelah garis kemiskinan ditentukan, maka profil kemiskinan dapat dianalisis yang kemudian memberikan perkiraan kemiskinan secara keseluruhan, distribusi kemiskinan di seluruh sektor, wilayah, kelompok sosial ekonomi maupun perbandingan antara penduduk miskin dan tidak miskin (Kakwani & Son, 2004). Di Indonesia, pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS misalnya menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Hal ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang disampaikan oleh Worldbank (<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11985>) (Haughton & Khandker, 2009). Melalui konsep ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang dapat dikelaskan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Sebagaimana disampaikan oleh Ravallion (1998) dalam (Haughton & Khandker, 2009), terdapat tiga langkah untuk menganalisis kemiskinan: (i) Mendefinisikan indikator kesejahteraan, (ii) Menetapkan standar minimum yang dapat diterima dari indikator tersebut untuk memisahkan yang miskin dari yang tidak miskin (garis kemiskinan), (iii) Membuat ringkasan statistik untuk mengumpulkan informasi dari distribusi indikator kesejahteraan ini relatif terhadap garis kemiskinan. Beberapa pertanyaan penting dalam mendalami kemiskinan di suatu wilayah antara lain: Bagaimana karakteristik rumah tangga miskin? Bagaimana kondisi kemiskinan yang ada apakah sementara atau tetap? Bagaimana pola dan perubahan kemiskinan? Selain itu, perlu diperhatikan pula aspek longitudinal/panel yang lebih luas dari profil kemiskinan - aliran pendapatan seumur hidup, posisi anak-anak, orang sakit dan lanjut usia, kecukupan tabungan, jenis kelamin; dll. Selain itu, penting menggunakan sumber data gabungan untuk penilaian kemiskinan - menggabungkan survei rumah tangga dan sensus penduduk untuk menyusun peta kemiskinan agar profil, karakteristik dan permasalahan kemiskinan dapat dijabarkan secara jelas untuk kemudian dicari upaya-upaya (kebijakan) penanggulangan kemiskinan yang sesuai.

Penyusunan RPKD Kota Salatiga didahului dengan analisis terhadap kondisi wilayah yang dilanjutkan dengan analisis profil kemiskinan wilayah. Hasil kajian profil kemiskinan daerah melalui analisis karakteristik makro maupun mikro kemudian dipergunakan untuk menganalisis akar masalah kemiskinan, keterkaitan dengan kondisi fiskal serta analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, analisis wilayah dilakukan untuk menentukan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. Dalam RPKD ini termuat rekomendasi penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kota Salatiga.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RPKD) Kota Salatiga yaitu :

1. Memberikan pedoman atau panduan dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah yang sistematis, terpadu dan menyeluruh di tingkat Kota Salatiga.
2. Menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan ke dalam konteks penyelesaian permasalahan kemiskinan di Kota Salatiga.
3. Meningkatkan kinerja antar lembaga serta instansi penanggulangan kemiskinan serta membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga menuju profesionalisme dan pencapaian yang terukur dan terarah.
4. Meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Salatiga.

1.3 RUANG LINGKUP

1. RPKD Kota Salatiga berisi tentang analisis terhadap kondisi umum wilayah, identifikasi profil kemiskinan, penentuan program dan wilayah prioritas penanganan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun mulai 2023 hingga 2027.
2. RPKD disusun bersama dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Salatiga mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
3. RPKD dilakukan melalui strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan.
 - a. Strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta, sinergi kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
 - b. Program penanggulangan kemiskinan terdiri atas program bantuan sosial dan jaminan sosial berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu ; program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, serta program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.
4. Lingkup pembahasan RPKD adalah seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan.
5. RPKD menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

1.4 LANDASAN HUKUM

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Salatiga Tahun 2023-2027 disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Adapun landasan hukum antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga;
4. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 45 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu Di Kota Salatiga;
5. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
6. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050-05/372/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), dan Sekretariat TKPK, Kelompok Kerja (Pokja) TKPK, dan Kelompok Program TKPK.

1.5 PENGERTIAN

Berikut ini disajikan pengertian kata dan kelompok kata untuk memahami dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga :

1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program penanggulangan kemiskinan.
2. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Penduduk Miskin adalah orang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya.

6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; (ii) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan (iii) program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.
7. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat : (i) hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, (ii) kebijakan dan strategi tahun berjalan, (iii) matriks target keberhasilan, (iv) lokasi prioritas.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang memuat : (i) pendahuluan, (ii) kondisi umum daerah, (iii) profil kemiskinan daerah, (iv) prioritas program, dan (v) lokasi prioritas. RPKD merupakan bagian dari dokumen RPJMD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah tertentu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
12. Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota.
13. Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan : (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan (iv) sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota. TKPK

Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Keanggotaan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

1.6 SISTEMATIKA

RPKD Kota Salatiga tahun 2023-2027 disusun dengan bab-bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, landasan umum dan sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Umum Wilayah Kota Salatiga menjelaskan tentang kondisi fisik, sosial ekonomi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Bab III Profil Kemiskinan Kota Salatiga membahas tentang konsep kemiskinan, analisis kondisi kemiskinan daerah, analisis karakteristik permasalahan dari berbagai bidang yakni ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan.

Bab IV Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan tentang program prioritas penanggulangan kemiskinan dengan analisis determinan kemiskinan, analisis kondisi fiskal, analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi, serta strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Bab V Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan membahas penentuan wilayah prioritas bidang kemiskinan konsumsi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan serta percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Bab VI Monitoring dan Evaluasi menjelaskan tentang bagaimana upaya monitoring dan evaluasi dilakukan.

Bab VII Penutup berisi kata akhir dan saran perbaikan.

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

2.1. KONDISI FISIK

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis Kota Salatiga terletak di antara 007°17' dan 007°17'.23" Lintang Selatan dan di antara 110°27'.56,81" dan 110°32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga merupakan kota yang strategis karena berada pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan Kota Semarang dan Kota Surakarta. Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang dengan batas wilayahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Kauman Lor dan Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Watu Agung), sebelah timur Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Sukoharjo dan Glawan) dan Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Tegal Waton dan Nyamat), sebelah Selatan Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Samirono, Jetak) dan Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan Karang Duren), serta sebelah barat Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Jombor, Sraten dan Gedangan) dan Kecamatan Getasan (Desa Polobogo). Berikut ini secara lebih rinci karakteristik lokasi dan wilayah Kota Salatiga berdasarkan luas wilayah dan kondisi administrasi ada pada tabel 2.1.

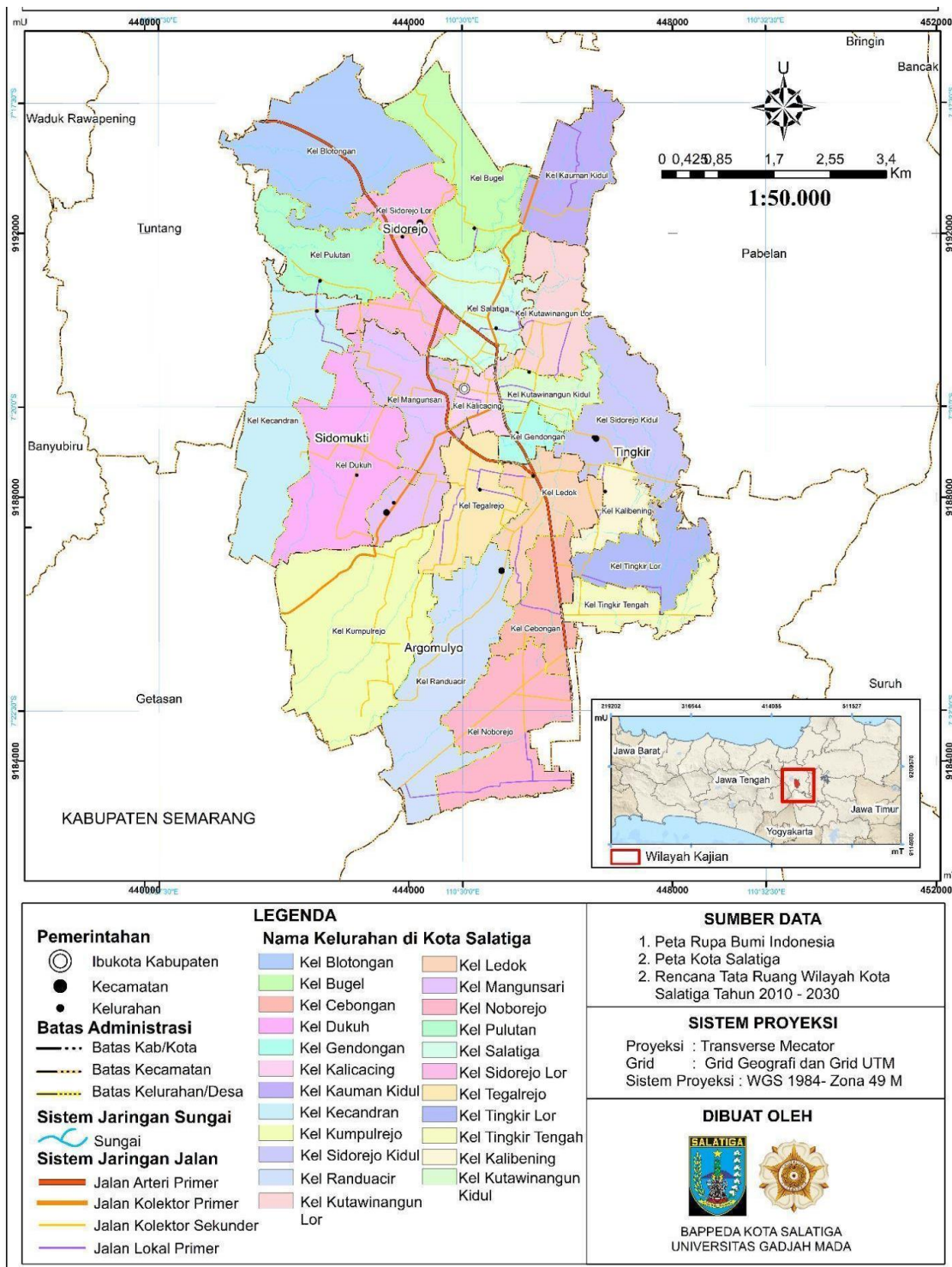
Tabel 2.1 Data Jumlah RT/RW dan Luas Wilayah Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	LUAS WILAYAH(±Km ²)	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	KECAMATAN SIDOREJO	15.61	314	60
	1. Kelurahan Salatiga	2.05	81	12
	2. Kelurahan Bugel	2.54	21	6
	3. Kelurahan Sidorejo Lor	2.60	95	16
	4. Kelurahan Blotongan	4.20	72	15
	5. Kelurahan Pulutan	2.13	20	5
	6. Kelurahan Kauman Kidul	2.09	25	6
2.	KECAMATAN SIDOMUKTI	18.14	235	39
	1. Kelurahan Mangunsari	2.96	96	16
	2. Kelurahan Dukuh	3.64	74	10
	3. Kelurahan Kecandran	3.48	26	6
	4. Kelurahan Kalicacing	0.72	39	7
3.	KECAMATAN TINGKIR	10.43	301	49
	1. Kelurahan Kalibening	0.97	9	3
	2. Kelurahan Sidorejo Kidul	2.75	37	9
	3. Kelurahan Kutowinangun Lor	1.98	91	6
	4. Kelurahan Kutowinangun Kidul	1.04	70	8
	5. Kelurahan Gendongan	0.58	38	5
	6. Kelurahan Tingkir Tengah	1.38	32	10
	7. Kelurahan Tingkir Lor	1.73	24	8
4.	KECAMATAN ARGOMULYO	18.14	277	58

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	LUAS WILAYAH(\pm Km ²)	Jumlah RT	Jumlah RW
	1. Kelurahan Ledok	1.93	71	14
	2. Kelurahan Cebongan	1.50	22	6
	3. Kelurahan Tegalrejo	1.96	62	9
	4. Kelurahan Randuacir	3.93	41	9
	5. Kelurahan Kumpulrejo	5.63	44	10
	6. Kelurahan Noborejo	3.19	37	10

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2021

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022, secara administratif Kota Salatiga memiliki luas wilayah sebesar \pm 5.678,110 ha atau \pm 56,78 km² yang terbagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan. Berikut menunjukkan wilayah administratif Kota Salatiga pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Salatiga

Sumber : Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Detail Tata Ruang Bwp Pk I, II, III dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030

Kota Salatiga berada pada ketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut (mdpl) dan dikelilingi beberapa gunung (Merbabu, Telomoyo dan Gajah Mungkur) menyebabkan Kota Salatiga memiliki tingkat kesuburan tanah dan potensi alam. Kondisi geologi di Kota Salatiga yaitu satuan morfologi gunung api yang berupa puncak Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo dengan ketinggian tempat umumnya lebih dari 1400 mdpl.

Sementara itu satuan morfologi tubuh gunung api yaitu berada pada ketinggian antara 400-1400 mdpl dan kemiringan lereng antara 10°-50° yang menempati dari tenggara ke barat laut sepanjang lereng Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo dan menempati bagian kecil di barat laut sebagai lereng Gunung Ungaran. Sedangkan pada kondisi morfologi kaki gunungapi menunjukkan bahwa ketinggiannya kurang dari 500 mdpl dan kemiringan lereng antara 5°-30°. Satuan morfologi ini tersusun oleh endapan vulkanik dan batuan sedimen tersier, sungai-sungai yang mengalir di daerah ini umumnya memiliki pola aliran sub-dendritik dan radial yang konvergen di Rawa Pening.

Jika dilihat dari kondisi tanah Kota Salatiga didominasi oleh tanah Latosol Coklat dan tanah Latosol Coklat tua. Jenis tanah tersebut menyebabkan Kota Salatiga cocok untuk ditanami beberapa tanaman karena tekstur tanahnya remah dan konsentrasinya gembur. Dari segi hidrologi, Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Salatiga meliputi pengelolaan wilayah sungai Jratunseluna (Sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi dan Juana) yang merupakan wilayah sungai strategis nasional mencakup DAS Tuntang sebagai potensi wilayah Kota Salatiga dari segi pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Jawa Tengah, kondisi iklim di Kota Salatiga yaitu beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 23°C-28°C dengan jumlah curah hujan di Kota Salatiga pada tahun 2015 sebanyak 2.124 mm dengan rata-rata hari hujan 84 hari dan rata-rata curah hujan sebanyak 25,29 mm/hari. Curah hujan tertinggi berada di bulan April sebanyak 460 mm dengan hari hujan 16 hari dan rata-rata curah hujan sebanyak 28,75 mm/hari.

2.1.2. Kondisi Kawasan dan Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Salatiga merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur (yang meliputi Kabupaten/Kota Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi). Kawasan ini selain didukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak yang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Untuk mendukung hal tersebut maka melalui Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intra regional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara inter regional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Pulau Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Pulau Kalimantan.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian struktur ruang wilayah di Kota Salatiga terbagi menjadi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan Kota Sidorejo, Sub pusat pelayanan Kota Sidomukti, Sub pusat Pelayanan Kota Argomulyo, sub pusat pelayanan Kota Tingkir dan pusat lingkungan seperti pada Gambar 2.2.



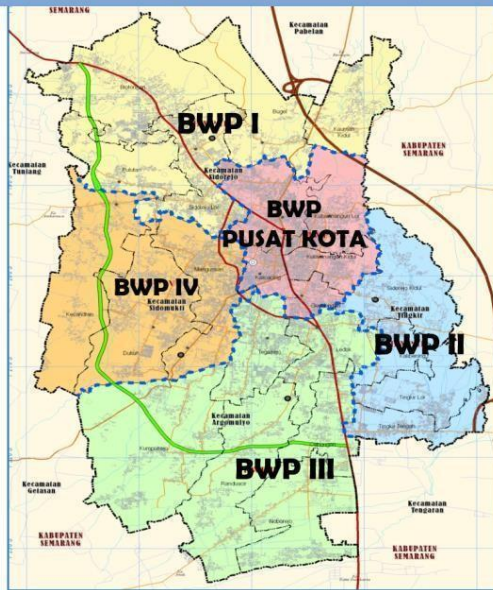
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA SALATIGA

BWP PUSAT KOTA : Mewujudkan pusat perdagangan jasa dan perkantoran berskala regional berkonsep kota hijau (green city) yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

- a. Sub BWP PK-1 (Kelurahan Kalicacing)
- b. Sub BWP PK-2 (Kelurahan Salatiga)
- c. Sub BWP PK-3 (Kelurahan Kutowinangun Lor)
- d. Sub BWP PK-4 (Kelurahan Kutowinangun Kidul)
- e. Sub BWP PK-5 (Kelurahan Gendongan)

BWP I : Mewujudkan kawasan pendidikan tinggi dan pariwisata didukung permukiman, perdagangan, dan pertanian

- a. Sub BWP I.1 (Kelurahan Blotongan)
- b. Sub BWP I.2 (kelurahan Bugel)
- c. Sub BWP I.3 (Kelurahan Kauman Kidul)
- d. Sub BWP I.4 (Kelurahan Sidorejo Lor)
- e. Sub BWP I.5 (Kelurahan Pulutan)



BWP II : Mewujudkan kawasan industri dan kegiatan berbasis pertanian lahan basah yang di dukung permukiman.

- a. Sub BWP II.1 (Kelurahan Sidorejo Kidul)
- b. Sub BWP II.2 (Kelurahan Kalibening)
- c. Sub BWP II.3 (Kelurahan Tingkir Lor)
- d. Sub BWP II.4 (Kelurahan Tingkir Tengah)

BWP III : Mewujudkan kawasan industri dan kegiatan berbasis pertanian meliputi Agrowisata dan Agroindustri yang didukung permukiman

- a. Sub BWP III.1 (Kelurahan Tegalarjo)
- b. Sub BWP III.2 (Kelurahan Ledok)
- c. Sub BWP III.3 (Kelurahan Cebongan)
- d. Sub BWP III.4 (Kelurahan Noborejo)
- e. Sub BWP III.5 (Kelurahan Randuacir)
- f. Sub BWP III.6 (Kelurahan Kumpulrejo)

BWP IV : mewujudkan pusat pengembangan pelayanan kesehatan berskala regional yang didukung permukiman

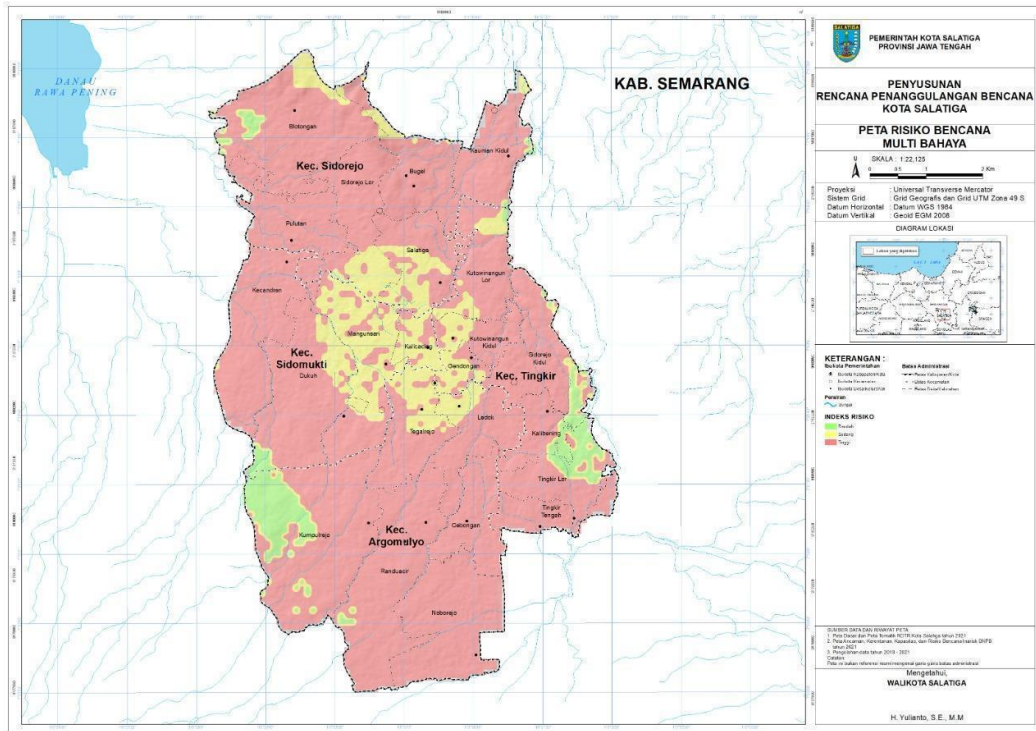
- a. Sub BWP IV.1 (Kelurahan Mangunsari)
- b. Sub BWP IV.2 (Kelurahan Dukuh)
- c. Sub BWP IV.3 (Kelurahan Kecandran)

Gambar 2.2 Bagian Wilayah Perencanaan Kota Salatiga
Sumber : RTRW Kota Salatiga, 2010

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kota Salatiga tersebar di beberapa kelurahan antara lain meliputi Kelurahan Blotongan, Bugel, Sidorejo Kidul, Tegalarjo, Randuacir dan Kumpulrejo. Kejadian bencana berupa angin puting beliung misalnya, terjadi pada tahun 2016 di Kelurahan Blotongan. Beberapa wilayah masuk dalam kawasan rawan longsor akibat kondisi lereng, semisal di Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Dukuh atau akibat posisi rumah/perumahan di sempadan sungai, semisal di Kelurahan Randuacir dan Tegalarjo. Kejadian bencana yang sering terjadi adalah pohon tumbang yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi pepohonan yang sudah tua. Berikut ini merupakan peta risiko, ancaman dan kerentanan bencana multi bahaya Kota Salatiga pada Gambar 2.3 sampai Gambar 2.7.

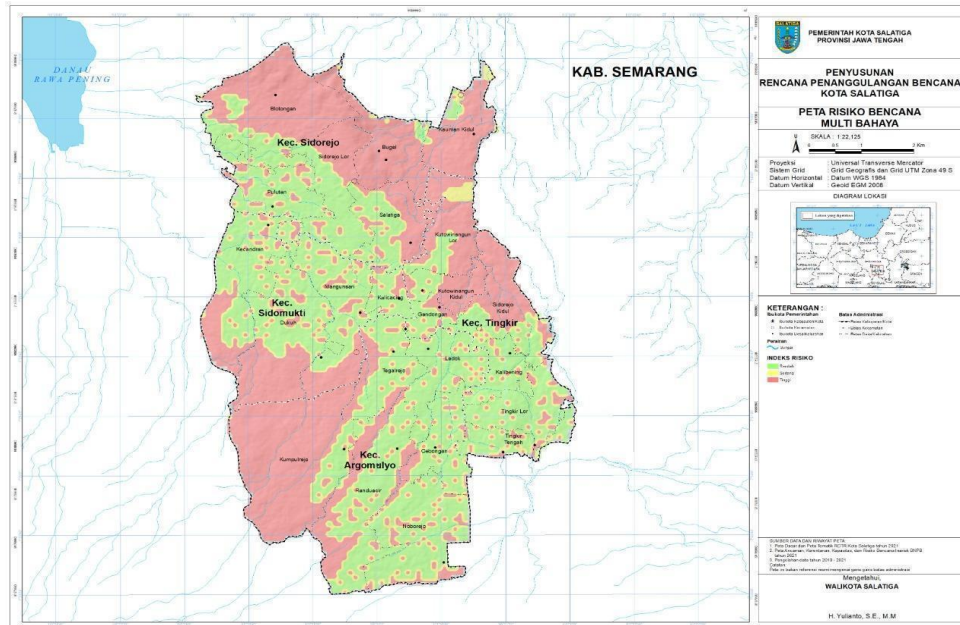
Risiko multi bahaya merupakan indeks komposit dari variabel masukan yang terdiri dari: ancaman multi bahaya, kerentanan multi bahaya, dan kapasitas. Dikarenakan pada bagian ancaman multi bahaya terdapat dua skenario, yaitu dengan atau tanpa bencana non alam (COVID-19), maka pada bagian risiko multi bahaya juga terdiri dari kedua skenario tersebut. Pada indeks risiko multi bahaya gabungan, yang mengakomodasi ancaman bencana alam dan non alam, teridentifikasi bahwa sebagian besar wilayah Kota Salatiga dikategorikan sebagai kawasan risiko tinggi, terutama pada kawasan *peri-urban*. Sementara kawasan pusat kota dikategorikan sebagai kawasan risiko sedang. Hal ini berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19, dimana infrastruktur kesehatan utama sebagian besar terletak di sekitar pusat kota. Di sisi lain, kawasan risiko rendah terdapat di Kelurahan Kumpulrejo, Kalibening, Tingkir Lor, Sidorejo Kidul, dan Blotongan. Umumnya terletak pada kawasan permukiman kepadatan rendah.



Gambar 2.3 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya Gabungan (Ancaman Bencana Alam dan Non Alam)

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Salatiga tahun 2022-2026

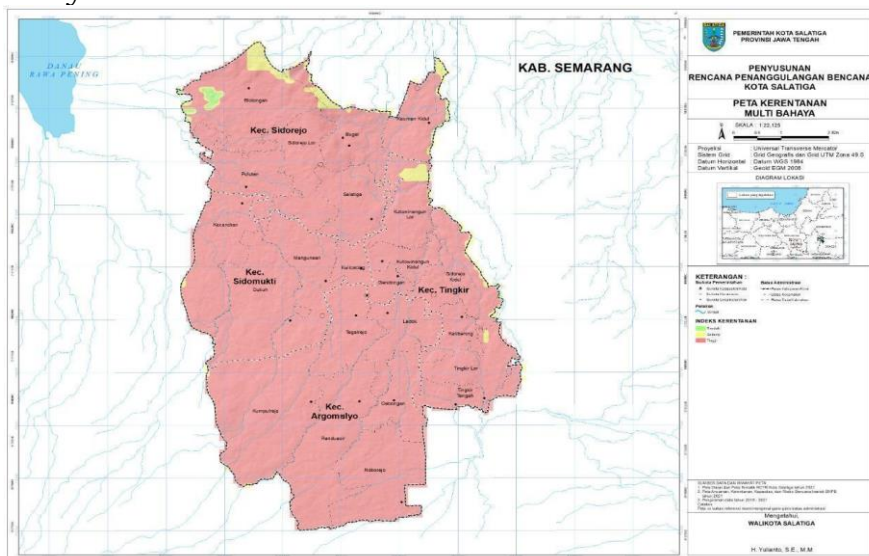
Pada indeks risiko multi bahaya bencana alam, teridentifikasi pola yang berbeda, dimana kawasan risiko rendah memiliki luasan yang lebih tinggi dari kawasan risiko tinggi. Wilayah dengan morfologi landai yang melingkupi bagian pusat Kota Salatiga, sisi barat laut dan tenggara, dikategorikan memiliki risiko bencana multi bahaya yang rendah. Sementara wilayah dengan morfologi berbukit hingga bergunung yang terletak di sisi barat daya dan timur laut Kota Salatiga, dikategorikan sebagai kawasan risiko tinggi. Hal ini dikarenakan ancaman bencana tanah longsor di lokasi-lokasi tersebut, serta tanah longsor juga teridentifikasi sebagai bencana alam paling prioritas (Gambar 2.4).



Gambar 2.4 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya Bencana Alam di Kota Salatiga

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Salatiga tahun 2022-2026

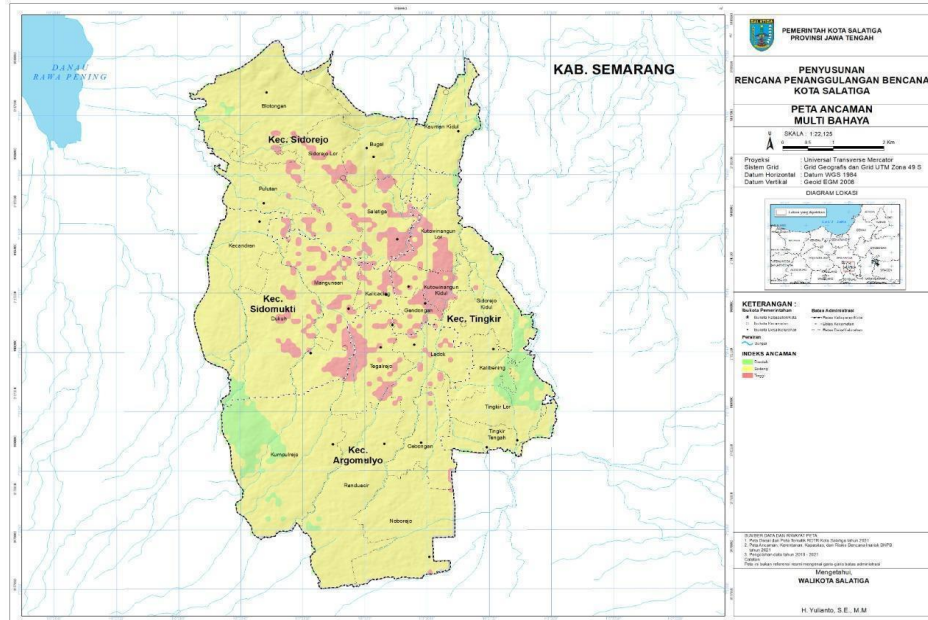
Kerentanan terhadap bencana multi bahaya pada Gambar 2.5 menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Kota Salatiga dikategorikan memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana. Hanya sebagian kecil area di sisi barat Kelurahan Blotongan yang termasuk pada zona kerentanan rendah. Kondisi kerentanan ini melibatkan masing-masing komponen kerentanan (sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan), serta memperhatikan keterpaparan berdasarkan persebaran kawasan ancaman multi bahaya.



Gambar 2.4 Peta Tingkat Kerentanan terhadap Bencana Multi Bahaya di Kota Salatiga

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Salatiga tahun 2022-2026

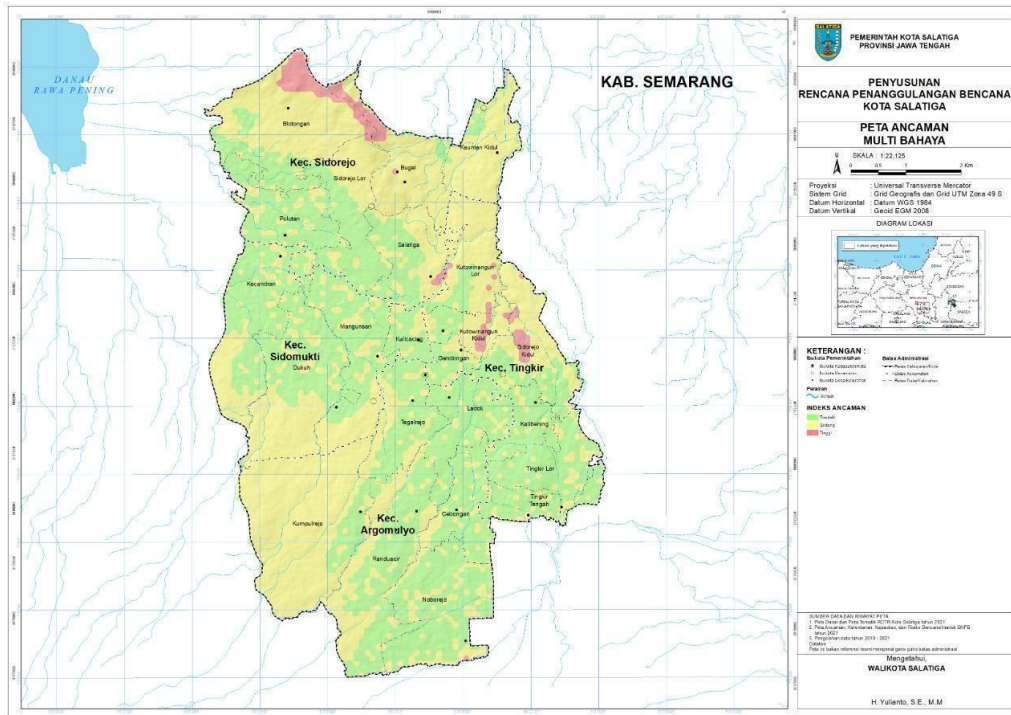
Peta ancaman multi bahaya gabungan pada Gambar 2.6 menunjukkan efek yang dominan dari ancaman bencana Covid-19 sebagai ancaman bencana dengan prioritas tertinggi di Kota Salatiga. Hal ini tergambarkan pada kawasan pusat kota yang memiliki lebih banyak kawasan ancaman tinggi. Sementara ancaman rendah teridentifikasi di Kelurahan Kumpulrejo, Tingkir Lor, Kalibening, dan Sidorejo Kidul.



Gambar 2.6 Peta Kawasan Ancaman Multi Bahaya Gabungan (Ancaman Bencana Alam dan Non Alam)

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Salatiga tahun 2022-2026

Kawasan ancaman bencana alam yang tinggi berdasarkan Gambar 2.7 terdapat di Kelurahan Blotongan, Sidorejo Kidul, dan Kutowinangun Kidul. Hal ini dikarenakan kontribusi dari kawasan ancaman bencana tanah longsor sebagai ancaman bencana prioritas, dimana memiliki lokus pada wilayah-wilayah tersebut. Sementara sebagian besar kawasan permukiman kepadatan tinggi yang terletak di pusat kota Salatiga, dikategorikan sebagai kawasan ancaman rendah bencana multi bahaya.



Gambar 2.7 Peta Kawasan Ancaman Multi Bahaya Bencana Alam di Kota Salatiga
 Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Salatiga tahun 2022-2026

2.1.4. Kondisi Infrastruktur

Kondisi infrastruktur secara umum terkait dengan ketersediaan fasilitas dasar, antara lain fasilitas pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas), fasilitas kesehatan (rumah sakit, apotek/toko obat, poliklinik/balai, puskesmas dan puskesmas pembantu), serta fasilitas ekonomi (pasar, bank, toko, supermarket) (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Jumlah Fasilitas Umum di Kota Salatiga Tahun 2021

Fasilitas Umum	Jumlah
SD/MI	102
SMP/MTS	31
SMA/Aliyah	9
SMK	19
Rumah Sakit	6
Apotek/Toko Obat	30
Politeknik/Balai	26
Puskesmas	6
Puskesmas Pembantu	22

Fasilitas Umum	Jumlah
Pasar	16

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

2.2. KONDISI SOSIAL EKONOMI

2.2.1. Kondisi Demografis Wilayah

Kondisi demografi menunjukkan jumlah penduduk yang berubah pada tiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) Kota Salatiga mengalami kenaikan, dan mengalami penurunan di tahun 2021. Dalam periode 5 tahun yaitu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah penduduk Kota Salatiga mengalami penambahan sekitar 9.766 jiwa atau rata-rata 0,62% selama 5 tahun. Pada tahun 2021 jumlah penduduk tercatat sebanyak 193.525 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk sebanyak 196.082 jiwa, maka pertumbuhan penduduk menurun sebanyak 2.557 jiwa. Penurunan jumlah penduduk diindikasikan karena adanya pandemi Covid-19 sebagai permasalahan global yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadi penurunan jumlah penduduk Kota Salatiga. Pada Tabel 2.2 menunjukkan rasio jumlah penduduk perempuan 2000 jiwa lebih tinggi dibandingkan dengan rasio jumlah laki-laki. Tentunya perubahan komposisi *sex ratio* akan memberikan dampak pada segala aspek kehidupan (sosial, ekonomi, budaya, dan politik). Selengkapnya tabel jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	2016	92.401	93.915	186.316	98,39
2	2017	95.381	96.697	192.078	98,64
3	2018	96.490	98.121	194.611	98,34
4	2019	97.026	98.537	195.563	98,46
5	2020	97.326	98.756	196.082	98,55
6	2021	95.601	97.924	193.525	97,63

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2021

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2021 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 52.634 jiwa, kemudian disusul Kecamatan Argomulyo sebesar 50.001 jiwa, berikutnya adalah Kecamatan Sidomukti (44.549 jiwa), dan terendah ada di Kecamatan Tingkir sebanyak 46.341 jiwa. Adapun persebaran penduduk terendah berada di Kecamatan

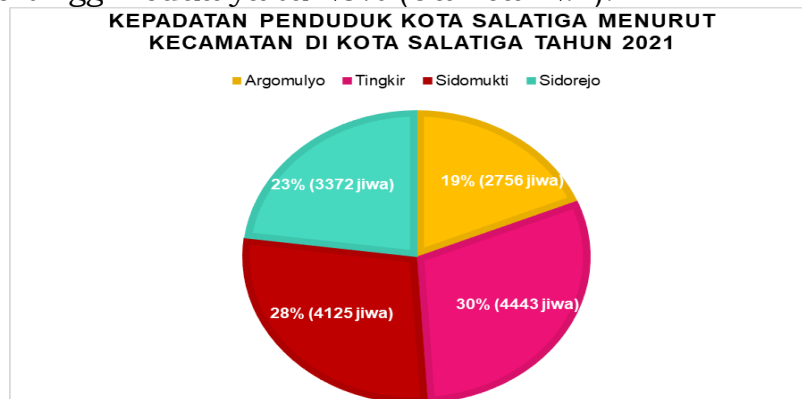
Sidomukti sebanyak 44.162 jiwa. Namun secara keseluruhan penduduk Kota Salatiga dapat dikatakan merata. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2016-2021

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Argomulyo	44.069	48.794	49.772	49.679	50.261	50.001
2	Tingkir	43.468	46.117	46.605	46.562	46.937	46.341
3	Sidomukti	42.474	43.617	44.023	44.710	44.162	44.549
4	Sidorejo	56.409	53.550	54.211	54.612	54.722	52.634
Kota Salatiga		186.420	192.078	194.611	195.563	196.082	193.525

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

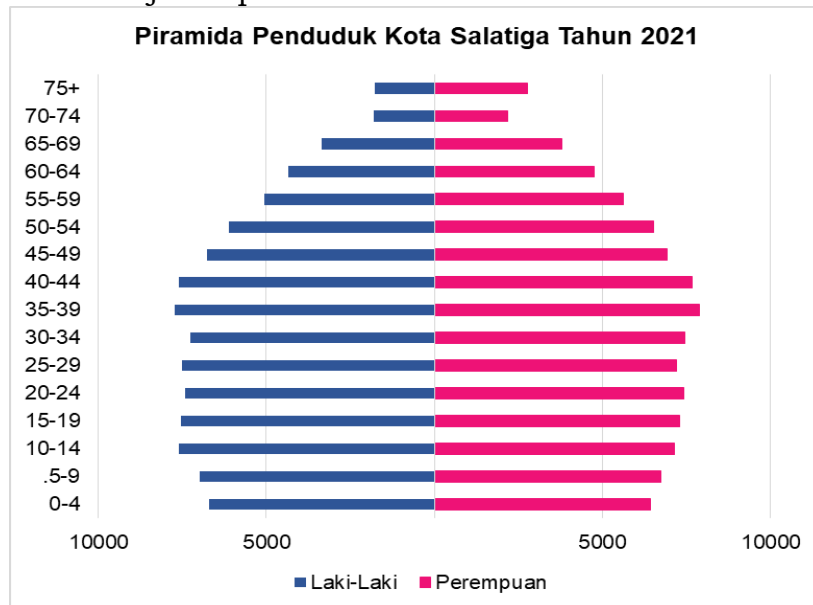
Perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota) menunjukkan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Tingkat kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Berdasarkan data BPD dalam angka, menunjukkan tahun 2021 kepadatan penduduk 3.520 per km². Untuk wilayah yang mengalami kepadatan tertinggi yaitu 30% penduduk atau 4443 jiwa berada di Kecamatan Tingkir dan disusul oleh Kecamatan Sidomukti sebagai wilayah kepadatan tertinggi kedua yaitu 28% (Gambar 2.4).



Gambar 2.4 Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Menurut Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2021
Sumber: BPS, 2021

Adapun permasalahan kemiskinan erat hubungannya dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau seseorang yang memiliki hambatan, kesulitan dan gangguan untuk melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya baik sebagai masyarakat rentan. Oleh karena itu, perlu adanya pencatatan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia untuk mengidentifikasi jenis

penyanggah masalah kesejahteraan sosial. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok usia 35-39 tahun sebanyak 15.635 jiwa atau sebesar 7,97% dari jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia 70-74 tahun sebanyak 3.624 jiwa atau sebesar 2,03% dari jumlah penduduk. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2020 disajikan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2021

Sumber : BPS, 2022.

2.2.2. Kondisi Sosial

Masalah kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan juga potensi terhadap kerentanan kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar memberikan kecenderungan timbulnya masalah sosial, seperti anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang disabilitas, hingga tuna susila. Terdapat juga permasalahan sosial yang berasal dari keluarga yang berumah tangga tak layak huni dan keluarga fakir miskin.

Kondisi sosial berhubungan pada kerentanan sosial terkait dengan kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Kelompok masyarakat rentan dalam kondisi kemiskinan merupakan perempuan terutama remaja perempuan, perempuan hamil, perempuan menyusui, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Kelompok rentan ini membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus agar kelompok rentan mampu bertahan menghadapi situasi kemiskinan. Berdasarkan Tabel 2.5 menunjukkan populasi kelompok rentan menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 menunjukkan bahwa kelompok rentan yaitu bayi, anak balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah dasar/ setingkat, penduduk usia lanjut, ibu hamil, dan penyandang disabilitas memiliki situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko kemiskinan. Kelompok ini berisiko tinggi karena pada saat terjadi bencana akan merasakan dampak yang lebih besar daripada kelompok masyarakat lainnya.

Tabel 2.5 Jumlah Kelompok Rentan di Indonesia Tahun 2020

No.	Kelompok Rentan	Kelompok Umur/ Formulasi	Jumlah
1.	Bayi dan Anak Balita	0 – 4 tahun	12.614
2.	Pra Sekolah dan Anak Usia SD/Setingkat	5 – 14 tahun	30.487
3.	Penduduk Usia Lanjut	≥60 tahun	7319
4.	Ibu Hamil K1		2.754
5.	Ibu Hamil K4*		2.665
6.	Ibu Bersalin/Nifas		2.475
7.	Penyandang Disabilitas	≤15 tahun	50
8.	Penyandang Disabilitas	15>x>60 tahun	520
9.	Penyandang Disabilitas	≥60 tahun	221

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2020

Kelompok rentan seperti ibu hamil di Kota Salatiga ditunjukkan pada Tabel 2.6 menunjukkan bahwa ibu hamil yang berada pada kondisi miskin dan rentan miskin akan mengakibatkan stres dan menjadi penyebab gangguan kehamilan, melahirkan dan produksi ASI karena kurangnya keterpenuhan dari segi ekonomi. Perempuan memiliki kerentanan yang tinggi bukan hanya pada ibu hamil dan menyusui saja, namun setiap perempuan selalu menjadi lebih dirugikan dan lebih merasakan dampak kemiskinan dibandingkan lelaki.

Tabel 2.6 Jumlah Ibu Hamil di Kota Salatiga Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah	
	Ibu Hamil	Ibu Bersalin/ Nifas
Sidorejo	661	593
Sidomukti	372	334
Sidomukti	250	246
Argomulyo	324	318
Argomulyo	480	397
Tingkir	667	587
Grand Total	2.754	2.475

Sumber: Seksi Kesga Gizi DKK Salatiga, 2021

Kelompok rentan lanjut usia (lansia) berdasarkan Tabel 2.7 menunjukkan total lansia di Kota Salatiga sebesar 7.319 jiwa dengan jenis kelamin perempuan lansia lebih besar dibandingkan jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 4.121 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lansia memerlukan pemulihan yang lebih lama dan menghadapi masa yang lebih sulit dalam kondisi miskin daripada laki-laki. Kelompok rentan lansia juga sering kali tinggal sendiri sehingga semakin memperbesar risiko lansia terdampak situasi ketidakmampuan ekonomi, karena adanya keterbatasan fisik dan tidak adanya bantuan dari anggota keluarga.

Tabel 2.7 Jumlah Individu Lansia berdasarkan jenis kelamin di Kota Salatiga Tahun 2021

Kecamatan/Kelurahan	Jml Individu Usia > 60 tahun		
	L	P	Total
ARGOMULYO	854	1.133	1.987
Cebongan	86	117	203
Kumpulrejo	190	269	459
Ledok	161	195	356
Noborejo	140	198	338
Randuacir	119	167	286
Tegalrejo	158	187	345
SIDOMUKTI	745	932	1.677
Dukuh	232	296	528
Kalicacing	86	127	213
Kecandran	155	171	326
Mangunsari	272	338	610
SIDOREJO	800	995	1.795
Blotongan	157	191	348
Bugel	80	92	172
Kauman kidul	74	107	181
Pulutan	108	126	234
Salatiga	170	255	425
Sidorejo lor	211	224	435
TINGKIR	799	1.061	1.860

Kecamatan/Kelurahan	Jml Individu Usia > 60 tahun		
	L	P	Total
Gendongan	81	116	197
Kalibening	40	69	109
Kutowinangun kidul	122	178	300
Kutowinangun lor	244	302	546
Sidorejo kidul	139	177	316
Tingkir lor	100	114	214
Tingkir tengah	73	105	178
Total	3.198	4.121	7.319

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2020

Penyandang disabilitas menurut Undang – Undang No.4 Tahun 1997 adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang tuna daksa, tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, cacat fisik dan mental. Berdasarkan Tabel 2.8 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas terbesar berada pada usia produktif yaitu usia 15-44 tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 195 jiwa dan perempuan sebesar 103 jiwa.

Tabel 2.8 Jumlah Penyandang Disabilitas dibagi per-usia dan jenis kelamin di Kota Salatiga Tahun 2020

Kecamatan/ Kelurahan	Usia < 15 th		Usia 15-44 th		Usia 45-59 th		Usia > 60 th		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
ARGOMULYO	8	3	48	32	23	26	23	23	186
Cebongan	1		4	1	3	1	1	3	14
Kumpulrejo	1	2	14	6	7	8	6	2	46
Ledok		1	3	4	4	8	3	4	27
Noborejo			4	7	3	1		5	20
Randuacir	3		9	3	3	5	9	1	33
Tegalrejo	3		14	11	3	3	4	8	46
SIDOMUKTI	9	5	58	27	24	17	23	27	190
Dukuh	6	2	12	10	6	2	8	5	51

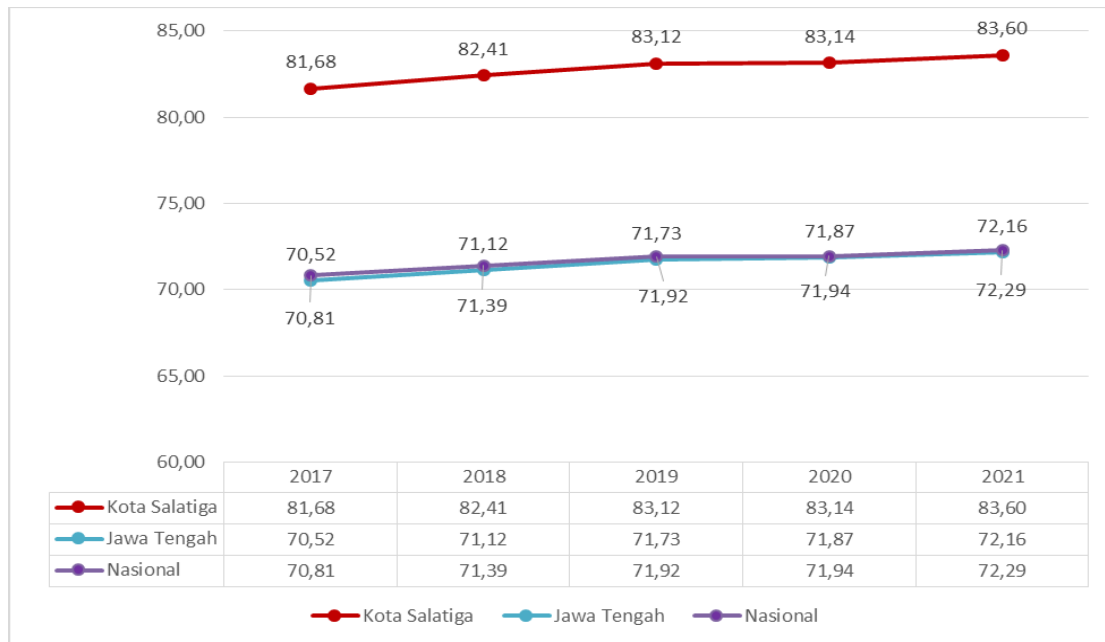
Kecamatan/ Kelurahan	Usia < 15 th		Usia 15-44 th		Usia 45-59 th		Usia > 60 th		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Kalicacing	1	1	11	4	4	6	5	11	43
Kecandran			6	6	5	3	5	3	28
Mangunsari	2	2	29	7	9	6	5	8	68
SIDOREJO	9	3	45	46	31	14	32	38	218
Blotongan	4	1	12	15	11	3	9	9	64
Bugel			1	4	5		2	5	17
Kauman Kidul	1		4	6	3	3	2	2	21
Pulutan			5	2		2		4	13
Salatiga	1	1	9	7	5	1	9	12	45
Sidorejo Lor	3	1	14	12	7	5	10	6	58
TINGKIR	10	3	47	33	25	24	27	28	197
Gendongan	1		8	5	5	5	4	1	29
Kalibening	2		5	3	2	1	2	8	23
Kutowinangun Kidul	2	1	3	7	4	4	2	2	25
Kutowinangun Lor	2		11	9	6	4	6	3	41
Sidorejo Kidul	1	1	6	4	5	5	10	11	43
Tingkir Lor	1	1	8	2	2	2	1	1	18
Tingkir Tengah	1		6	3	1	3	2	2	18
Total	36	14	198	138	103	81	105	116	791

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2020

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

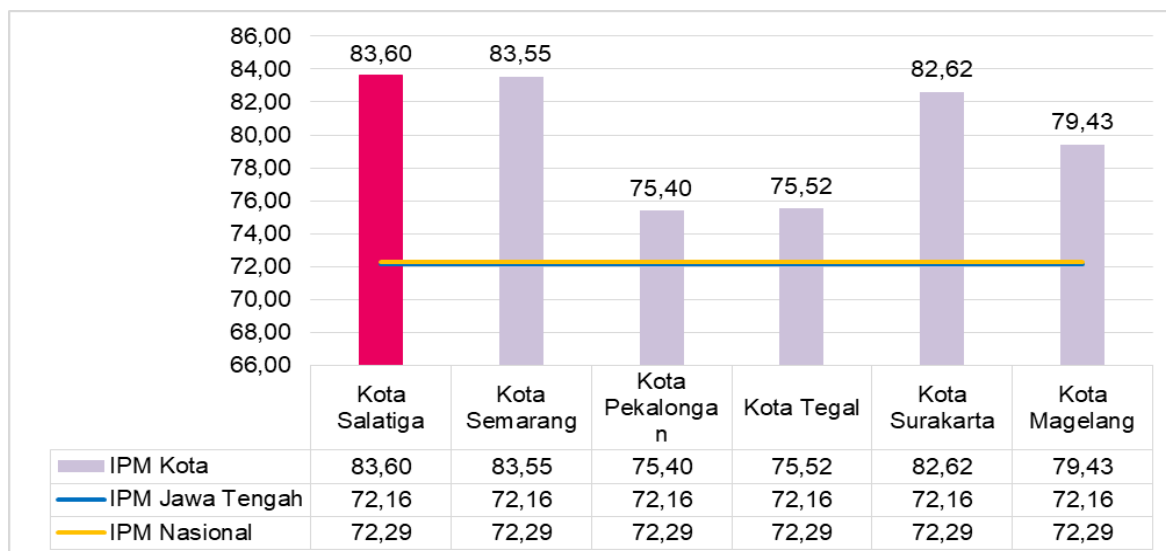
Capaian IPM Kota Salatiga selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Pada Tahun 2021 IPM Kota Salatiga sebesar 83,60, indeks pembangunan manusia meningkat 0,46 dari tahun 2020 sebesar 83,14. Perlambatan capaian IPM sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang berdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka IPM Kota Salatiga selama lima tahun terakhir selalu berada di atas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.6 Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Capaian IPM Kota Salatiga pada tahun 2017 sebesar 81,68 menunjukkan hasil yang baik, yaitu berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 70,52 dan Nasional 70,81, serta dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah merupakan posisi kedua tertinggi setelah Kota Semarang (81,19), selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.7 di bawah ini.



Gambar 2.7 Posisi Relatif IPM Kota Salatiga dibandingkan dengan Kota Lain, Provinsi dan Nasional Tahun 2021
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar tersebut diukur dengan empat komponen IPM yaitu usia harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita (Tabel 2.9).

Tabel 2.9 Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2016-2021

No.	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Usia Harapan Hidup saat lahir	76,87	76,98	77,11	77,22	77,4	77,55
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,98	14,99	15,00	15,34	15,41	12,77
3.	Rata-rata Lama Sekolah	9,82	10,15	10,40	10,41	10,42	10,66
4.	Pengeluaran Riil Perkapita (ribu Rp)	14.81 1	14.92 1	15.46 4	15.94 4	15.70 0	15.84 3
IPM Kota Salatiga		81,14	81,68	82,41	83,12	83,14	83,60
Jawa Tengah		69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16
Nasional		70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

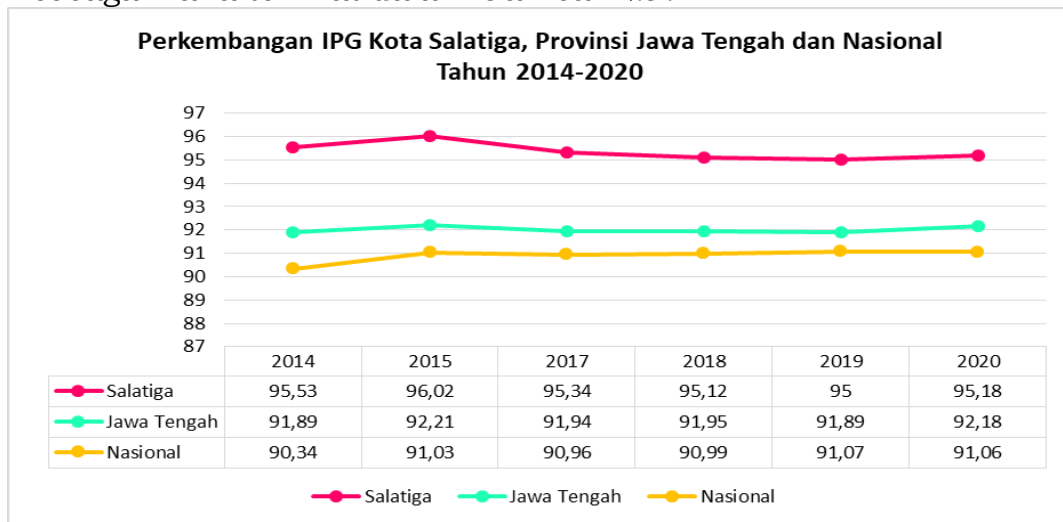
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2021

2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti definisi IPM), namun terpilih berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan

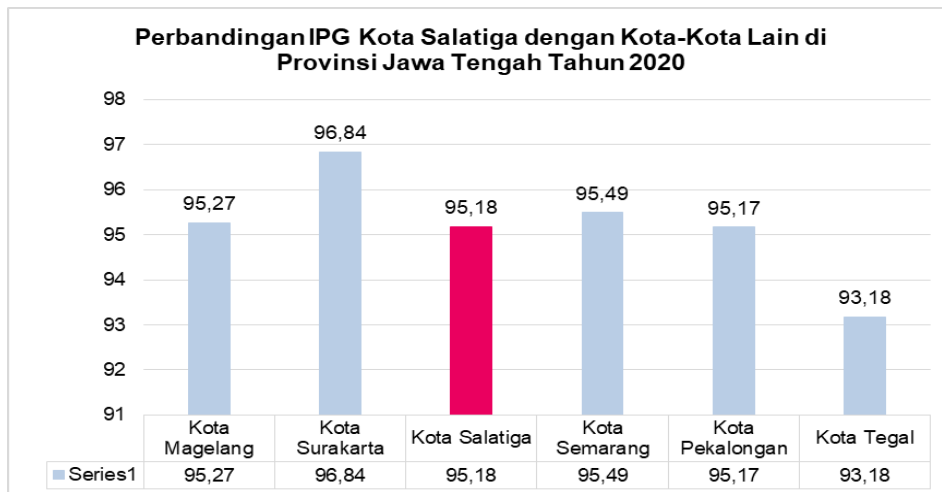
pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati/sama dengan angka 100.

Capaian IPG Kota Salatiga tahun 2020 dengan indeks 95,18 terhitung naik dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dengan indeks 95. Capaian IPG Kota Salatiga berada di atas capaian IPG Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 92,18 dan Nasional sebesar 91,06 (Gambar 2.8). Perbandingan capaian IPG Kota Salatiga dengan kota – kota lain di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke 4 sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.9.



Gambar 2.8 Perkembangan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2020

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2021



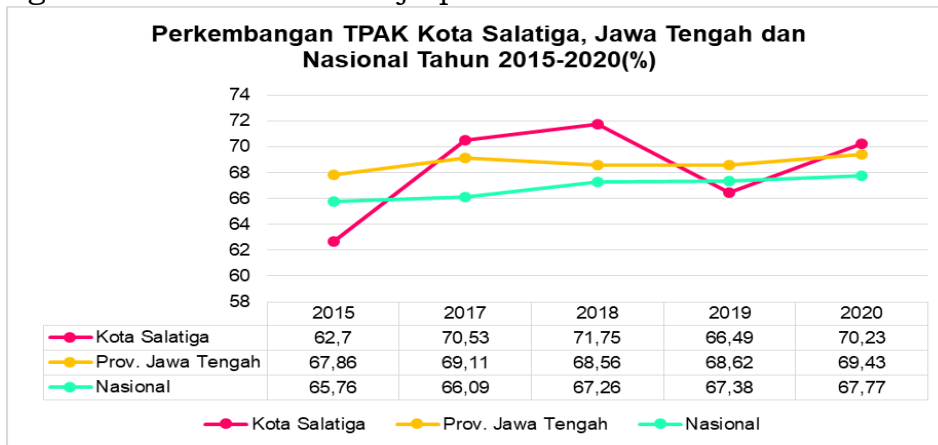
Gambar 2.9 Perbandingan IPG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2021

3. Ketenagakerjaan

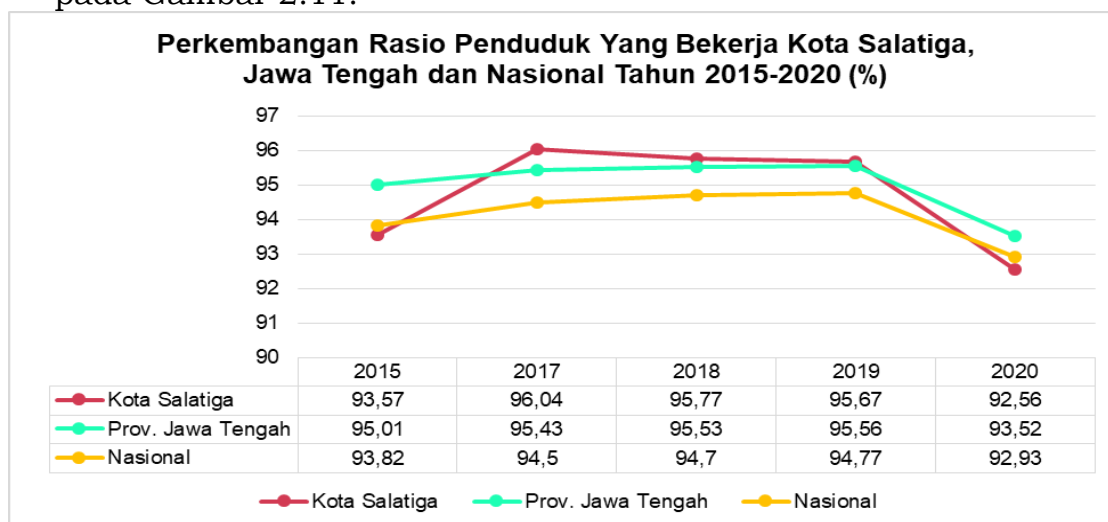
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Capaian TPAK Kota

Salatiga Tahun 2020 sebesar 70,23% mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 66,49%. Capaian Kota Salatiga tahun 2020 berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,43% dan Nasional sebesar 67,77%. Perbandingan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10 Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020 (%)
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2021

Sebelum adanya pandemi Covid-19 rasio penduduk yang bekerja di Kota Salatiga menunjukkan tren yang cenderung stabil. Tren menurun terjadi pada tahun 2020 karena adanya pandemi yang mengakibatkan banyaknya lapangan usaha yang mengalami kerugian yang secara langsung berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada tenaga kerja. Gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional seperti pada Gambar 2.11.

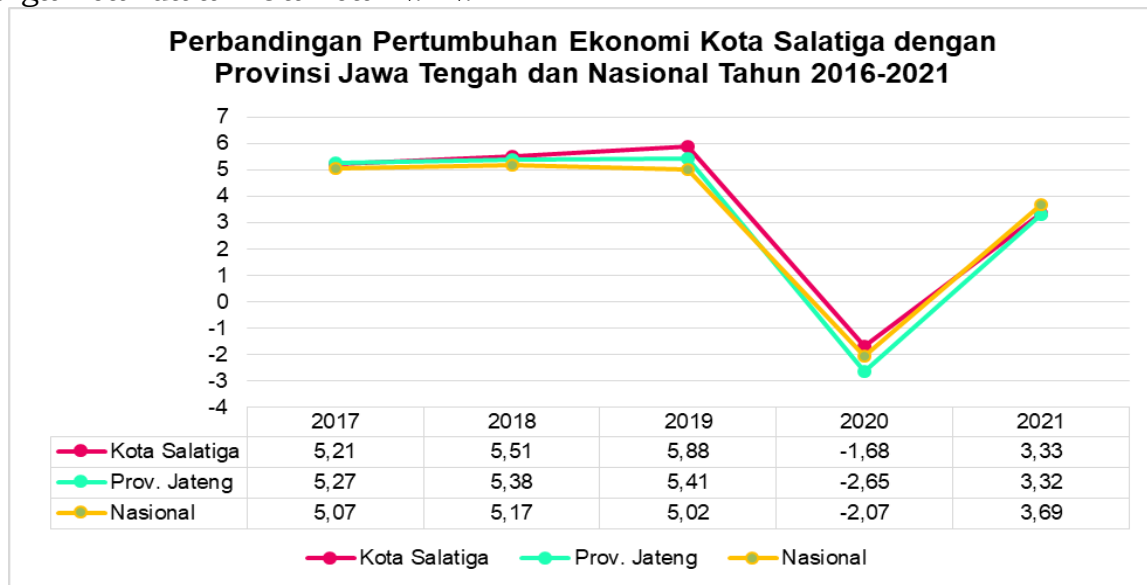


Gambar 2.11 Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020 (%)
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2021

2.2.3. Kondisi Ekonomi

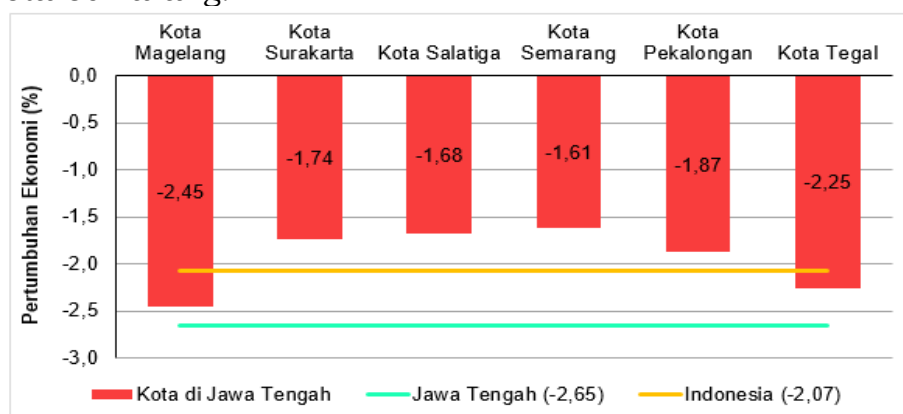
Kondisi ekonomi makro Kota Salatiga selama lima tahun (2017-2021) menunjukkan kinerja yang relatif stabil seiring membaiknya perekonomian

nasional dan perekonomian global. Sejak akhir tahun 2019 pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia mengakibatkan perekonomian dunia dan nasional mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga mengalami pertumbuhan dengan nilai 3,33% berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 3,32% dengan selisih 0,01% dan di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional 3,69%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
 Sumber : BPS, 2020

Selama periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tahunan Kota Salatiga selalu di atas Provinsi Jawa Tengah maupun nasional (Gambar 2.13). Pada tahun 2020, dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah, penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tidak sebanyak mayoritas kota lainnya, kecuali Kota Semarang.



** : Angka sangat sementara

Gambar 2.13 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga dengan Kota Lainnya di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional Tahun 2020** (%)

Sumber : BPS, 2020

Dari segi ekonomi, perekonomian penduduk dapat dilihat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama setahun, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu selama setahun.

PDRB ADHB Kota Salatiga dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2017-2021) meningkat 23,11 persen dari Rp11,4 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp14,01 triliun pada tahun 2021. Sedangkan PDRB ADHK naik dari Rp8,6 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp9,82 triliun pada tahun 2021, yang berarti perekonomian Kota Salatiga tumbuh 13,92 persen. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Salatiga dalam periode tersebut berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan Tabel 2.11.

Tabel 2.10 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021

PDRB	2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	11,38	12,34	13,31	13,27	14,01
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (triliun Rp)	8,62	9,13	9,67	9,50	9,82

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

Tabel 2.11 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Salatiga Tahun 2016-2020 (dalam juta)

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	525,55	567,53	599,35	606,19	631,75
B	Pertambangan dan Penggalan	5,18	5,22	5,36	5,44	5,34
C	Industri Pengolahan	3.569,64	3.835,46	4.161,27	4.276,68	4.586,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,81	23,31	24,23	24,71	25,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,75	8,20	8,67	9,06	9,31
F	Konstruksi	1.615,22	1.790,90	1.918,19	1.850,35	1.929,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.507,69	1.629,05	1.756,07	1.704,86	1.823,95

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
H	Transportasi dan Pergudangan	336,84	363,07	400,61	304,90	324,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	850,60	920,16	1.001,71	944,91	1.002,97
J	Informasi dan Komunikasi	344,81	385,31	428,89	510,45	542,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	412,15	440,72	462,86	471,77	498,68
L	Real Estat	536,69	579,42	609,36	612,78	631,73
M,N	Jasa Perusahaan	136,24	154,42	175,63	167,00	174,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	613,16	652,23	689,70	690,22	705,65
P	Jasa Pendidikan	606,29	662,72	718,06	733,79	741,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,50	197,62	214,67	239,51	242,33
R,S, T,U	Jasa lainnya	112,22	123,83	135,22	127,24	129,09
Produk Domestik Regional Bruto		11.382,35	12.339,18	13.310,27	13.269,94	14.006,59
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		60,22	64,57	68,57	67,50	72,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2020

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun tertentu dan saat ini yang digunakan yaitu tahun dasar 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

Pada tahun 2020, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sebesar Rp13.269.938,91 (dalam jutaan) mengalami penurunan sebesar Rp40.329,72 (dalam jutaan) atau -0,3% jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp13.310.268,63 (dalam jutaan).

Kontribusi tertinggi PDRB ADHB menurut lapangan usaha menunjukkan sektor penyumbang PDRB terkecil selama periode tersebut adalah pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2021, sektor industri pengolahan menyumbang Rp4.586,93 miliar atau 32,86 persen dari total PDRB ADHB dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp5,34 miliar atau 0,038 persen dari total PDRB ADHB (lihat Tabel 2.10). Sedangkan sektor industri pengolahan menyumbang Rp2.955,02 miliar atau 30,09 persen dari total PDRB ADHK dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp3,27 miliar atau 0,033 persen dari total PDRB ADHK (lihat

Tabel 2.12).

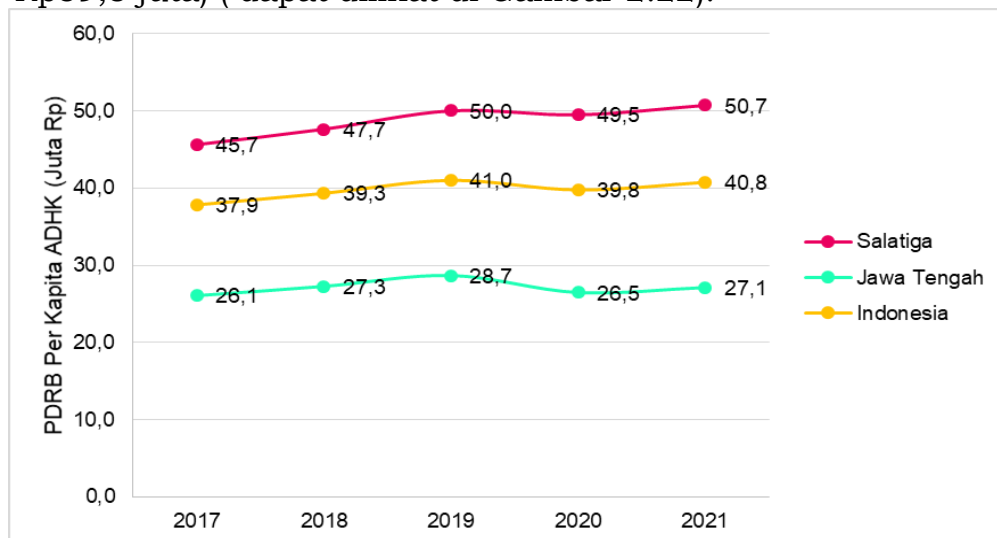
Tabel 2.12 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	393,93	411,85	424,95	419,10	430,02
B	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,35	3,40	3,36	3,27
C	Industri Pengolahan	2.530,04	2.649,47	2.823,78	2.831,44	2.955,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,77	20,55	21,34	21,96	23,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,97	7,35	7,63	7,77	7,87
F	Konstruksi	1.214,06	1.288,65	1.341,14	1.288,95	1.299,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.224,67	1.289,89	1.361,42	1.310,22	1.380,39
H	Transportasi dan Pergudangan	296,34	316,36	342,50	251,54	259,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	675,18	724,15	778,44	730,71	762,77
J	Informasi dan Komunikasi	351,49	392,86	432,88	514,41	546,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	305,38	316,87	327,71	333,74	337,29
L	Real Estat	465,79	490,73	509,07	508,42	519,27
M,N	Jasa Perusahaan	101,94	112,71	124,17	115,67	119,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	431,76	454,27	473,92	467,89	476,44
P	Jasa Pendidikan	384,10	410,48	437,48	436,68	436,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,67	139,15	148,68	161,98	162,41
R,S, T,U	Jasa lainnya	90,79	99,16	107,51	99,88	100,49
Produk Domestik Regional Bruto		8.624,24	9.127,86	9.666,00	9.503,16	9.820,29
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		45,63	47,76	49,80	48,34	50,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2020

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Ini merujuk pada definisi PDRB per kapita yaitu merupakan hasil pembagian PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

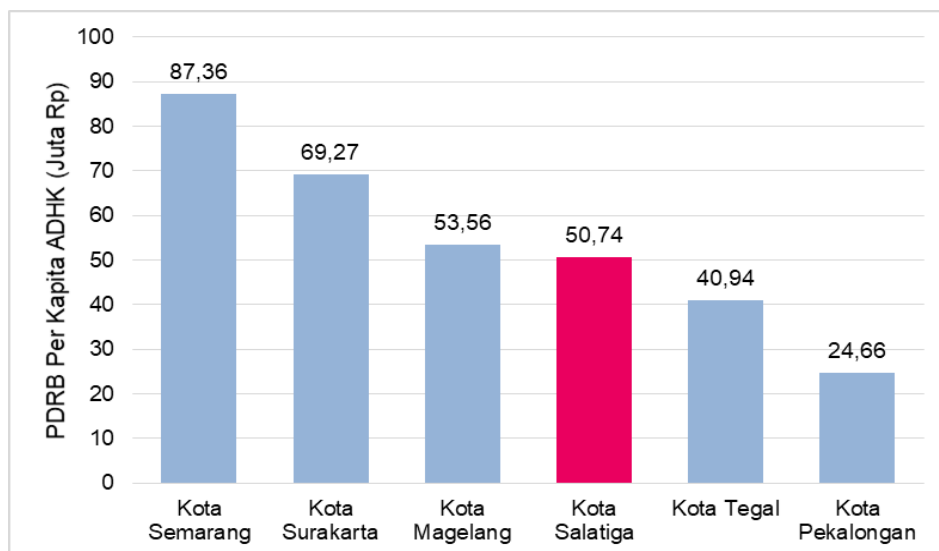
PDRB perkapita Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp45,7 juta pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi sebesar Rp50 juta pada tahun 2019. Namun demikian PDRB Kota Salatiga mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. PDRB Kota Salatiga tahun 2020 adalah sebesar Rp49,5 juta sebelum naik kembali pada tahun 2021 ke Rp50,7 juta. Kondisi PDRB per Kapita Kota Salatiga sejalan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia yang juga mengalami penurunan di tahun 2020. Namun demikian kondisi PDRB Kota Salatiga pada tahun 2020 masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah (yaitu sebesar Rp27,1 juta) dan Nasional (yaitu sebesar Rp39,8 juta) (dapat dilihat di Gambar 2.22).



Gambar 2.14 Perkembangan PDRB per Kapita Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

Sumber: BPS, 2022

Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah pada tahun 2021, PDRB per kapita Kota Salatiga (Rp50,74 juta) berada pada peringkat keempat setelah Kota Semarang (Rp87,36 juta), Kota Surakarta (Rp69,27) dan Kota Magelang (Rp53,56 juta) (Gambar 2.15).



Gambar 2. 15 Posisi PDRB per Kapita Kota Salatiga Tahun 2020 (juta rupiah)

Sumber : BPS, 2021

Kerentanan ekonomi juga dinilai dari nilai rupiah lahan produktif yang dihitung dari nilai kontribusi PDRB pada sektor yang berhubungan dengan lahan produktif (seperti sektor pertanian)

yang dapat diklasifikasikan berdasarkan data penggunaan lahan. Tabel 2.15 menunjukkan bahwa penggunaan lahan sawah di Salatiga sebesar 630,70 ha merupakan lahan produktif (seperti sektor pertanian) tanaman pangan. Berdasarkan Statistik Pertanian Hortikultura (2020), Kota Salatiga menghasilkan 8 ton cabai besar dan 18,80 ton cabai rawit dengan luas panen 5 ha cabai besar dan 13 hektar cabai rawit. Luas panen cabai besar hanya ada di Kecamatan Tingkir seluas 5 hektar. Luas panen cabai rawit terluas di Kecamatan Argomulyo seluas 6 hektar dan terkecil di Kecamatan Sidorejo dengan luas panen 2 hektar.

Tabel 2.15 Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kota Salatiga

Kecamatan	Lahan Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	Jumlah
Argomulyo	9,00	755,00	1.089,00	1.853,00
Tingkir	295,00	173,00	587,00	1.055,00
Sidomukti	49,70	382,00	714,30	1.146,00
Sidorejo	277,00	448,00	899,00	1.624,00
Salatiga	630,70	1.758,00	3.289,30	5.678,00

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2021

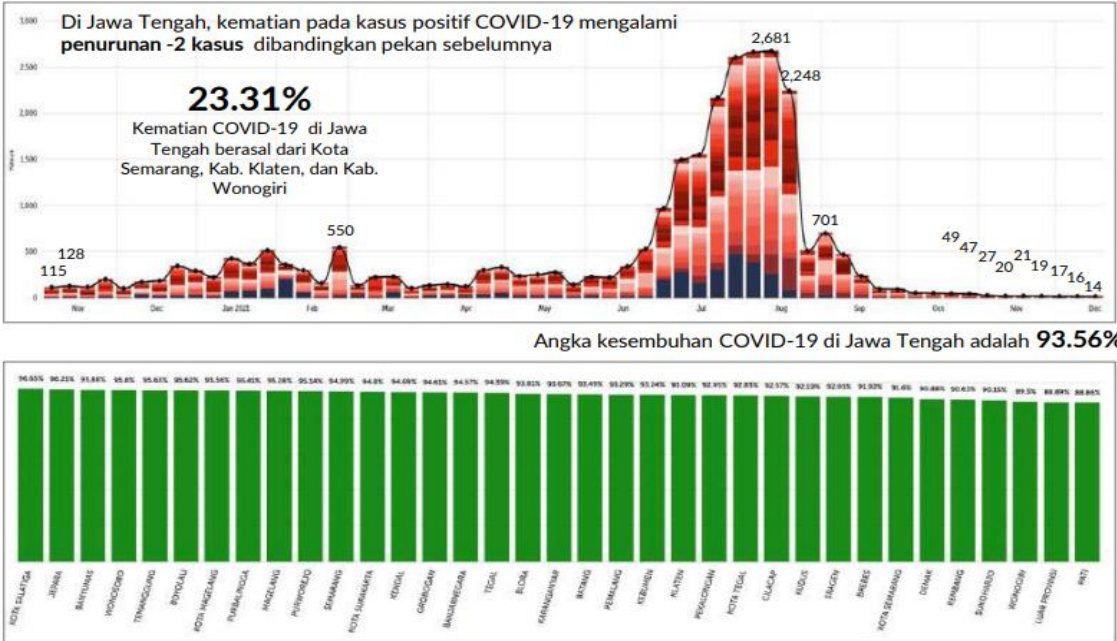
Dari segi sosial budaya dan ekonomi ini berhubungan dengan kondisi rumah tangga masyarakat, karena kemiskinan terjadi pada level lokal dan berpengaruh pada rumah tangga (penduduk) atau komunitas. Adanya kapasitas merespons di level yang rendah menunjukkan seberapa besar

kapasitas komunitas untuk merespons ketidakmampuan ekonomi pada level rumah tangga yang dipengaruhi oleh dimensi standar hidup masyarakat Kota Salatiga.

2.2.4. Pandemi COVID-19 di Kota Salatiga

Kasus terkonfirmasi COVID-19 pertama di Indonesia yaitu pada 2 Maret 2020 dengan 2 kasus terkonfirmasi. Pada kurun waktu kurang lebih 3 bulan, jumlah kasus konfirmasi di Indonesia terus meningkat dengan per 12 Juni 2020 terus bertambah hingga 35.295 kasus terkonfirmasi positif dan 2.000 kasus meninggal. Secara nasional, provinsi Jawa Tengah terdapat 1.813 kasus dengan 10 besar provinsi dengan kasus tertinggi di Indonesia (Kemenkes, 2020). Di Kota Salatiga, kasus pertama terkonfirmasi pada per tanggal 11 Juni 2020, dengan 25 kasus terkonfirmasi (Dinas Kota Salatiga, 2020).

Tingkat keparahan, risiko Covid-19 pada populasi Kota Salatiga ditunjukkan pada angka *recovery rate* (RR) dan *Case Fatality Rate* (CFR). Rasio kesembuhan atau *recovery Rate* (RR) Kota Salatiga menunjukkan jumlah orang yang sembuh dari Covid-19 dan telah selesai isolasi dibagi jumlah total yang terkonfirmasi Covid-19. Sedangkan rasio kematian (*Case Fatality Rate*) menunjukkan jumlah orang yang meninggal dibagi jumlah orang yang terkonfirmasi. Pada Gambar 2.16 menunjukkan grafik perkembangan kasus meninggal, angka kematian dan angka kesembuhan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Angka tersebut digunakan untuk mengevaluasi mutu fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagai kasus terdeteksi yang dilaporkan di Kementerian Kesehatan.



Gambar 2.16 Grafik perkembangan kasus meninggal, angka kematian dan angka kesembuhan di Provinsi Jawa Tengah
Sumber : Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2022

Pada Tahun 2021 berdasarkan Analisis Data COVID-19 Indonesia update per 19 Desember 2021 (Satgas Penanganan Covid-19, 2022) melaporkan insiden kumulatif Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

menunjukkan Kota Salatiga merupakan Kota tertinggi ketiga setelah Kota Magelang dan Kota Surakarta yaitu sebesar 3225.05 kasus per 100.000 penduduk. Adapun insiden kumulatif di Kota Magelang yaitu sebesar 5664.96 kasus per 100.000 penduduk dan Kota Surakarta sebesar 3786,83 kasus per 100.000 penduduk.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat penularan lokal. Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Kota Salatiga menyampaikan bahwa Salatiga dalam kondisi siap karena telah melibatkan RT/RW untuk membentuk kegiatan jejaring sosial seperti membagi sembako, alat pelindung diri (APD) dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penerapan isolasi di lingkup paling kecil serta bersifat lokal telah diterapkan.

Setelah kasus Gelombang kedua Covid-19 di Indonesia, berangsur angsur kasus Covid-19 di Indonesia menurun seiring dengan peningkatan program vaksin dosis 1 dan dosis 2. Sebuah babak baru dalam peradaban secara global bagi manusia yaitu menghadapi *New Normal*. Adapun Kondisi kasus Covid-19 Kota Salatiga saat ini menunjukkan positif kumulatif (pada tahun 2020-per tanggal 6 juni 2022) jumlah penderita Covid-19 yaitu 10.981 jiwa dengan rincian 0 dirawat, 10.684 jiwa sembuh dan 287 meninggal dunia (Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2022).

2.3. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.3.1. Legislasi

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan sebagaimana tercantum pada poin pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Agenda 2030 « *End poverty in all its forms everywhere* (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun)». Hal ini juga disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024 bahwa strategi pengurangan tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal ini disebutkan pada Strategi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 pada bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, khususnya pada bidang Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, pada poin Pengentasan Kemiskinan. Dalam RPJMN tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan yakni penurunan tingkat kemiskinan antara enam hingga tujuh persen pada akhir tahun 2024.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas kebijakan, yang tercermin pada salah satu misi yakni *Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran*. Hal ini juga didukung dengan program unggulan Gubernur melalui Satgas kemiskinan, bantuan desa dan rumah sederhana layak huni. Serta arah kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah.

Secara khusus, arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga juga termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dimana dijelaskan terkait dengan Arah Pengembangan Wilayah, yaitu wilayah pengembangan Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten

Grobogan. Adapun target untuk penurunan angka kemiskinan pada kisaran 0,28 persen hingga 9,28 persen. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Salatiga sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 adalah sebagai berikut *Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pelayanan infrastruktur, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan* yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2023 hingga 2026. Kebijakan ini tentunya dibarengi dengan prioritas pembangunan salah satunya melalui Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan dan *Stunting*. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

2.3.2. Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, upaya penanggulangan kemiskinan pada level kabupaten/kota dilakukan oleh perangkat daerah dibantu oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK yang diangkat dengan Surat Keputusan Walikota, dan yang terakhir sesuai dengan Permendagri No 53 Tahun 2020 kelembagaan TKPK ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu di Kota Salatiga.

TKPK Kota Salatiga mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. TKPK Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Kota Salatiga;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kota Salatiga di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota.

Keanggotaan TKPK Kota Salatiga terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Susunan keanggotaan TKPK Kota Salatiga terdiri atas :

- a. penanggungjawab : bupati/wali kota;
- b. ketua : wakil bupati/wakil wali kota;
- c. wakil ketua : sekretaris daerah kabupaten/kota;
- d. sekretaris : kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
- e. wakil sekretaris : 1. kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial; 2. kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa/kelurahan; 3. kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;

- f. kelompok pengelola program : 1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat; 2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
- g. anggota : 1. kepala dan unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan; 2. perwakilan masyarakat; 3. perwakilan dunia usaha; dan 4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Kota Salatiga terdiri atas :

- a. kepala : sekretaris Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
- b. wakil kepala : kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
- c. anggota : 1. kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan 2. unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Sekretariat TKPK Kota Salatiga mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Salatiga

2.3.3. Penganggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan. Agenda kerja tahunan memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kota Salatiga yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan. TKPK Kota Salatiga dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan TKPK Provinsi dan TNP2K.

BAB III PROFIL KEMISKINAN KOTA SALATIGA

3.1. KONSEP KEMISKINAN

3.1.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Definisi kemiskinan yang dipergunakan oleh Badan Pusat Statistik yakni kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun Garis Kemiskinan (GK) menurut BPS mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Selain garis kemiskinan, BPS juga menggunakan Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index (HCI-P0)*) yang merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

3.1.2. Jenis-jenis kemiskinan

Kemiskinan dapat dikaji baik secara absolut maupun relatif. Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Namun demikian, kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di

Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *Gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *Gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : (i) Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi, (ii) Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah, (iii) Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

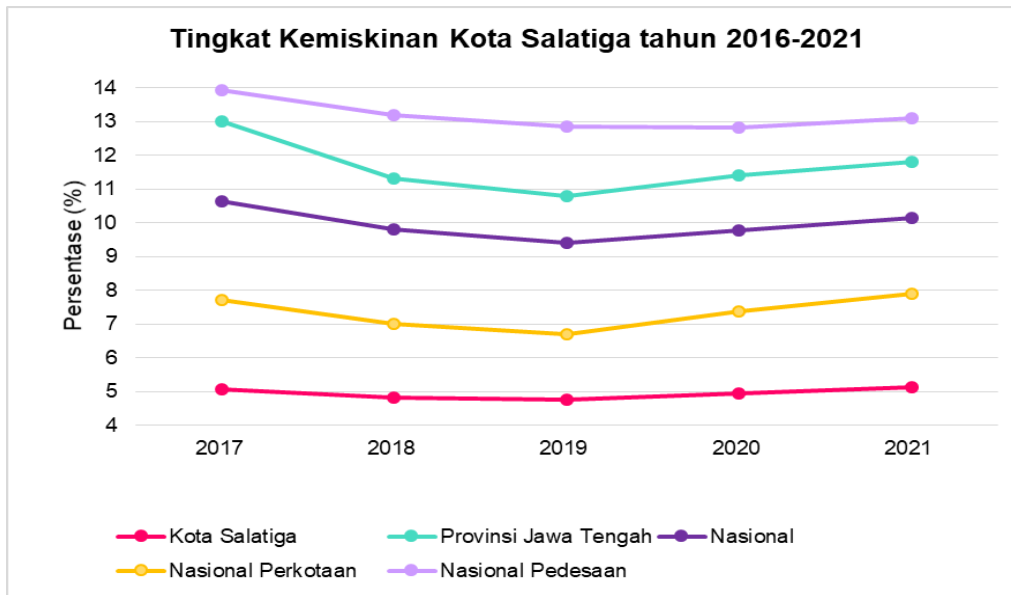
3.2. ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DAERAH

3.2.1. Kondisi Kemiskinan Makro

3.2.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

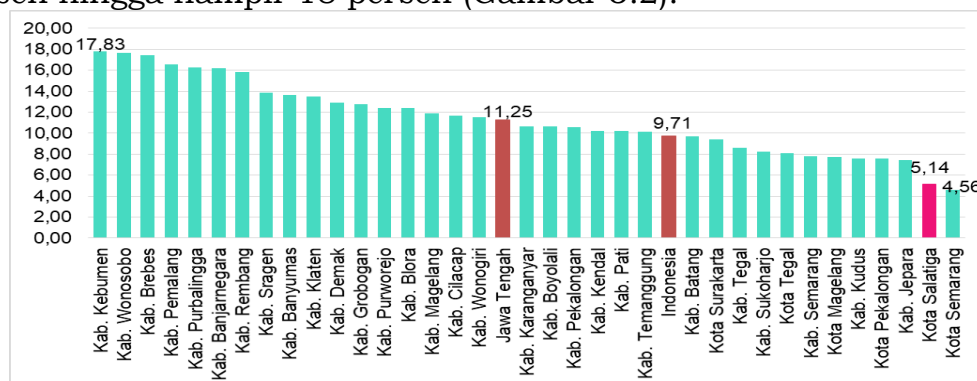
Grafik persentase tingkat kemiskinan Kota Salatiga tahun 2017-2021 menunjukkan adanya dinamika. Berdasarkan Gambar 3.1 tingkat kemiskinan 3 tahun pertama menunjukkan penurunan dan 3 tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Tahun 2019 menunjukkan tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan sebesar 0,31% dibanding tahun 2017. Adapun grafik dari tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 0,38% dibanding tahun 2019. Tingkat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir paling tinggi berada pada tahun 2021 sebesar 5,14%.

Secara keseluruhan tingkat kemiskinan di Kota Salatiga tahun 2017-2021 memiliki posisi yang berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tingkat kemiskinan tertinggi tahun 2017-2021 berada pada Provinsi Jawa Tengah dengan persentase kemiskinan tertinggi mencapai 13,01% pada tahun 2017. Adapun kemiskinan nasional terbagi menjadi 2, yaitu nasional perdesaan dan nasional perkotaan. Apabila mempertimbangkan kategori kemiskinan perdesaan dan perkotaan pada grafik, maka tingkat kemiskinan nasional perdesaan memiliki persentase paling tinggi dari tahun 2017-2021 dengan capaian tertinggi sebesar 13,93% pada tahun 2017.



Gambar 3.1 Tingkat Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2016-2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

Dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Jawa Tengah, Kota Salatiga memiliki persentase penduduk miskin terendah kedua (5,14) setelah Kota Semarang (4,56) di tahun 2021. Berdasarkan data BPS, SUSENAS tahun 2022 yang ditunjukkan pada gambar 3.2 angka tersebut hanya separuh dari persentase penduduk miskin Indonesia (9,71) di tahun yang sama. Di Jawa Tengah, ada sebanyak 12 kabupaten dan kota yang memiliki persentase penduduk miskin kurang dari tingkat kemiskinan nasional. Sementara sebanyak 17 kabupaten berada di atas persentase penduduk miskin di Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin dari 11 persen hingga hampir 18 persen (Gambar 3.2).



Gambar 3.2 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2021
Sumber : BPS, SUSENAS, 2022

Tahun 2017 jumlah penduduk miskin Kota Salatiga sebanyak 9.550 jiwa, atau turun sebanyak 150 jiwa dibandingkan dengan tahun 2016. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin Kota Salatiga sebesar 9.240 jiwa atau turun sebesar 310 jiwa dibanding dengan tahun 2017 dimana penduduk miskin Kota Salatiga sebanyak 9.550 jiwa. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin masih turun, namun kecil yakni sebesar 30 jiwa dibanding tahun 2018.

Tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 480 jiwa dari 2019 sebesar 9.210 jiwa menjadi 9.690 Jiwa. Kenaikan tersebut berlanjut hingga tahun 2021 dengan jumlah penduduk sebesar 10.140 jiwa (Gambar 3.2).

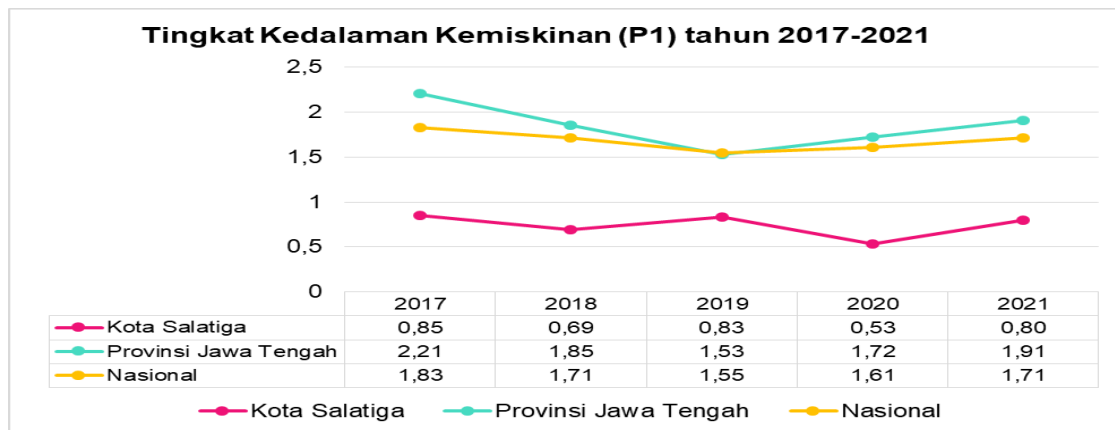


Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga
Sumber : BPS Kota Salatiga

3.2.1.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, tetapi bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan di Kota Salatiga menjadi sangat penting. Kedalaman kemiskinan adalah ukuran kesenjangan pengeluaran rata-rata untuk setiap orang miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi skor indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Kemiskinan (P1) Kota Salatiga cenderung mengalami dinamika (fluktuatif) tiap tahun dari 2016-2021 (naik, turun, kemudian naik dan turun kembali) meskipun selalu di bawah angka nasional dan provinsi. Tahun 2017 kemiskinan (P1) Kota Salatiga sebesar 0,85 atau naik 0,25 poin. Pada tahun 2018 tingkat kedalaman kemiskinan Kota Salatiga menurun sebesar 0,16 poin atau menjadi 0,69. Tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sampai titik 0,83. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,3 atau menjadi 0,53, serta tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,27 atau menjadi 0,8. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan (P1) Kota Salatiga kurun waktu 5 tahun terakhir paling tinggi pada tahun 2017 yakni sebesar 0,85 dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar 0,53. Namun, kenaikan paling tinggi pada tahun 2020-2021 yakni sebesar 0,27 poin dan penurunan paling tinggi pada tahun 2019-2020 sebesar 0,30. Tingkat kedalaman kemiskinan Kota Salatiga berada pada posisi paling rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kedalaman kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kedalaman kemiskinan Jawa Tengah selalu berada di posisi yang paling tinggi dari tahun 2017-2021, kecuali tahun 2019 P1 nasional lebih tinggi. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kota Salatiga lebih baik dari Nasional dan Jawa Tengah, serta Nasional lebih baik dari Jawa Tengah. Secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 3.4.

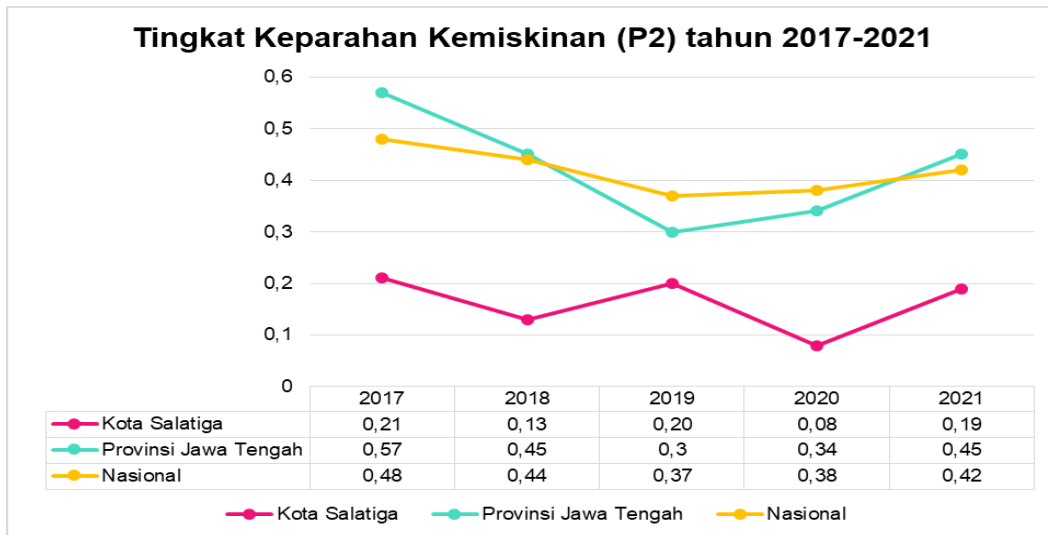


Gambar 3.4 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber : BPS Nasional, 2022

3.2.1.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan

Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tingkat Keparahan (P2) Kota Salatiga cenderung mengalami dinamika yang naik turun tiap tahun dari 2016-2021. Berdasarkan Gambar 3.5, tahun 2017 kemiskinan (P2) Kota Salatiga sebesar 0,21 atau naik 0,11 poin. Pada tahun 2018 tingkat keparahan kemiskinan Kota Salatiga menurun sebesar 0,08 poin atau menjadi 0,13. Tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sampai titik 0,2. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,12 atau menjadi 0,08, serta tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,11 atau menjadi 0,19. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan (P2) Kota Salatiga kurun waktu 5 tahun terakhir paling tinggi pada tahun 2017 yakni sebesar 0,21 dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar 0,08. Namun, kenaikan paling tinggi pada tahun 2020-2021 yakni sebesar 0,11 poin dan penurunan paling tinggi pada tahun 2019-2020 sebesar 0,12.

Tingkat keparahan kemiskinan Kota Salatiga berada pada posisi paling rendah apabila dibandingkan dengan tingkat keparahan kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Tingkat keparahan kemiskinan Jawa tengah tahun 2017, 2018 dan 2021 selalu berada di posisi yang paling tinggi. Tingkat keparahan kemiskinan nasional tahun 2019 dan 2020 berada paling tinggi. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kota Salatiga lebih baik dari Nasional dan Jawa Tengah, dan Nasional lebih baik dari Jawa Tengah pada tahun 2019 dan 2020, serta Jawa Tengah lebih baik dari nasional pada tahun 2017, 2018 dan 2021.



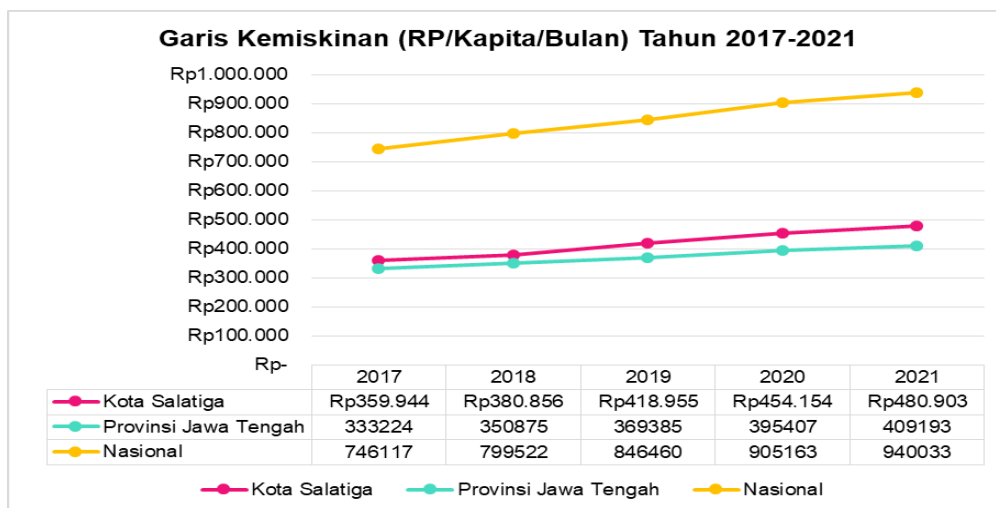
Gambar 3.5 Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2021

Sumber: BPS, 2022

3.2.1.4. Garis Kemiskinan

Berdasarkan data BPS dalam kurun lima tahun terakhir Garis Kemiskinan Kota Salatiga terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 14.798 dibanding tahun 2016 menjadi 359.944 (Rp/Kapita/Bulan). Tahun 2018, Garis Kemiskinan Kota Salatiga sebesar 380.856 (Rp/Kapita/Bulan) atau naik sebesar 20.912 (Rp/Kapita/Bulan) dibanding dengan tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019, Garis Kemiskinan Kota Salatiga sebesar Rp418.955 atau naik sebesar Rp38.099 dibanding tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020, Garis Kemiskinan Provinsi Kota Salatiga meningkat 35.199 (Rp/Kapita/Bulan) menjadi 454.154 (Rp/Kapita/Bulan). Tahun 2021 garis kemiskinan Kota Salatiga meningkat sebesar 26.749 (Rp/Kapita/Bulan) menjadi 480.903 (Rp/Kapita/Bulan). Berdasarkan data BPS, Garis Kemiskinan Kota Salatiga lebih rendah dari Garis Kemiskinan Nasional. Namun, lebih tinggi dari garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2021.

Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibanding peran komoditi non makanan. Tahun 2021, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,57% pada garis kemiskinan. Komoditi beras yang memberi sumbangan terbesar baik di perkotaan (20,52%) maupun di pedesaan (22,99%). Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua kepada Garis Kemiskinan yaitu 11,51% di perkotaan dan 10,09% di pedesaan. Komoditi lainnya yang mempengaruhi Garis Kemiskinan adalah telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, mie instan, tempe, kue basah, tahu, dan kue kering. Komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan adalah perumahan, yaitu 6,37% di perkotaan dan 6,91% di pedesaan (Gambar 3.6).



Gambar 3.6 Gari Kemiskinan Kota Salatiga, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Nasional, 2022

3.2.2. Kondisi Kemiskinan Mikro

3.2.2.1. Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 s.d. Desil 4

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020, jumlah penduduk Kota Salatiga dengan status kesejahteraan 40 persen terbawah sebanyak 8.122 rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga sebanyak 33.751 anggota rumah tangga. Adapun jumlah penduduk rumah tangga dalam kondisi 10 persen terendah (desil 1) atau sangat miskin sebanyak 4.668 jiwa dengan 903 rumah tangga. Sedangkan jumlah penduduk dengan kondisi 10-20% terendah (desil 2) atau miskin yaitu sebanyak 7.066 jiwa dengan 1.470 rumah tangga. Rumah tangga dalam kondisi 20-30% terendah (desil 3) atau status hampir miskin yaitu sebanyak 2.029 rumah tangga dengan 8.711 jiwa. Adapun rumah tangga dalam kondisi 30-40% terendah (desil 4) atau rentan miskin sebanyak 3.720 rumah tangga atau 13.306 jiwa. Sementara rumah tangga dalam kondisi mampu hingga sangat mampu di Kota Salatiga atau masuk dalam kategori Desil 4+ yaitu sebanyak 37,32 persen atau 10.759 jiwa dari total anggota rumah tangga. Berikut ini jumlah rumah tangga dan anggota rumah tangga dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga

No.	Desil	Rumah Tangga	Anggota Rumah Tangga
1	Desil 1	903	4.668
2	Desil 2	1.470	7.066
3	Desil 3	2.029	8.711
4	Desil 4	3.720	13.306
5	Desil 4+	4.837	10.759

No.	Desil	Rumah Tangga	Anggota Rumah Tangga
	Total	12.959	44.510

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2020

Adapun dari kondisi rumah tangga dengan status kesejahteraan tersebut diidentifikasi per kecamatan/kelurahan di Salatiga menunjukkan penduduk dengan kondisi kesejahteraan 10 persen terendah (Desil 1) terbanyak berada di Kecamatan Argomulyo dengan jumlah rumah tangga sebanyak 347 rumah tangga. Sedangkan kecamatan dengan status kesejahteraan terbawah paling sedikit yaitu di Kecamatan Sidomukti yaitu sebanyak 175 rumah tangga. Jumlah rumah tangga di Kecamatan Argomulyo menduduki peringkat pertama, sehingga rumah tangga terbanyak dengan status kesejahteraan 10-20 persen (Desil 2) dan 20-30 persen terendah (Desil 3) yaitu berada di Kecamatan Argomulyo khususnya di Kelurahan Kumpulrejo. Artinya penduduk dengan status sangat miskin, miskin dan hampir miskin banyak terdapat di Kecamatan Argomulyo.

Kondisi berbeda dialami oleh Kecamatan Sidomukti dengan jumlah rumah tangga paling sedikit dengan status kesejahteraan 10-20 persen terendah (Desil 2) yaitu sebanyak 342 rumah tangga. Sementara itu, rumah tangga paling sedikit dengan tingkat kesejahteraan 20-30 persen terendah (Desil 3) yaitu di Kecamatan Tingkir, Kecamatan dengan penduduk berstatus kesejahteraan 30-40 persen terendah (Desil 4) paling banyak adalah Kecamatan Sidorejo dengan 998 rumah tangga. Sementara itu, paling sedikit dengan status kesejahteraan 30-40 persen terendah yaitu di Kecamatan Tingkir dengan 852 rumah tangga. Sementara itu, Kecamatan Sidorejo yang notabene merupakan wilayah perkotaan menduduki jumlah rumah tangga terbanyak dengan status kesejahteraan lebih dari 40 persen (Desil 4+) yaitu sebanyak 1.324 rumah tangga, artinya penduduk dengan status mampu hingga sangat mampu banyak berada di Kecamatan Sidorejo dibandingkan di Kecamatan lainnya (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Jumlah Rumah Tangga dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial Desil 1 s/d Desil 4+ per Kecamatan/Kelurahan di Kota Salatiga

Kecamatan/ Kelurahan	Rumah Tangga					Total
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 4+	
ARGOMULYO	347	475	600	981	1.082	3.485
Cebongan	20	50	55	119	117	361
Kumpulrejo	157	154	149	172	149	781
Ledok	24	50	70	153	281	578
Noborejo	56	94	131	189	176	646
Randuacir	57	79	104	158	145	543
Tegalrejo	33	48	91	190	214	576

Kecamatan/ Kelurahan	Rumah Tangga					
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 4+	Total
SIDOMUKTI	175	342	485	889	1.109	3.000
Dukuh	79	126	176	282	296	959
Kalicacing	7	24	34	85	182	332
Kecandran	41	73	108	193	203	618
Mangunsari	48	119	167	329	428	1.091
SIDOREJO	200	327	484	998	1.324	3.333
Blotongan	75	73	93	182	238	661
Bugel	14	29	42	94	138	317
Kauman Kidul	11	31	61	113	137	353
Pulutan	38	51	55	114	132	390
Salatiga	28	48	97	234	380	787
Sidorejo Lor	34	95	136	261	299	825
TINGKIR	181	326	460	852	1.322	3.141
Gendongan	2	11	30	97	167	307
Kalibening	21	29	32	59	56	197
Kutowinangun Kidul	12	53	56	128	235	484
Kutowinangun Lor	71	91	127	204	348	841
Sidorejo Kidul	63	78	98	154	145	538
Tingkir Lor	5	30	70	122	241	468
Tingkir Tengah	7	34	47	88	130	306
Total	903	1.470	2.029	3.720	4.837	12.959

Sumber : Dinas Sosial, 2020

3.2.2.2. Jumlah Individu Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin per Kelurahan di Kota Salatiga

Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk Kota Salatiga usia kurang dari 1-6 tahun dengan status kesejahteraan desil 1 s/d desil 4+ sebanyak 1.221 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu 633 jiwa penduduk laki-laki dan 588 jiwa penduduk perempuan. Adapun penduduk terbanyak usia kurang dari 6 tahun yaitu di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo sebanyak 176 jiwa, disusul Kelurahan Sidorejo Lor sebanyak 122 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Salatiga usia 6-14 tahun dengan status kesejahteraan desil 1 s/d desil 4+ sebanyak 6.231 jiwa, dengan rincian penduduk laki laki sebanyak 3.207 jiwa dan perempuan sebanyak 3.024. Adapun Kelurahan Dukuh menduduki urutan pertama jumlah individu usia 6-14 tahun sebanyak 256 jiwa. Sementara itu, Kelurahan Tingkir Tengah terdapat jumlah individu usia 6-14 tahun paling sedikit yaitu sebanyak 77 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Salatiga usia 15-44 tahun dengan status kesejahteraan desil 1 s/d desil 4+ sebanyak 20.215 jiwa dengan rincian penduduk laki laki 10.543 jiwa dan perempuan sebanyak 9.672 jiwa. Penduduk dengan usia produktif tersebut berada paling banyak di Kelurahan Mangunsari sebanyak 1.791 jiwa dan di Kelurahan Dukuh sebanyak 1.613 jiwa. Adapun Kelurahan Kalibening memiliki penduduk usia produktif 15-44 tahun paling sedikit dibandingkan Kelurahan yang lain yaitu sebanyak 317 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Salatiga usia 45-59 tahun dengan status kesejahteraan desil 1 s/d desil 4+ sebanyak 9.498 jiwa. Dengan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki laki yaitu sebesar 5.078 jiwa penduduk perempuan dan penduduk laki-laki sebanyak 4.422 jiwa. Adapun jumlah penduduk dengan usia 45-59 tahun berada di Kelurahan Mangunsari sebanyak 860 jiwa, disusul Kelurahan Kutowinangun Lor sebanyak 639 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Salatiga dengan usia lansia atau usia lebih 60 tahun dengan status kesejahteraan desil 1/d desil 4+ sebanyak 7.319 jiwa. Usia lansia perempuan lebih banyak yaitu sebesar 4.121 jiwa dan usia lansia laki-laki sebanyak 3.198 jiwa. Adapun penduduk usia lansia paling banyak berada di Kelurahan Kutowinangun Lor sebanyak 548 jiwa dan di Kelurahan Dukuh sebanyak 528 jiwa.

Di Kota Salatiga jumlah penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu usia 15-60 tahun dengan status kesejahteraan desil 1 s/d desil 4+ yaitu sebanyak 29.713 jiwa. Adapun usia non produktif yaitu usia kurang dari 14 tahun dan lebih dari 15 tahun yaitu sebanyak 14.711 jiwa. Secara lebih detail, jumlah individu berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin per Kelurahan di Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jumlah Individu Berdasarkan Kelompok Usia dan Jumlah Kelamin per Kelurahan di Kota Salatiga

Kecamatan/ Kelurahan	Jml Individu Usia <6 tahun			Jml Individu Usia 6-14 tahun			Jml Individu Usia 15-44 tahun			Jml Individu Usia 45-59			Jml Individu Usia > 60 tahun			Total
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
Argomulyo	196	197	393	901	810	1711	2941	2682	5623	1161	1373	2534	854	1133	1987	12248
Cebongan	14	16	30	93	89	182	326	280	606	114	154	268	86	117	203	1289
Kumpulrejo	84	92	176	237	209	446	742	647	1389	250	313	563	190	269	459	3033
Ledok	25	26	51	117	105	222	429	392	821	182	228	410	161	195	356	1860
Noborejo	37	33	70	163	165	328	535	515	1050	230	247	477	140	198	338	2263
Randuacir	28	26	54	149	131	280	442	404	846	180	203	383	119	167	286	1849
Tegalrejo	8	4	12	142	111	253	467	444	911	205	228	433	158	187	345	1954
Sidomukti	129	127	256	801	687	1488	2488	2325	4813	1036	1161	2197	745	932	1677	10431
Dukuh	43	28	71	266	256	522	811	802	1613	326	360	686	232	296	528	3420
Kalicacing	14	19	33	68	48	116	232	207	439	104	133	237	86	127	213	1038
Kecandran	32	38	70	183	132	315	492	478	970	196	218	414	155	171	326	2095
Mangunsari	40	42	82	284	251	535	953	838	1791	410	450	860	272	338	610	3878
Sidorejo	193	159	352	834	801	1635	2640	2481	5121	1139	1296	2435	800	995	1795	11338
Blotongan	19	17	36	182	164	346	521	495	1016	231	275	506	157	191	348	2252
Bugel	20	19	39	91	81	172	264	265	529	110	128	238	80	92	172	1150
Kauman Kidul	23	29	52	92	99	191	248	273	521	141	133	274	74	107	181	1219
Pulutan	17	18	35	112	93	205	347	310	657	129	150	279	108	126	234	1410
Salatiga	44	24	68	174	170	344	578	506	1084	256	295	551	170	255	425	2472
Sidorejo Lor	70	52	122	183	194	377	682	632	1314	272	315	587	211	224	435	2835
Tingkir	115	105	220	671	726	1397	2474	2184	4658	1086	1246	2332	799	1061	1860	10467
Gendongan	10	10	20	54	63	117	207	174	381	91	113	204	81	116	197	919
Kalibening	15	11	26	61	50	111	162	155	317	77	68	145	40	69	109	708
Kutowinangun Kidul	10	14	24	91	95	186	389	307	696	161	211	372	122	178	300	1578
Kutowinangun Lor	24	27	51	179	176	355	731	628	1359	294	345	639	244	302	546	2950
Sidorejo Kidul	18	12	30	121	156	277	423	402	825	188	216	404	139	177	316	1852
Tingkir Lor	25	21	46	102	109	211	339	325	664	174	184	358	100	114	214	1493
Tingkir Tengah	13	10	23	63	77	140	223	193	416	101	109	210	73	105	178	967
Total	633	588	1221	3207	3024	6231	10543	9672	20215	4422	5076	9498	3198	4121	7319	44484

Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga, 2020

3.2.2.3. Jumlah Anak Bersekolah dan Tidak Bersekolah Usia 7 hingga 18 Tahun per Kelurahan di Kota Salatiga

Berdasarkan wilayah, Kelurahan/Kecamatan dengan usia sekolah 7-18 tahun per Kelurahan di Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel 3.4. Di Kota Salatiga penduduk usia sekolah 7-18 tahun yaitu sebanyak 8.737 jiwa yang tersebar di setiap kelurahan. Sebanyak 7.622 jiwa penduduk bersekolah pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Adapun sebanyak 1.115 jiwa penduduk usia 7-18 tahun tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi. Artinya sebanyak 12,76% penduduk usia 7-18 tahun tidak dapat mengakses pendidikan di atasnya atau mengalami putus sekolah.

Berdasarkan wilayah Kecamatan Argomulyo khususnya Kelurahan Kumpulrejo menduduki peringkat pertama penduduk usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi terbanyak yaitu sebesar 373 jiwa di Kelurahan Argomulyo dan 148 jiwa di Kelurahan Kumpulrejo. Sementara itu, kondisi yang lebih baik telah dicapai di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti dengan penduduk usia 7-18 tahun telah bersekolah sebanyak 611 jiwa (Tabel 3.4).

Tabel 3.4 Partisipasi Sekolah Anak Bersekolah dan Tidak Bersekolah Usia 7-18 Tahun per Kelurahan di Kota Salatiga

Kecamatan/ Kelurahan	Usia 7-18 Tahun		
	Tidak/belum Pernah Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Bersekolah
Argomulyo	343	30	1.972
Cebongan	30	2	221
Kumpulrejo	136	12	458
Ledok	25	5	285
Noborejo	70	2	345
Randuacir	43	8	328
Tegalrejo	39	1	335
Sidomukti	215	19	1.907
Dukuh	92	6	611
Kalicacing	8	5	163
Kecandran	57	3	382
Mangunsari	58	5	751
Sidorejo	284	39	1.924
Blotongan	64	3	396
Bugel	25	3	210
Kauman Kidul	26	7	235
Pulutan	68	6	204
Salatiga	34	3	452
Sidorejo Lor	67	17	427
Tingkir	170	15	1.819
Gendongan	9	4	151
Kalibening	16	2	130
Kutowinangun Kidul	16	1	262
Kutowinangun Lor	63	2	483
Sidorejo Kidul	36	2	339

Kecamatan/ Kelurahan	Usia 7-18 Tahun		
	Tidak/belum Pernah Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Bersekolah
Tingkir Lor	16	4	273
Tingkir Tengah	14		181
Total	1.012	103	7.622

Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga, 2020

3.2.2.4. Jumlah Individu yang Bekerja dan Tidak Bekerja Menurut Kelompok Usia diatas 15 tahun per Kelurahan di Kota Salatiga

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2020 menunjukkan jumlah usia kepala rumah tangga diatas 15 tahun di Kota Salatiga sebanyak 36.147 jiwa. Adapun jumlah penduduk dengan status bekerja yaitu sebanyak 21.027 jiwa, sedangkan dengan status tidak bekerja yaitu sebanyak 15.120 jiwa. Artinya sebanyak 41% penduduk di Kota Salatiga dengan usia produktif tidak bekerja, sementara 69% penduduk telah berstatus bekerja. Artinya secara demografi penduduk yang tidak bekerja merupakan beban bagi penduduk yang bekerja. Hal ini pun mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan daya saing wilayah di Kota Salatiga.

Adapun penduduk dengan status tidak bekerja paling banyak di Kecamatan Argomulyo yaitu di Kelurahan Kumpulrejo sebanyak 873 jiwa, di Kecamatan Sidomukti yaitu di Kelurahan Mangunsari sebanyak 1.366 jiwa, di Kecamatan Sidorejo yaitu di Kelurahan Sidorejo Lor sebanyak 999 jiwa, di Kecamatan Tingkir di Kelurahan Kutowinangun Lor sebanyak 1.097 jiwa. Adapun penduduk yang bekerja paling banyak di Kota Salatiga yaitu di Kelurahan Kumpulrejo sebanyak 1.379 jiwa dan Di Kelurahan Kutowinangun Lor sebanyak 1.389 jiwa. Berikut ini secara lebih detail dijelaskan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Jumlah Kepala Rumah Tangga yang Bekerja dan Tidak Bekerja Menurut Kelompok Usia diatas 15 Tahun per Kelurahan di Kota Salatiga

Kecamatan/ Kelurahan	Status Bekerja		Total
	Bekerja	Tidak Bekerja	
Argomulyo	5.906	3.951	9.857
Cebongan	580	476	1.056
Kumpulrejo	1.394	873	2.267
Ledok	855	708	1.563
Noborejo	1.078	756	1.834
Randuacir	1.043	441	1.484
Tegalrejo	956	697	1.653

Kecamatan/ Kelurahan	Status Bekerja		Total
	Bekerja	Tidak Bekerja	
Sidomukti	4.897	3.587	8.484
Dukuh	1.604	1.161	2.765
Kalicacing	480	388	868
Kecandran	996	672	1.668
Mangunsari	1.817	1.366	3.183
Sidorejo	5.355	3.760	9.115
Blotongan	1.104	733	1.837
Bugel	593	323	916
Kauman Kidul	604	346	950
Pulutan	645	511	1.156
Salatiga	1.168	848	2.016
Sidorejo Lor	1.241	999	2.240
Tingkir	4.869	3.822	8.691
Gendongan	389	383	772
Kalibening	338	228	566
Kutowinangun Kidul	747	600	1.347
Kutowinangun Lor	1.389	1.097	2.486
Sidorejo Kidul	874	643	1.517
Tingkir Lor	716	495	1.211
Tingkir Tengah	416	376	792
Total	21.027	15.120	36.147

Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga, 2020

3.2.2.5. Jumlah Individu Usia 15 hingga 64 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan desil 1 s/d desil 4+ di Kota Salatiga dengan usia produktif 15-64 tahun yaitu sebanyak 34.698 jiwa. Dominasi penduduk dengan lapangan pekerjaan utama di Kota Salatiga yaitu merupakan pekerja industri Pengolahan atau sebesar 4.162 jiwa. Artinya, posisi Kota Salatiga yang dikelilingi oleh perbatasan Kabupaten Semarang dengan fungsi perdagangan dan jasa serta teraglomerasi pabrik dan industri

besar menyebabkan penduduk di Kota Salatiga memilih lapangan pekerjaan sebagai pegawai industri pengolahan. Adapun disisi lain, lapangan pekerjaan jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan menduduki lapangan pekerjaan peringkat kedua di Kota Salatiga yaitu sebanyak 3.920 jiwa. Sementara itu, pekerjaan lainnya didominasi oleh pekerjaan informal atau pelajar/mahasiswa yaitu 14.824 jiwa. Secara lebih detail status kedudukan dalam pekerjaan utama individu usia produktif yaitu ada pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Status Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama (Individu Usia Produktif 15-64 Tahun)

Kecamatan/ Kelurahan	Pertanian tanaman padi & palawija	Hotikultura	Perkebunan	Perikanan tangkap	Perikanan budidaya	Peternakan	Kehutanan & pertanian lainnya	Pertambangan / penggalian	Industri pengolahan	Listrik, gas & air	Bangunan / konstruksi
Argomuljo	167	108	21	2	2	347	1	6	1343	13	1089
Cebongan		2	3			15			158	1	47
Kumpulrejo	7	36	10			119	1	2	278		317
Ledok	8			2		12			176	3	137
Noborejo	21	66	5			82		1	308	1	222
Randuacir	130	3	2			98	1		233	2	213
Tegalrejo	1	1	1			21	1	1	190	6	150
Sidomukti	112	6	17	11	3	78	14	19	817	13	802
Duluh	25	3	9	1		36	4	4	281	2	307
Kalicacing		1		5		3	1		54		23
Kecandran	65		6	1	2	18	9	4	170	1	241
Mangunsari	22	2	2	4	1	21		11	312	10	231
Sidorejo	273	7	17	15	8	53	11	10	988	68	785
Blotongan	48	2	1	5		13	8	1	223	25	149
Bugel	34	2	6	3		17	1	2	101	1	75
Kauman Kidul	97		3	1	1	12	1	4	118	5	66
Pulutan	71	1	2	1	6	6		1	161	9	135
Salatiga	9	1	2	3		3	1	1	177	19	103
Sidorejo Lor	14	1	3	2	1	2		1	178	9	254
Tingkir	209	5	14	6	8	52	23	12	1044	22	642
Gendongan			2			1			68	1	33
Kalibening	37					4	10	1	87	5	45
Kutowinangun Kidul	1	2		2		8		3	112	3	49
Kutowinangun Lor	21	3	3	1		8	2	1	196	6	146
Sidorejo Kidul	71		5		1	23	6	5	248		171
Tingkir Lor	55		2	2	2	4	4	1	248	6	102
Tingkir Tengah	24		2	1		4	1	1	85	1	96
Total	761	126	69	34	21	530	49	47	4162	116	3318
Kecamatan/ Kelurahan	Perdagangan	Hotel & rumah makan	Transportasi & pergudangan	Informasi & komunikasi	Keuangan & asuransi	Jasa pendidikan	Jasa kesehatan	Jasa kemasyarakatan, pemerintahan & perorangan	Pemulung	Lainnya	Total
Argomuljo	843	299	241	15	26	79	38	1057	56	3195	8948
Cebongan	80	21	44	2	1	6	2	172	7	718	1279
Kumpulrejo	180	65	39	2	3	13	12	241	25	79	1429
Ledok	158	47	55	3	7	7	4	177	12	95	905
Noborejo	119	48	26	2	2	23		126	3	1159	2212
Randuacir	114	57	25	1	4	12	10	125	3	796	1832
Tegalrejo	192	61	52	5	11	18	10	216	6	348	1291
Sidomukti	819	324	206	36	33	82	42	1052	62	4113	8661
Duluh	251	92	64	8	13	31	18	357	16	770	2292
Kalicacing	109	63	28	10	8	13	3	115	5	70	511
Kecandran	115	47	30	9	1	17	2	107	14	1184	2043
Mangunsari	344	122	84	9	11	21	19	473	27	2089	3815
Sidorejo	916	351	234	27	36	82	36	1053	48	3478	8466
Blotongan	188	100	38	10	5	9	14	182	10	721	1752
Bugel	86	42	29	4	11	10	6	119	3	590	1142
Kauman Kidul	103	19	19		5	9	3	90	3	184	743
Pulutan	110	28	17	2	2	4	3	65	7	470	1101
Salatiga	211	84	76	7	8	23	2	340	12	1327	2412
Sidorejo Lor	218	78	55	4	5	27	8	257	13	186	1316
Tingkir	1006	346	252	26	44	64	13	758	39	4038	8623
Gendongan	94	37	19	5	3	3	3	62	2	152	485
Kalibening	45	16	10	5	4	8	1	54	3	360	697
Kutowinangun Kidul	178	96	62	8	8	14	2	156	5	463	1175
Kutowinangun Lor	379	116	88	3	11	12	4	251	22	1427	2700
Sidorejo Kidul	126	32	19	4	9	11	1	114	2	316	1164
Tingkir Lor	108	24	28		9	16	1	79	2	775	1468
Tingkir Tengah	76	25	26	1			1	42	3	545	934
Total	3584	1320	933	104	139	307	129	3920	205	14824	34698

Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga, 2020

3.3. ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN KONSUMSI

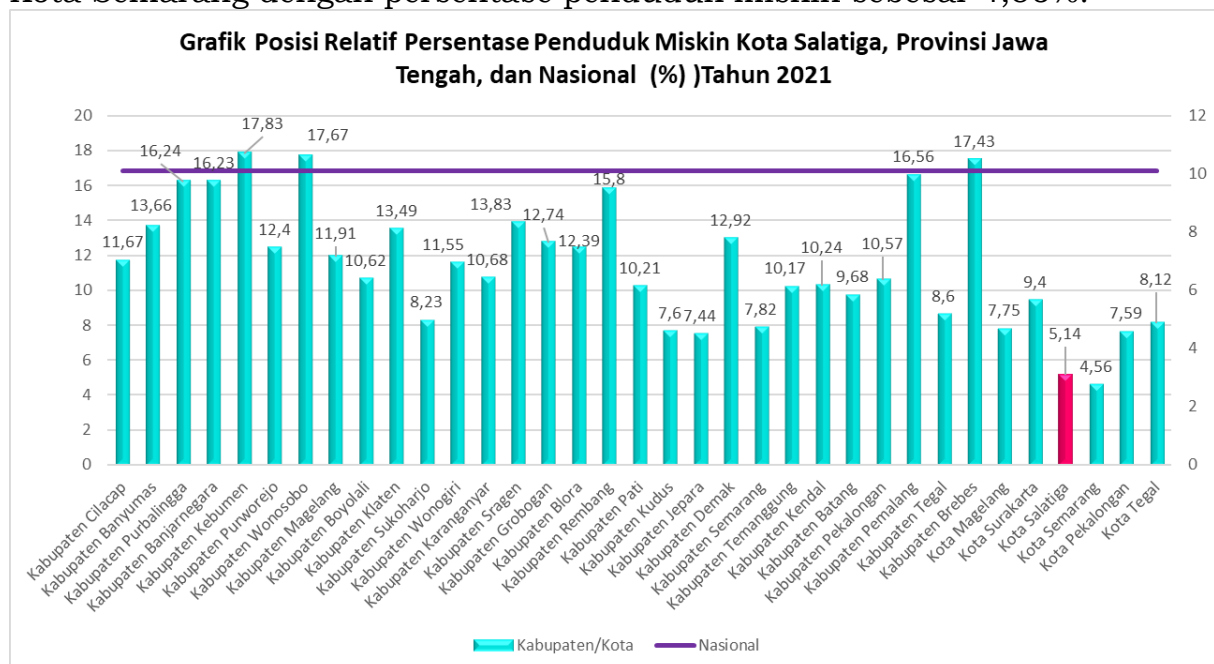
3.3.1. Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Kemiskinan Konsumsi

3.2.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berikut ini dijabarkan kondisi jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga dalam kurun waktu tertentu dan posisi relatif terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan data BPS yang disajikan pada Gambar 3.7 menunjukkan capaian Kota Salatiga ini masih lebih baik dari capaian nasional dan provinsi. Capaian Persentase Penduduk Miskin masih di bawah capaian Nasional secara keseluruhan yaitu sebesar 5,14 di tahun 2021. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kota Salatiga menduduki peringkat 4 terbawah. Adapun persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Kebumen dengan persentase penduduk miskin sebesar 17,83%, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Semarang dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,56%.



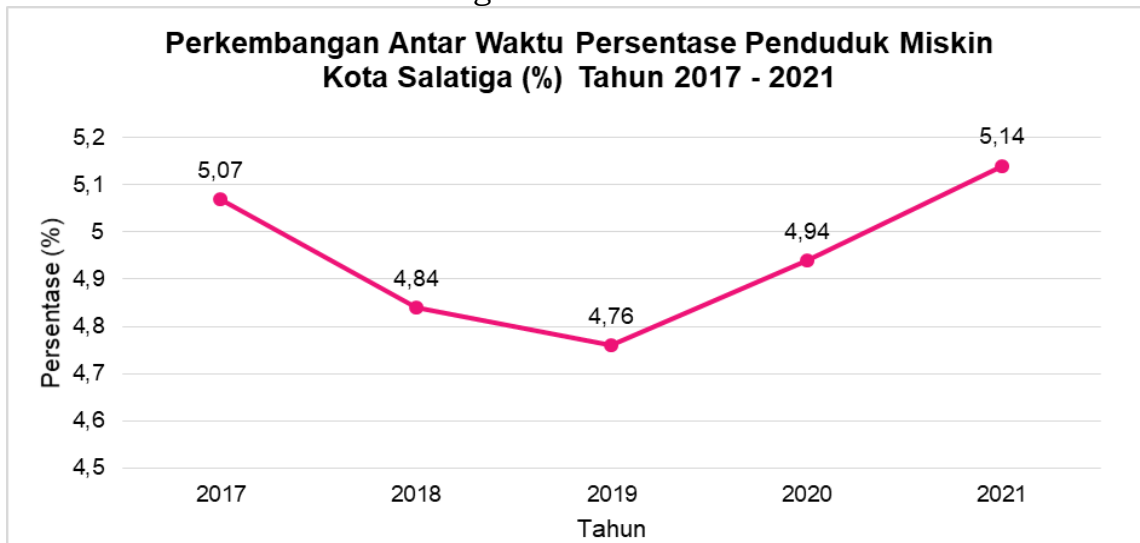
Gambar 3.7 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga dan Nasional Tahun 2021

Sumber: BPS Nasional, 2022

B. Perkembangan *time series*

Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Kota Salatiga pada titik 5,24%. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan Kota Salatiga sebesar 5,07% atau mengalami penurunan sebanyak 0,17% dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Kota Salatiga pada titik 4,84% atau berkurang 0,23% dibandingkan pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Kota Salatiga sebesar 4,76% atau turun sebesar

0,08%. Namun pada awal tahun 2020 tingkat kemiskinan Kota Salatiga sebesar 4,947% atau mengalami kenaikan sebesar 0,18% dibanding dengan tahun 2019. Sama halnya dengan tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kota Salatiga juga mengalami kenaikan sebesar 0,20% atau menjadi 5,14%. Kenaikan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena adanya Pandemi Covid 19, yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatannya menjadi berkurang. Hal ini berakibat pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan menjadi terganggu. Pada Gambar 3.8 menunjukkan perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin di Kota Salatiga Tahun 2017-2021.



Gambar 3.8 Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga (%) Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Berdasarkan Gambar 3.9 menggambarkan persentase penduduk miskin Kota Salatiga Tahun 2017 –2021 menunjukkan tren yang fluktuatif, awalnya turun hingga tahun 2019, kemudian beranjak naik sejak tahun 2020. Kenaikan ini sebagai akibat adanya Pandemi COVID 19 yang berdampak luas pada berbagai aspek terutama ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2017-2019 terbukti efektif menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun demikian, sejak adanya pandemi yang berdampak multidimensi, program pengentasan kemiskinan terkendala pandemi, sehingga persentase penduduk miskin mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 belum berjalan efektif.

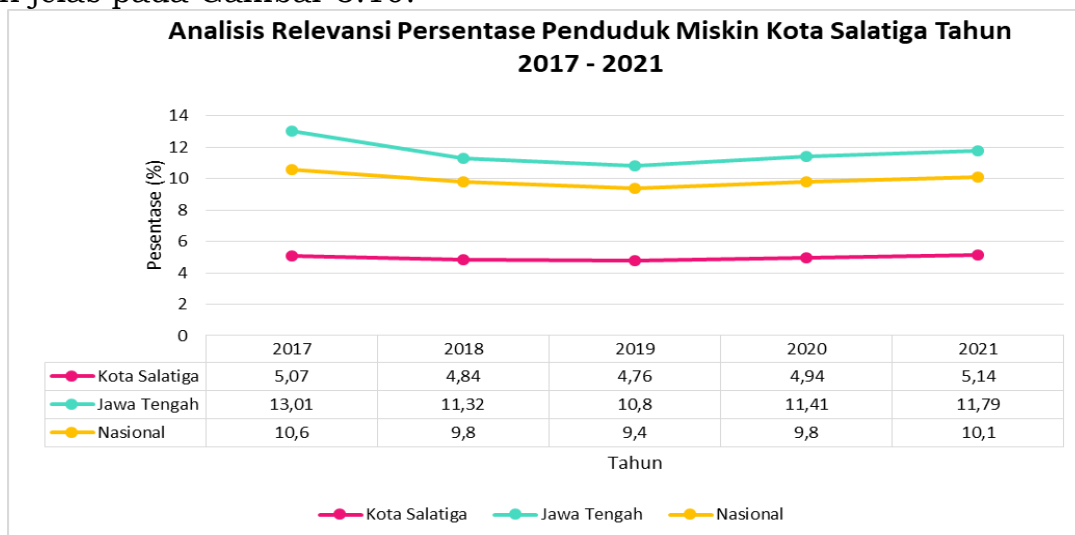


Gambar 3.9 Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Persentase penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2017 – 2021 menunjukkan fluktuasi, dimana kecenderungan menurun hingga tahun 2019, dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebagai dampak dari Pandemi COVID 19. Kecenderungan penurunan ini relevan dengan capaian persentase penduduk miskin Nasional dan Provinsi yang juga mengalami penurunan hingga tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan Kota Salatiga berkontribusi positif bagi penurunan kemiskinan Nasional. Berikut ini secara lebih jelas pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Nasional, 2022

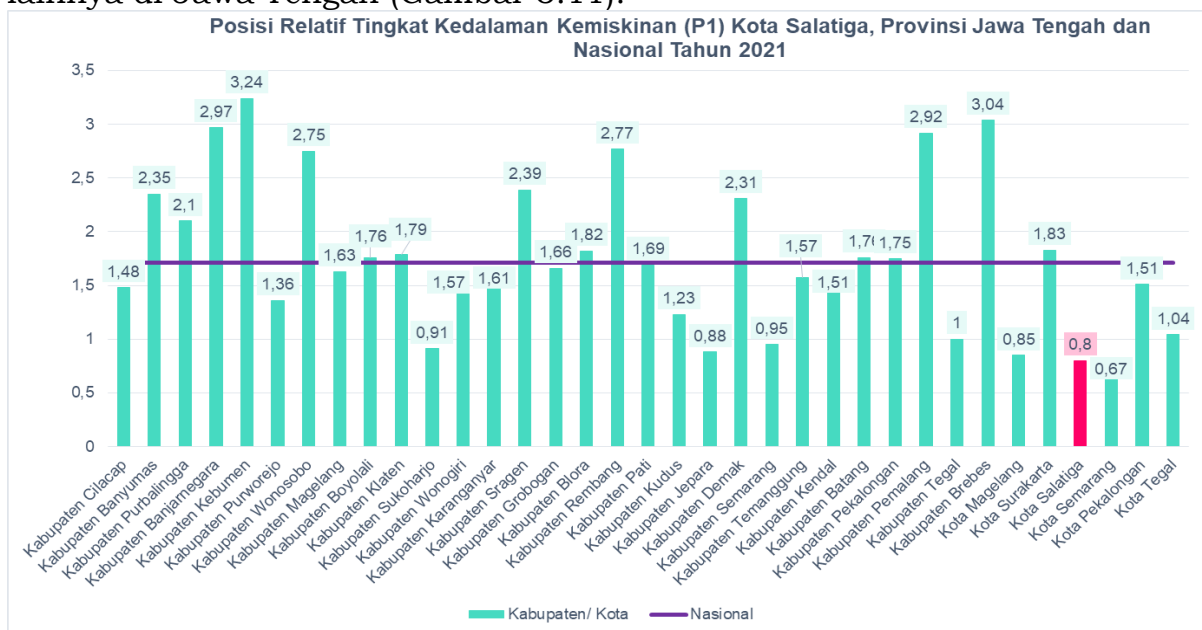
3.2.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Tingkat kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk dari garis kemiskinan. Berikut ini dijabarkan kondisi tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Salatiga dalam kurun waktu tertentu dan posisi relatif terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

A. Posisi Relatif

Tingkat kedalaman kemiskinan Kota Salatiga berdasarkan data BPS 2021 sebanyak 0,80 poin. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, tingkat kedalaman kemiskinan Kota Salatiga ini termasuk yang paling kecil. Kota/Kabupaten dengan kemiskinan (P1) terbesar adalah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Brebes. Sedangkan Kota/Kabupaten dengan kemiskinan (P1) terkecil adalah Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Magelang. Apabila dibandingkan secara nasional, tingkat kemiskinan (P1) Kota Salatiga jauh lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kota Salatiga lebih baik dari Nasional dan kota/kabupaten lainnya di Jawa Tengah (Gambar 3.11).



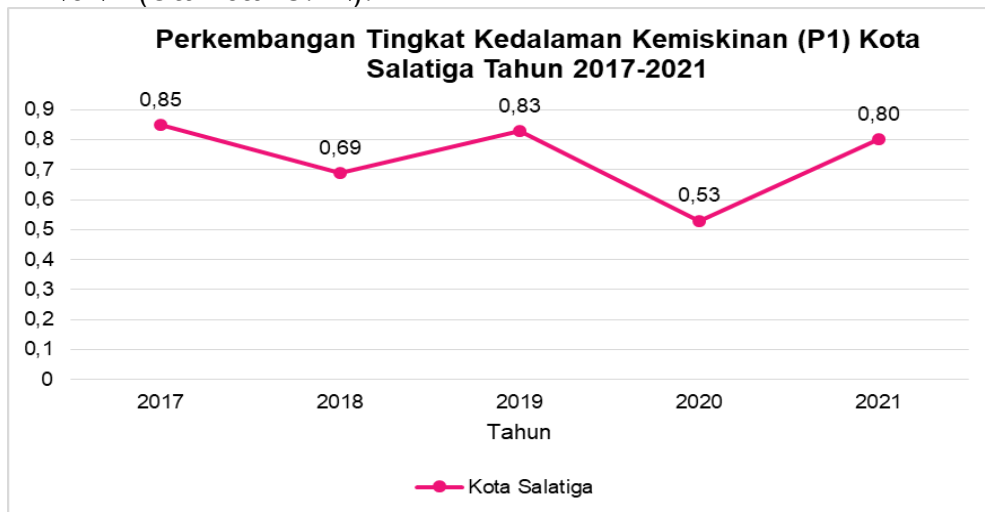
Gambar 3.11 Posisi Relatif Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

B. Perkembangan Time series

Berdasarkan data BPS, perkembangan antar waktu Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2017 – 2021 menunjukkan fluktuatif, pada tahun 2018, P1 Kota Salatiga turun 0,18 poin menjadi 0,69 dibandingkan tahun 2017 dimana P1 Kota Salatiga sebesar 0,85. Sedangkan pada tahun 2019 P1 Kota Salatiga Kembali mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin menjadi 0,83 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,30 poin menjadi 0,53 dan kembali naik cukup signifikan yaitu sebesar 0,27 poin menjadi 0,80. Pada tahun 2021, sebagai dampak dari COVID 19 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kota Salatiga juga menunjukkan peningkatan. Peningkatan Tingkat Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan bahwa Pandemi COVID 19 berdampak pada merosotnya pendapatan masyarakat miskin, terutama yang ada di perkotaan sehingga daya belinya menurun drastis. Berikut ini

perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan Kota Salatiga selama kurun waktu 2017-2021 (Gambar 3.12).



Gambar 3.12 Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kota Salatiga periode 2015 – 2020 menunjukkan kecenderungan penurunan meskipun sifatnya fluktuatif, naik dan turun. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan masih cukup efektif untuk menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan, walaupun pada tahun 2021 ada peningkatan kembali yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu pandemi COVID-19 (Gambar 3.13).

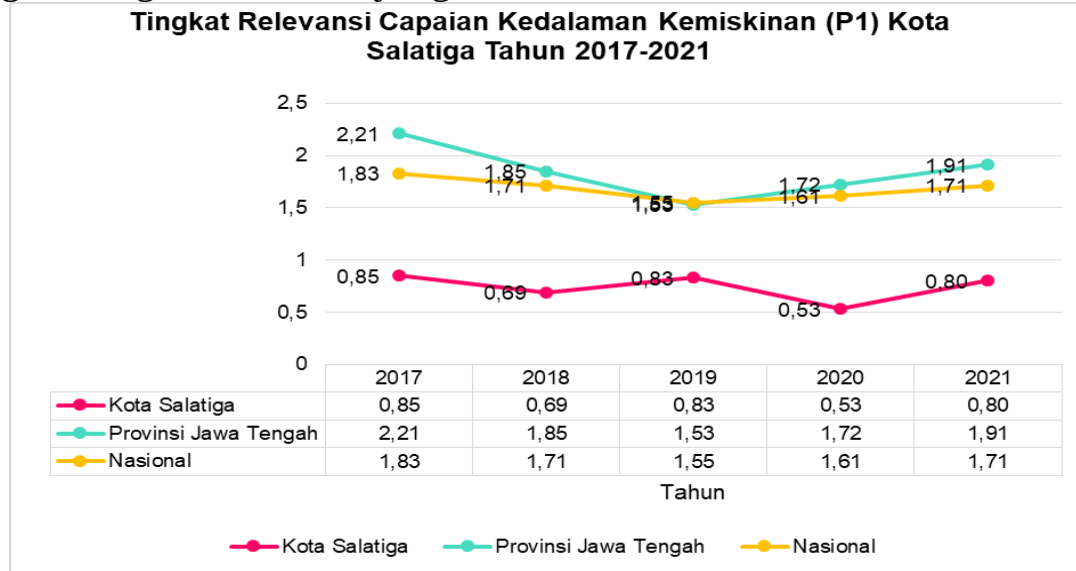


Gambar 3.13 Analisis Efektivitas Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2017-2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Berdasarkan Gambar 3.14 menunjukkan capaian tingkat kedalaman kemiskinan Kota Salatiga tahun 2017 – 2021 cukup relevan dengan capaian tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Nasional dan Provinsi. Tahun 2017 dan 2018 menunjukkan kondisi kedalaman kemiskinan yang menurun baik di

Kota Salatiga maupun provinsi dan nasional. Namun, terdapat kondisi yang berbeda pada tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019 P1 Kota Salatiga mengalami kenaikan sedangkan P1 provinsi dan nasional mengalami penurunan. Tahun 2020, P1 Kota Salatiga mengalami penurunan, sedangkan P1 provinsi dan nasional mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan pada tahun 2019 dan 2020 kontribusi poin di Kota Salatiga tidak cukup mempengaruhi kondisi P1 nasional dan provinsi, karena sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kondisi yang menurun tahun 2019 dan naik tahun 2020.



Gambar 3.14 Tingkat Relevansi Capaian Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2017-2021

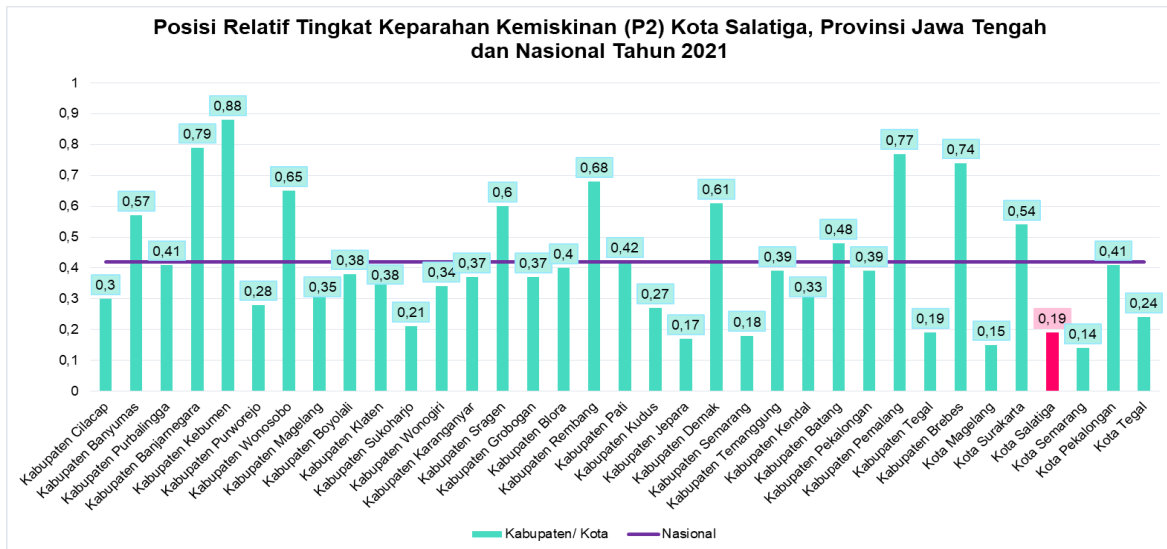
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

3.2.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Adapun berikut ini dijabarkan kondisi tingkat keparahan kemiskinan Kota Salatiga dalam posisi relatif terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan dalam kurun waktu tertentu.

A. Posisi Relatif

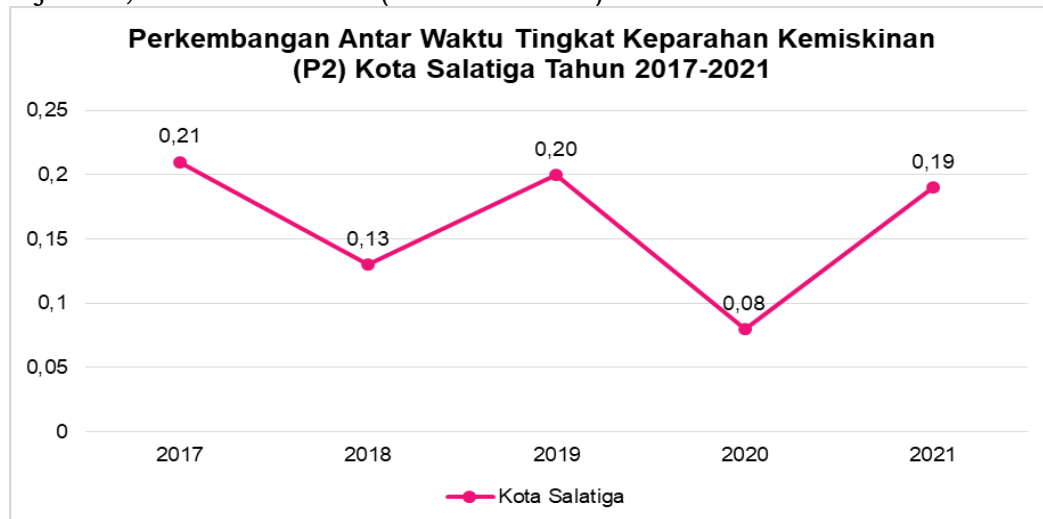
Tingkat keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan data BPS 2021, P2 Kota Salatiga sebesar 0,19. Capaian ini lebih baik dari capaian Nasional dan Provinsi, yaitu sebesar 0,42. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) yang semakin kecil semakin baik, begitupun sebaliknya semakin besar maka semakin tidak baik karena ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar. Berdasarkan provinsi tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kota Salatiga berada pada peringkat ke-5 terbawah (nilai kecil). Kabupaten/kota dengan tingkat keparahan kemiskinan (P2) paling kecil adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 0,14. Sedangkan Provinsi dengan P2 tertinggi adalah Kabupaten Kebumen, yaitu sebesar 0,88. Dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Jawa Tengah, capaian P2 Kota Salatiga termasuk yang terbaik. Kabupaten di Jawa Tengah yang paling kecil P2-nya adalah Kota Semarang dengan P2 sebesar 0,14 (Gambar 3.15).



Gambar 3.15 Posisi Relatif Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

B. Perkembangan *time series*

Perkembangan tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kota Salatiga tahun 2017 – 2021 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kota Salatiga sebesar 0,19 atau mengalami kenaikan 0,27 poin dibandingkan tahun 2020 dimana P2 sebesar 0,08. Kenaikan P2 ini sejalan dengan kenaikan P0 dan P1 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Penurunan selama periode 2017 – 2021 terjadi pada tahun 2018 dan 2020. Pada tahun 2018 P2 turun dari 0,21 tahun 2017 menjadi 0,13. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan dari 0,2 tahun 2019 menjadi 0,08 tahun 2020 (Gambar 3.16).



Gambar 3.16 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kota Salatiga periode 2017 – 2021 menunjukkan kecenderungan penurunan meskipun sifatnya fluktuatif, naik

dan turun. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan masih cukup efektif untuk menurunkan tingkat keparahan kemiskinan, walaupun pada tahun 2021 ada peningkatan kembali yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu pandemi COVID-19. Secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 3.17.

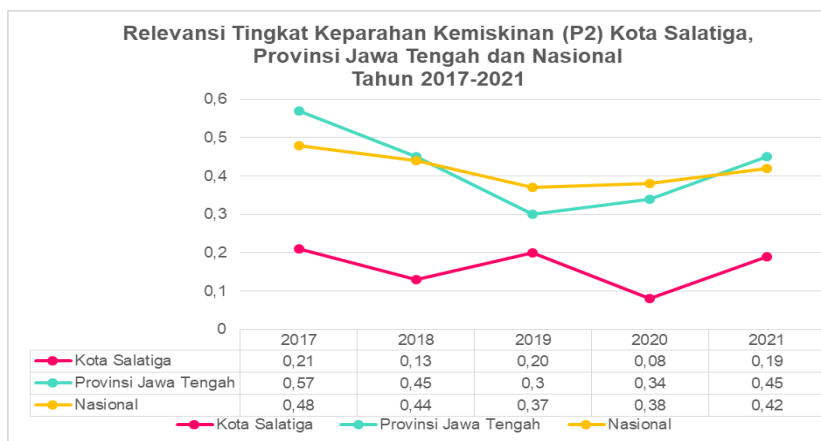


Gambar 3.17 Efektivitas Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Capaian tingkat keparahan kemiskinan Kota Salatiga tahun 2017 – 2021 relevan dengan capaian tingkat keparahan kemiskinan (P2) Nasional dan provinsi yang cenderung menurun walaupun fluktuatif yang ditunjukkan pada Gambar 3.18. Ketika terjadi kenaikan atau penurunan tingkat keparahan kemiskinan Nasional, hal ini juga diikuti oleh adanya kenaikan atau penurunan P2 Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Salatiga. Tahun 2017, 2018 menunjukkan kondisi keparahan kemiskinan yang menurun baik di Kota Salatiga maupun provinsi dan nasional. Namun, terdapat kondisi yang berbeda pada tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019 P2 Kota Salatiga mengalami kenaikan sedangkan P2 provinsi dan nasional mengalami penurunan. Tahun 2020, P2 Kota Salatiga mengalami penurunan, sedangkan P2 provinsi dan nasional mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan pada tahun 2019 dan 2020 kontribusi poin di Kota Salatiga tidak cukup mempengaruhi kondisi P2 nasional dan provinsi, karena sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kondisi yang menurun tahun 2019 dan naik tahun 2020.



Gambar 3.18 Relevansi Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Nasional, 2022

3.3.2. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Kemiskinan Konsumsi

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan meningkat, artinya semakin tinggi jumlah penduduk miskin dan/atau nilai indeks maka menunjukkan semakin jauh dari rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Kota Salatiga mengalami ketidakstabilan kondisi kemiskinan konsumsi namun program dan kegiatan yang ada di Kota Salatiga dinilai efektif dan cukup relevan dengan kebijakan di tingkat Provinsi maupun nasional. Berikut ini Tabel 3.7 menjabarkan analisis karakteristik kemiskinan dalam dimensi kemiskinan konsumsi.

Tabel 3.7 Masalah Kemiskinan Konsumsi

No.	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1.	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin	Lebih baik (2 terbawah dari nilai terkecil)	Fluktuatif	Efektif	Relevan
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Lebih baik (2 terbawah dari nilai terkecil)	Fluktuatif	Efektif	Cukup Relevan (perbedaan pada tahun 2019 dan 2020)
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	Lebih baik (5 terbawah dari nilai terkecil)	Fluktuatif	Efektif	Cukup Relevan (perbedaan pada tahun 2019 dan 2020)

3.4. ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN

3.4.1. Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Ketenagakerjaan

3.4.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan persentase jumlah pengangguran dibanding dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Nilai TPT menunjukkan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Beberapa kategori yang termasuk dalam pengangguran terbuka adalah tidak punya pekerjaan dan yang mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan dan yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Berikut ini posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas dan relevansi tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga.

A. Posisi Relatif

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 7,26%. Capaian ini menunjukkan TPT Kota Salatiga lebih tinggi sekitar 0,76% dibandingkan dengan capaian TPT Nasional, yaitu sekitar 6,5%. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat ke-7 TPT tertinggi dan yang capaiannya lebih tinggi dari nasional. Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki TPT tertinggi, yaitu Kabupaten Tegal dan Kabupaten Cilacap sebesar 9,97%. Sedangkan kota/kabupaten yang memiliki TPT terendah, yaitu Kabupaten Wonogiri sebesar 2,43%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kota Salatiga lebih tinggi, sehingga peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan rendah dan mendorong timbulnya permasalahan sosial di Kota Salatiga. Hal tersebut karena semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin rendah peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong timbulnya permasalahan sosial (Gambar 3.19).



Gambar 3.19 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Sumber: BPS Nasional, 2022

B. Perkembangan *time series*

Secara *time series* atau dari periode 2017-2021 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Salatiga cenderung naik, dimana pada periode tahun 2017 – 2020 TPT Kota Salatiga cenderung mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2021 TPT Kota Salatiga mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Adapun peningkatan paling signifikan berada pada tahun 2020 yakni meningkat sebesar 3,11% menjadi 7,44% dibanding tahun 2019 sebesar 4,33% Tahun 2021 TPT Kota Salatiga mengalami penurunan kembali sebesar 0,18%. Tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya diakibatkan faktor eksternal, yakni pandemi COVID-19 dan pemerintah membuat suatu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menyebabkan menurunnya kebutuhan tenaga kerja dan penurunan jam kerja yang menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Tahun 2021 kembali mengalami penurunan karena kondisi pandemi COVID-19 yang juga sudah mulai membaik, sehingga berbagai sektor termasuk ketenagakerjaan perlahan membaik pula, sehingga penyerapan tenaga kerja mulai bertambah lagi (Gambar 3.20).

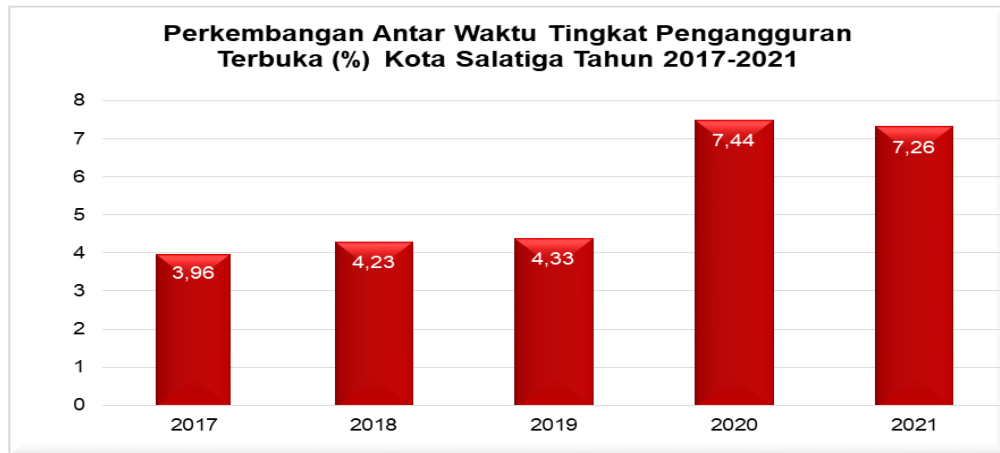


Gambar 3.20 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Salatiga Tahun 2017-2020

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

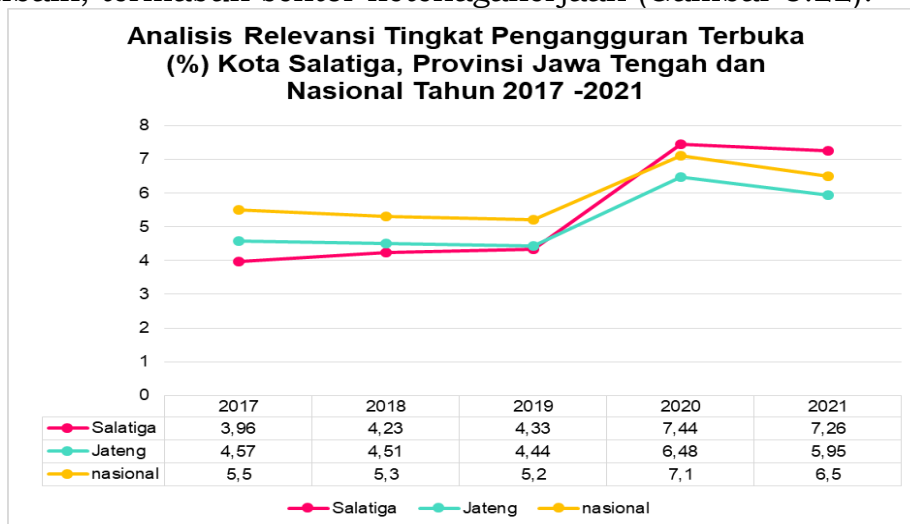
Jika dilihat dari tren waktu ke waktu dari Gambar 3.21, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga hingga tahun 2020 memiliki tren yang cenderung naik. Hal ini menunjukkan berbagai program pembangunan meliputi pembangunan sektor ekonomi (UMKM) dan IKM pada tahun 2017-2019 masih kurang efektif untuk menurunkan angka pengangguran. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding 2020. Hal ini menunjukkan program pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan di Kota Salatiga akibat pandemi COVID-19 cukup efektif menurunkan angka pengangguran yang sebelumnya pada tahun 2020 meningkat drastis dibanding 2019. Secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Salatiga tahun 2017 – 2021 relevan dengan capaian tingkat keparahan kemiskinan (P2) Nasional dan provinsi yang cenderung naik pada tahun 2020 dibanding 2019, dan turun pada tahun 2021 dibanding 2020. Namun, tidak relevan pada tahun 2017-2019, karena TPT Kota Salatiga cenderung naik, sedangkan TPT provinsi dan Nasional cenderung menurun. Kenaikan tahun 2020 yang relevan terjadi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya semua sektor, termasuk ketenagakerjaan karena banyak yang jam kerja turun dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Penurunan tahun 2021 tersebut juga menunjukkan kondisi yang relevan karena pada tahun 2021 pandemi COVID-19 sudah mulai membaik, dan keadaan perlahan-lahan juga ikut membaik, termasuk sektor ketenagakerjaan (Gambar 3.22).



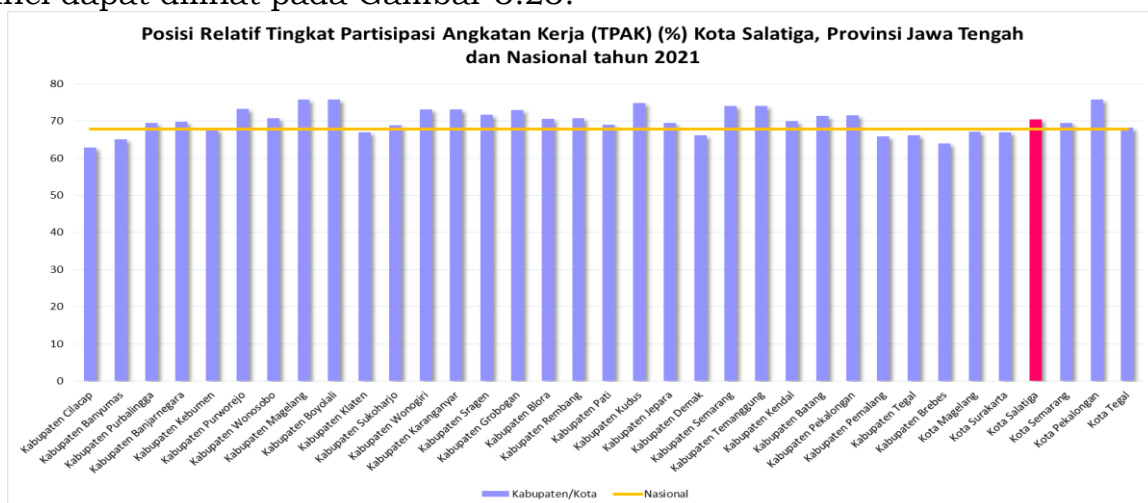
Gambar 3.22 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Nasional, 2022

3.4.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan secara persentase banyaknya penduduk usia diatas 15 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja. Nilai TPAK menggambarkan besar-kecilnya pasokan atau ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi. TPAK bermanfaat untuk melihat penduduk yang potensial memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Berikut ini posisi relatif, perkembangan *time series*, efektivitas, relevansi Kota Salatiga.

A. Posisi Relatif

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK bermanfaat untuk melihat penduduk yang potensial memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 70,36%. Capaian ini menunjukkan TPAK Kota Salatiga lebih tinggi atau lebih baik sekitar 2,56% dibandingkan dengan capaian TPAK Nasional, yaitu sekitar 67,8%. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat ke-17 TPAK tertinggi dan yang capaiannya lebih tinggi/lebih baik dari nasional. Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki TPAK tertinggi, yaitu Kabupaten Boyolali sebesar 75,79%. Sedangkan kota/kabupaten yang memiliki TPAK terendah, yaitu Kabupaten Cilacap sebesar 62,91%. Adapun kondisi TPAK dan TPT pada Kabupaten Cilacap tersebut berkebalikan. Hal ini menunjukkan bahwa persentase bagian dari penduduk usia kerja di Kota Salatiga yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa tahun 2021 termasuk besar/tinggi. Berikut ini secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 3.23.

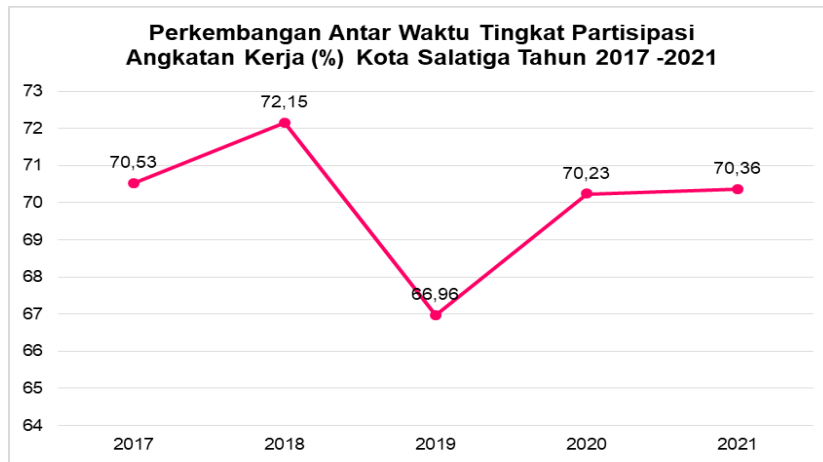


Gambar 3.23 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Sumber: BPS Nasional, 2022

B. Perkembangan *time series*

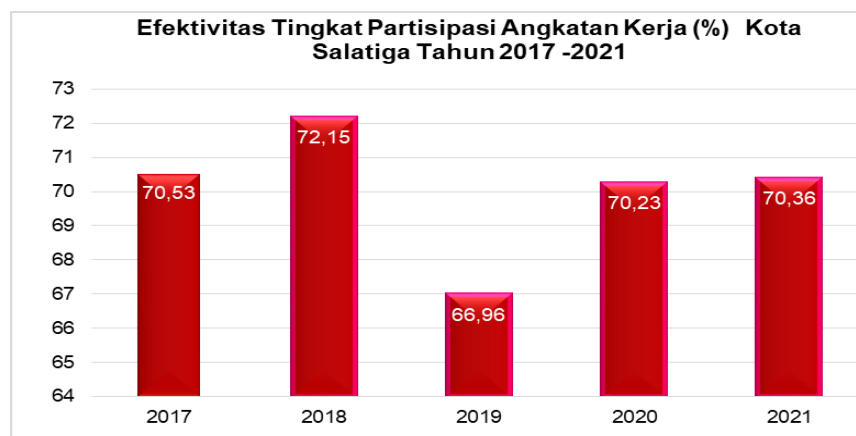
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Salatiga pada kurun waktu 2017-2021 mengalami kondisi yang cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir TPAK tahun 2018 mengalami kenaikan 1,62% dibanding 2017 dari 70,53% menjadi 72,15%. Tahun 2019, TPAK Kota Salatiga mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 5,19% menjadi 66,96% dari 72,15%. Tahun 2020 hingga 2021 TPAK Kota Salatiga terus mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Adapun kenaikan pada tahun 2020 cukup signifikan, yakni sebesar 3,27% menjadi 70,23%. Tahun 2021 TPAK masih mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, yakni hanya 0,13%.



Gambar 3.24 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

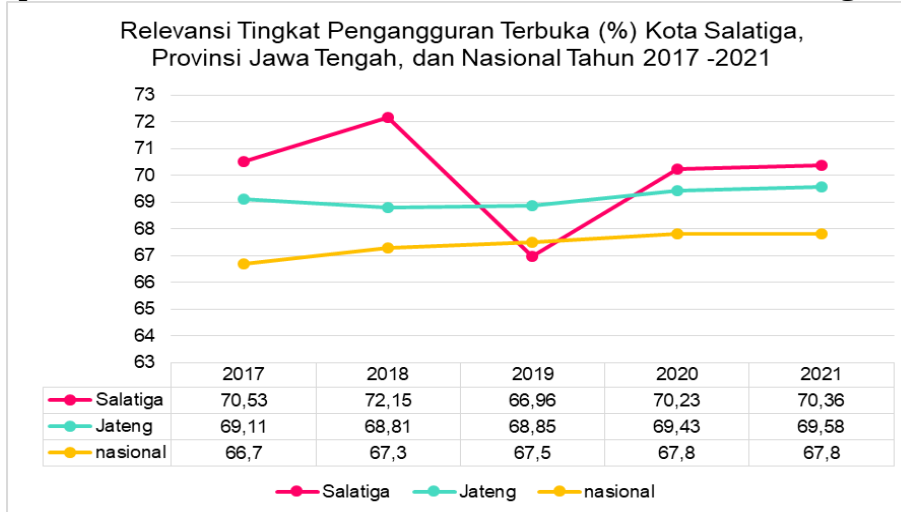
Jika dilihat dari tren waktu ke waktu dari Gambar 3.25 maka dapat dikatakan TPAK di Kota Salatiga memiliki tren yang naik, namun fluktuatif. Hal ini menunjukkan berbagai program pembangunan meliputi pembangunan sektor ekonomi (UMKM) dan IKM, serta pemberdayaan di Kota Salatiga cukup efektif untuk meningkatkan TPAK di Kota Salatiga (Gambar 3.25).



Gambar 3.25 Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Gambar 3.26 menunjukkan bahwa TPAK Kota Salatiga memiliki kecenderungan yang tidak sama dengan nilai TPAK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kota Salatiga memiliki TPAK yang cenderung fluktuatif, sedangkan provinsi cenderung meningkat, namun pada tahun 2018 menurun dibanding 2017. Adapun TPAK Nasional dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat.



Gambar 3.26 Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Nasional, 2022

3.4.2. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Ketenagakerjaan

Dimensi ketenagakerjaan merupakan salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan, tetapi disisi lain merupakan salah satu penyebab penghambat pembangunan yakni dengan munculnya permasalahan sosial di bidang ketenagakerjaan. Adanya permasalahan seperti pengangguran, menjadi bentuk pendorong peningkatan angka kemiskinan di Kota Salatiga. Adapun di Kota Salatiga pengangguran dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan Kota Salatiga lebih baik dari nasional karena penduduk usia kerja telah terlibat dan berusaha dalam kegiatan produktif. Berikut ini secara lebih jelas masalah dan kondisi Kota Salatiga terhadap masing-masing aspek (Tabel 3.8)

Tabel 3.8 Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Ketenagakerjaan

No	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Lebih baik dari nasional (peringkat 7 TPT tertinggi se-provinsi)	Cenderung naik	Efektif	Cukup Relevan (perbedaan pada tahun 2017-2019 yang cenderung naik)

No	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Lebih baik dari nasional (peringkat 17 TPAK tertinggi se-provinsi)	Fluktuatif	Efektif	Tidak Relevan (tren yang berbeda)

3.5. ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KESEHATAN

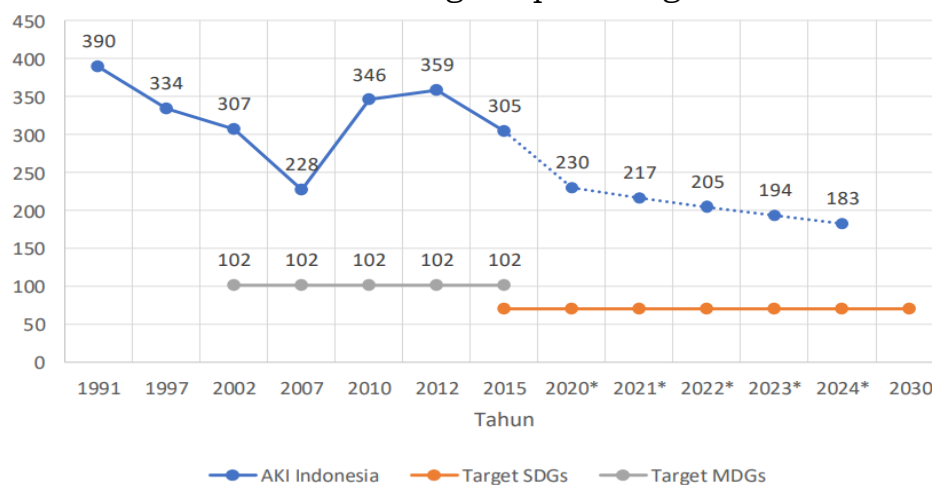
3.5.1. Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Kesehatan

3.5.1.1. Angka Kematian Ibu

Angka kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas(42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Dengan perhitungan angka kematian ibu digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. Berikut ini perkembangan antar waktu angka kematian ibu di Kota Salatiga.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan data DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2022, menunjukkan indikator AKI (per 100.000 kelahiran hidup) di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 230 atau turun -1,80 persen per tahun. Meski mengalami penurunan AKI masih belum mencapai target pada Tahun 2015 yaitu 102 dan *Sustainable Development Goals* tahun 2030 yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup (Gambar 3.27). Adapun di Kota Salatiga pada tahun 2020 menunjukkan AKI (per 100.000) yaitu sebesar 117 per 100.000 (Gambar 3.28). Artinya angka kematian Ibu masih jauh dari target *Sustainable Development Goals* tahun 2030 yaitu kurang dari 70, namun angka tersebut lebih baik dibandingkan pada tingkat nasional.



Gambar 3.27 Perkembangan AKI (PER 100.000 kelahiran hidup) di tingkat nasional

Sumber : berkas.dpr.go.id



Gambar 3.28 Posisi Relatif Angka Kematian Ibu di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2020
Sumber: BPS Nasional, 2021

B. Perkembangan *time series*

Perkembangan angka kematian ibu di Kota Salatiga pada periode waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Dimana pada tahun 2017, angka kematian ibu memiliki nilai paling tinggi yaitu sebesar 236,87 (per 100.000 kelahiran hidup). Adapun pada tahun 2018, angka kematian ibu menurun hingga -158,47 (per 100.000 kelahiran hidup). Namun kecenderungan kembali meningkat pada tahun 2020-2021. Adapun tahun 2020 naik sebesar 42,82 dari tahun 2019, sedangkan tahun 2021 meningkat sangat drastis sebesar 308,05 dari tahun 2020 menjadi 429,55. Angka tersebut jauh melebihi target AKI (117). Kenaikan yang terjadi pada tahun 2020 terdapat 3 kasus kematian ibu yang disebabkan oleh eklamsia, penyakit penyerta hepatitis dan gagal ginjal, sehingga angka capaian kinerjanya menjadi 121,5 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2021 AKI mengalami kenaikan yang sangat drastis, dimana berdasarkan perhitungan absolut terdapat 10 kasus kematian ibu yang disebabkan oleh COVID-19, penyakit jantung dan kanker payudara. Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada pertengahan 2019 di Indonesia dan Kota Salatiga khususnya mengalami puncak kasus pada tahun 2021 mengakibatkan kelompok rentan banyak mengalami kematian akibat terkena COVID-19, termasuk ibu hamil banyak yang menjadi korban (80% kematian ibu hamil/bersalin disebabkan oleh COVID 19). Angka kematian ibu yang cenderung mengalami penurunan menunjukkan kebijakan dan program terkait angka kematian ibu telah tercapai. Berikut ini gambar angka kematian ibu pada level lokal, provinsi dan nasional (Gambar 3.29).



Gambar 3.29 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu di Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber: RKPD Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

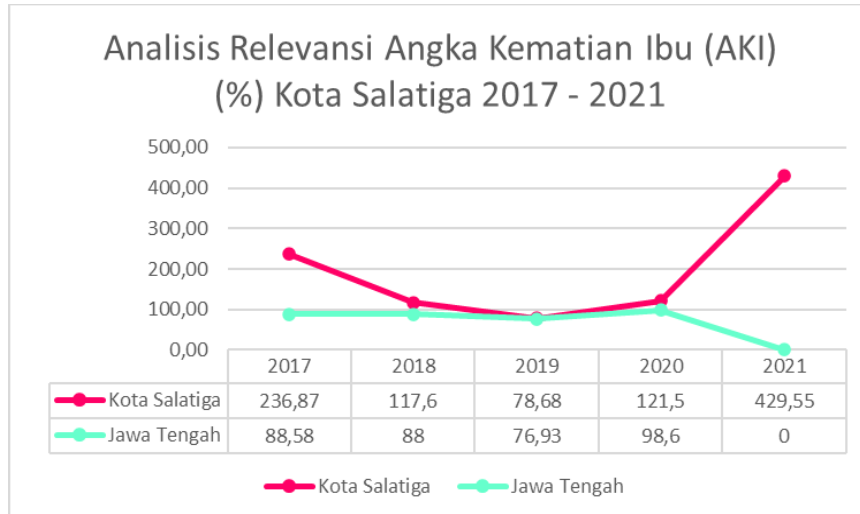
COVID-19 menyebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, sarana transportasi dan kekhawatiran akan tertular dapat menghambat perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam hal akses dan kualitas layanan. Sehingga dikhawatirkan, adanya peningkatan morbiditas dan mortalitas Ibu dan anak dan penurunan cakupan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan gizi. Adapun analisis efektivitas angka kematian ibu pada periode tahun 2017-2021 memiliki kecenderungan menurun di tahun 2017-2018 dan meningkat pada tahun 2019 dan kembali stabil di tahun 2020-2021. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas karena capaian indikator kinerja peningkatan keselamatan ibu melahirkan di tahun 2021 tercapai pada kinerja Angka Kematian Ibu sebesar 117 kasus per 100.000 Kelahiran Hidup (Gambar 3.30).



Gambar 3.30 Efektivitas Angka Kematian Ibu (AKI) (%) Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Berdasarkan gambar 3.31 menunjukkan bahwa Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah tidak relevan, hal ini karena angka kematian ibu di Kota Salatiga jauh lebih besar dibandingkan rata-rata angka kematian ibu secara Nasional. Artinya Kota Salatiga memberikan kontribusi negatif pada peningkatan Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tercermin pada perkembangan angka kematian ibu di Kota Salatiga yang cenderung stabil pada tahun ke tahun, namun angka kematian ibu di Kota Salatiga cenderung fluktuatif atau tidak stabil. Relevansi angka kematian ibu dapat dilihat pada Gambar 3.31.



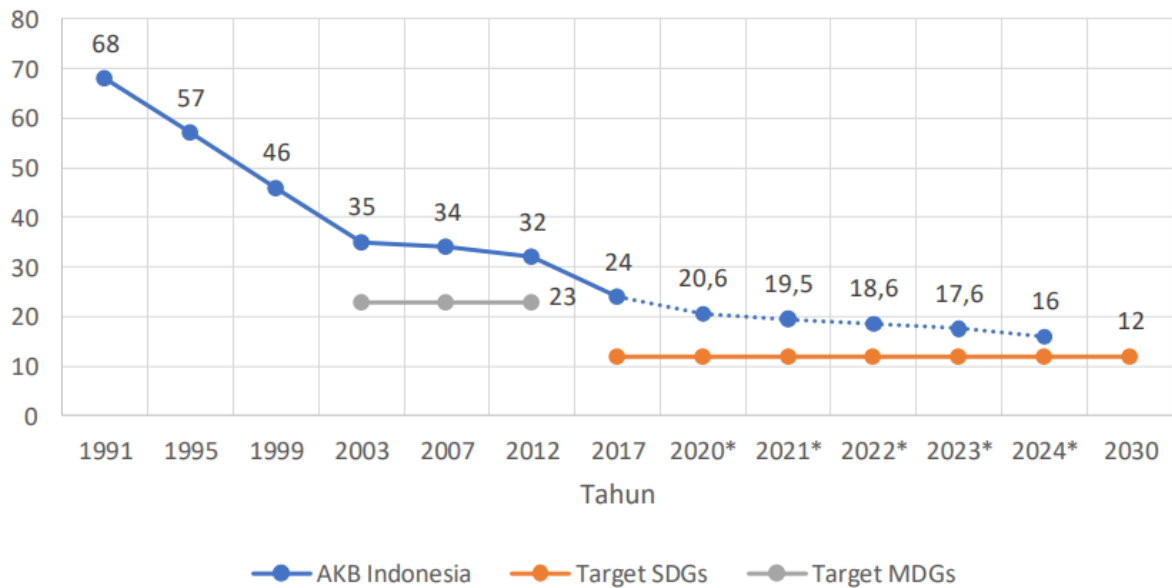
Gambar 3.31 Relevansi Angka Kematian Ibu (%) Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020
Sumber: BPS Nasional, 2021

3.5.1.2. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting sebagai cerminan tingkat kesehatan masyarakat, karena bayi sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal serta kondisi status sosial orang tuanya terutama terkait dengan kesehatan reproduksi. Tingkat kematian bayi dihitung dari banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun pada waktu tertentu per seribu kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Berikut ini perkembangan antar waktu angka kematian bayi di Kota Salatiga dalam kurun waktu tertentu terhadap angka kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia.

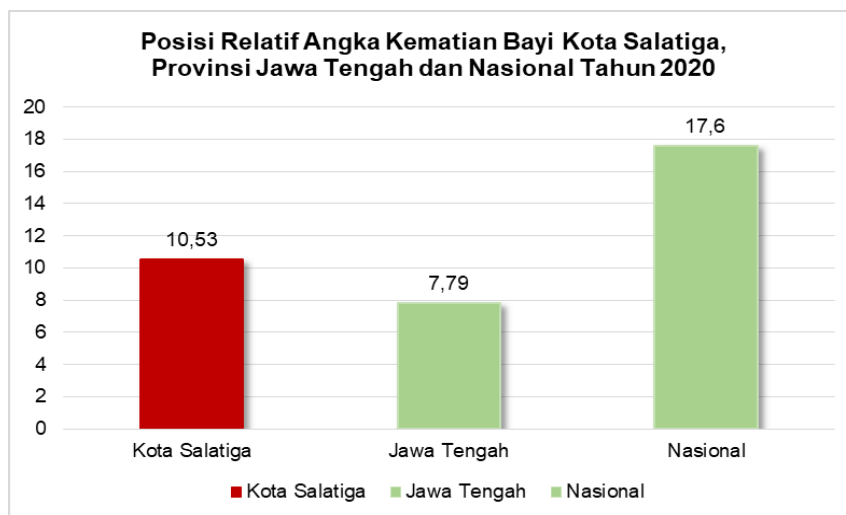
A. Posisi Relatif

Berdasarkan data DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2022, menunjukkan indikator AKB di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 23. Angka tersebut belum mencapai target Sustainable Development Goals Tahun 2030 yaitu 12 (Gambar 3.32). Adapun di tengah situasi Covid-19, angka kematian bayi melonjak pada tahun 2019 yaitu sekitar 26.000 kasus meningkat hampir 40 persen menjadi 44.000 kasus pada tahun 2020. Adapun di Kota Salatiga pada tahun 2020 menunjukkan AKB yaitu 10,23 per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut menunjukkan Kota Salatiga maupun provinsi Jawa Tengah telah melampaui target *Sustainable Development Goals* Tahun 2030 yaitu 12 (Gambar 3.33).



Gambar 3.32 Perkembangan AKB (per 1.000 kelahiran hidup) di tingkat Nasional

Sumber : berkas.dpr.go.id



Gambar 3.33 Posisi Relatif Angka Kematian Bayi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

Sumber: BPS Nasional, 2021

B. Perkembangan *time series*

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Salatiga pada kurun waktu 2017-2021 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2017 Angka Kematian Bayi sebesar 15% dan pada periode selanjutnya mengalami penurunan sebesar 7,16% menjadi 7,84%. Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,78%. Tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,09%, dan tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 3,22% menjadi 13,75%. Selama kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2021 memiliki kecenderungan angka yang meningkat, meskipun pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu mendekati separuh dibanding tahun sebelumnya. Angka capaian pada tahun 2018 menjadi angka terendah angka

kematian bayi di Kota Salatiga dari tahun 2017 hingga tahun 2021, sebaliknya angka tertinggi kematian bayi dialami pada tahun 2017; sedikit lebih baik dari tahun 2021. Penurunan kurva ini disebabkan karena meningkatnya kelahiran prematur, kurang sadarnya ibu untuk melakukan KB dan penanganan persalinan yang kurang tepat (Gambar 3.34).



Gambar 3.34 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Berdasarkan Gambar 3.35 menunjukkan perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup pada periode tahun 2017 – 2021 memiliki kecenderungan naik. Kenaikan Angka Kematian Bayi menunjukkan strategi dan kebijakan, serta program yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi kurang efektif. Adapun program yang perlu dioptimalkan antara lain program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, program upaya kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu program dan kegiatan untuk penurunan angka kematian bayi Kota Salatiga.

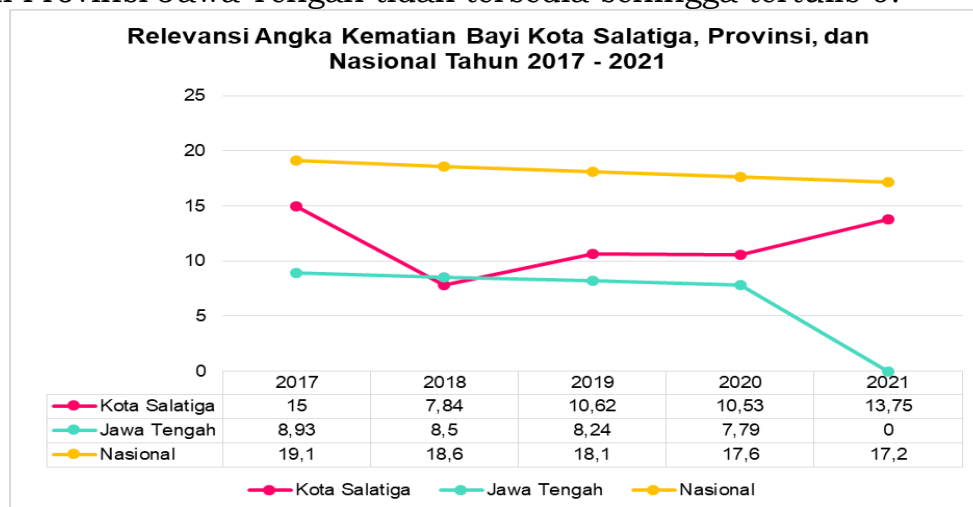


Gambar 3.35 Efektivitas Angka Kematian Bayi Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Berdasarkan Gambar 3.36 menjabarkan posisi analisis relevansi Angka Kematian Bayi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 Kota Salatiga dengan provinsi dan nasional menunjukkan kondisi yang tidak relevan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik yang menunjukkan tren berbeda. Tren Provinsi Jawa Tengah dan nasional menunjukkan kesamaan yaitu cenderung turun, sedangkan tren Kota Salatiga fluktuatif. Kondisi AKB Kota Salatiga yang relevan hanya pada tahun 2018 dan 2020 karena mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program antara provinsi dengan nasional terkait penurunan AKB sudah relevan, namun antara Kota Salatiga dengan provinsi dan nasional tidak relevan. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.36. Adapun data angka kematian bayi tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah tidak tersedia sehingga tertulis 0.



Gambar 3.36 Relevansi Angka Kematian Bayi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Nasional, 2022

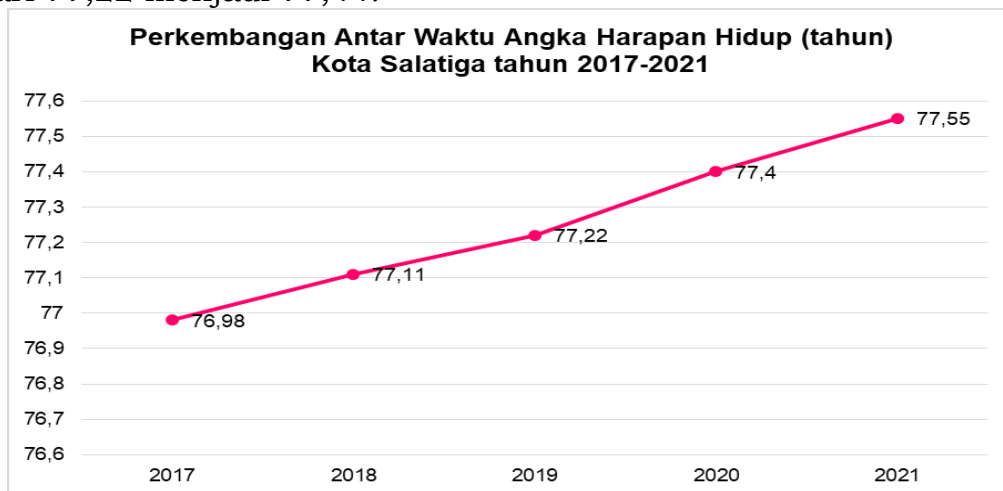
3.5.1.3. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup atau disingkat AHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AHH di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. AHH menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Berikut ini menunjukkan angka harapan hidup Kota Salatiga dalam kurun waktu tertentu dan posisi relatif terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut ini angka harapan hidup di Kota Salatiga pada periode waktu tertentu.

A. Perkembangan *time series*

Berdasarkan Gambar 3.37 tentang perkembangan Angka Harapan Hidup cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2017 - 2021 AHH Kota Salatiga cenderung naik. Pada tahun 2017 AHH Kota Salatiga sebesar 76,98 tahun dan naik menjadi 77,11 tahun 2018. AHH ini terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 menjadi 77,55 tahun.

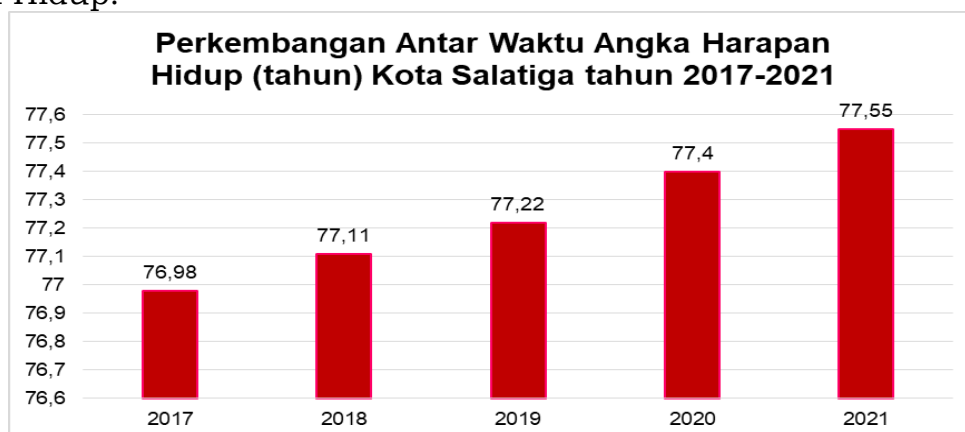
Angka Harapan Hidup yang cenderung naik menunjukkan kebijakan yang dilakukan oleh Kota Salatiga berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun kenaikan paling tinggi yakni pada tahun 2020 sebesar 0,18, dari 77,22 menjadi 77,44.



Gambar 3.37 Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup (Tahun) Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

B. Efektivitas

Dari Gambar 3.38 di bawah tentang analisis efektivitas Angka Harapan Hidup Kota Salatiga dari tahun 2017 – 2021. Dari data *series* tentang AHH menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Kota Salatiga cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan program dan kebijakan Pemerintah Kota Salatiga sudah cukup efektif untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup.

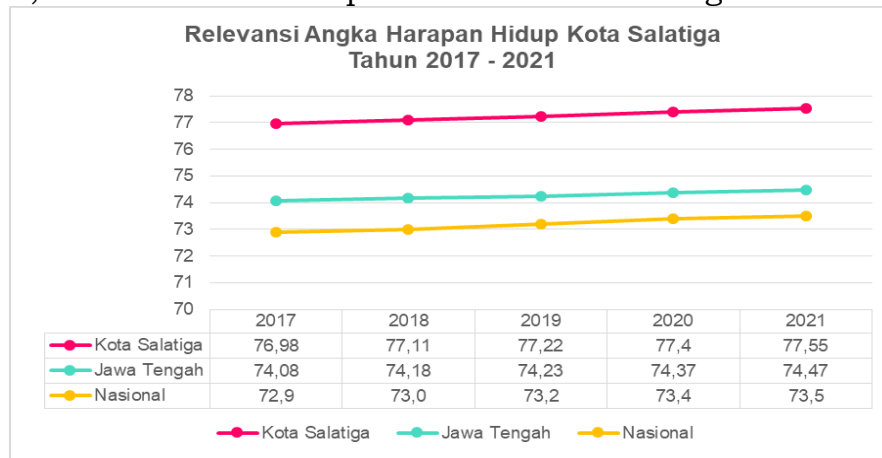


Gambar 3.38 Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup (Tahun) Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

C. Relevansi

Dari Gambar 3.39 tentang Analisis Relevansi Angka Harapan Hidup Kota Salatiga tahun 2017 – 2021 menunjukkan bahwa capaian Angka Harapan Hidup Kota Salatiga berada di atas capaian AHH Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Sedangkan, capaian AHH nasional paling rendah dibanding Provinsi

Jawa Tengah dan nasional. Berdasarkan grafik Angka Harapan Hidup Kota Salatiga relevan dengan Angka Harapan Hidup tingkat nasional dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional cukup relevan dalam meningkatkan AHH.



Gambar 3.39 Relevansi Angka Harapan Hidup Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

3.5.1.4. *Stunting*

A. Perkembangan *time series*

Dari Gambar Grafik 3.40 menunjukkan perkembangan *stunting* Kota Salatiga tahun 2018-2021 cenderung menurun. Tahun 2019, kondisi *stunting* Kota Salatiga mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 1,947 menjadi 9,588. Tahun 2020, *stunting* Kota Salatiga naik sebesar 0,892 menjadi 10,48 dibanding tahun 2019. Tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 1,044 menjadi 9,436. Adapun dalam 4 tahun terakhir tersebut, kondisi *stunting* paling tinggi berada pada tahun 2018, yakni sebesar 11,535, sedangkan kondisi paling rendah berada pada tahun 2021, yakni sebesar 9,436. (Gambar 3.40).



Gambar 3.40 Perkembangan Antar Waktu *Stunting* di Kota Salatiga Tahun 2018-2021

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

B. Efektivitas

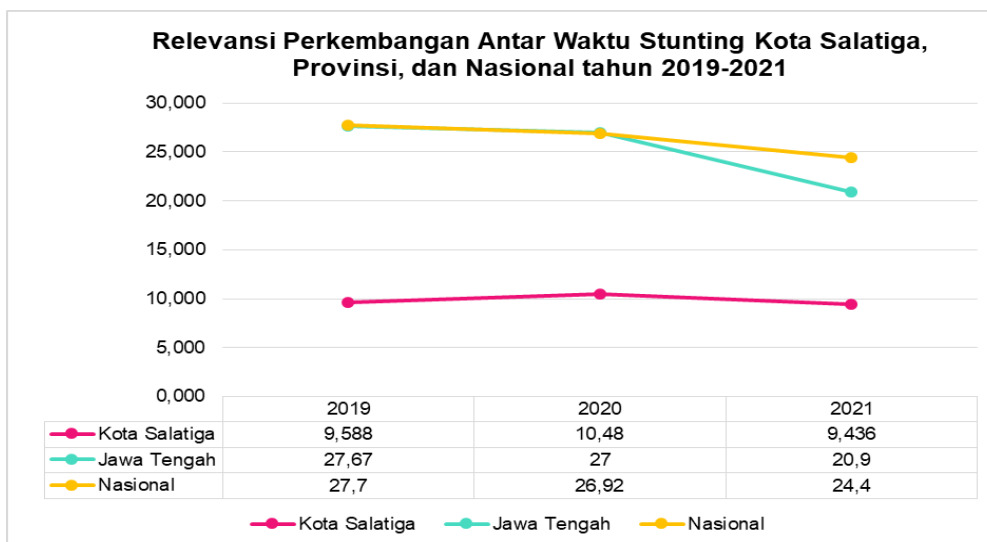
Dari Gambar 3.41 tentang analisis efektivitas *stunting* Kota Salatiga tahun 2018-2021 menunjukkan grafik yang cenderung menurun. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa penurunan lebih banyak terjadi dibanding kenaikan. Selain itu, intervensi (%) penurunan juga lebih besar terjadi dibanding yang mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa program daerah berupa program upaya kesehatan masyarakat cukup efektif untuk menurunkan persentase atau nilai intervensi *stunting* di Kota Salatiga. Berikut Gambar 3.41 efektivitas intervensi *stunting* di Kota Salatiga.



Gambar 3.41 Efektivitas Intervensi *Stunting* Kota Salatiga Tahun 2018-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

C. Relevansi

Dari Gambar 3.42 tentang analisis relevansi *stunting* Kota Salatiga menunjukkan bahwa capaian angka *stunting* Kota Salatiga pada tahun 2019 pada posisi angka 9,58% lebih baik dari capaian angka *stunting* nasional dan provinsi yaitu 27,7% dan 27,67%, namun pada tahun 2020 capaian angka *stunting* berbanding terbalik yaitu capaian angka *stunting* di Kota Salatiga naik menjadi 10,48%, sedangkan capaian *stunting* nasional dan provinsi mengalami penurunan menjadi 26,92% dan 27%. Namun, pada perbedaan tersebut kondisi *stunting* di Kota Salatiga masih tetap lebih baik dibanding provinsi dan nasional. Pada tahun 2021 kembali relevan, yaitu mengalami penurunan baik di Kota Salatiga maupun nasional dan provinsi, dimana capaian *stunting* Kota Salatiga pada angka 9,43% yang lebih baik dari capaian nasional dan provinsi yaitu 27,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menurunkan angka *stunting* antara Kota Salatiga dan nasional cukup relevan.



Gambar 3.42 Relevansi Perkembangan Antar Waktu *Stunting* Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2021
Sumber: BPS Nasional, 2022

3.5.2. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Kesehatan

Menjaga kesehatan merupakan kewajiban setiap masyarakat, upaya pencegahan terhadap suatu penyakit harus dimiliki oleh setiap individu. Walaupun merupakan tanggung jawab setiap masyarakat, namun hal itu harus mendapat dukungan dari pemerintah yang berwenang. Pemerintah tersebut mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Pemerintah hanya mendukung masyarakat dengan membuat suatu kebijakan – kebijakan yang berpihak untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dimulai dari masyarakat itu sendiri dan mendapat dukungan program – program yang berasal dari kebijakan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah Dinas Kesehatan. Adapun permasalahan kemiskinan dalam dimensi kesehatan dilihat dari masing-masing aspek yang dianalisis ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Kesehatan

No.	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	Lebih baik dari nasional dan provinsi	Cenderung turun, tahun 2020 dan 2021 naik drastis	Efektif	Tidak Relevan
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Lebih baik dari nasional (persentase lebih rendah), lebih buruk dari provinsi (persentase lebih tinggi)	Fluktuatif	Kurang Efektif	Tidak Relevan

3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Lebih baik dari nasional dan provinsi (persentase paling tinggi)	Cenderung naik	Efektif	Relevan
4	<i>Stunting</i>	Lebih baik dari nasional dan provinsi (persentase paling rendah).	Cenderung turun	Efektif	Cukup Relevan (perbedaan pada tahun 2020 yang cenderung naik)

3.6. ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN PENDIDIKAN

3.6.1. Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Pendidikan

3.6.1.1. Angka Partisipasi Kasar

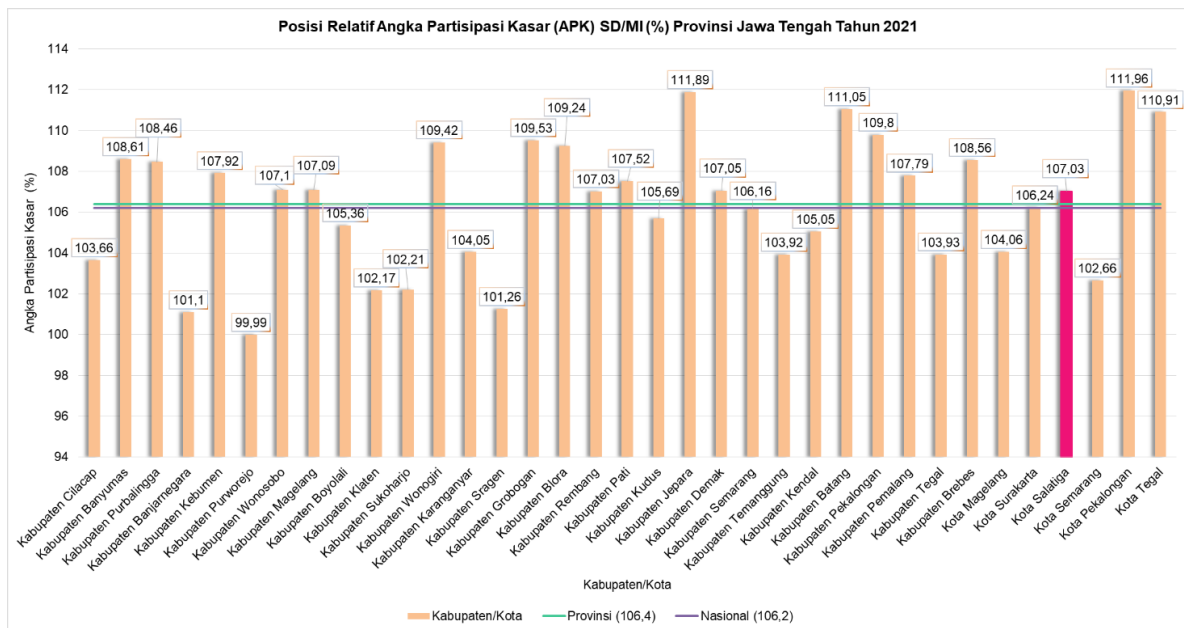
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, SMA. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Dengan mengidentifikasi APK maka dapat mengukur daya serap penduduk usia sekolah masing-masing jenjang pendidikan. Lebih detail APK tiap jenjang pendidikan dijelaskan berikut ini.

3.6.1.1.1. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah merupakan persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar.

A. Posisi Relatif

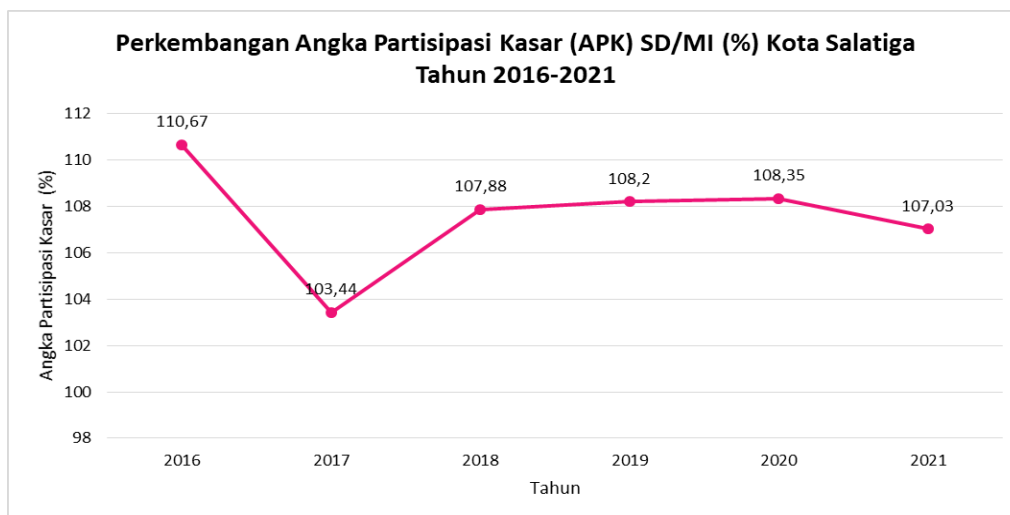
Berdasarkan posisi relatif APK SD/MI di Kota Salatiga Tahun 2021 yaitu 107,03%. Angka tersebut berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 106,4% dan Nasional yaitu 106,2%. Adapun Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan Kota Salatiga memiliki angka lebih rendah yaitu sebesar 106,16% dengan selisih 0,87%. Artinya Capaian APK SD/MI Kota Salatiga lebih tinggi jika dibandingkan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara lebih detail posisi relatif Kota Salatiga dapat dilihat pada Gambar 3.43.



catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan
 Gambar 3.43 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

B. Perkembangan *time series*

Gambar 3.44 menjelaskan perkembangan APK SD/MI dari tahun 2016-2021 di Kota Salatiga. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan angka partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada tahun 2016 sebesar 110,67, angka tersebut cenderung tinggi dibandingkan periode waktu yang lainnya. Namun, pada tahun 2017, angka partisipasi kasar SD/MI menurun hingga 7,23% di tahun 2017 dan berangsur-angsur kembali meningkat pada tahun 2018 hingga 2020. Meskipun di tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 APK SD/MI kembali mengalami penurunan sebesar 1,03%, yang semula 108,35% di tahun 2020 menjadi 107,03% di tahun 2021. Adapun persentase APK SD/MI di Kota Salatiga tetap berada di atas capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan di Kota Salatiga masih berjalan dengan baik.



catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.44 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kota Salatiga tahun 2016-2021 (Gambar 3.45) menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun di tahun 2020 hingga tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan dan masih terdapat anak putus sekolah pada layanan pendidikan dasar, namun Kota Salatiga berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar. Dengan tren penurunan capaian APK SD/MI di Kota Salatiga Tahun 2021, maka Pemerintah Kota Salatiga tetap melakukan perbaikan program dan kegiatan dengan tetap menargetkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A tetap berada di atas 100 dan berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sesuai dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022.



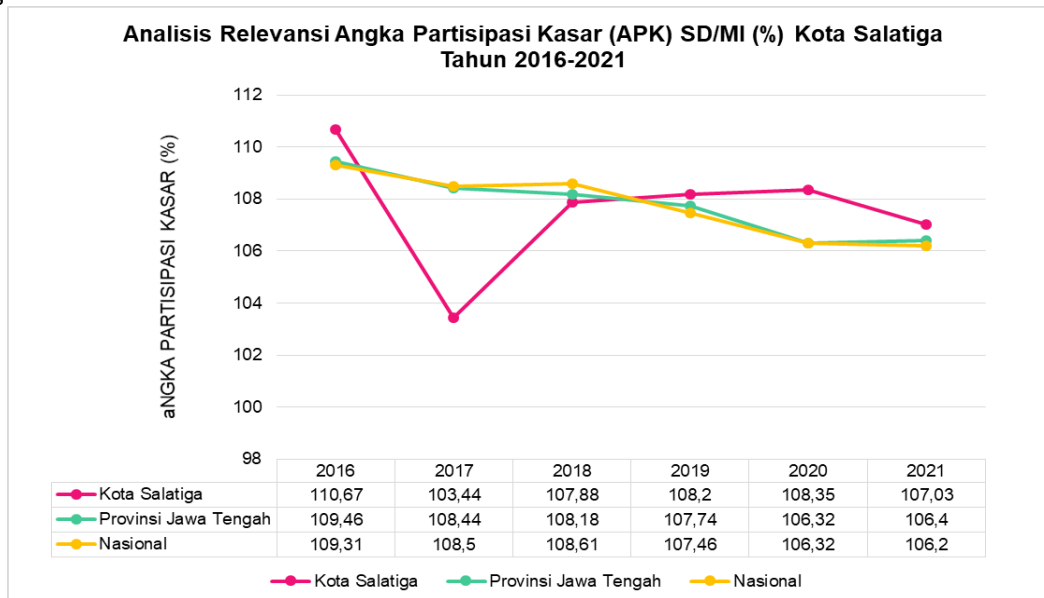
catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.45 Efektivitas Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Berdasarkan Gambar 3.46 menunjukkan tren APK SD/MI Nasional dari tahun 2016-2017 cenderung mengalami penurunan, diikuti dengan capaian APK SD/MI Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017-2018 capaian APK SD/MI meningkat dan tidak diikuti oleh capaian APK SD/MI Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah capaian nasional yaitu meningkat sebesar 4,44% di tahun 2018. Angka ini sangat baik untuk mengejar ketertinggalan Kota Salatiga di tahun 2017. Adapun di periode waktu berikutnya, capaian APK SD/MI Nasional dan Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan di tahun 2018 hingga tahun 2020. Sementara itu di tahun 2020, APK SD/MI Kota Salatiga mengalami peningkatan. Artinya terdapat keberhasilan program pembangunan pendidikan di Kota Salatiga dan berada di atas capaian nasional dan provinsi. Di Tahun 2021, Kota Salatiga mengalami penurunan ketercapaian APK SD/MI hingga 1,22% dari tahun sebelumnya. Namun, selama 6 tahun terakhir, Kota Salatiga berkontribusi positif terhadap peningkatan APK SD/MI Nasional dan Provinsi Jawa Tengah karena angka ini tetap berada di atas capaian APK SD/MI Nasional dan Jawa Tengah.



catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.46 Analisa Relevansi Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

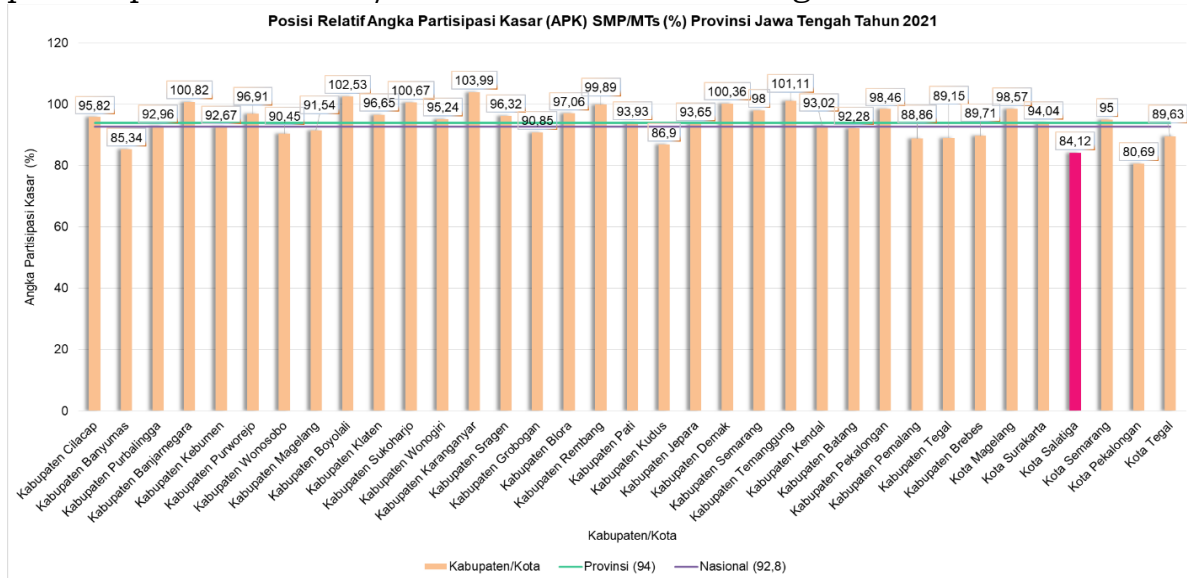
3.6.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah merupakan persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah SLTP dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

A. Posisi Relatif

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kota Salatiga pada Gambar 3.47 menunjukkan bahwa APK SMP/MTs Kota Salatiga sebesar 84,12%. Artinya,

persentase tersebut lebih rendah 9,88% dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 94%. Secara Nasional, capaian APK SMP/MTs berada pada 92,8%, maka nilai APK SMP/MTs Kota Salatiga tidak lebih baik dengan selisih (-)8,68%. Adapun secara inter-regional, wilayah di sekitar Kota Salatiga seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali memiliki persentase lebih baik dibandingkan Kota Salatiga yaitu berada di atas APK SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah. Adapun dari tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki nilai APK SMP/MTs terbawah setelah Kota Pekalongan dengan selisih 3,43%. Angka tersebut menyumbang nilai negatif pada capaian APK SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah.



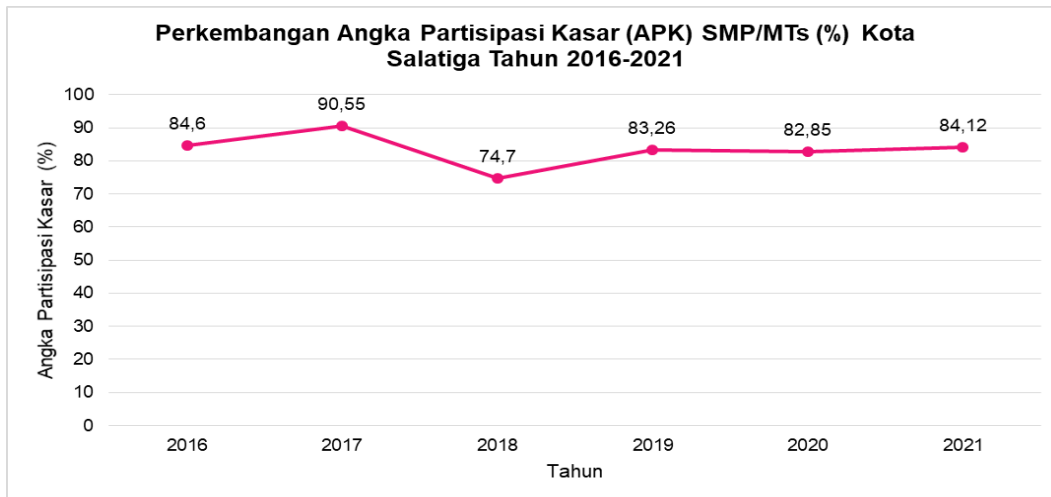
catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembanding

*data APK SMP/MTs Kota Salatiga tahun 2021 dari Dinas Pendidikan yaitu 130,81%

Gambar 3.47 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

B. Perkembangan Time Series

Perkembangan APK SMP/MTs Kota Salatiga pada periode 2016-2021 cenderung fluktuatif atau mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2016 APK SMP/MTs menunjukkan angka 84,6% dan meningkat sebesar 5,95% pada tahun 2017. Namun penurunan drastis terjadi di tahun berikutnya, pada tahun 2018 APK SMP/MTs mengalami penurunan sebesar 15,85%, angka ini menunjukkan penurunan partisipasi penduduk yang sedang bersekolah di jenjang SMP. Ketertinggalan partisipasi penduduk tersebut dapat ditingkatkan kembali pada tahun 2019 sebesar 83,26%. Upaya peningkatan program pendidikan jenjang SMP di Tahun 2019 menunjukkan keberhasilan dengan peningkatan sebesar 8,56%. Walaupun begitu, pada tahun 2020 angka APK SMP/MTs cenderung menurun hingga 0,41%, namun angka ini cenderung lebih baik dan dapat ditingkatkan kembali pada tahun 2021 dengan ketercapaian APK SMP/MTs sebesar 84,12%. Secara lebih detail, tren APK SMP/MTs selama 6 tahun dapat dilihat pada Gambar 3.48.



catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

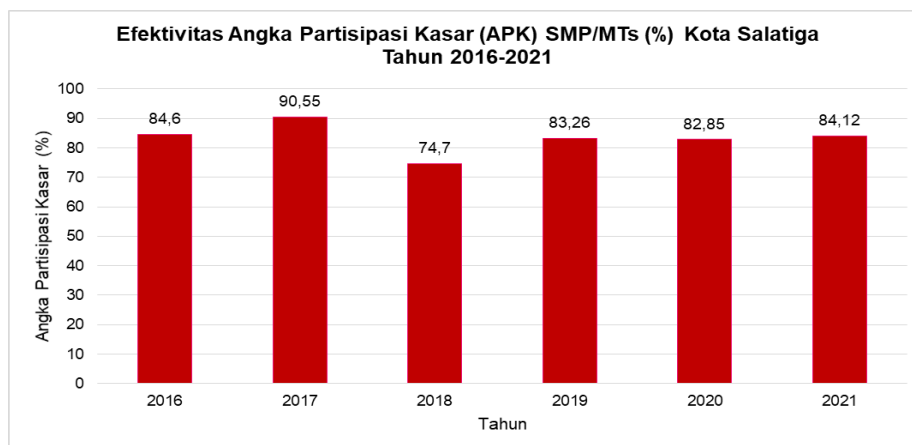
*data APK SMP/MTs Kota Salatiga tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dari Dinas Pendidikan berturut-turut yaitu 139,45%, 136,22%, 138,14%, 127,66%, dan 130,81%

Gambar 3.48 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Analisis efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021 (Gambar 3.49) menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung meningkat pada tahun 2021. Peningkatan angka partisipasi penduduk yang bersekolah di jenjang SMP dari tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Di samping masih ada anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya, Pemerintah Kota Salatiga terus meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dengan cara meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat. Kecenderungan peningkatan capaian APK SMP/MTs menandakan kinerja Pemerintah Kota Salatiga telah diperbaiki, sehingga dapat meningkat di tahun berikutnya. Oleh karena itu, berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022, Kota Salatiga menargetkan APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B untuk dapat mencapai target hingga 100 persen.



catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

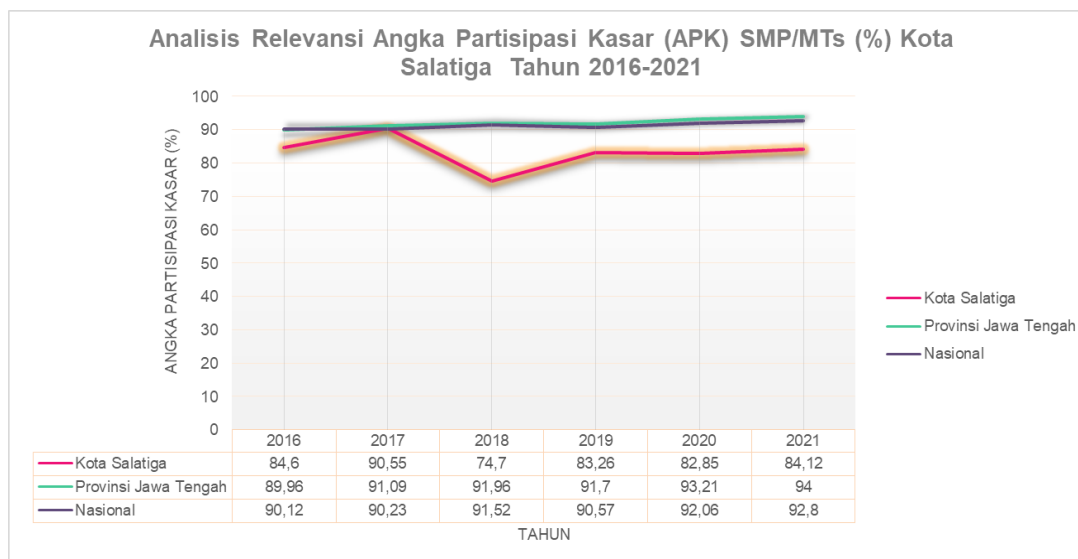
*data APK SMP/MTs Kota Salatiga tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dari Dinas Pendidikan berturut-turut yaitu 139,45%, 136,22%, 138,14%, 127,66%, dan 130,81%

Gambar 3.49 Efektivitas Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Berbeda dengan APK SD/MI, persentase APK SMP/MTs di Kota Salatiga dari Tahun 2016-2021 cenderung berada di bawah garis capaian Provinsi dan Nasional. Pada Gambar 3.50 menunjukkan dari tahun ke tahun tren persentase penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMP di Kota Salatiga lebih rendah dibandingkan capaian APK di Provinsi dan Nasional. Terutama pada tahun 2018, nilai APK SMP/MTs Kota Salatiga cenderung memiliki selisih hingga 16% dari nilai capaian provinsi dan nasional. Adapun di tahun berikutnya perkembangan APK SMP/MTs Kota Salatiga cenderung naik meskipun masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional, namun berangsur-angsur membaik. Upaya Kota Salatiga untuk melakukan peningkatan APK SMP/MTs perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif pada peningkatan capaian APK SMP/MTs.



catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

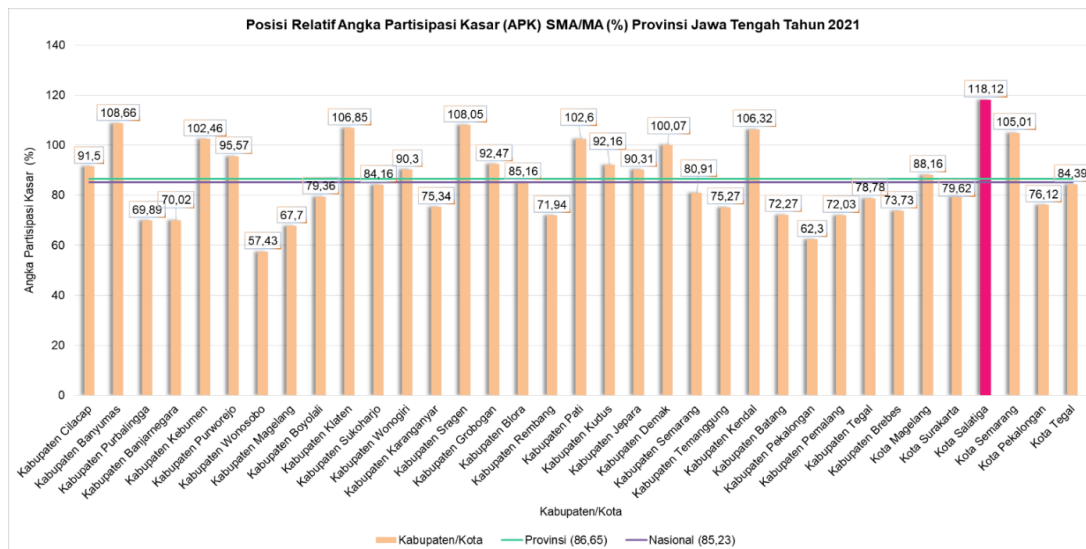
*data APK SMP/MTs Kota Salatiga tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dari Dinas Pendidikan berturut-turut yaitu 139,45%, 136,22%, 138,14%, 127,66%, dan 130,81%

Gambar 3.50 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

3.6.1.1.3 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Akhir/Madrasah Aliyah A. Posisi Relatif

Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA yaitu perbandingan jumlah murid pada tingkat pendidikan SLTA dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Pada tahun 2021, APK SMA/MA Kota Salatiga sebesar 118,12%, capaian ini lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional yaitu sebesar 85,23%. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki capaian APK SMA/MA tertinggi yang disusul oleh Kabupaten Banyumas dan Sragen dengan selisih nilai sekitar 10%. Adapun secara inter-regional, Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan Kota Salatiga memiliki nilai 80,91%, angka tersebut jauh berada di bawah Kota Salatiga dan capaian provinsi. Artinya nilai APK SMA/MA Kota Salatiga dalam kondisi lebih baik dan berkontribusi positif terhadap peningkatan APK SMA/MA. Secara lebih rinci, Gambar 3.51 menunjukkan posisi relatif APK SMA/MA Kota Salatiga dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Gambar 3.51).

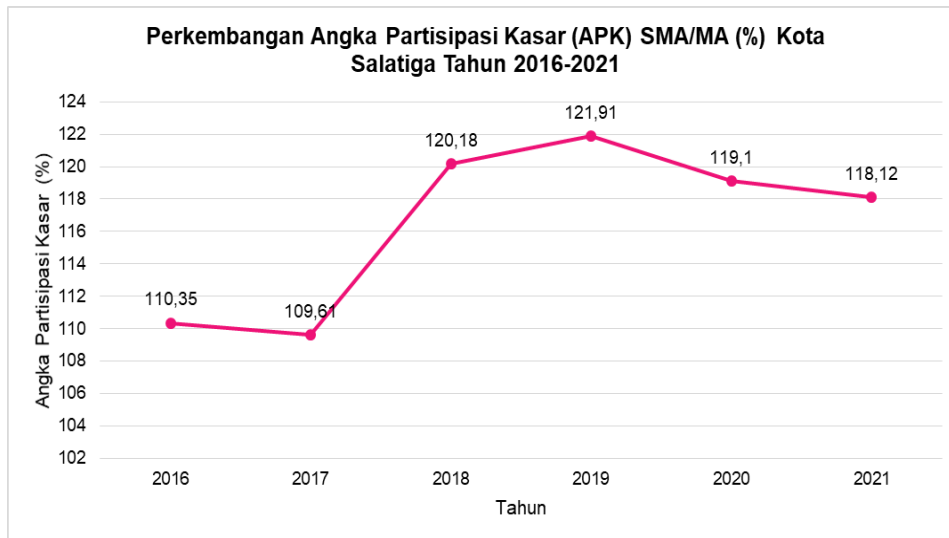


catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembanding

Gambar 3.51 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

B. Perkembangan *time series*

Berdasarkan Gambar 3.52 secara periode waktu APK SMA/MA tahun 2016 hingga 2021 cenderung mengalami peningkatan pada periode 2017-2019 dan kembali turun pada periode 2020-2021. Pada Tahun 2017, APK SMA/MA Kota Salatiga mengalami penurunan yang pada tahun 2016 sebesar 110,35% menjadi 109,61% di tahun 2017. Meskipun mengalami penurunan, APK SMA/MA Kota Salatiga mengalami peningkatan hingga 10,57% pada tahun 2018. Kemudian dari periode waktu 6 tahun tersebut, capaian APK SMA/MA tertinggi berada di tahun 2019 yaitu sebesar 121,91 %. Namun kembali menurun pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebesar 119,1% dan tahun 2021 sebesar 118,12%. Meskipun dua tahun terakhir mengalami penurunan capaian APK SMA/MA Kota Salatiga, tetapi persentase capaian APK SMA/MA Kota Salatiga cenderung tinggi. Artinya, jumlah penduduk usia 16-18 tahun banyak yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SLTA.



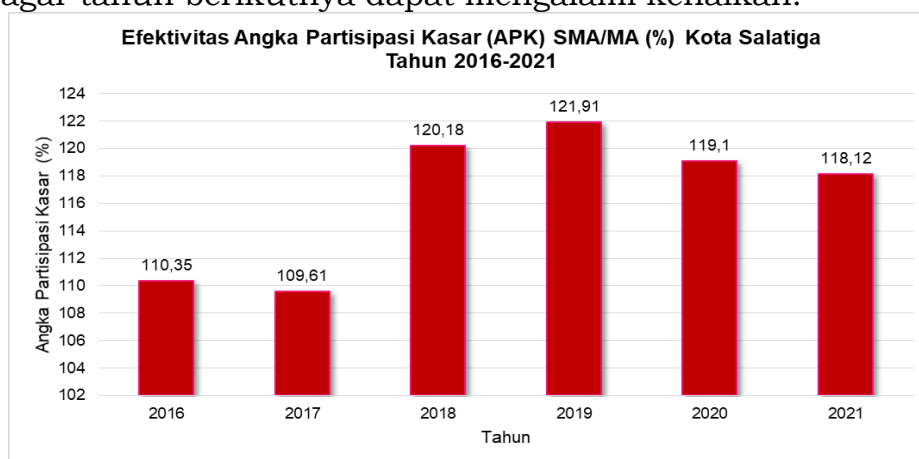
catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.52 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Perkembangan APK SMA/MA cenderung mengalami ketidakstabilan atau fluktuatif dari tahun 2016-2021 (Gambar 3.53). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah Kota Salatiga efektif pada periode tahun 2017-2019, dan mengalami penurunan APK/kurang efektif di tahun 2020-2021. Walaupun secara tren menunjukkan kecenderungan menurun pada dua tahun terakhir, APK SMA/MA memiliki tingkat keefektifan lebih baik jika dibandingkan pada capaian provinsi dan nasional. Tentunya, kinerja Pemerintah Kota Salatiga perlu diperbaiki kembali agar tahun berikutnya dapat mengalami kenaikan.



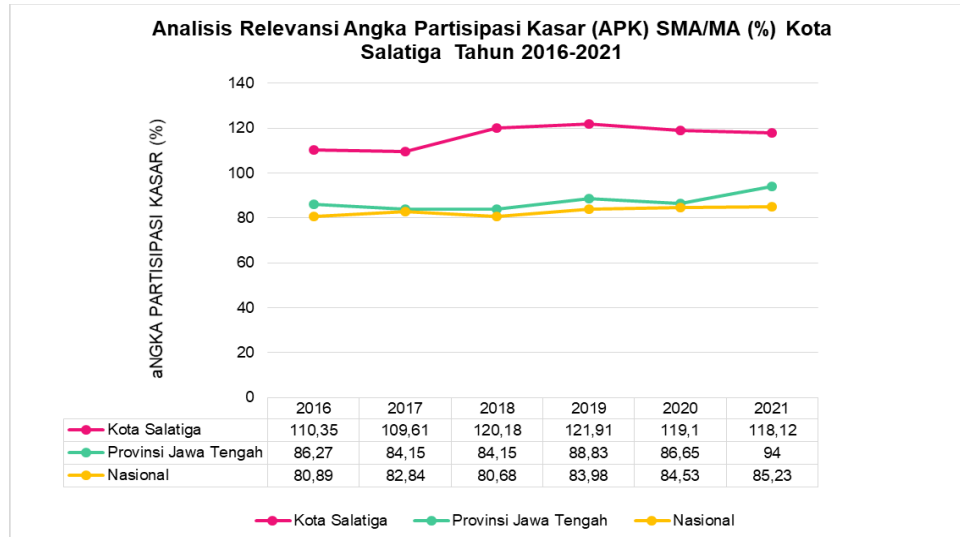
catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.53 Efektivitas Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Gambar 3.54 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016-2021 capaian APK SMA/MA Kota Salatiga sudah relevan dengan capaian APK SMA/MA tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Terlihat pada periode waktu 6 tahun, Kota Salatiga memiliki capaian APK SMA/MA di atas capaian nasional dan capaian provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa capaian peningkatan APK SMA/MA Kota Salatiga memiliki kontribusi positif pada peningkatan capaian APK Nasional dan Kebijakan Pendidikan Kota Salatiga dalam upaya meningkatkan APK SMA/MA telah sinkron dengan kebijakan pendidikan nasional.



catatan : data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.54 Analisis Relevansi Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

3.6.1.2. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMA yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Pengukuran APM dimanfaatkan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Lebih detail APM tiap jenjang pendidikan dijelaskan berikut ini.

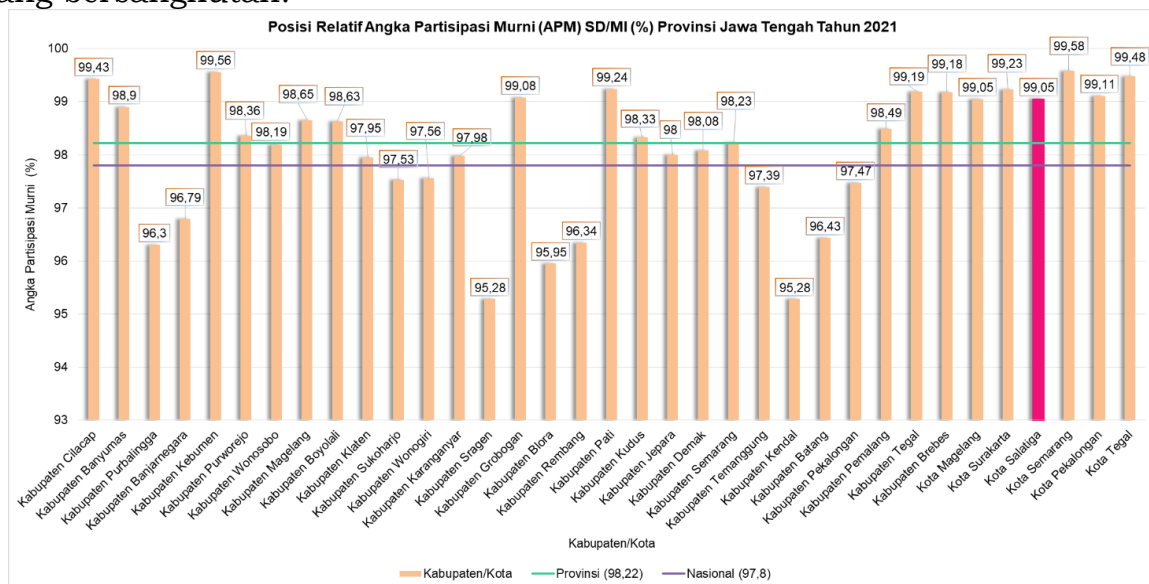
3.6.1.2.1. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI merupakan perbandingan penduduk menurut usia pendidikan yang terdaftar menurut usia pendidikan yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan yang bersesuaian yaitu murid dengan usia 7-12 tahun di SD/MI dengan jumlah penduduk usia 7-12 untuk SD/MI.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan Gambar 3.55 menunjukkan APM SD/MI pada tahun 2021 sebesar 99,05% atau lebih tinggi dari capaian nasional yaitu 97,8% dan capaian provinsi yaitu 98,22%. APM SD/MI Kota Salatiga telah sejalan kebijakan Pendidikan Nasional. Adapun asosiasi Kota Salatiga terhadap wilayah di sekitar perbatasan Kota Salatiga seperti Kabupaten Semarang

memiliki selisih 0,82% lebih rendah daripada capaian APM SD/MI Kota Salatiga. Sementara itu, kondisi berbeda dengan capaian APM SD/MI di wilayah sekitar Kota Salatiga seperti Kota Semarang dan Kabupaten Magelang yang berada di atas capaian Kota Salatiga yaitu selisih sekitar 0,20-0,30% lebih tinggi daripada Kota Salatiga. Di samping itu, Kota Salatiga menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar telah sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.



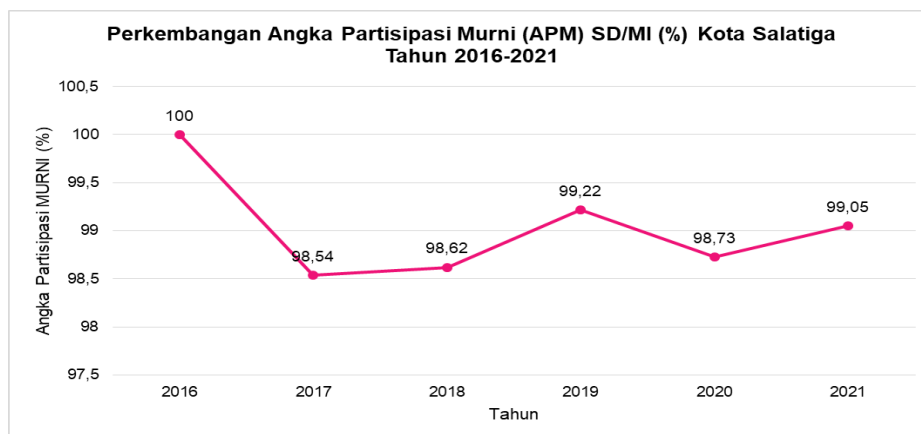
catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembanding

Gambar 3.55 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

B. Perkembangan *time series*

Pada Periode Tahun 2016-2021 perkembangan APM SD/MI secara *time series* menunjukkan tren ketidakstabilan atau fluktuatif. Dari ke-enam periode waktu tersebut, capaian APM SD/MI Kota Salatiga tertinggi pernah tercapai hingga 100% pada tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017, penurunan persentase sebesar 1,46% atau menjadi 98,54%. Kemudian tren positif kembali pada periode tahun 2018-2019 yaitu sebesar 98,62% dan 99,22%. Meskipun begitu, di tahun 2020 tren negatif kembali terjadi yaitu angka APM SD/MI menurun hingga 0,49%. Peningkatan kinerja Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2021 meningkat, terbukti dari kontribusi positif peningkatan APM SD/MI di Kota Salatiga. Perkembangan APM SD/MI selama kurun waktu 6 tahun terakhir menjadi pijakan dalam membuat kebijakan ke depan dan dengan adanya peningkatan persentase APM SD/MI tahun 2022 menjadi langkah awal untuk pemerintah kembali meningkatkan jumlah anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang sekolah dasar. Berikut ini merupakan perkembangan APM SD/MI Kota Salatiga (Gambar 3.56).



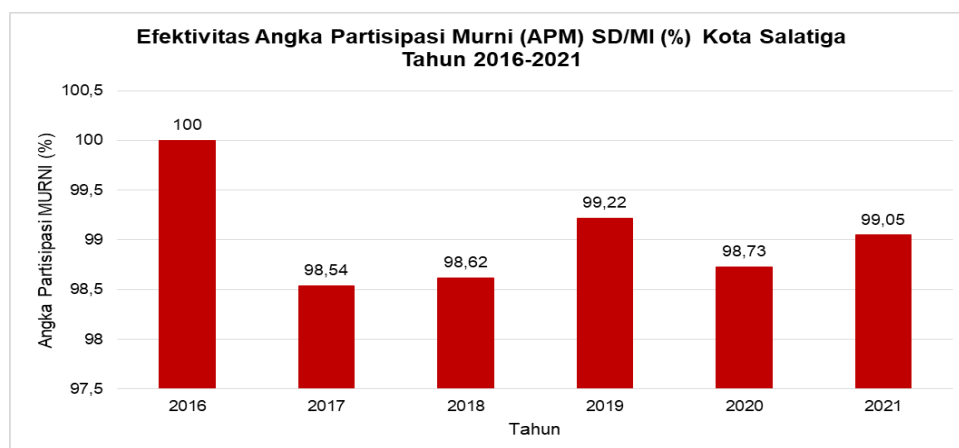
catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.56 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga Tahun 2022

C. Efektivitas

Tren capaian APM SD/MI dari tahun 2016-2021 menunjukkan berbagai kebijakan dan program bidang pendidikan seperti program pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pemberian biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan biaya operasional penyelenggaraan sekolah pada jenjang sekolah dasar kurang efektif. Selain itu program peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dasar serta peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dasar dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk memperbaiki indikator ketercapaian APM SD/MI agar kebijakan dapat berjalan dengan baik dan terukur. Dengan kondisi perkembangan APM SD/MI Kota Salatiga yang mengalami fluktuasi maka perlunya bahan monitoring dan evaluasi untuk memperkuat program pendidikan Kota Salatiga dan untuk mendorong capaian APM SD/MI yang dapat berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah dan capaian Nasional (Gambar 3.57).



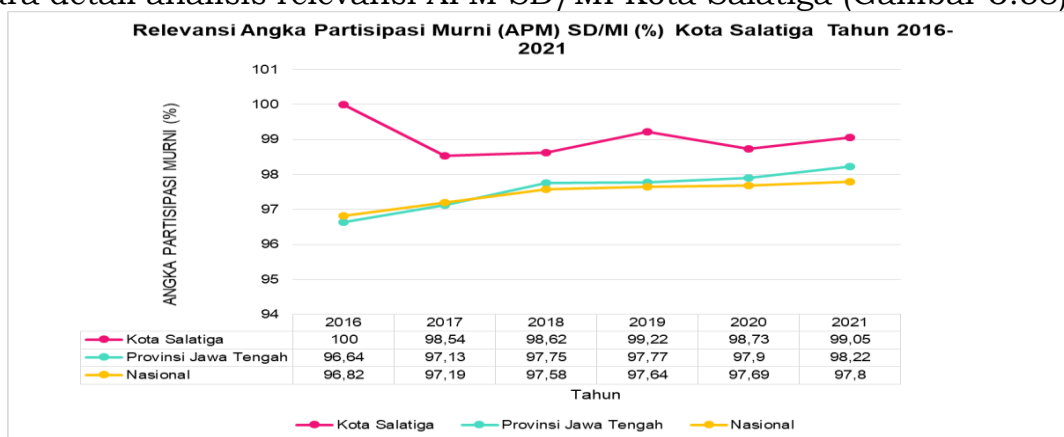
catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.57 Efektivitas Angka Partisipasi Murni SD/MI Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Pada periode tahun 2016-2021 APM SD/MI Kota Salatiga cenderung fluktuatif. Berbeda dengan Capaian APM SD/MI tingkat nasional dan provinsi yang cenderung meningkat dalam kurun waktu 6 tahun. Meskipun begitu, APM SD/MI Kota Salatiga selalu berada di atas capaian nasional dan provinsi, artinya kenaikan capaian Kota Salatiga berkontribusi positif pada capaian di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga telah sesuai dengan harapan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, capaian APM SD/MI Kota Salatiga telah relevan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. di bawah ini secara detail analisis relevansi APM SD/MI Kota Salatiga (Gambar 3.58).



catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembanding

Gambar 3.58 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

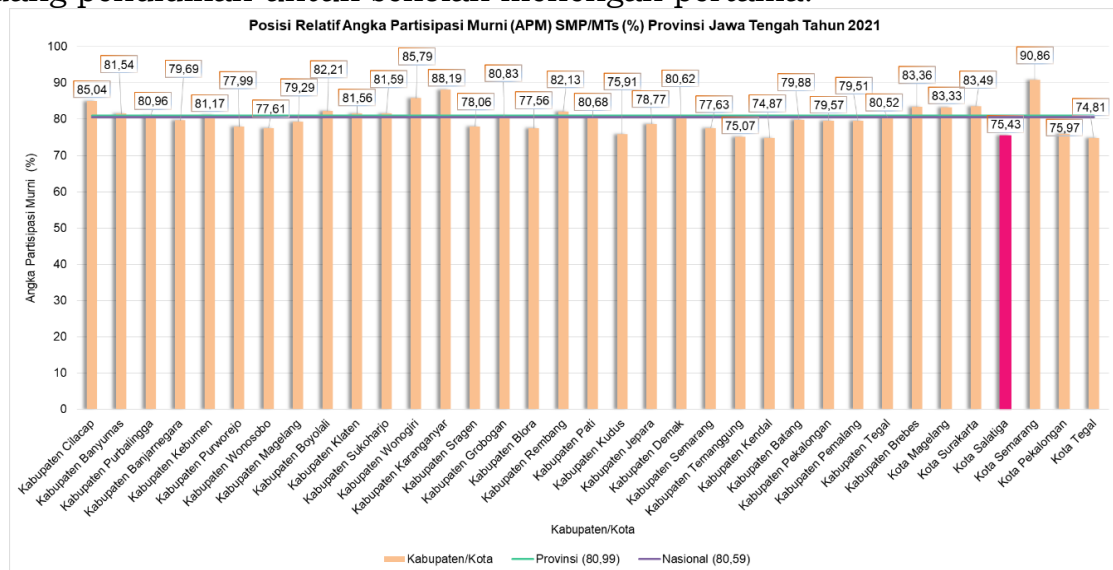
3.6.1.2.2. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Angka partisipasi murni SMP/MTs adalah perbandingan penduduk menurut usia pendidikan yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan dengan usia 13-15 tahun di SLTP, dengan jumlah penduduk usia untuk SLTP.

A. Posisi Relatif

Pada Tahun 2021, capaian APM SMP/MTs Kota Salatiga sebesar 75,43%. Sementara itu, capaian APM SMP/MTs di tingkat nasional dan provinsi Jawa Tengah masing-masing yaitu 80,59% dan 80,99%. Angka tersebut menunjukkan APM SMP/MTs Kota Salatiga lebih rendah daripada tingkat Provinsi dan Nasional yaitu selisih sekitar 5%. Adapun perbandingan kondisi Kota Salatiga dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian APM SMP/MTs Kota Salatiga paling sedikit dengan peringkat kedua terbawah setelah Kabupaten Temanggung. Sementara itu, Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan Kota Salatiga memiliki capaian APM SMP/MTs sebesar 77,63%, angka tersebut lebih rendah dari tingkat nasional dan provinsi namun lebih tinggi dibandingkan

capaian APM SMP/MTs Kota Salatiga. Artinya, Kota Salatiga pada tahun 2021 berkontribusi negatif dalam peningkatan atau penurunan APM SMP/MTs. Oleh karena itu, perlunya peningkatan program dan kegiatan khususnya di bidang pendidikan untuk sekolah menengah pertama.

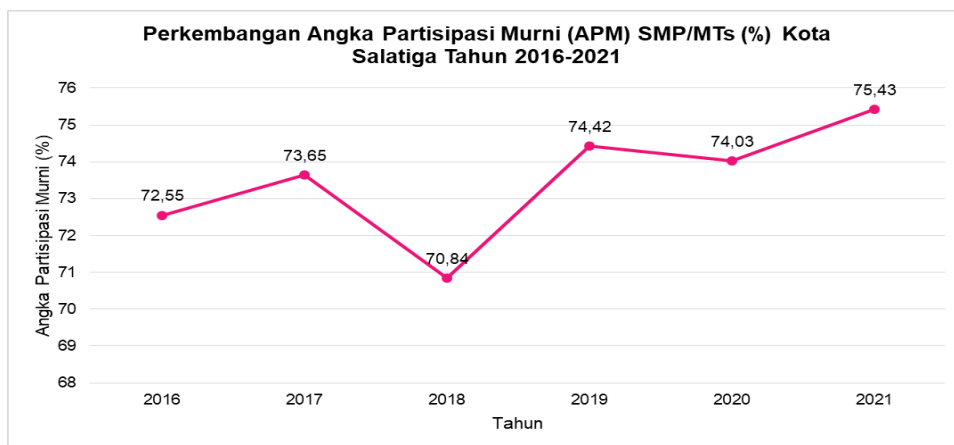


catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.59 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

B. Perkembangan *time series*

Pada periode tahun 2016-2021 perkembangan APM SMP/MTs Kota Salatiga cenderung mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2018, APM SMP/MTs Kota Salatiga mengalami penurunan yang semula 73,65% di tahun 2017 menjadi 70,84% di tahun 2018 atau menurun sebesar 2,81%. Artinya terdapat murid yang tidak tepat waktu dalam menempuh jenjang pendidikan di atasnya. Adapun pada tahun 2019, kinerja Pemerintah Kota Salatiga dalam bidang pendidikan mampu meningkatkan capaian APM SMP/MTs sebesar 74,42% di tahun 2019. Akan tetapi, capaian tersebut tidak dapat dipertahankan atau ditingkatkan di tahun berikutnya yaitu di Tahun 2020 dengan penurunan 0,29%. Kemudian, di tahun 2021 capaian APM SMP/MTs kembali menunjukkan performa cukup baik yaitu meningkat sebesar 1,40% menjadi 75,43%. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Salatiga perlu meningkatkan proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Secara lebih rinci, Gambar 3.60 menggambarkan kondisi perkembangan APM SMP/MTs pada periode 6 tahun terakhir (Gambar 3.60).



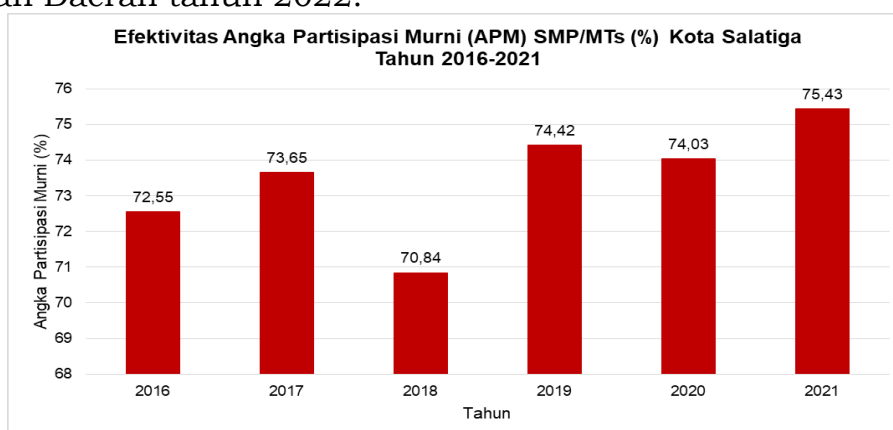
catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembanding

Gambar 3.60 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Capaian APM SMP/MTs Kota Salatiga menunjukkan ketidakstabilan, terlihat jelas pada tahun 2018 penurunan capaian APM SMP/MTs yang cukup drastis dan diikuti penurunan capaian di tahun 2020 (Gambar 4.61). Terlepas dari itu, Kota Salatiga telah mengalami kondisi baik di tahun 2021 dengan peningkatan persentase capaian APM SMP/MTs. Dengan adanya kondisi tersebut, maka perlunya kegiatan terkait pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam penentuan program dan kegiatan di bidang pendidikan khususnya SLTP. Hal ini karena perlunya kesesuaian capaian Nasional dengan tingkat kewenangan masing-masing yang dapat efektif untuk meningkatkan persentase jumlah murid bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, salah satu upaya peningkatan efektivitas indikator APM SMP/MTs yaitu dengan program wajib belajar 12 tahun agar dapat mencapai target APM SMP/MTs 100 persen di tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2022.



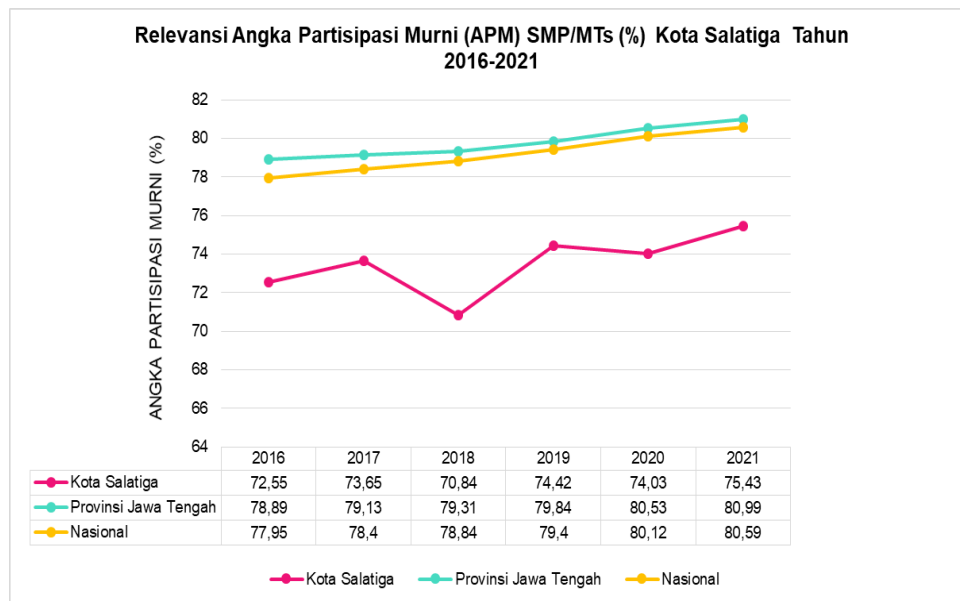
catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembanding

Gambar 3.61 Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Pada periode tahun 2016-2021 perkembangan APM SMP/MTs Kota Salatiga berada di bawah garis capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Capaian APM SMP/MTs tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 6 tahun, sebaliknya Kota Salatiga selama 6 tahun terakhir belum dapat berkontribusi positif pada peningkatan APM SMP/MTs. Artinya, APM SMP/MTs Kota Salatiga belum relevan dengan program nasional. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dijalankan oleh Kota Salatiga harus terintegrasi dengan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan dasar. Di bawah ini menunjukkan analisis relevansi APM SMP/MTs Kota Salatiga (Gambar 3.62).



catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.62 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Salatiga

Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

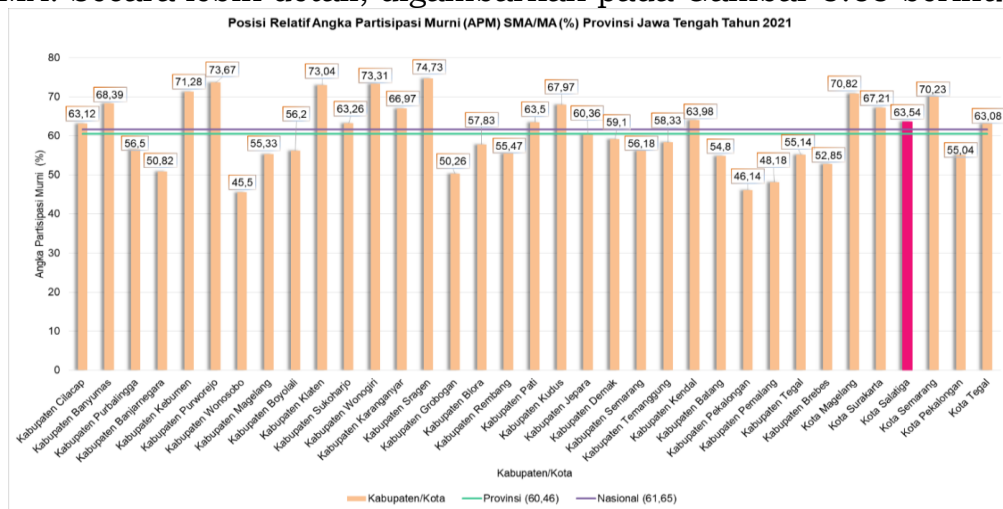
3.6.1.2.3. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Akhir/Madrasah Aliyah

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA merupakan perbandingan penduduk menurut usia pendidikan yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan yang bersesuaian usia 16-18 tahun di SLTA dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun untuk SLTA.

A. Posisi Relatif

Pada tahun 2021, capaian APM SMA/MA Kota Salatiga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tingkat nasional sebesar 63,54%. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang lain, APM SMA/MA Kota Salatiga menduduki peringkat ke 14 (empat belas). Adapun rata-rata capaian APM SMA/MA Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 cenderung di bawah capaian Nasional. Sementara itu, secara inter-regional Kota Salatiga masih berada lebih tinggi 8,74% dibandingkan Kabupaten

Semarang dan lebih rendah 6,69% dibandingkan capaian APM SMA/MA Kota Semarang. Akan tetapi, dari segi rata-rata provinsi dan nasional, Kota Salatiga telah berkontribusi positif untuk meningkatkan capaian APM SMA/MA. Secara lebih detail, digambarkan pada Gambar 3.63 berikut ini.

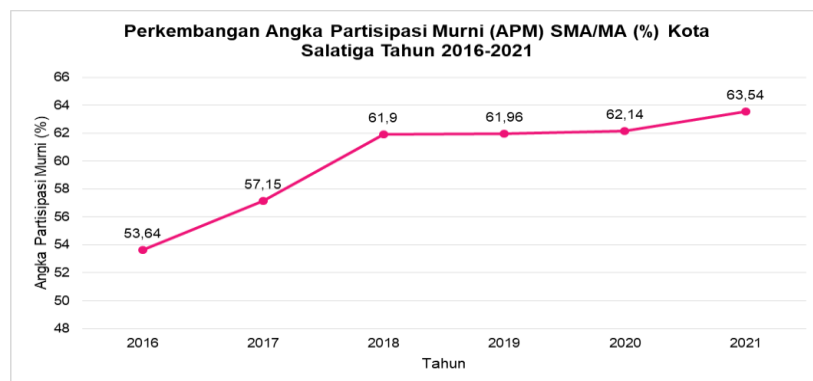


catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.63 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

B. Perkembangan *time series*

Berdasarkan Gambar 3.64 menunjukkan perkembangan APM SMA/MA Kota Salatiga tahun 2016-2021 menunjukkan performa yang baik yaitu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016 sebesar 53,64% dan naik cukup signifikan di tahun 2017 dan tahun 2018 berturut turut yaitu 57,15% dan 61,9%. Pada tahun 2019-2021 kenaikan sekitar 2% hingga mencapai angka 63,54% di tahun 2021. Tren kenaikan tersebut menunjukkan jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA telah sesuai dengan usia 16-18 tahun terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah tersebut.

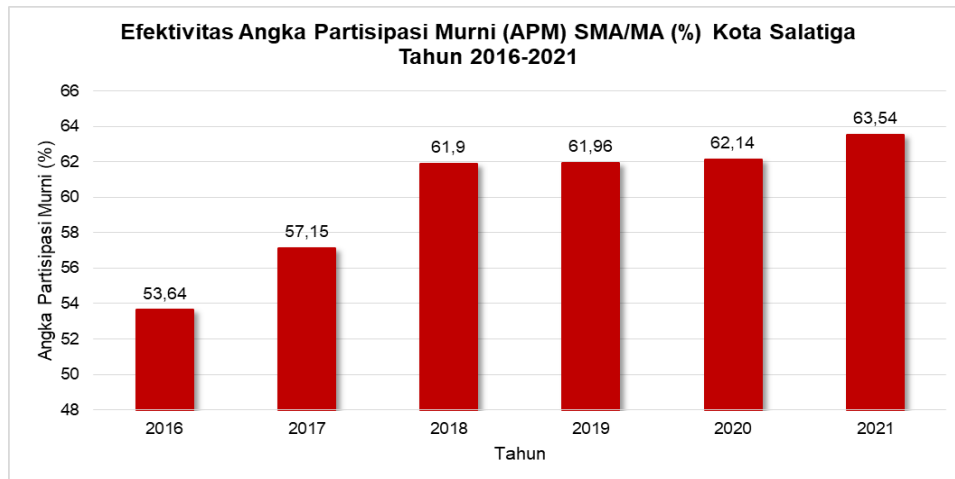


catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.64 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Perkembangan APM SMA/MA Kota Salatiga cenderung mengalami tren naik dari tahun 2016-2021. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam upaya peningkatan APM SMA/MA telah efektif. Oleh karena itu, mutu pendidikan SMA terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Salatiga dari tahun ke tahun sehingga penduduk mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan jenjang SMA. Adapun upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan Kota Salatiga harus tetap ditingkatkan agar dapat berkontribusi positif dalam peningkatan capaian APM SMA/MA (Gambar 3.65).

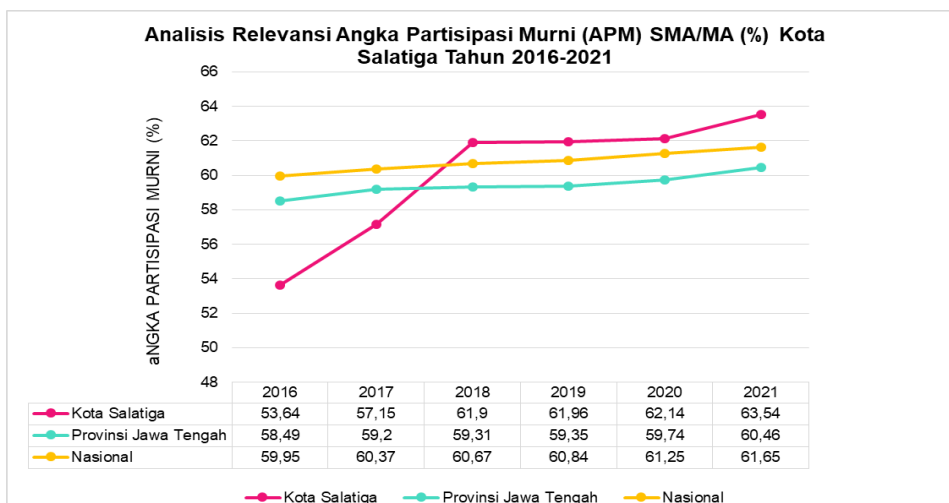


Gambar 3.65 Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Gambar 3.66 menunjukkan capaian APM SMA/MA Kota Salatiga relevan dengan capaian APM SMA/MA Nasional pada periode tahun 2019-2021. Meskipun di tahun 2016-2017 capaian APM Kota Salatiga di bawah capaian nasional dan provinsi dengan selisih sekitar 3-5% lebih rendah dibandingkan tingkat nasional dan provinsi. Namun, pada tahun 2018-2021, seiring dengan kenaikan capaian APM SMA/MA tingkat nasional dan provinsi, Kota Salatiga-pun cenderung meningkat. Artinya dengan adanya relevansi tersebut, berbagai program/kegiatan pendidikan seperti beasiswa miskin, bantuan operasional sekolah dan pemenuhan prasarana sarana penunjang pendidikan Kota Salatiga telah sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.



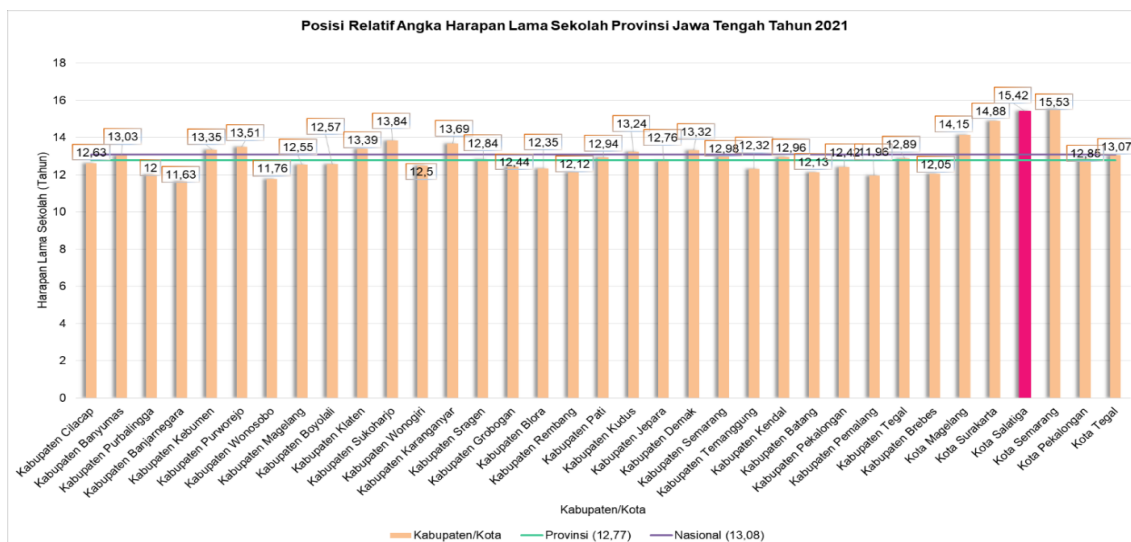
Gambar 3. 66 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

3.6.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan *United Nations Development Programme* (UNDP). Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Berikut ini kondisi angka harapan lama sekolah di Kota Salatiga terhadap posisi relatif Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

A. Posisi Relatif

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peluang usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 15,42 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,42 tahun atau setara dengan Diploma I. Capaian Angka Harapan Sekolah Kota Salatiga tahun 2021 lebih baik daripada capaian nasional sebesar 13,08 tahun. Sedangkan di tingkat provinsi, Angka HLS Kota Salatiga menduduki peringkat pertama dengan Angka HLS tertinggi dan berada di atas rata-rata capaian provinsi Jawa Tengah sebesar 12,77 tahun. Artinya capaian HLS Kota Salatiga menunjukkan kondisi pembangunan sistem pendidikan selama 15,42 tahun telah dicapai oleh setiap anak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 3.67).



catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.67 Posisi Relatif Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

B. Perkembangan Time Series

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga dalam periode waktu 6 tahun (2016-2021) menunjukkan perkembangan positif. Hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018, capaian HLS Kota Salatiga cenderung stabil, kemudian di tahun 2019 capaian HLS meningkat hingga 0,34% menjadi 15,34% dan kembali meningkat pada dua tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan perkembangan positif selaras dengan kinerja Pemerintah Kota Salatiga. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.68.



catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.68 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Angka Harapan Lama Sekolah dari tahun 2016-2021 (Gambar 3.69) menunjukkan tren meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Salatiga berjalan efektif di dalam peningkatan harapan lama sekolah Kota Salatiga. Adapun hal ini berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan mengenai efektivitas kegiatan dan program pengelolaan pendidikan di jenjang PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C serta program pengembangan kurikulum.



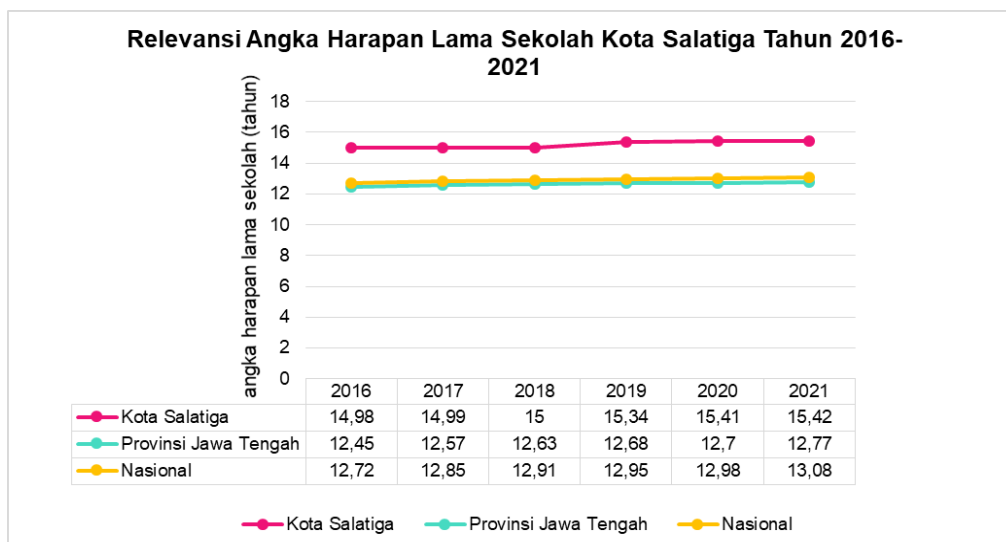
catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.69 Efektivitas Angka Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Dari Gambar 3.70 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016-2021 capaian HLS Kota Salatiga sudah relevan dengan capaian HLS tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Terlihat pada periode waktu 6 tahun, Kota Salatiga memiliki capaian HLS di atas capaian nasional dan capaian provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa capaian peningkatan HLS Kota Salatiga memiliki kontribusi positif pada peningkatan capaian HLS Nasional, maka Kebijakan Pendidikan Kota Salatiga dalam upaya meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah telah sinkron dengan kebijakan pendidikan Nasional.



catatan: data yang digunakan menggunakan data BPS agar selaras dengan Provinsi dan Kab/Kota lain sebagai pembandingan

Gambar 3.70 Relevansi Angka Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

3.6.2. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Pendidikan

Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi pendidikan, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan bidang pendidikan yang membuat indikator angka partisipasi kasar (APK) tiap jenjang pendidikan, Angka partisipasi murni (APM) tiap jenjang pendidikan dan Harapan lama sekolah (HLS) (Tabel 3.10). Sebagian besar indikator bidang pendidikan yang belum tercapai yaitu pada kategori SMP/MTs/Paket B, hal ini dikarenakan selama kurun waktu 6 tahun, partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan SMP dan persentase anak pada kelompok usia 13-15 tahun menunjukkan angka negatif. Maka dari itu, program wajib belajar 12 tahun di Kota Salatiga perlu ditingkatkan mengingat porsi anak yang bersekolah di jenjang SMP menunjukkan angka tidak tepat waktu, disamping harapan lama sekolah Kota Salatiga telah mencapai kondisi sangat baik dengan capaian positif.

Tabel 3.10 Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Pendidikan

No.	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Lebih baik	Fluktuatif dan cenderung menurun	Tidak Efektif	Tidak Relevan
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Lebih rendah	Cenderung naik, namun melambat	Tidak efektif	Tidak Relevan
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	Lebih baik (no. 1 Provinsi)	Cenderung menurun dan fluktuatif	Efektif	Relevan

No.	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Lebih baik	Cenderung naik namun fluktuatif	Tidak Efektif	Relevan
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Lebih rendah	Cenderung naik, namun melambat	Tidak Efektif	Tidak Relevan
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Lebih baik	Cenderung meningkat	Efektif	Relevan
7.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lebih baik (no. 1 Provinsi)	Cenderung naik, namun melambat	Efektif	Relevan

3.7. ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN INFRASTRUKTUR DASAR

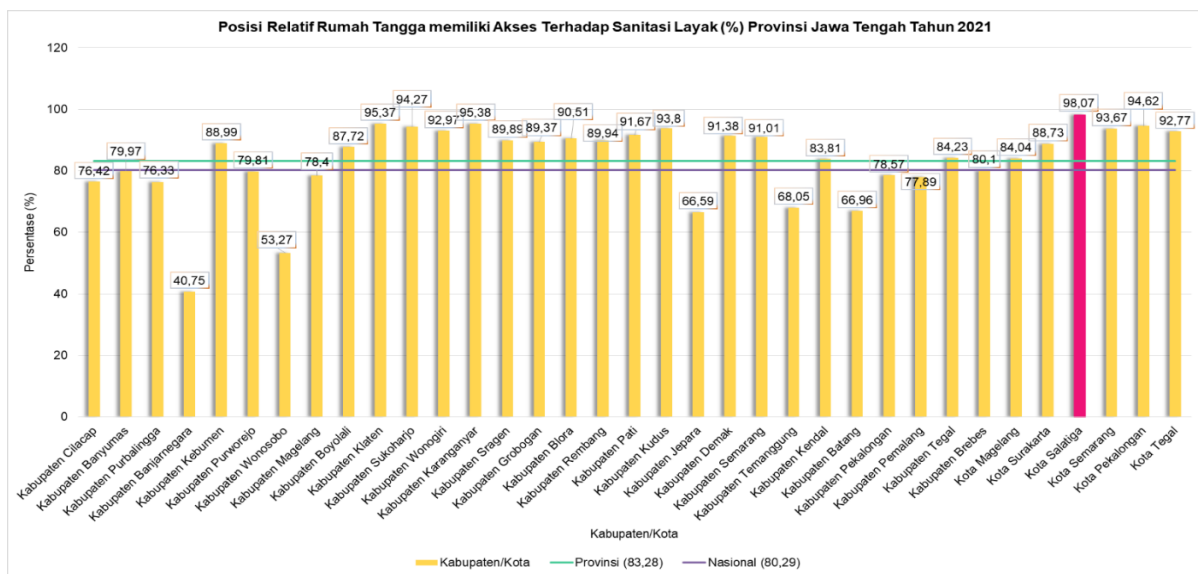
3.7.1. Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Infrastruktur Dasar

3.7.1.1. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%)

Sanitasi masih menjadi permasalahan, terutama di permukiman padat yang belum memiliki sanitasi tidak layak dan masih terdapatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang belum terselesaikan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berikut ini dijelaskan posisi relatif, perkembangan *time series*, efektivitas dan relevansi Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional.

A. Posisi Relatif

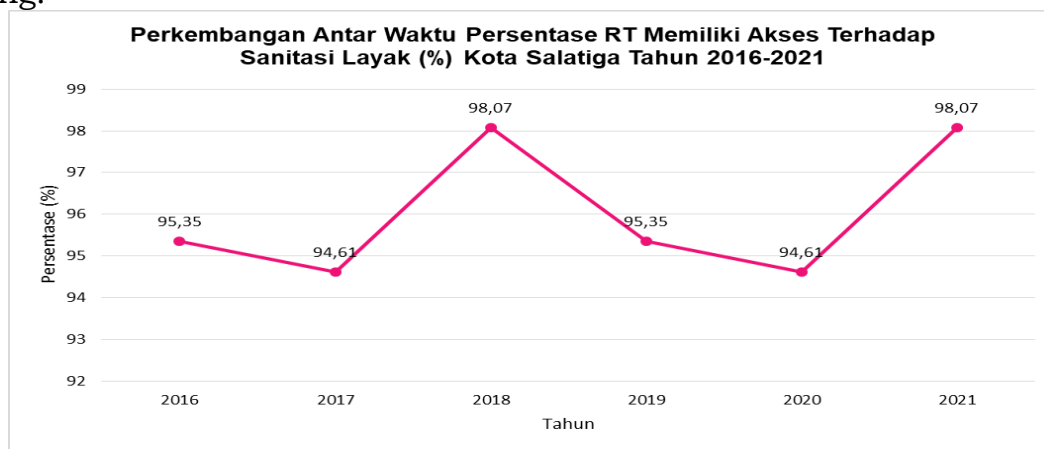
Berdasarkan grafik posisi relatif Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (%) Kota Salatiga menunjukkan sanitasi layak dengan urutan 1 dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 98,57%. Angka tersebut berada diatas persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di tingkat nasional dan provinsi. Bila dibandingkan dengan kabupaten di sekitar Kota Salatiga, selisih persentase 7,96% dengan Kabupaten Semarang dan selisih jauh dengan Kabupaten Boyolali dengan persentase 78,5%. Oleh karena itu, dengan capaian persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak tertinggi dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, Kota Salatiga terindikasi telah mewujudkan sarana dan prasarana perumahan, permukiman dan sanitasi perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Berikut ini merupakan grafik posisi relatif akses terhadap sanitasi layak Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat nasional (Gambar 3.71).



Gambar 3.71 Posisi Relatif Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
Sumber : BPS Nasional, 2022

B. Perkembangan Time Series

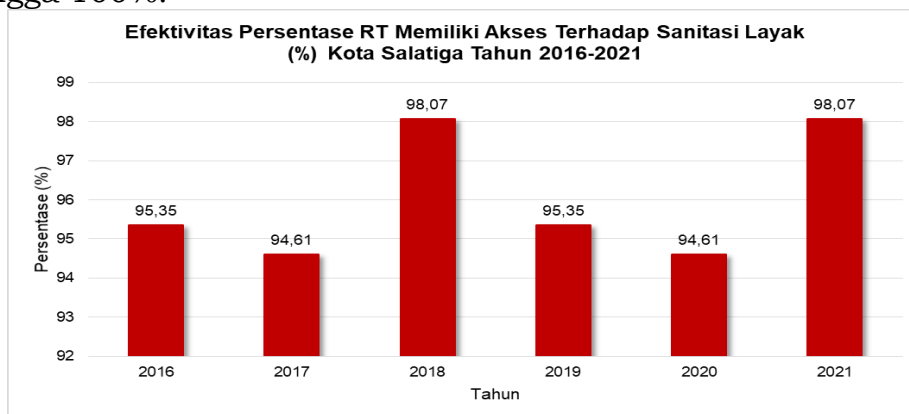
Gambar 3.72 menunjukkan perkembangan antar waktu persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak pada periode waktu 6 tahun, menunjukkan tren ketidakstabilan atau fluktuatif. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2016-2017, akses sanitasi layak Kota Salatiga menurun hingga 0,74%. Namun, meningkat di tahun 2018 secara signifikan, dan kembali berangsur-angsur menurun di tahun 2019-2020. Meski dalam kurun waktu dua tahun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak turun hingga 3,46% dari tahun 2018 hingga tahun 2020, Kota Salatiga kembali meningkatkan akses sanitasi layak kepada masyarakat sehingga di tahun 2021 dapat tercapai angka 98,07%. Konsistensi Pemerintah Kota Salatiga perlu ditingkatkan untuk dapat memfasilitasi sanitasi layak kepada masyarakat, sehingga dapat melanjutkan kebijakan yang sudah ada dan membuat program baru di masa yang akan datang.



Gambar 3.72 Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

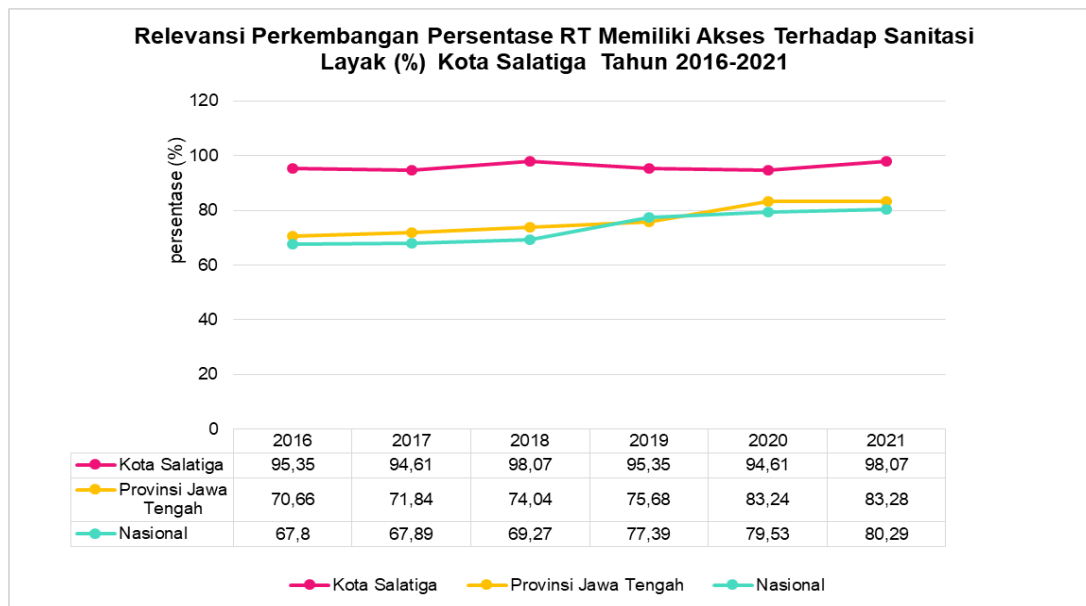
Berdasarkan perkembangan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kota Salatiga pada kurun waktu 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak memiliki tren yang cenderung naik pada tahun 2020-2021 (Gambar 3.73). Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi kepada semua pihak pemangku kebijakan dalam meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Program urusan pekerjaan umum di tingkat Kota Salatiga bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota. Berdasarkan target dan sasaran Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2022, Kota Salatiga menargetkan persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak hingga 100%.



Gambar 3.73 Efektivitas Persentase RT Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kota Salatiga Tahun 2016-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Analisis relevansi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung naik, namun melambat. Persentase tersebut diikuti oleh capaian Kota Salatiga dengan persentase capaian tertinggi di tahun 2021 yaitu 98,07%. Oleh karena itu, terdapat relevansi kebijakan antara Pemerintah Kota Salatiga dengan tingkat provinsi dan nasional yaitu pada kurun waktu 6 tahun. Pada periode tersebut persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kota Salatiga mengalami kenaikan sehingga terdapat kontribusi Kota Salatiga untuk pembangunan pelayanan dasar pada periode waktu tersebut. Dengan adanya relevansi dan sinkronisasi capaian di tingkat nasional dan program yang ada di Kota Salatiga maka Kota Salatiga memberikan nilai positif untuk peningkatan akses terhadap sanitasi layak. Lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 3.74.



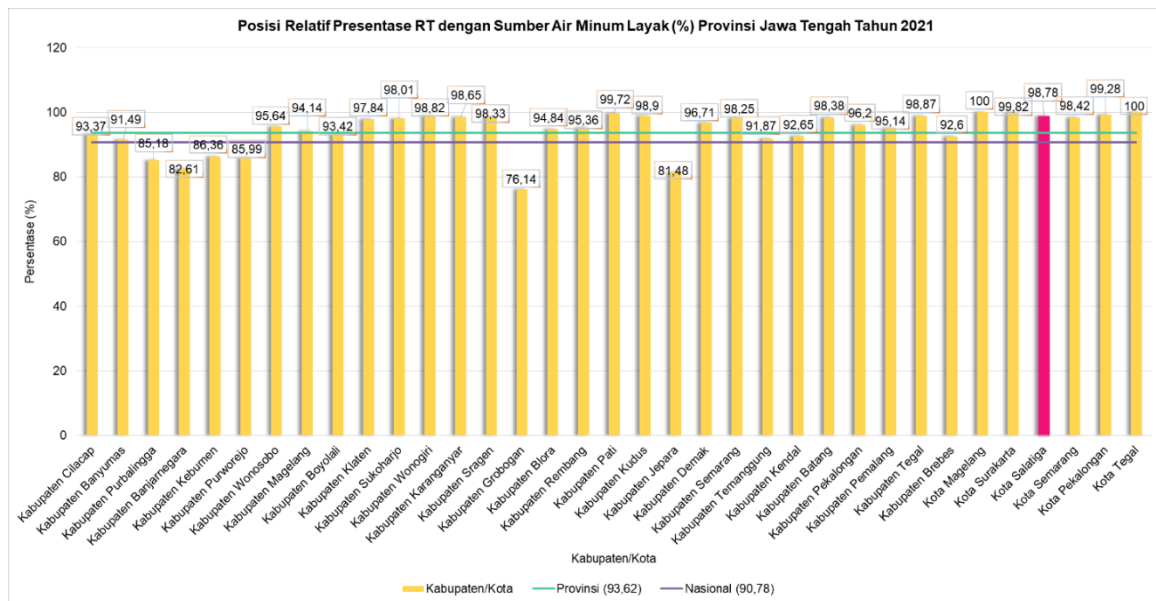
Gambar 3.74 Relevansi Perkembangan Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2018
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

3.7.1.2. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%)

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu pada konsep terbaru tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Adapun konsep sumber air minum layak jika sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019. Berikut ini kondisi Kota Salatiga berdasarkan RT dengan sumber air minum layak

A. Posisi Relatif

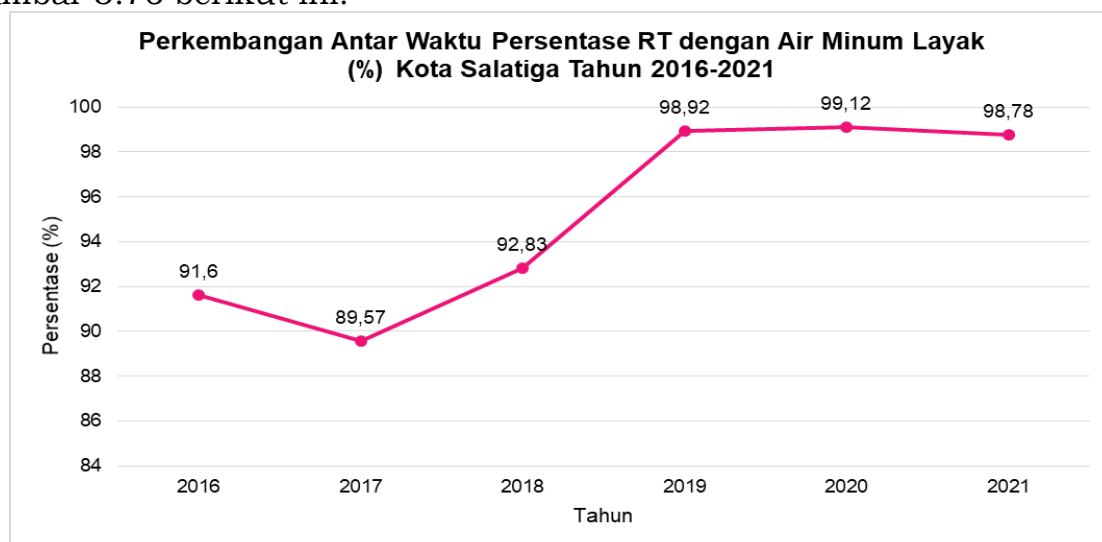
Berdasarkan posisi relatif persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak (%) Kota Salatiga berada di atas capaian provinsi dan nasional. Di tingkat nasional, persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak sebesar 90,78%, artinya selisih 8,0% dari Kota Salatiga. Adapun di tingkat provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki urutan keempat terbaik setelah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pati, Kabupaten Tegal. Di tingkat inter-regional, Kota Salatiga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang juga memiliki selisih tidak jauh yaitu hanya 0,53% di bawah capaian Kota Salatiga. Sementara itu, Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali yang secara kewilayahan relatif dekat dengan Kota Salatiga memiliki capaian rumah tangga dengan sumber air minum layak lebih rendah (Gambar 3.75).



Gambar 3.75 Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 Sumber : BPS Kota Salatiga, Tahun 2022

B. Perkembangan *time series*

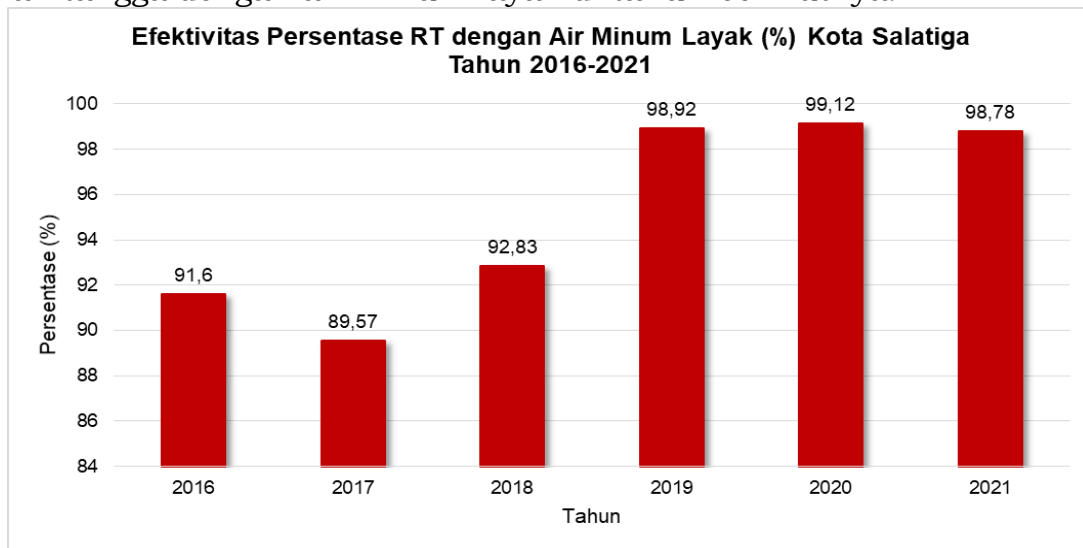
Selama periode waktu 2016 hingga 2021, kondisi rumah tangga dengan air minum layak di Kota Salatiga memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Adapun ketercapaian air minum layak di Tahun 2017 mengalami penurunan yang semula 91,6% di tahun 2016 menjadi 89,57% di tahun 2017, tetapi Pemerintah Kota Salatiga dapat meningkatkan fasilitas akses air minum layak kepada penduduknya yang dibuktikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 cenderung meningkat. Akan tetapi, kondisi akses sumber air minum layak di Kota Salatiga kembali menurun hingga 0,38% di Tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan, namun capaian Kota Salatiga masih berada pada kondisi baik. Secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 3.76 berikut ini.



Gambar 3.76 Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021
 Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

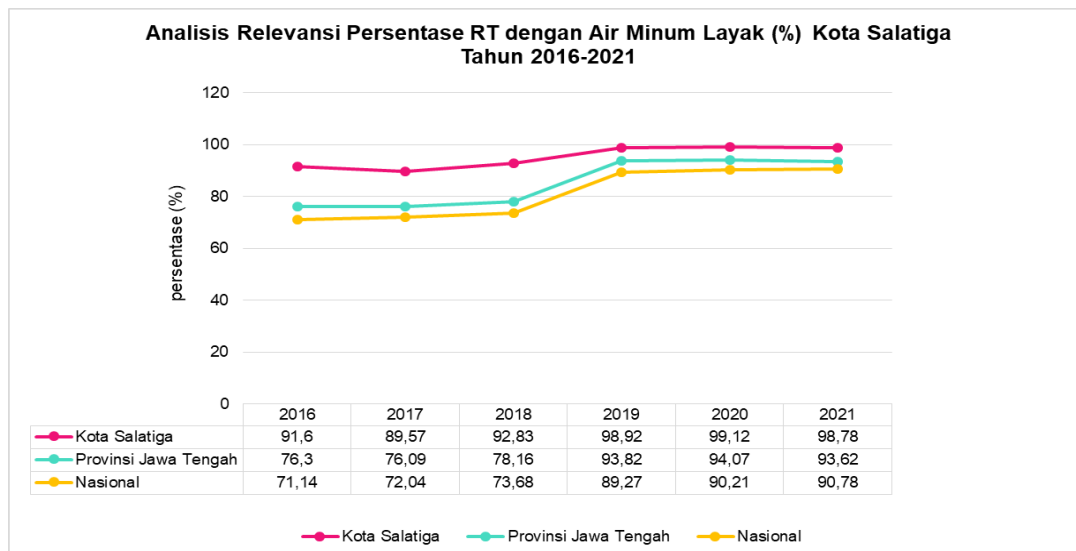
Analisis efektivitas program dan kegiatan terkait akses air minum layak dapat diidentifikasi dari perkembangan persentase rumah tangga dengan air minum layak di Kota Salatiga yang menunjukkan kecenderungan naik, namun lambat (Gambar 3.77). Program Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Salatiga tahun 2022 yaitu adanya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase rumah tangga dengan akses air minum layak. Oleh karena itu, program tersebut perlu ditingkatkan agar dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kembali persentase capaian rumah tangga dengan air minum layak di tahun berikutnya.



Gambar 3.77 Efektivitas Persentase RT dengan Air Minum Layak Kota Salatiga Tahun 2016-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Pada grafik analisis relevansi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa ada kebijakan yang relevan antara Pemerintah Kota Salatiga dengan tingkat provinsi dan nasional yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada periode tersebut, persentase rumah tangga dengan air minum layak Kota Salatiga terus mengalami peningkatan diikuti dengan capaian di tingkat nasional dan provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Kota Salatiga pada kurun waktu 6 tahun telah cukup relevan dan sinkron dengan capaian nasional dan program yang ada di Kota Salatiga telah berkontribusi untuk pembangunan nasional. Berikut ini merupakan analisis relevansi persentase rumah tangga dengan air minum layak di tingkat Kota Salatiga, Provinsi dan Nasional pada periode waktu 6 tahun (Gambar 3.78).



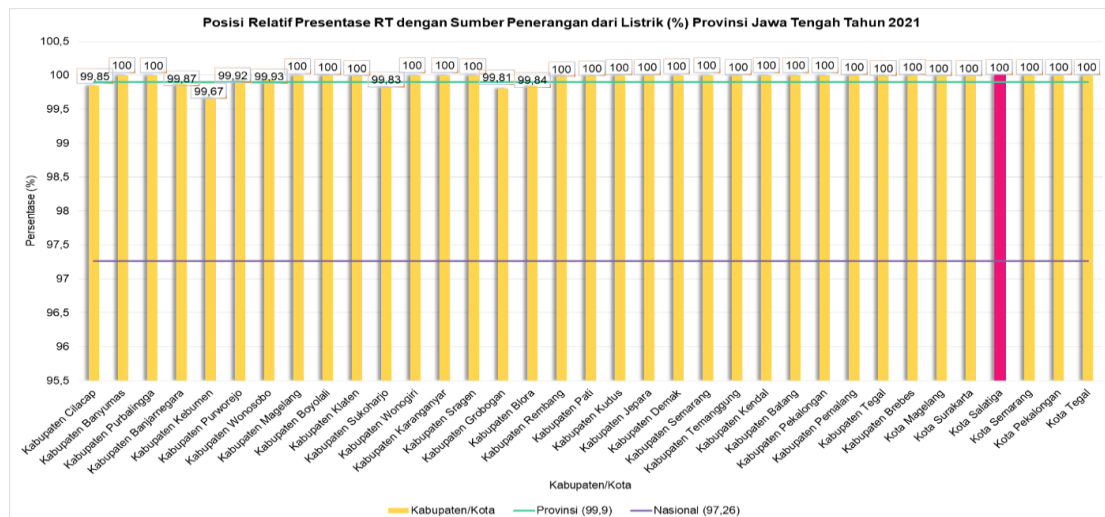
Gambar 3.78 Analisis Relevansi Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kota Salatiga Tahun 2016-2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

3.7.1.3. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%)

Sumber penerangan rumah tangga merupakan kebutuhan vital dari perumahan. Bahkan akses sumber penerangan berupa indikator elektrifikasi menjadi salah satu indikator kemajuan suatu wilayah. Sumber penerangan yang berkelanjutan memiliki kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas hidup penduduk. Adanya fungsi sumber penerangan tidak hanya berfungsi untuk penerangan atau pencahayaan saja, namun berkaitan dengan produktivitas perekonomian rumah tangga. Adapun berikut ini kondisi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terkait RT dengan sumber penerangan dari listrik

A. Posisi Relatif

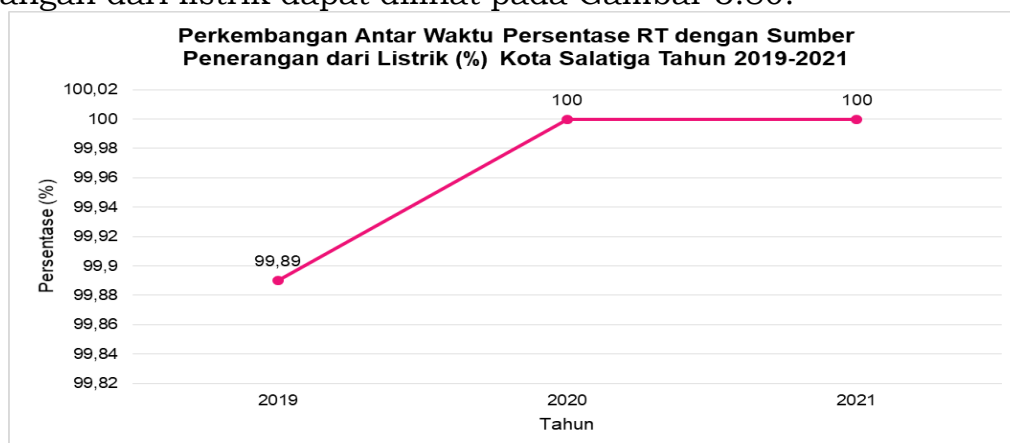
Berdasarkan posisi relatif persentase rumah tangga dan sumber penerangan dari listrik (%) Kota Salatiga Tahun 2021 menunjukkan angka ketercapaian 100% angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan capaian tingkat nasional sebanyak 97,26%. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berkontribusi positif untuk peningkatan capaian persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik PLN maupun listrik Non PLN di tahun 2021. Dari rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah, hanya 8 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang angkanya berada di bawah capaian provinsi Jawa Tengah, namun dari level nasional menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah telah berkontribusi positif atau berada di atas garis capaian nasional. Artinya akses sumber penerangan dari Listrik di Provinsi Jawa Tengah sangat baik atau sebagian besar penduduknya telah memiliki sumber penerangan baik dari PLN maupun non PLN (Gambar 3.79).



Gambar 3.79 Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

B. Perkembangan *time series*

Rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik (%) Kota Salatiga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa perkembangan antar waktu cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, ketercapaian rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik berada pada 99,89%. Artinya ada 1,21% rumah tangga di Kota Salatiga tidak menggunakan sumber penerangan listrik PLN dan/atau non PLN sebagai penerangan utama. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan tahun 2021, Kota Salatiga telah meningkatkan akses sumber penerangan dari listrik untuk warganya, sehingga telah mencapai nilai 100%. Secara lebih rinci, perkembangan antar waktu persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik dapat dilihat pada Gambar 3.80.

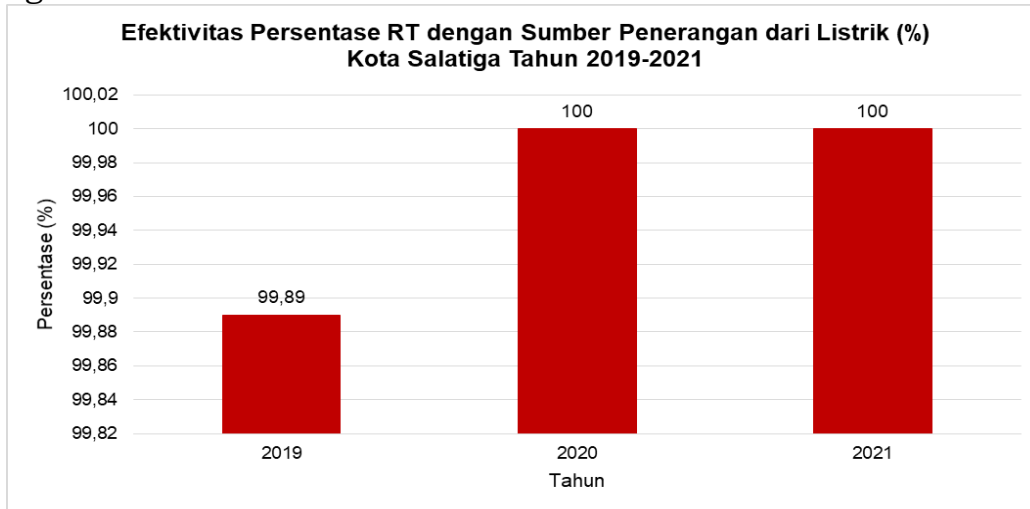


Gambar 3.80 Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Kota Salatiga Tahun 2019-2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Berdasarkan grafik analisis efektivitas persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik Kota Salatiga (Gambar 3.81) menunjukkan tren cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program penyediaan

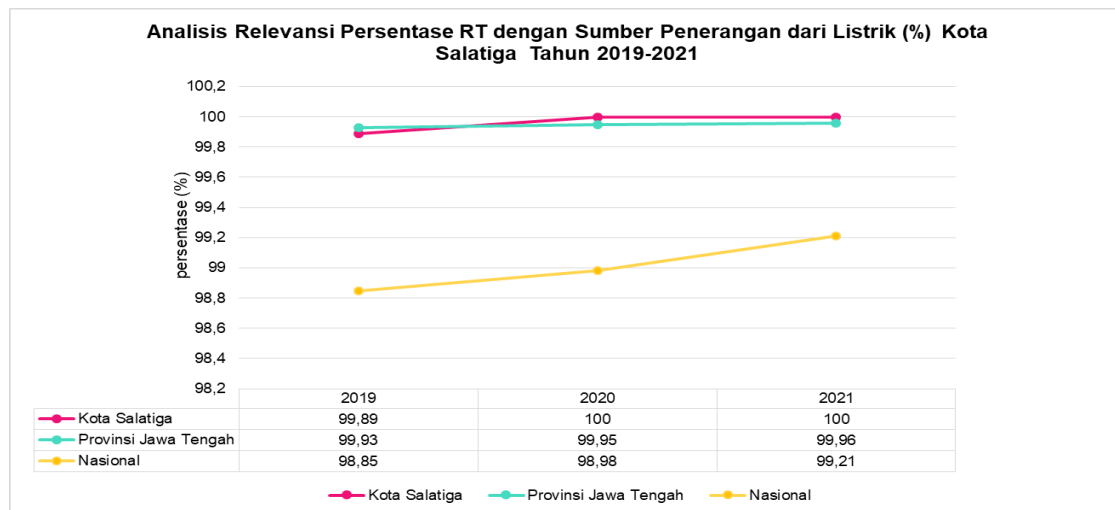
komponen instalasi listrik dan penyediaan jasa sumber daya listrik cukup efektif untuk peningkatan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik. Adapun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2017-2022, dimensi pembangunan sektor unggulan salah satunya kedaulatan energi dan ketenagalistrikan.



Gambar 3.81 Efektivitas Persentase RT dengan Sumber Penerangan dari Listrik Kota Salatiga Tahun 2019-2021
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Berdasarkan grafik analisis relevansi perkembangan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik (%) Kota Salatiga tahun 2019-2021 memiliki kecenderungan yang kurang kurang relevan pada capaian provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019, namun capaian cenderung relevan pada tahun 2020-2021, baik dengan capaian nasional maupun provinsi. Hal ini karena capaian rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik Kota Salatiga tahun 2019 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, di tingkat nasional, capaian Kota Salatiga pada periode 2019-2021 berada di atas garis capaian nasional, artinya kebijakan Pemerintah Kota Salatiga telah relevan dengan kebijakan pemerintah Pusat. Dapat disimpulkan selama tiga tahun terakhir, program yang dilakukan oleh Kota Salatiga di bidang infrastruktur dasar khususnya dalam perluasan cakupan masyarakat yang memiliki akses listrik sudah relevan atau sejalan dengan capaian nasional, sehingga Kota Salatiga ikut serta mendorong capaian pembangunan nasional di bidang kelistrikan dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut ini analisis relevansi persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik Kota Salatiga dan perbandingan perkembangan di tingkat nasional dan provinsi tahun 2019-2021 (Gambar 3.82).



Gambar 3.82 Analisis Relevansi Persentase Rumah Tangga dan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Kota Salatiga Tahun 2019-2021
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

3.7.1.4. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%)

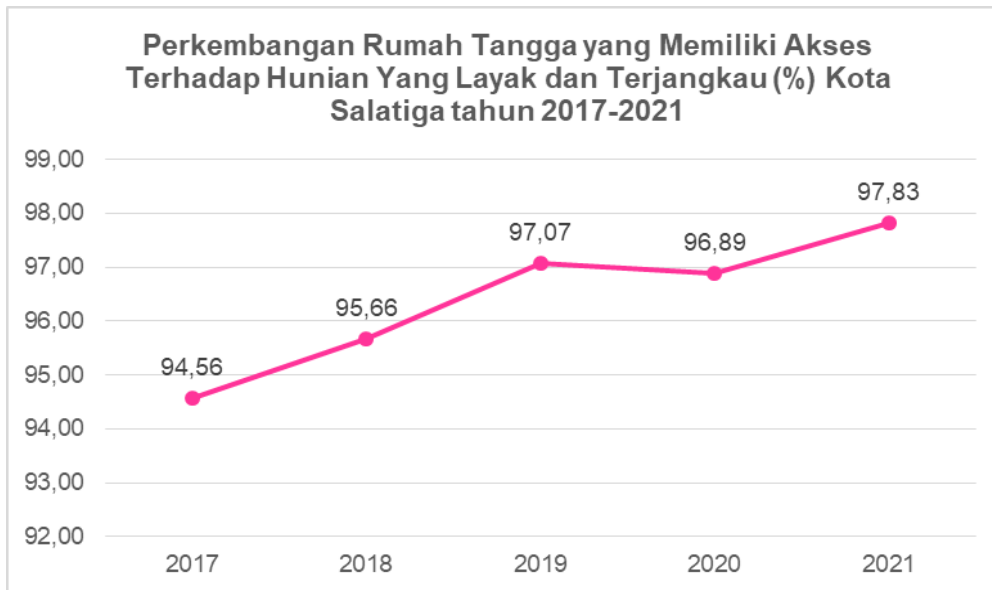
Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- (1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (sufficient living space)
- (2) memiliki akses terhadap air minum layak
- (3) memiliki akses terhadap sanitasi layak
- (4) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/ vinyl/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

Berikut ini lebih jelas persentase rumah tangga memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kota Salatiga.

A. Perkembangan *time series*

Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) tahun 2017 – 2021 menunjukkan bahwa pada periode perkembangan antar waktu tersebut mengalami kecenderungan peningkatan, walaupun terdapat kondisi penurunan pada periode 2019-2020. Tahun 2020 persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau mengalami penurunan sebesar 0,18% menjadi 96,89%. Tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,94% menjadi 97,83%.



Gambar 3.83 Perkembangan Antar Waktu RT Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kota Salatiga
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

B. Efektivitas

Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) tahun 2017 – 2021 menunjukkan bahwa pada periode perkembangan antar waktu tersebut mengalami kecenderungan peningkatan, walaupun terdapat kondisi penurunan pada periode 2019-2020. Tahun 2020 persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau mengalami penurunan sebesar 0,18% menjadi 96,89%. Tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,94% menjadi 97,83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan hunian yang layak dan terjangkau sudah sangat efektif.



Gambar 3.84 Efektivitas RT Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kota Salatiga
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Relevansi

Berdasarkan grafik analisis relevansi perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) Kota Salatiga, provinsi, dan nasional tahun 2017 – 2021 menunjukkan kecenderungan yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dilakukan oleh Kota Salatiga bidang infrastruktur dasar khususnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sudah relevan/sejalan dan sinergi dengan capaian nasional dan provinsi serta turut mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak.



Gambar 3.85 Relevansi RT Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

3.7.2. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Infrastruktur Dasar

Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi infrastruktur dasar, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan non konsumsi bidang infrastruktur dasar yang membuat indikator rumah layak huni (Tabel 3.11). Sebagian besar indikator bidang infrastruktur dasar telah relatif baik dilihat dari posisi capaian di tingkat provinsi dan nasional, perkembangan waktu, efektivitas program dan relevansinya. Namun, dari indikator tersebut, persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak memiliki perkembangan waktu yang cenderung fluktuatif atau ada ketidakstabilan persentase penduduk yang dapat mengakses sanitasi layak. Untuk tetap mempertahankan kestabilan capaian indikator bidang infrastruktur dasar, pemerintah perlu tetap meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam mendukung pertumbuhan wilayah di Kota Salatiga secara merata.

Tabel 3.11 Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang infrastruktur Dasar

No.	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1.	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%)	Lebih tinggi dari nasional dan provinsi Jawa Tengah (No. 1 se Provinsi)	Cenderung fluktuatif atau tidak stabil	Efektif	Relevan
2.	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak (%)	Lebih tinggi dari nasional dan provinsi Jawa Tengah (No. 4 se Provinsi)	Cenderung meningkat	Efektif	Relevan
3.	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%)	Lebih tinggi dari nasional dan provinsi Jawa Tengah	Cenderung meningkat	Efektif	Relevan
4.	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%)	Lebih tinggi dari nasional dan provinsi Jawa Tengah	Cenderung meningkat	Efektif	Relevan

3.8. ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN

3.8.1. Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Ketahanan Pangan

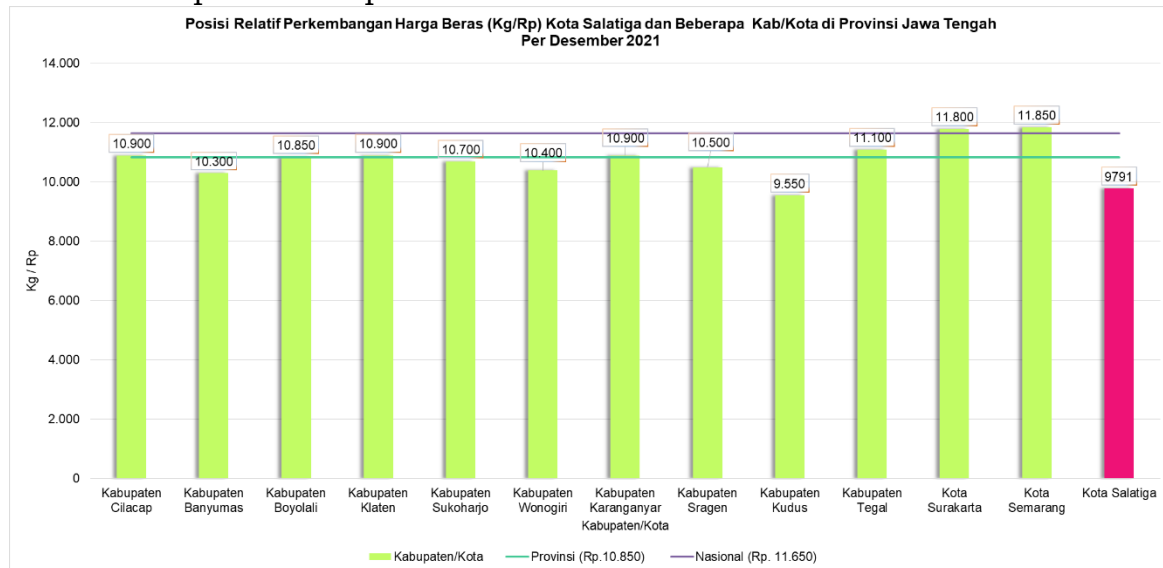
3.8.1.1. Perkembangan Harga Beras

Perkembangan harga beras di Indonesia relatif tidak stabil. Kenaikan dan penurunan harga dipengaruhi oleh harga secara umum atau inflasi. Perkembangan harga beras di Indonesia dan di Kota Salatiga secara khusus sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi beras, di sisi lain adanya konversi lahan pertanian menjadi permukiman atau industri lain menyebabkan luas lahan pertanian akan menjadi berkurang. Hal ini tentunya akan mempengaruhi produktivitas padi. Produktivitas padi yang berkurang akan mempengaruhi stok beras dan harga beras. Adapun kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga beras akan berdampak terhadap upaya untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah, sebab kenaikan harga beras memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyumbang inflasi.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan Gambar 3.86 posisi relatif perkembangan harga beras (Kg/Rp) Kota Salatiga per Desember 2021 menunjukkan bahwa perkembangan harga beras Kota Salatiga berada di bawah pasaran harga beras tingkat Nasional yaitu sebesar Rp9.791,-. Artinya harga beras di Kota Salatiga lebih rendah dibandingkan harga beras pada tingkat nasional sebesar Rp11.850,-. Dibandingkan dengan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menunjukkan harga beras di Kota Salatiga paling rendah setelah Kabupaten Kudus sebesar Rp9500,-. Harga beras paling tinggi yaitu di Kota Semarang yaitu sebesar Rp11.850,- hal ini mengingat Kota

Semarang merupakan ibu kota Provinsi yang mana dari segi jumlah penduduk dan perkembangan wilayahnya lebih pesat dibandingkan Kota Salatiga. Harga beras di Kota Salatiga menunjukkan harga pada pasar tradisional yaitu di Pasar Rejosari, Pasar Blauran dan Pasar Raya. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 3.86 berikut ini.

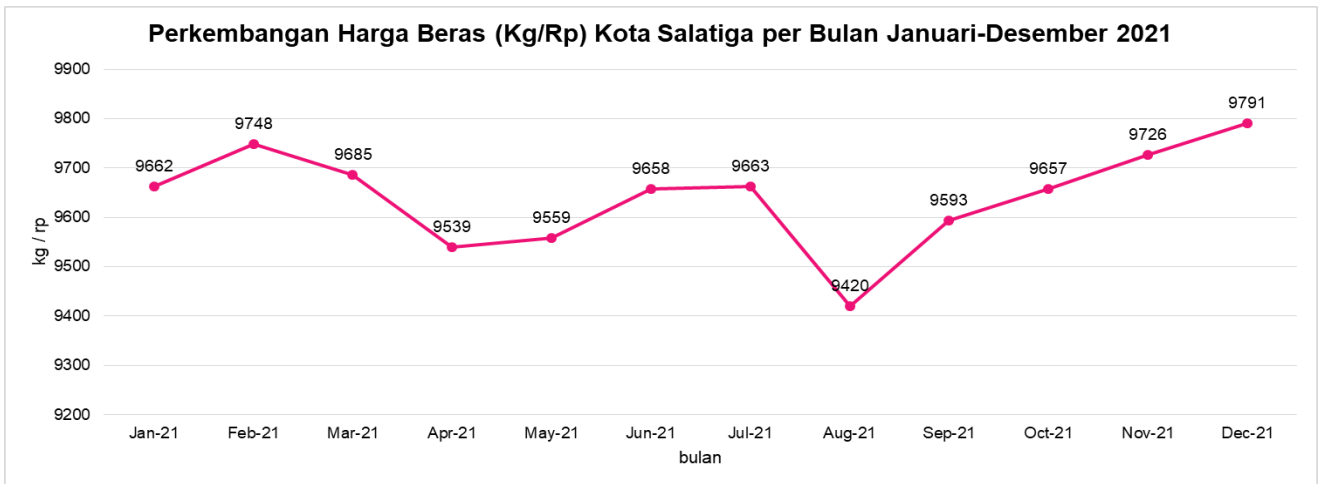


Gambar 3.86 Posisi Relatif Perkembangan Harga Beras (Kg/Rp) Kota Salatiga dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah per Desember 2021

Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

B. Perkembangan *time series*

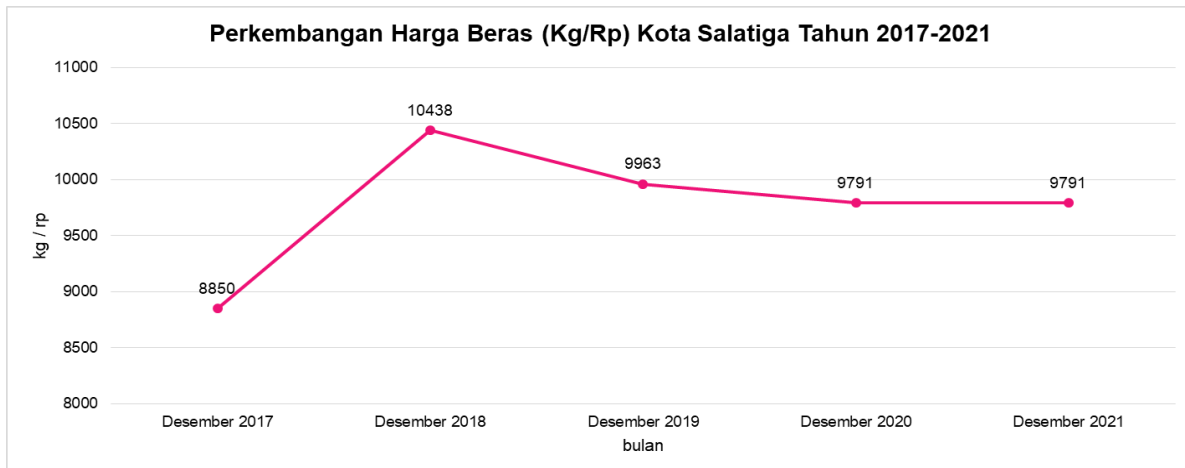
Berdasarkan grafik perkembangan per bulan pada tahun 2021, harga beras di Kota Salatiga cenderung mengalami ketidakstabilan. Pada bulan Januari sampai bulan Februari, harga beras mengalami kenaikan menjadi Rp9.748,-. Kemudian di bulan Maret sampai bulan April harga beras mengalami penurunan sebesar Rp9.539,- di bulan April. Adapun di bulan Mei sampai bulan Juli, harga beras mengalami kenaikan yaitu Rp9.663 pada bulan Juli. Kemudian penurunan harga beras sangat drastis di bulan Agustus hingga Rp9.420,-. Artinya pada bulan Agustus maupun pada bulan ketika harga beras turun yaitu karena ketika produksi melimpah pada musim panen yang merugikan petani. Walaupun mengalami penurunan di bulan Agustus, harga beras mengalami kenaikan kembali dari bulan September hingga Desember dan mencapai harga tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp9.791,- pada bulan Desember. Artinya harga beras mengalami kenaikan karena pada saat defisit yang merugikan konsumen sehingga harga beras akan bergejolak. Perkembangan harga beras pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.87.



Gambar 3.87 Perkembangan Harga Beras (Kg/Rp) Kota Salatiga per Bulan Januari-Desember 2021

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, 2022

Adapun perkembangan harga beras (Kg/Rp) Kota Salatiga tahun 2018-2021 menunjukkan kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp10.438,- karena adanya kenaikan harga yang dipengaruhi oleh inflasi dimana beras merupakan salah satu komoditas yang berpengaruh sangat tinggi terhadap inflasi. Adapun pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan penurunan harga beras menunjukkan hasil tarik menarik antara sisi permintaan yaitu konsumen dan sisi penawaran produsen atau petani. Gambar 3.88 menunjukkan perkembangan harga beras Kota Salatiga dalam lima tahun terakhir.



Gambar 3.88 Perkembangan Harga Beras (Kg/Rp) Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Analisis efektivitas harga beras (Kg/Rp) Kota Salatiga pada tahun 2018-2021 mengalami kecenderungan menurun walaupun pada tahun 2018 mengalami peningkatan (Gambar 3.89). Oleh karena itu, pemerintah perlu memberlakukan kebijakan pengendalian harga beras untuk melindungi petani dan konsumen. Penurunan harga beras di Kota Salatiga perlu ditinjau kembali karena adanya harga beras murah dapat menyengsarakan petani

padi dan tidak mampu mendorong sektor industri untuk bersaing di pasar. Perlunya kebijakan stabilitas harga beras di pasar domestik yang berorientasi pada peningkatan pendapatan petani.

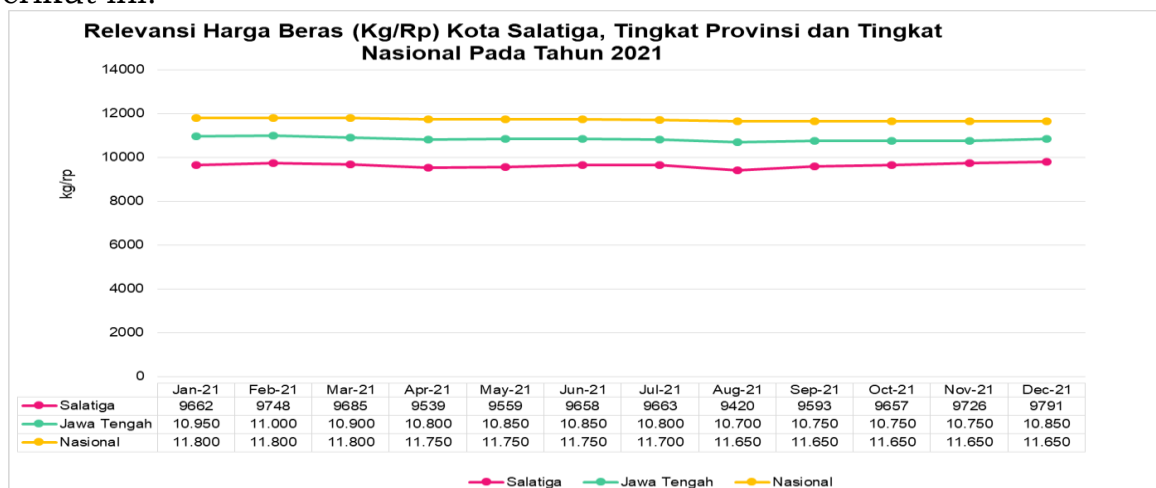


Gambar 3.89 Efektivitas Harga Beras (Kg/Rp) Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Berdasarkan grafik analisis relevansi perkembangan harga beras (kg/Rp) Kota Salatiga tahun 2021 menunjukkan perkembangan harga beras di Kota Salatiga berada di bawah harga beras di tingkat nasional dan di tingkat provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan tidak ada relevansi kebijakan untuk mengendalikan harga beras antara Pemerintah Kota Salatiga dengan tingkat nasional maupun provinsi. Secara detail, analisis relevansi harga beras Kota Salatiga dapat dilihat pada Gambar 3.90 berikut ini.



Gambar 3.90 Relevansi Harga Beras (Kg/Rp) Kota Salatiga, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Pada Tahun 2021

Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

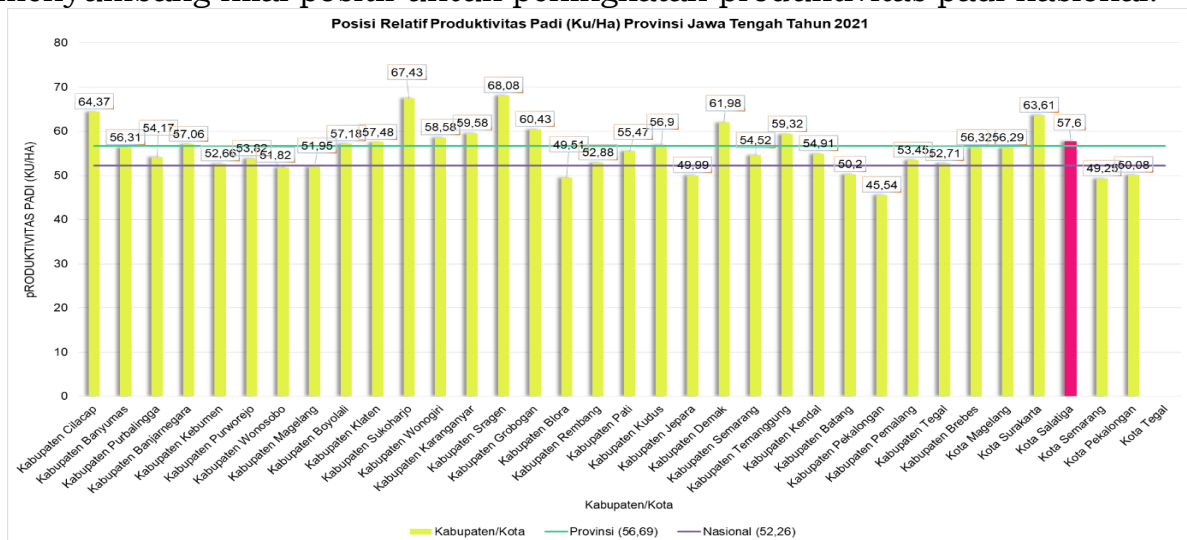
3.8.1.2. Produktivitas Padi

Sektor pertanian merupakan penunjang utama masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan Negara agraris. Penyediaan pangan bagi penduduk di Indonesia yang selalu bertambah memerlukan upaya nyata peningkatan produksi padi. Sebagian besar petani di Indonesia mengusahakan padi dengan program intensifikasi yang bertujuan untuk

meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani. Faktor yang mempengaruhi naik turunnya rata-rata produktivitas padi per hektar antara lain kesuburan tanah, pemakaian pupuk, bibit, cara bercocok tanam, jasad pengganggu dan sebagainya. Adapun aspek anomali seperti kelembaban dan curah hujan berpengaruh terhadap produksi padi. Berikut ini kondisi produktivitas padi Kota Salatiga.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan grafik posisi relatif produktivitas padi (kw/ha) Kota Salatiga Tahun 2021 (Gambar 3.91) menunjukkan bahwa produktivitas padi (kw/ha) Kota Salatiga sebesar 57,6 kuintal/hektar yang produktivitasnya relatif lebih tinggi dibandingkan pada tingkat nasional sebesar 52,26%. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berada di peringkat 9 (sembilan) dan daerah yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Selisih produktivitas padi dengan Kabupaten Semarang yaitu 2,80% lebih rendah dibandingkan Kota Salatiga. Dibandingkan dengan produktivitas padi secara nasional, di tingkat Provinsi Jawa Tengah memiliki produktivitas padi yang lebih banyak, artinya Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Salatiga telah menyumbang nilai positif untuk peningkatan produktivitas padi nasional.



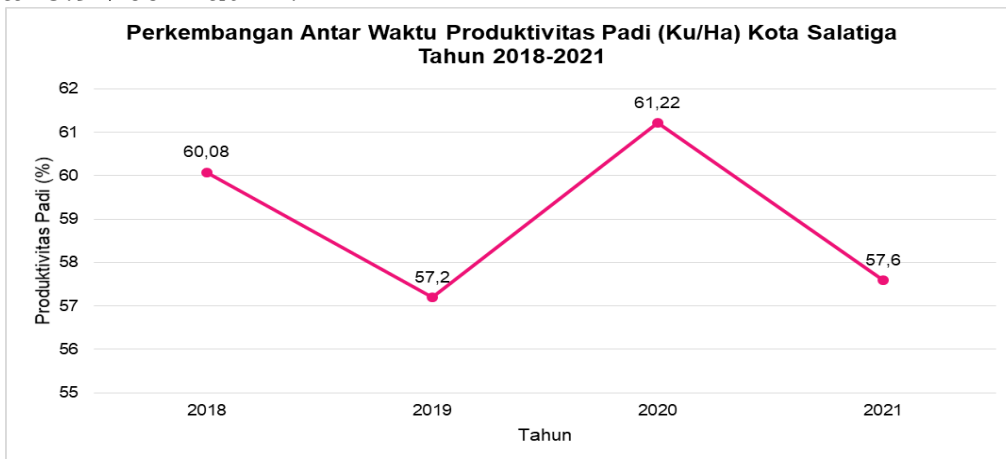
Gambar 3.91 Posisi Relatif Produktivitas Padi (kw/ha) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

B. Perkembangan *time series*

Dari grafik perkembangan antar waktu, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kota Salatiga menunjukkan perkembangan produktivitas padi secara fluktuatif atau tidak stabil. Pada periode tahun 2018 produktivitas padi Kota Salatiga berada pada nilai 60,08%, akan tetapi di tahun 2019 produktivitas padi menurun hingga 3,3 kw/ha. Walaupun demikian, di tahun 2019 ke tahun 2020, angka produktivitas padi kembali meningkat sebesar 61,22 kw/ha, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Namun, ketidakstabilan produktivitas padi kembali terjadi pada tahun 2021 yaitu penurunan produktivitas padi sebesar 57,6 kw/ha atau penurunan produktivitas padi sebesar 3,62 kw/ha. Lebih detail

perkembangan produktivitas padi di Kota Salatiga digambarkan melalui Gambar 3.92 berikut ini.

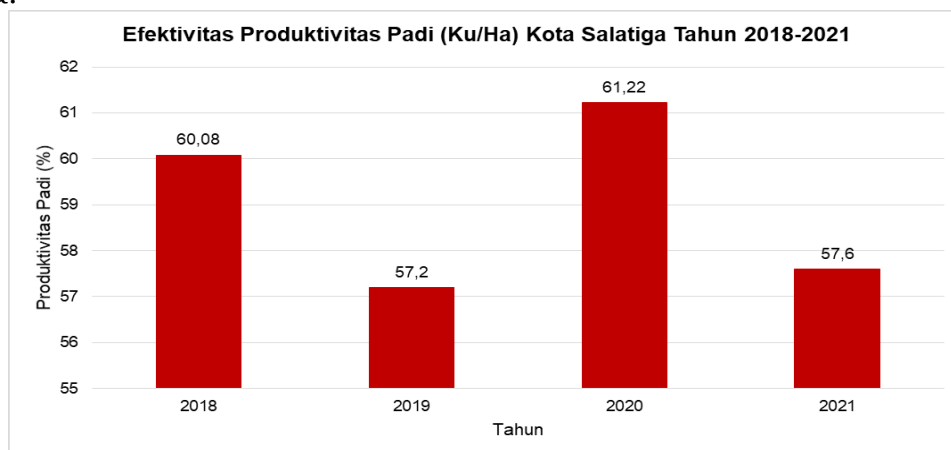


Gambar 3.92 Perkembangan Antar Waktu Produktivitas Padi (kw/ha) Kota Salatiga Tahun 2018-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

C. Efektivitas

Efektivitas intervensi perbaikan capaian produktivitas padi (kw/ha) Kota Salatiga dalam periode perkembangan waktu 4 tahun terakhir yaitu tahun 2018 hingga 2021 (Gambar 3.93) menunjukkan bahwa produktivitas padi cenderung tidak menentu karena penurunan atau peningkatan produktivitas padi yang tidak stabil dialami setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan program dan kegiatan kurang efektif saat terjadi penurunan produktivitas padi di tahun 2019 dan 2021 akibat dari penurunan investasi dan kemunduran perdagangan yang berakibat pada pendapatan riil dalam jangka panjang daerah. Adapun program dan kegiatan efektif pada tahun 2018 dan 2020 karena adanya peningkatan produktivitas padi. Peningkatan produktivitas padi dapat ditingkatkan dengan program intensifikasi oleh Pemerintah Kota Salatiga.



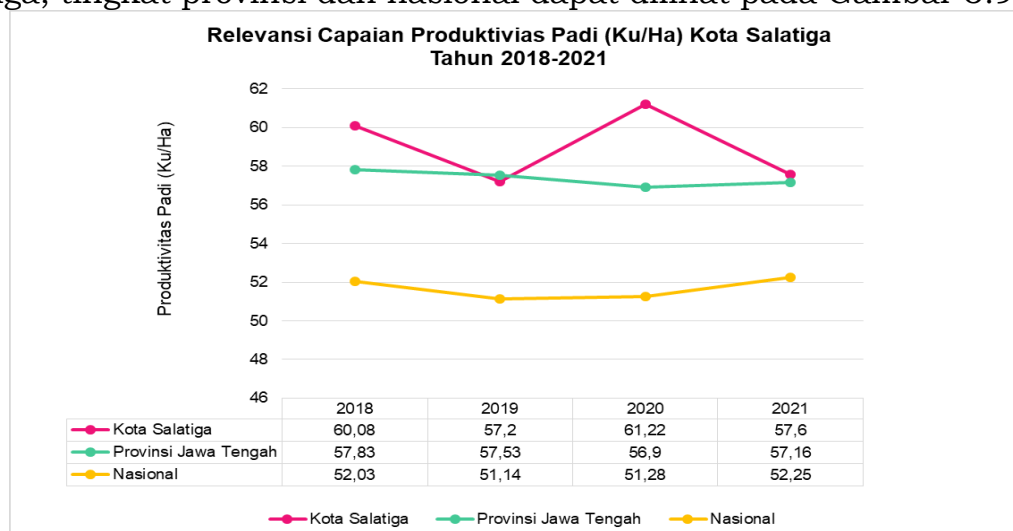
Gambar 3.93 Efektivitas Produktivitas Padi Kota Salatiga Tahun 2018-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

D. Relevansi

Capaian relevansi Produktivitas Padi (kw/ha) Kota Salatiga Tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa produktivitas padi Kota Salatiga pada tahun 2019

berada pada ambang batas rata-rata produksi padi Provinsi Jawa Tengah yaitu produktivitas padi Kota Salatiga sebesar 57,2 kw/ha sedangkan produktivitas padi Provinsi Jawa Tengah sebesar 57,32 kw/ha. Adapun di tahun 2018, 2020 dan 2021 Produktivitas padi Kota Salatiga berada di atas garis rata-rata provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional. Pada tahun 2018 produktivitas padi Kota Salatiga mengalami kenaikan diikuti oleh capaian tingkat nasional, kemudian pada tahun 2019 Produktivitas padi Kota Salatiga dan tingkat nasional mengalami hal yang sama yaitu mengalami penurunan. Pada tahun 2020 produktivitas padi Kota Salatiga dan tingkat Nasional mengalami kenaikan. Adapun di Tahun 2021, produktivitas padi Kota Salatiga mengalami penurunan sedangkan di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan program Pemerintah Kota Salatiga dalam meningkatkan produktivitas padi sudah relevan dan sinkron dengan kebijakan tingkat nasional, selain itu Pemerintah Kota Salatiga sudah berkontribusi pada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis relevansi capaian produktivitas Kota Salatiga, tingkat provinsi dan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.94.



Gambar 3.94 Relevansi Capaian Produktivitas Padi (kw/ha) Kota Salatiga Tahun 2018-2021

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

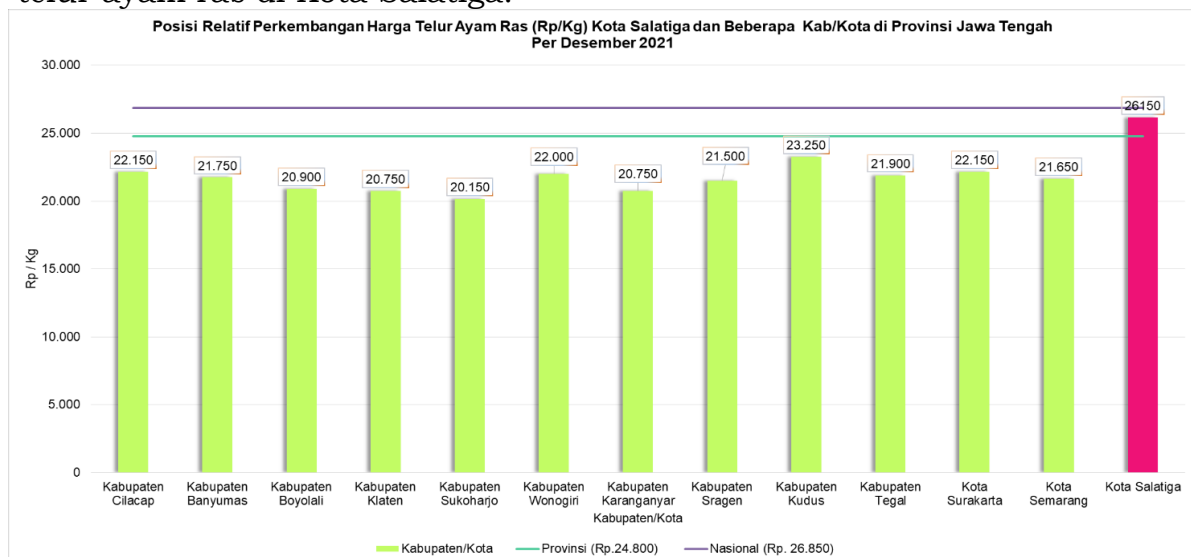
3.8.1.3. Harga Telur Ayam Ras

Telur ayam ras saat ini masih mendominasi pasar konvensional. Selama bertahun-tahun penyajian telur di pasar konvensional tidak mengalami perubahan yaitu dalam bentuk curah. Bentuk telur ayam ras spesifik yang dikemas dalam kotak plastik ataupun dikemas dengan penambahan vitamin dan mineral masih jarang terlihat di pasar konvensional. Umumnya telur ayam ras petelur dijadikan bahan industri atau komoditas ekspor, Indonesia memiliki kontribusi besar dalam konsumsi telur dari ayam ras petelur. Berikut ini posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas dan relevansi harga telur ayam ras di Kota Salatiga.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan grafik posisi relatif perkembangan harga beras (Rp/kg) pada tingkat produsen di Kota Salatiga menunjukkan bahwa harga telur

ayam ras sebesar Rp26.150/kg yang harganya lebih rendah dengan harga telur ayam ras di tingkat nasional yaitu sebesar Rp26.850/kg. Bila dibandingkan dengan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, posisi Kota Salatiga berada pada urutan nomor 1 dan berada di atas capaian harga telur ayam ras Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp24.800,-. Artinya adanya pola konsumsi masyarakat di Kota Salatiga yang cenderung tinggi berdampak pada tingginya harga telur ayam ras di Kota Salatiga. Secara lebih jelas, Gambar 3.95 berikut menjelaskan posisi relatif perkembangan harga telur ayam ras di Kota Salatiga.



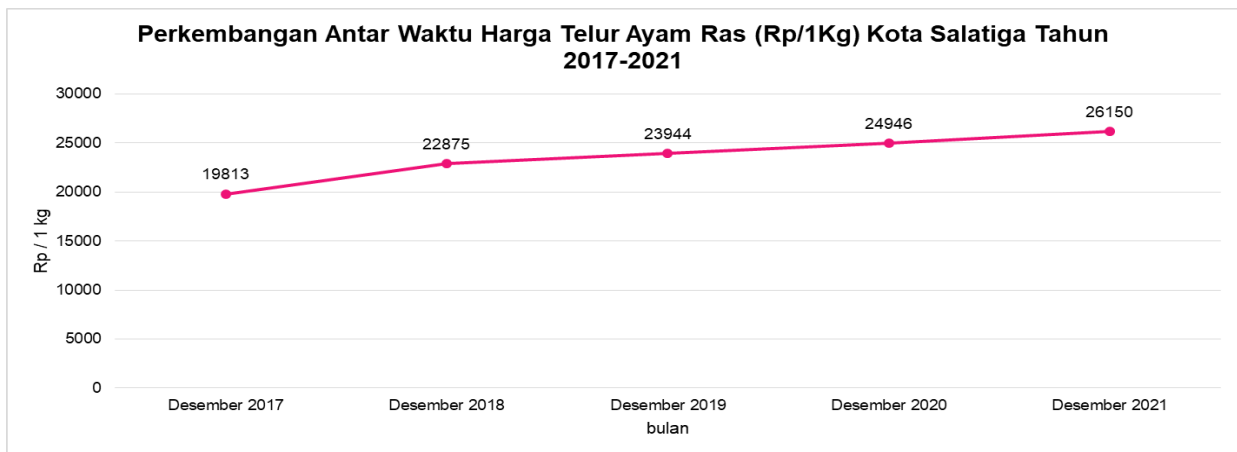
Gambar 3.95 Posisi Relatif Perkembangan Harga Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Kota Salatiga dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah per Desember 2021

Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

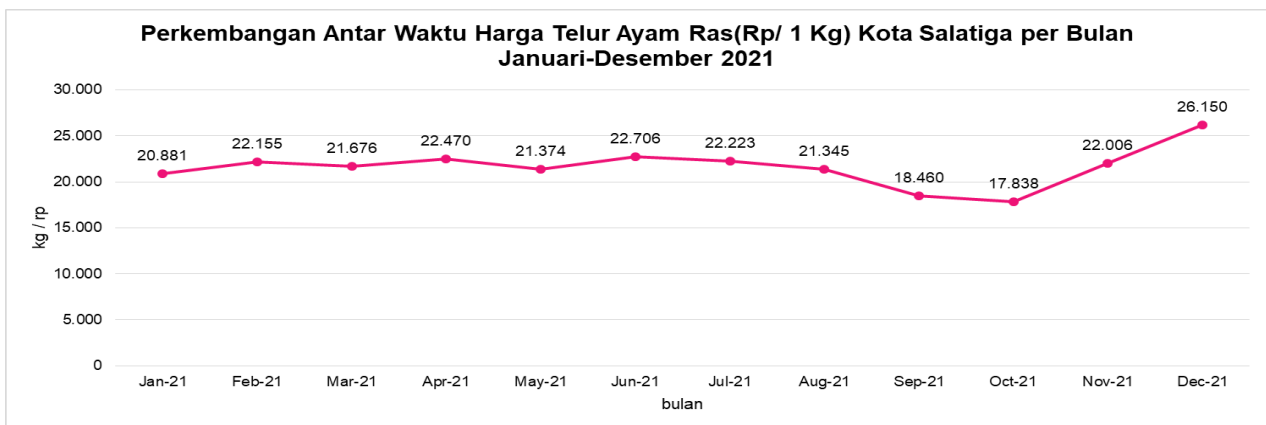
B. Perkembangan *time series*

Pada tahun 2021, perkembangan harga telur ayam di Kota Salatiga menunjukkan pada bulan Januari hingga bulan Agustus, harga telur ayam ras berkisar Rp. 20.000 hingga Rp. 22.000,-. Angka tersebut cenderung stabil. Akan tetapi, pada bulan September hingga Oktober harga ayam telur ras mengalami penurunan hingga Rp. 17.838/kg. Angka tersebut merupakan harga telur ayam ras paling rendah selama tahun 2021. Adapun di bulan November hingga Bulan Desember, harga telur ayam ras mengalami kenaikan dan mencapai angka paling tinggi pada bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp. 26.150 per kilogram. Perkembangan harga tersebut disebabkan oleh daya beli penduduk Kota Salatiga. Adapun tren ketidakstabilan harga dan cenderung mengalami kenaikan pada bulan November hingga Desember dipengaruhi oleh struktur pendapatan masyarakat, faktor sosio-kultural, serta kondisi geografi masyarakat. Berikut merupakan perkembangan antar waktu per bulan Januari – Desember 2021 (Gambar 3.96).

Adapun berdasarkan perkembangan antar waktu pada periode tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan kenaikan harga telur ayam ras hingga pada tahun 2021 sebesar Rp. 26.150 per kilogram. Angka tersebut menunjukkan angka tertinggi dalam periode waktu 4 tahun terakhir (Gambar 3.97).



Gambar 3.96 Perkembangan Antar Waktu Harga Telur Ayam Ras (Rp/ 1 Kg) Kota Salatiga per Bulan Januari-Desember 2021
 Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

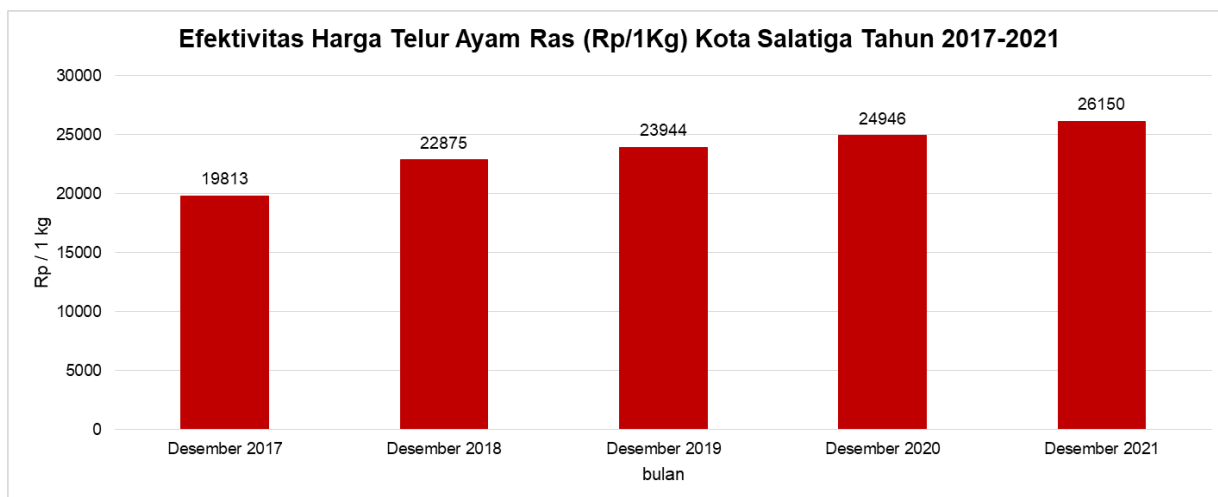


Gambar 3.97 Perkembangan Antar Waktu Harga Telur Ayam Ras (Rp/ 1 Kg) Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

C. Efektivitas

Berdasarkan analisis efektivitas harga telur ayam ras Kota Salatiga menunjukkan adanya pengaruh penawaran dan permintaan pasar. Hal yang sering terjadi yaitu apabila ada droping atau pasokan telur dalam jumlah besar di Kota Salatiga dengan harga yang lebih murah, maka harga telur ditingkat peternak Kota Salatiga menjadi jatuh dan menyebabkan kerugian bagi peternak. Adapun kenaikan harga telur ayam ras di Kota Salatiga dapat dipengaruhi oleh bibit ayam petelur yang mengalami kelangkaan tidak diikuti oleh permintaan pasar sehingga harga ayam telur cenderung naik. Maka dari itu, Pemerintah Kota Salatiga telah menjalankan kewenangan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dengan cara penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Artinya pemerintah Kota Salatiga berhak melakukan kewajiban dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen, dalam hal ini yaitu penentuan harga telur ayam ras. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.98.

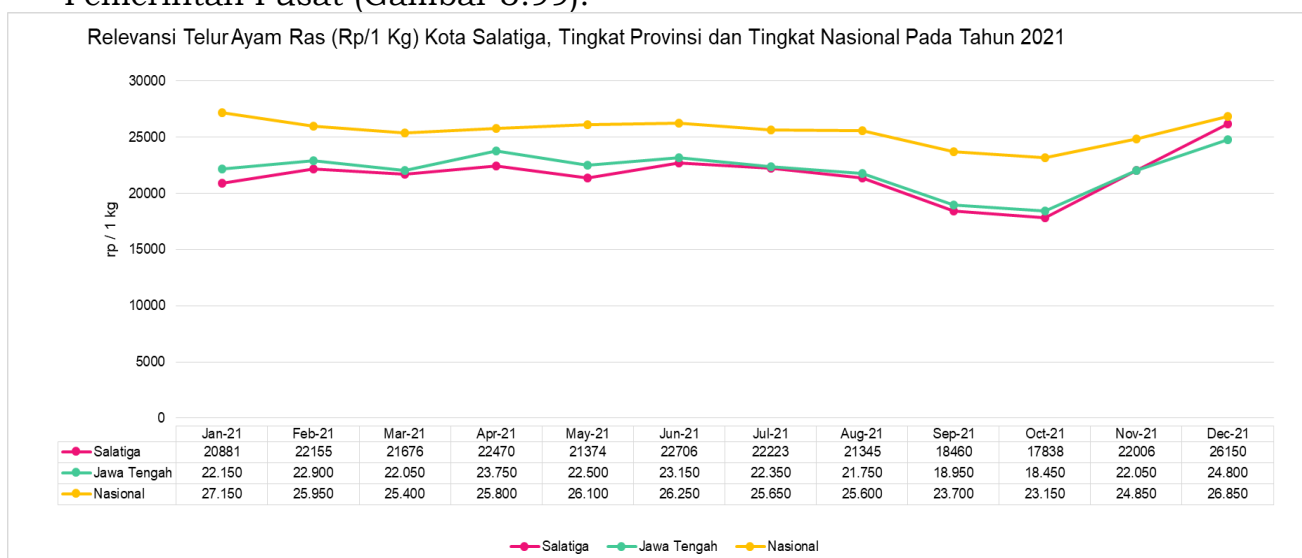


Gambar 3.98 Efektivitas Harga Telur Ayam Ras (Rp/1 Kg) Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

D. Relevansi

Berdasarkan gambar 3.99 menunjukkan bahwa belum adanya relevansi kebijakan penentuan harga telur ayam ras di tingkat nasional, tingkat provinsi dan Kota Salatiga. Di Tingkat Nasional penentuan harga telur ayam ras lebih tinggi dibandingkan dengan penentuan harga di Kota Salatiga dan Tingkat Nasional dalam kurun waktu satu tahun. Adapun capaian penentuan harga telur ayam ras di Kota Salatiga cenderung fluktuatif dan relatif relevan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun fluktuasi harga telur ayam ras terjadi pada perdagangan telur ayam ras bersifat mingguan bahkan harian, terutama yang terjadi di pasar konvensional. Adapun di bulan Oktober hingga Desember 2021, kondisi harga telur ayam ras di Kota Salatiga menunjukkan sudah relevan dengan kebijakan pemerintah pusat dan perlu meningkatkan koordinasi serta sinkronisasi antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Pemerintah Pusat (Gambar 3.99).



Gambar 3.99 Relevansi Telur Ayam Ras (Rp/1 kg) Kota Salatiga, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Pada Tahun 2021

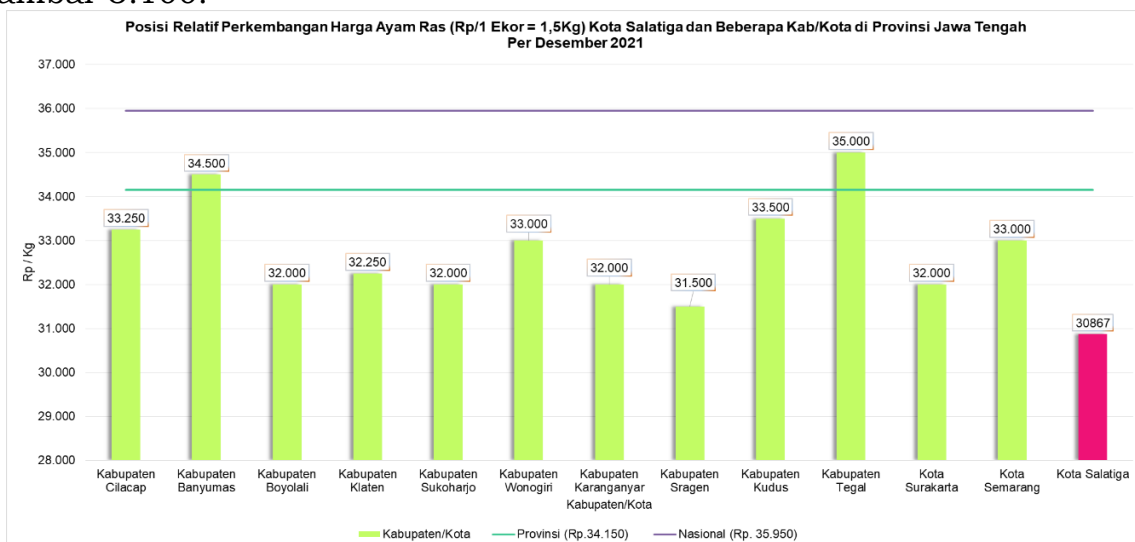
Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

3.8.1.4. Harga Ayam Ras

Salah satu sumber protein hewani dengan harga yang relatif terjangkau dan mudah diperoleh adalah daging ayam ras pedaging atau yang sering disebut sebagai ayam broiler (selanjutnya dipakai istilah ayam broiler). Selain harganya yang relatif lebih terjangkau, daging ayam broiler mudah diolah menjadi berbagai macam masakan sehingga banyak digunakan dalam rumah tangga maupun rumah makan karena dagingnya yang empuk dan tebal. Adapun harga ayam ras di Kota Salatiga dan di tingkat Provinsi Jawa Tengah serta Nasional sebagai berikut.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan gambar posisi relatif perkembangan harga ayam ras (Rp/ 1 ekor = 1,5 kilogram) di Kota Salatiga per bulan Desember 2021 menunjukkan urutan harga ayam ras paling rendah dibandingkan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Adapun terdapat selisih harga hingga mencapai Rp. 4.000 dari rata-rata harga ayam ras di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 34.150,-. Adapun di tingkat Nasional harga ayam ras sebesar 35.950,-. Artinya harga ayam ras di Kota Salatiga lebih rendah dari pada penentuan harga rata-rata di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Semakin tinggi permintaan yang ditunjukkan melalui jumlah kebutuhan daging ayam per kapita maka semakin tinggi pula harga daging ayam. Meskipun demikian, faktor sosio-kultur dan geografi memiliki pengaruh terhadap pola konsumen terhadap komoditas daging ayam ras. Berikut ini disajikan grafik terkait posisi relatif perkembangan harga ayam ras di Kota Salatiga dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah per Desember Tahun 2021 (Gambar 3.100). Lebih jelasnya ditampilkan pada Gambar 3.100.

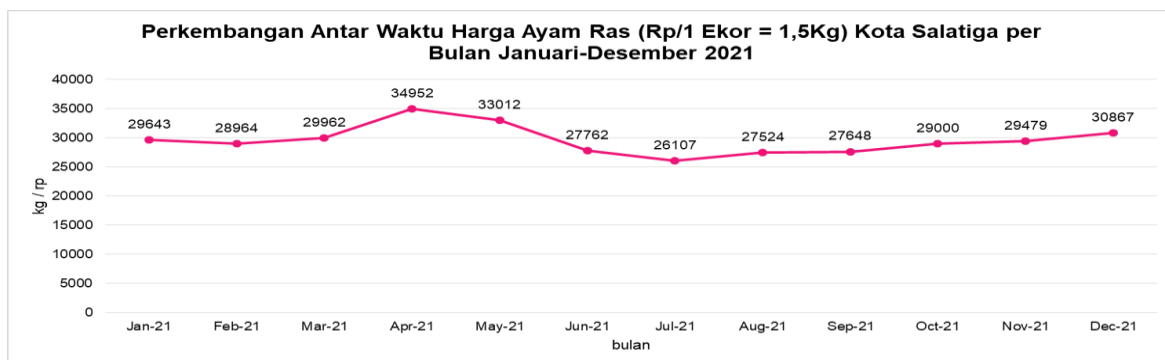


Gambar 3.100 Posisi Relatif Perkembangan Harga Ayam Ras (Rp/ 1 Ekor = 1,5 Kg) Kota Salatiga dan Beberapa Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah per Desember 2021

Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

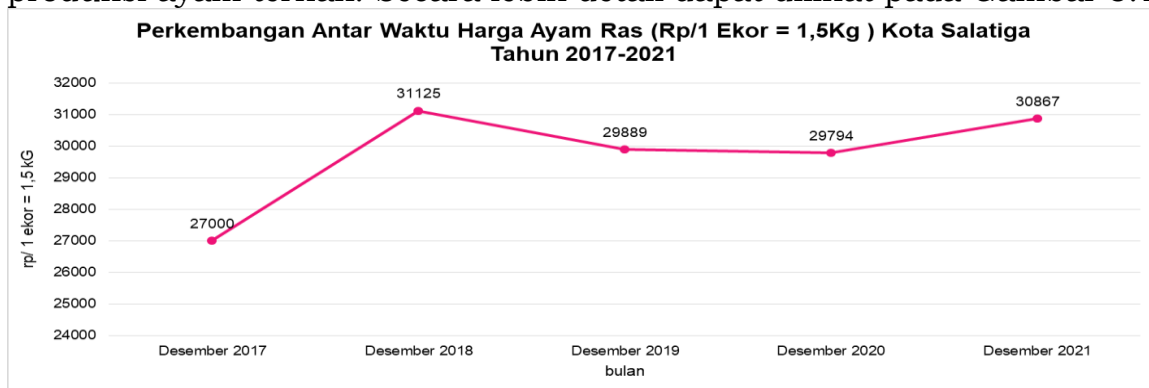
B. Perkembangan *time series*

Pada bulan Januari hingga Desember tahun 2021, harga ayam ras di Kota Salatiga cenderung stabil sekitar Rp. 29.000 per ekor. Adapun dari 12 bulan tersebut, harga daging ayam ras tertinggi berada di bulan April hingga bulan Mei tahun 2021 yaitu mencapai Rp. 34.952,- dan Rp. 33.012,-. Indikasi kenaikan harga daging ayam ras tersebut dikarenakan faktor sosio-kultural dan pola konsumsi daging ayam yang meningkat menjelang puasa, hari raya besar agama (Idul Fitri, lebaran haji, dan natal) serta liburan sekolah. Pada momentum tersebut, menunjukkan harga daging ayam ras tertinggi urutan ketiga yaitu pada bulan Desember sebesar Rp. 20.867,- dengan indikasi momentum hari raya natal. Sementara itu, di luar momentum tersebut, harga daging ayam cenderung stabil dan kembali normal. Gambar 3.101 menyajikan perkembangan antar waktu harga ayam ras Kota Salatiga per Bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2021.



Gambar 3.101 Perkembangan Antar Waktu Harga Ayam Ras (Rp/1 Ekor = 1,5 Kg) Kota Salatiga per Bulan Januari – Desember 2021
Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

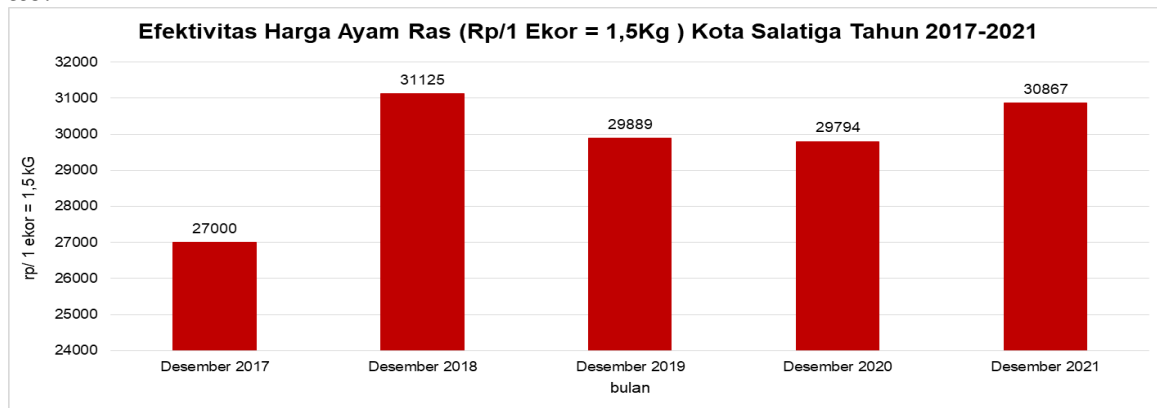
Adapun dari segi perkembangan waktu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan perkembangan harga daging ayam ras cenderung mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan harga daging ayam ras pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.31.125,- dan urutan kedua pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 30.667,-. Perkembangan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang terkait pola konsumsi pada hari-hari besar dan kondisi produksi ayam ternak. Secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 3.102.



Gambar 3.102 Perkembangan Antar Waktu Harga Ayam Ras (Rp/1 Ekor = 1,5 Kg) Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

C. Efektivitas

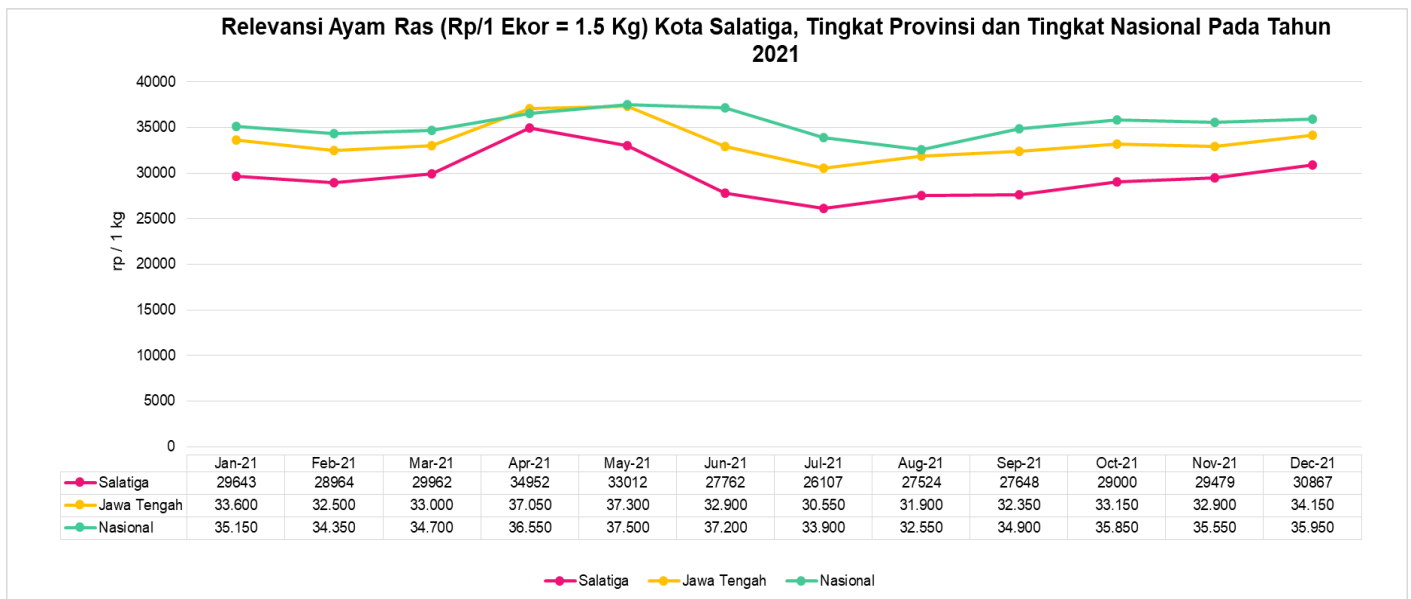
Melihat perkembangan antar waktu harga ayam ras (Rp/ekor = 1,5 kg) Kota Salatiga tahun 2017-2021 (Gambar 3.103) menunjukkan bahwa harga ayam ras di tingkat produsen mengalami kenaikan. Dengan adanya kenaikan harga ayam ras di tingkat produsen tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam mengendalikan harga ayam ras di tingkat produsen kurang efektif dan kurang tepat sehingga diperlukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk mengendalikan harga daging ayam ras.



Gambar 3.103 Efektivitas Harga Ayam Ras Kota Salatiga Tahun 2017-2021
Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

D. Relevansi

Perbandingan harga di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga dalam kurun waktu satu tahun 2021 menunjukkan harga ayam ras cenderung stabil dan mengalami kenaikan pada momentum perayaan hari besar. Adapun dari segi kebijakan menunjukkan Pemerintah Kota Salatiga dalam mengendalikan harga ayam ras sudah relevan dengan kebijakan pemerintah pusat dan perlu adanya upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi serta bersinergi antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksud untuk mengendalikan dan menurunkan harga ayam ras pada tingkat produsen sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis relevansi ayam ras Kota Salatiga, tingkat provinsi dan tingkat nasional pada tahun 2021 ditunjukkan pada Gambar 3.104.



Gambar 3. 104 Relevansi Ayam Ras (Rp/1 Ekor = 1,5 Kg) Kota Salatiga, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional pada Tahun 2021

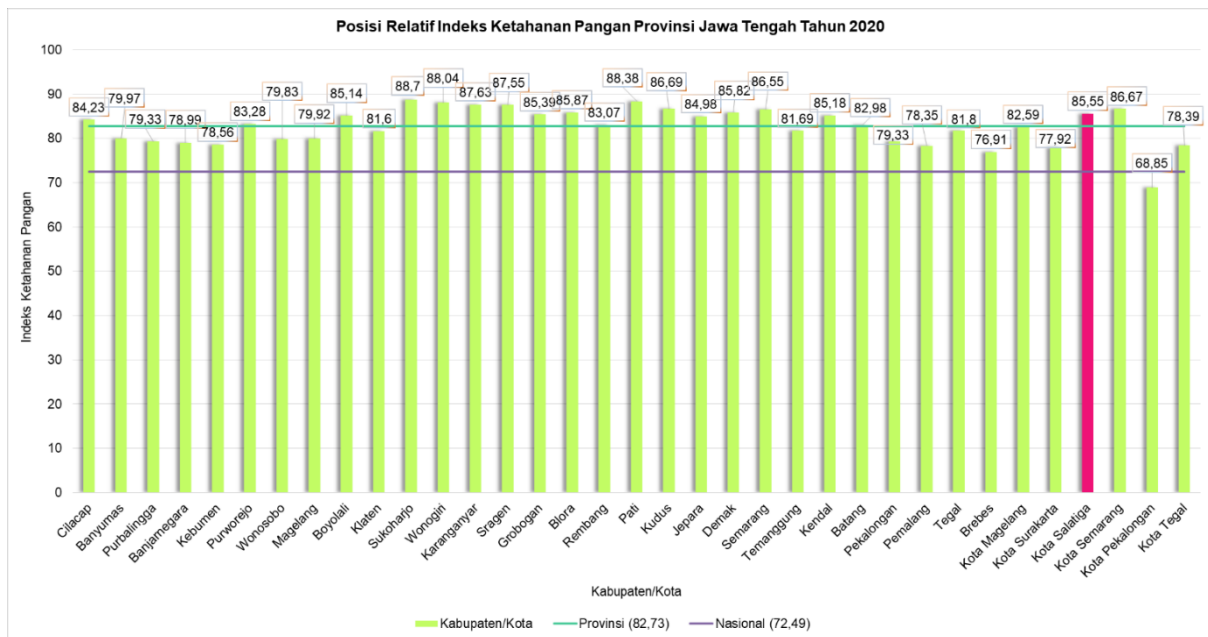
Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2022

3.8.1.5. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

A. Posisi Relatif

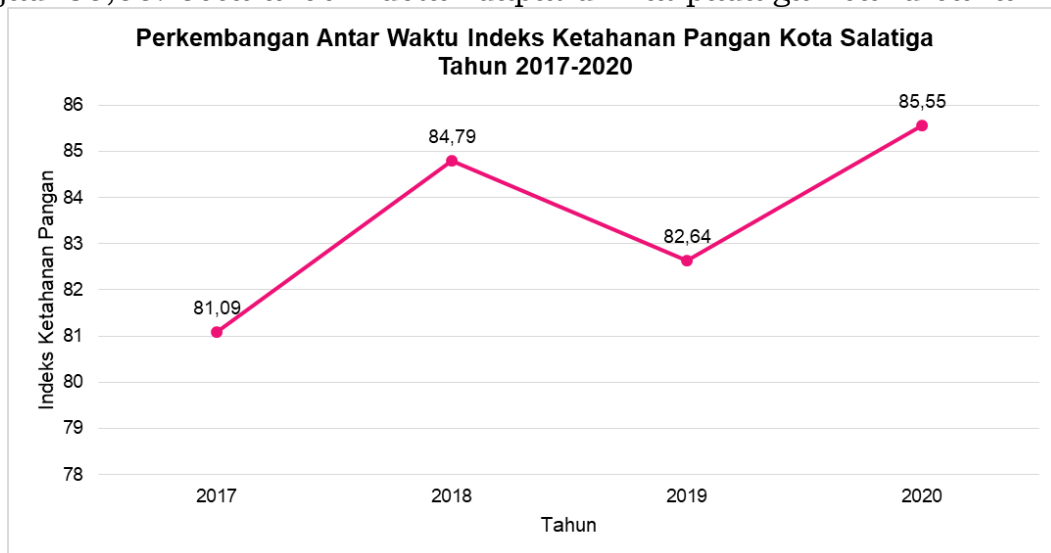
Berdasarkan gambar posisi relatif indeks ketahanan pangan di Kota Salatiga menunjukkan urutan 5 tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu 85,55. Angka tersebut berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 82,73 dan Nasional yaitu 72,49. Adapun Kota Semarang dan Kabupaten memiliki indeks ketahanan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Salatiga. Sementara itu, Kota Pekalongan menduduki urutan terbawah dengan indeks ketahanan pangan paling rendah se-provinsi Jawa Tengah. Adapun hasil perhitungan IKP 2021 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.105 Posisi Relatif Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
 Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Indonesia, 2021

B. Perkembangan *time series*

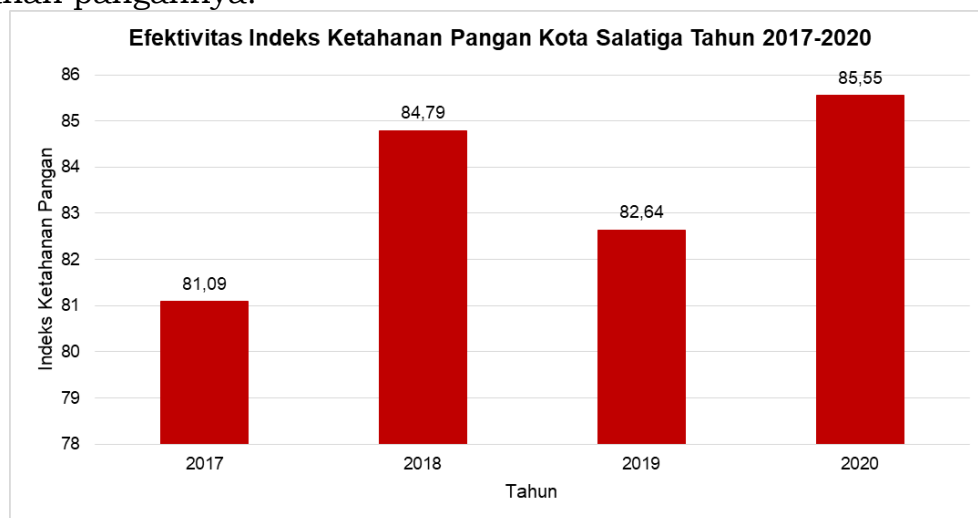
Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Salatiga tahun 2017-2020 menunjukkan pada periode perkembangan antar waktu tersebut mengalami ketidakstabilan (fluktuatif) dari tahun ketahun. Pada tahun 2017 ke 2018 kecenderungan capaian IKP mengalami peningkatan hingga 3 persen, namun pada tahun 2018-2019 nilai IKP kembali menurun hingga 2 persen lalu kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 85,55. Secara lebih detail dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.106 Perkembangan Antar Waktu Indeks Ketahanan Pangan Kota Salatiga Tahun 2017-2020
 Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2017-2021

C. Efektivitas

Analisis efektivitas Indeks Ketahanan Pangan Kota Salatiga Tahun 2017-2020 (Gambar 3.106) menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung meningkat pada tahun 2020. Peningkatan dan penurunan Indeks Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Adapun tren ketidakstabilan indeks ketahanan pangan Kota Salatiga menunjukkan kurang efektifnya program dan kegiatan terkait aspek ketahanan pangannya.

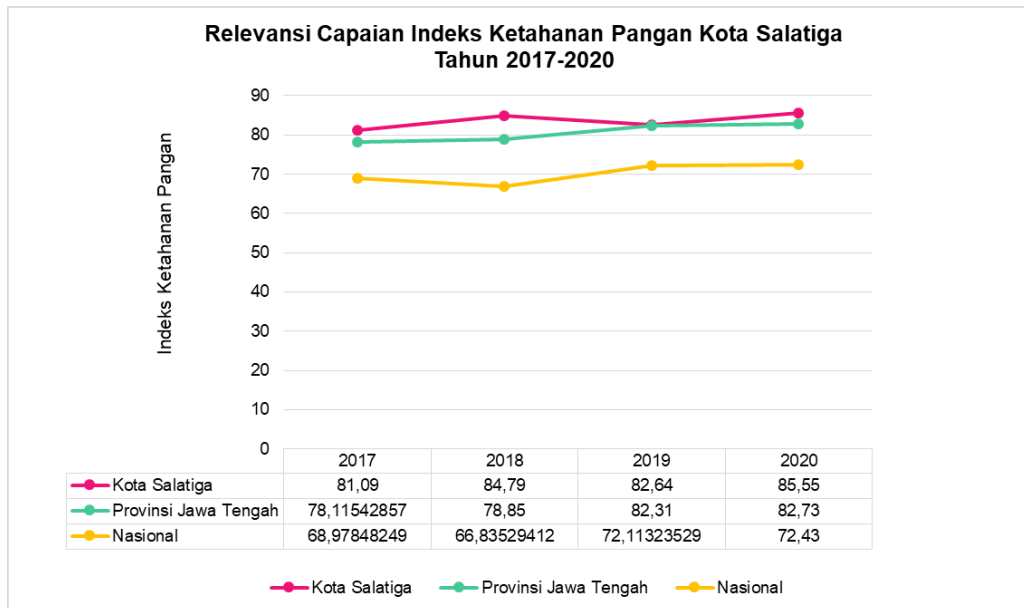


Gambar 3.107 Efektivitas Indeks Ketahanan Pangan Kota Salatiga Tahun 2017-2020

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2017-2021

D. Relevansi

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Kota Salatiga pada kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa IKP memiliki tren tidak stabil pada tahun 2017-2020 (Gambar 3.108). Adapun capaian IKP Kota Salatiga terus berada diatas capaian tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi kepada semua pihak pemangku kebijakan dalam meningkatkan indeks ketahanan pangan. Mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu pentingnya perencanaan program kegiatan pengentasan daerah rentan rawan pangan untuk menetapkan wilayah prioritas dan intervensi program yang spesifik akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



Gambar 3.108 Relevansi Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota Salatiga Tahun 2017-2020

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2017-2021

3.8.2. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Ketahanan Pangan

Daya beli masyarakat terhadap harga bahan pokok dipengaruhi oleh struktur pendapatan masyarakat. Adanya tren permintaan beras, telur ayam ras dan daging ayam ras ditentukan oleh pendapatan masyarakat. Dari segi struktur pendapatan rumah tangga dapat ditentukan dua hal yaitu sumber penghasilan dan penguasaan terhadap sumber produksi (baik secara lahan, teknologi dan lain-lain). Apabila masyarakat dengan struktur pendapatan rumah tangga tinggi maka konsumsi terhadap komoditi tersebut relatif tinggi. Namun, apabila masyarakat dengan struktur pendapatan rendah maka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dan konsumsi komoditi relatif rendah. Oleh karena itu, di Kota Salatiga harga beras, produktivitas padi, harga telur ayam ras dan harga ayam ras tidak efektif dijalankan karena kecenderungan ketidakstabilan pada periode waktu tertentu. Secara ringkas hasil analisis terkait ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Masalah Bidang Ketahanan Pangan

No.	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1.	Harga Beras	Lebih rendah dari nasional dan provinsi Jawa Tengah	Cenderung menurun	Kurang Efektif	Kurang Relevan
2.	Produktivitas Padi	Lebih tinggi dari nasional dan Provinsi Jawa Tengah (No. 9 se - Provinsi)	Cenderung fluktuatif dan menurun pada tahun terakhir	Kurang Efektif	Relevan
3.	Harga Telur Ayam Ras	Lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan lebih rendah dari tingkat nasional	Cenderung meningkat	Kurang Efektif	Relevan
4.	Harga Ayam Ras	Lebih rendah dari nasional dan provinsi.	Cenderung meningkat	Kurang Efektif	Relevan
5.	Indeks Ketahanan Pangan	Lebih tinggi dari nasional dan Provinsi Jawa Tengah (No. 5 se- Provinsi)	Cenderung fluktuatif	Kurang Efektif	Relevan

BAB IV PROGRAM PRIORITAS

4.1. ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN

4.1.1. Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Konsumsi

Kemiskinan di bidang konsumsi dapat terlihat dari pengeluaran dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumannya. Masyarakat dimasukan dalam kategori miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk contoh di Kota Salatiga, terdapat beberapa aspek dan parameter yang terkait dengan bidang konsumsi. Berdasarkan uraian dan penjabaran di Bab III, terdapat tiga parameter yang menjadi fokus utama dalam bidang konsumsi yakni Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2).

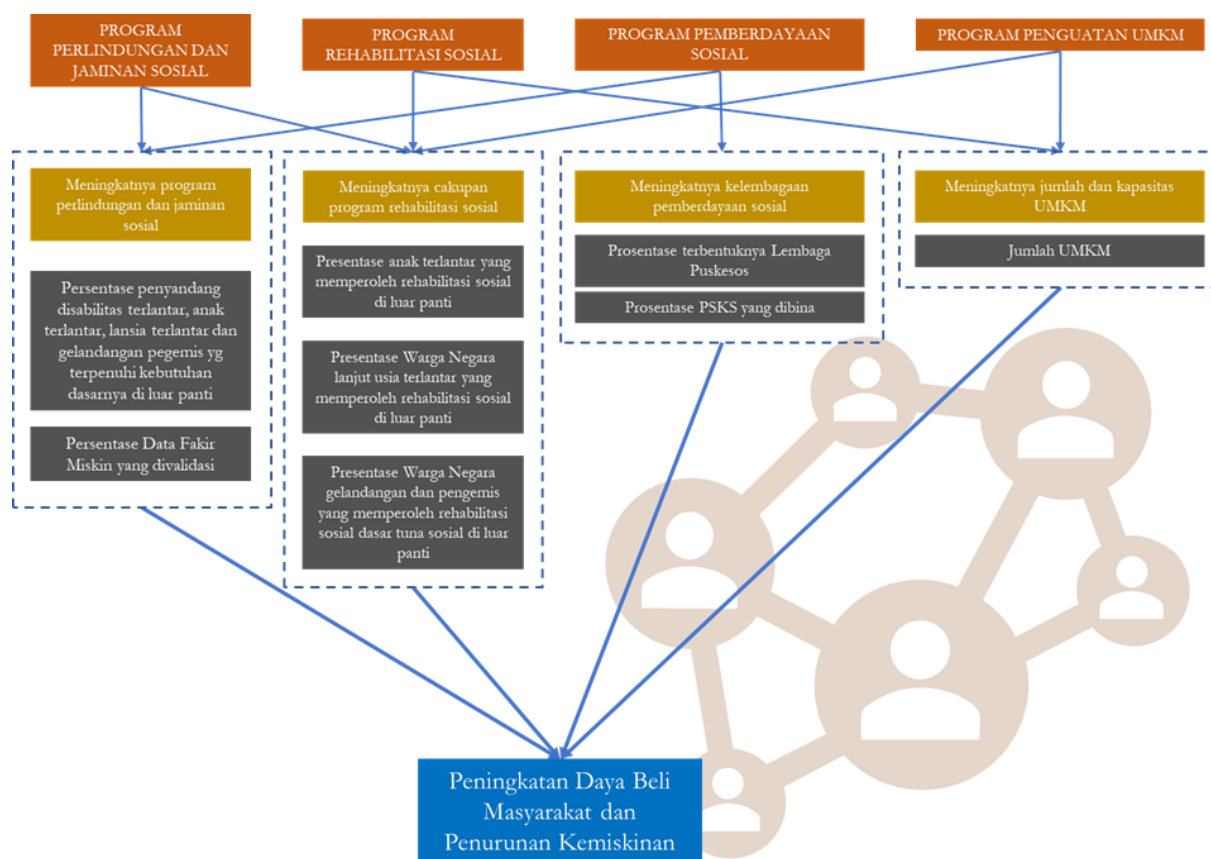
Persentase penduduk miskin di Kota Salatiga dalam dua tahun terakhir (2020 & 2021) berturut-turut adalah 4,947% dan 5,14%. Dari tahun 2020 ke 2021, terdapat kenaikan persentase penduduk miskin yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Hal serupa juga nampak pada tingkat kedalaman kemiskinan yang naik dari 0,53 pada tahun 2020 menjadi 0,80 pada tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan merosotnya pendapatan masyarakat miskin, terutama yang ada di perkotaan sehingga daya belinya menurun drastis. Penurunan daya beli terkait dengan tingkat konsumsi di masyarakat. Parameter selanjutnya yakni tingkat keparahan kemiskinan di Kota Salatiga juga menunjukkan kenaikan pada tahun 2020 ke 2021 dari 0,08 menjadi 0,19. Ringkasan persentase, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Parameter Kemiskinan Konsumsi

Parameter	Tahun 2020	Tahun 2021	Keterangan
Persentase Penduduk Miskin	4,947%	5,14%	Meningkat
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,53	0,80	Meningkat
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,08	0,19	Meningkat

Analisis Intervensi

Intervensi yang perlu dilakukan untuk menangani kemiskinan di bidang konsumsi perlu diarahkan untuk menurunkan parameter-parameter tersebut. Dengan demikian, sasaran intervensi adalah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, daya beli masyarakat untuk indeks kedalaman kemiskinan, dan penurunan ketimpangan untuk indeks keparahan kemiskinan. Sasaran tersebut dapat tercapai melalui dua pendekatan yakni dalam pendekatan makro melalui mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, pengendalian inflasi, menjaga iklim investasi, dan memperluas kesempatan kerja. Selain itu terdapat skala mikro melalui 2 cara, yaitu: pengurangan beban pengeluaran RT miskin dan rentan, peningkatan pendapatan RT miskin dan rentan.



Gambar 4.1 Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Konsumsi Untuk program intervensi dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Modus Intervensi Bidang Konsumsi

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program
Meningkatnya program perlindungan dan jaminan sosial	Penyelenggaraan bantuan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Langsung Tunai Subsidi kesehatan dan pendidikan Program Keluarga Harapan
Meningkatnya cakupan program rehabilitasi sosial	Penyelenggaraan program rehabilitasi sosial	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan fakir miskin dan penyandang masalah sosial dan penerima program rehabilitasi sosial Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Meningkatnya jumlah dan kapasitas UMKM	Penguatan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Program bantuan UMKM Pelatihan UMKM
Meningkatnya kelembagaan pemberdayaan sosial	Peningkatan Puskesos	<ul style="list-style-type: none"> Program <i>assessment</i> LKS/LKSA Program bantuan Puskesos

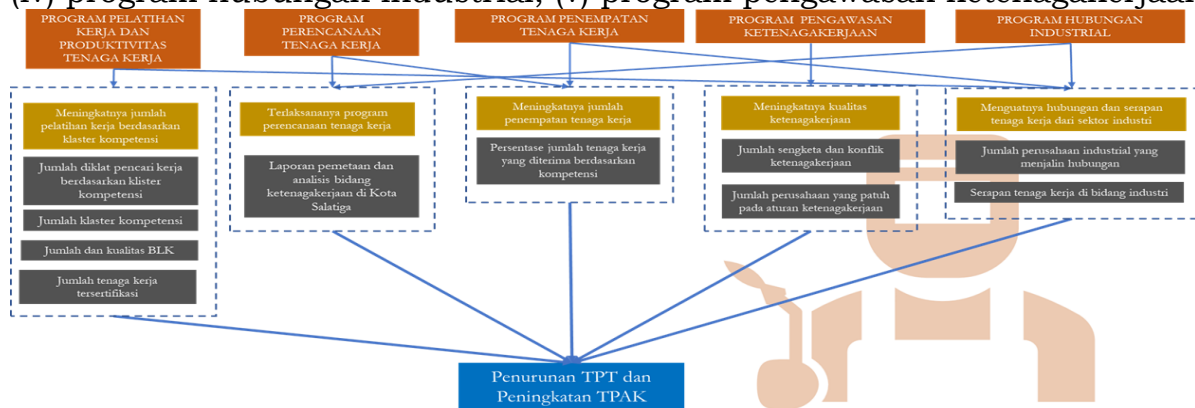
4.1.2. Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan

Analisis bidang kemiskinan bidang ketenagakerjaan mengidentifikasi dua parameter yang menjadi permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan

yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, pada tahun 2021 Kota Salatiga mencatatkan TPT sebesar 7,26% atau lebih tinggi 0,76% dibandingkan dengan capaian TPT Nasional, yaitu sekitar 6,5%. Selain itu, dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat ke-7 TPT tertinggi dan yang capaiannya lebih tinggi dari nasional. Sementara untuk indikator TPAK, pada tahun 2021, Kota Salatiga mencatatkan angka TPAK sebesar 70,36 % pada tahun 2021. Angka tersebut lebih tinggi 2,56% dibandingkan dengan capaian TPAK Nasional, yaitu sekitar 67,8%.

Analisis Intervensi

Untuk semakin menekan TPT dan TPAK, Pemerintah Kota Salatiga melalui Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 menyusun beberapa program yang tujuannya adalah terus memperbaiki angka TPT dan TPAK. Secara umum, program yang disusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kerja dan fasilitasi hubungan antara pasar dan kebutuhan tenaga kerja (link and match). Program yang dicanangkan antara lain adalah: program perencanaan tenaga kerja, (ii) program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, (iii) program penempatan tenaga kerja, (iv) program hubungan industrial, (v) program pengawasan ketenagakerjaan.



Gambar 4.2 Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan

Untuk prioritas intervensi bidang ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Identifikasi Modus Intervensi Kemiskinan Ketenagakerjaan Kota Salatiga

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program
Meningkatnya jumlah pelatihan kerja berdasarkan kluster kompetensi	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Program perencanaan tenaga kerja Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Program pembinaan Lembaga Pendidikan Kerja Swasta Program sertifikasi kompetensi
Meningkatnya hubungan dan serapan tenaga kerja di sektor industri	Penguatan hubungan industri (link and match)	<ul style="list-style-type: none"> Program informasi bursa tenaga kerja (<i>job fair</i>) Program penguatan hubungan industrial

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program
Terlaksananya program perencanaan tenaga kerja	perencanaan dan pemetaan bidang ketenagakerjaan di Kota Salatiga	program pemetaan dan perencanaan bidang ketenagakerjaan
Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi	Peningkatan klaster kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Program penempatan tenaga kerja • program pemetaan kompetensi
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan	penguatan serikat tenaga kerja pendampingan hak-hak tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengawasan ketenagakerjaan • program advokasi bidang ketenagakerjaan

4.1.3. Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Kesehatan

Bidang kesehatan menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan kemiskinan di Kota Salatiga. Terdapat beberapa parameter yang krusial dan menjadi perhatian utama untuk intervensi program yang terkait dengan bidang kesehatan di Kota Salatiga. Parameter tersebut antara lain adalah: Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Angka *Stunting*.

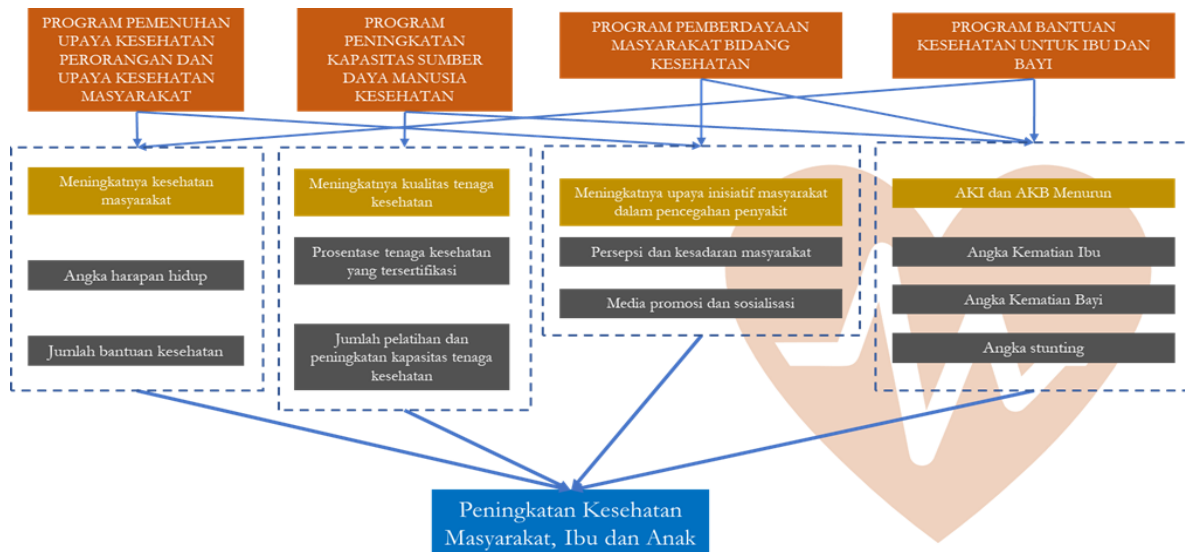
Secara umum, hasil temuan di Bab III menunjukkan AKI di Kota Salatiga pada tahun 2020 adalah 308,05 menjadi 429,55 pada tahun 2021. Lonjakan yang sangat signifikan tersebut turut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19; 80% kematian ibu di Rumah Sakit disebabkan oleh COVID-19. Sementara itu, untuk AKB di Kota Salatiga selama dua tahun ke belakang turut menunjukkan kenaikan yakni 10,53 pada tahun 2020 menjadi 13,75 di tahun 2021 dan juga dipengaruhi oleh faktor Pandemi COVID-19. Untuk AHH di Kota Salatiga, selama dua tahun terakhir AHH menunjukkan kenaikan yakni dari 77,4 tahun menjadi 77,5 tahun. Untuk parameter terakhir yakni *stunting*, Kota Salatiga mencatatkan penurunan dari 10,48 ke 9,436 selama dua tahun terakhir. Ringkasan data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Ringkasan Parameter Kemiskinan Bidang Kesehatan di Kota Salatiga

Parameter	Tahun 2020	Tahun 2021	Keterangan
Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	308,05	429,55	Meningkat
Angka Kematian Bayi (AKB)	10,53	13,75	Meningkat
Angka Harapan Hidup (AHH)	77,4	77,5	Menurun
Angka <i>Stunting</i>	10,48	9,436	Menurun

Analisis Intervensi

Berdasarkan parameter yang ditampilkan di Bab III, parameter yang perlu disasar adalah angka *stunting* serta kesehatan ibu dan bayi mengingat aspek-aspek tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama pandemi COVID-19. Dalam menekan AKI dan AKB, diperlukan upaya yang terfokus pada penjaminan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, infrastruktur kesehatan dasar yang dapat mendukung penurunan angka *stunting* juga perlu menjadi perhatian. Upaya menjaga kesehatan dapat dilaksanakan pada dua sasaran yakni kesehatan secara perorangan dan secara masyarakat.



Gambar 4.3 Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Kesehatan

Modus intervensi untuk program dan isu-isu di Gambar 4.5 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Modus Intervensi Bidang Kesehatan

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program
Meningkatnya kesehatan masyarakat	Penyelenggaraan program peningkatan kesehatan masyarakat secara umum	<ul style="list-style-type: none"> Program bantuan biaya kesehatan Peningkatan kualitas infrastruktur faskes
Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Program pelatihan tenaga kesehatan Program fasilitasi sertifikasi tenaga kesehatan
Meningkatnya inisiatif dan kesadaran masyarakat akan kesehatan	Penyelenggaraan sosialisasi dan promosi kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi PHBS Sosialisasi gaya hidup sehat Peningkatan sarana olahraga umum
Program bantuan kesehatan untuk ibu dan bayi	Penyelenggaraan bantuan untuk ibu dan bayi	<ul style="list-style-type: none"> Program pendampingan ibu menyusui

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program
		<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan akses kesehatan untuk ibu dan bayi • Imunisasi gratis sesuai dengan program pemerintah • Suplemen gratis untuk ibu dan bayi

4.1.4. Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu bidang kemiskinan yang membutuhkan intervensi-intervensi tertentu dalam penangannya. Analisis rona dan kondisi awal pada bidang pendidikan di Kota Salatiga menghasilkan temuan yang perlu ditindaklanjuti untuk mendapatkan prioritas intervensinya. Kemiskinan di bidang pendidikan nampak dan terartikulasi pada indikator-indikator seperti Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menggambarkan keluasan aspek dan akses pendidikan sebagai salah satu bidang yang mampu mengentaskan kemiskinan dan terbagi atas masing-masing satuan pendidikan yakni di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. APK di Kota Salatiga sendiri pada Tahun 2021 mencapai 107,03%. Angka tersebut berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 106,4% dan Nasional yaitu 106,2%. Sementara untuk APK di tingkat SMP dan SMA masing-masing adalah 84,12% dan 118,12%.

Selain diekspresikan melalui APK, bidang pendidikan juga dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Murni (APM) yakni persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMA dan sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk melihat perbandingan anak yang bersekolah tepat waktu. APM untuk Kota Salatiga pada setiap satuan pendidikan adalah 99,05% untuk APM SD, sementara untuk satuan pendidikan SMP yakni 80,59% dan 80,99% untuk Madrasah Tsanawiyah. Pada tingkat SMA dan MA, APM Kota Salatiga berada pada angka 63,54%. Secara ringkas, angka APK dan APM di Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 APK dan APM untuk Setiap Satuan Pendidikan di Kota Salatiga

Satuan Pendidikan	APK	APM
SD/MI	107,03%	99,05%
SMP/MTs	84,12%*	80,59% (SMP) 80,99% (MTs)
SMA/MA	118,12%	63,54%

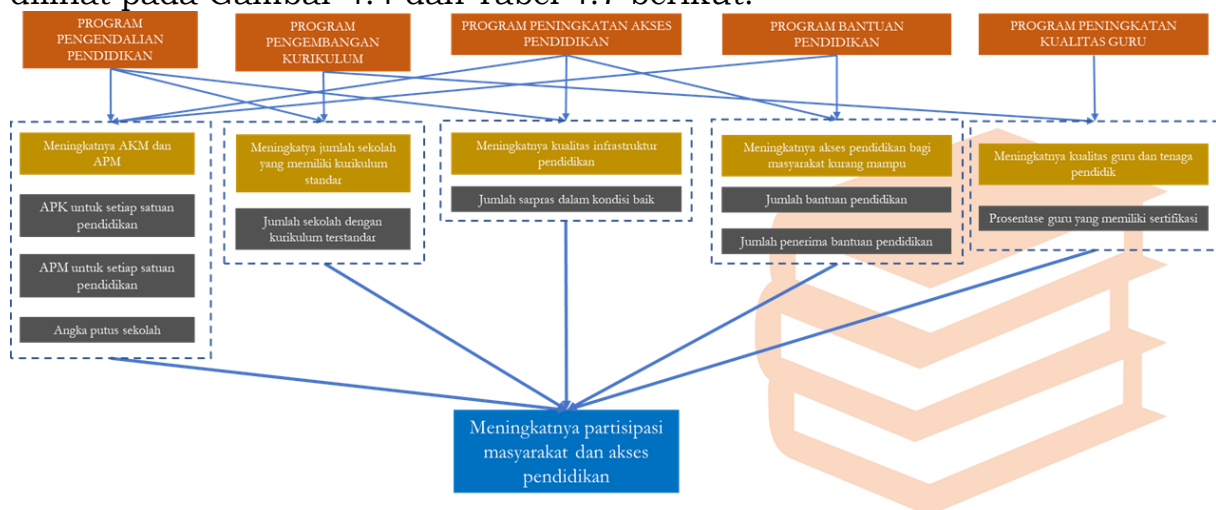
*data APK SMP/MTs Kota Salatiga tahun 2021 dari Dinas Pendidikan yaitu 130,81%

Analisis Intervensi

Intervensi program kemiskinan di Kota Salatiga difokuskan pada peningkatan APM dan APK di Kota Salatiga dan secara simultan dibarengi

dengan peningkatan kualitas pendidikan di berbagai satuan pendidikan. Upaya peningkatan kuantitas dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan sedangkan kualitas dilakukan dengan pengembangan kurikulum dan *upgrading* tenaga pengajar. Selain itu sasaran juga ditujukan kepada menurunkan angka putus sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan kemiskinan yang terkait dengan bidang pendidikan di Kota Salatiga perlu diintervensi dalam aspek AKM dan APM serta peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Hal tersebut krusial untuk menjamin kualitas dan pendidikan yang ada di Kota Salatiga memenuhi standar dan dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan secara lebih luas. Selain itu, partisipasi juga dapat dilakukan dengan mendorong pendidikan informal. Secara internal, kualitas pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk menarik minat masyarakat dalam melanjutkan sekolah hingga pada menyelesaikan seluruh pendidikan dasar. Secara ringkas, untuk mencapai hal tersebut, beberapa sasaran yang perlu dicapai dalam bidang pendidikan di Kota Salatiga adalah (i) Meningkatnya APK dan APM, (ii) Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki kurikulum terstandarisasi, (iii) Meningkatnya kualitas infrastruktur pendidikan, (iv) Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, dan (v) Meningkatnya kualitas guru dan tenaga pendidik. Uraian intervensi dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan Tabel 4.7 berikut.



Gambar 4.4 Analisis Intervensi Bidang Pendidikan

Tabel 4.7 Modus Intervensi Kemiskinan Bidang Pendidikan Kota Salatiga

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program
Meningkatnya AKM dan APM	Penyelenggaraan bantuan pada sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Program Bantuan Operasional Sekolah Program sosialisasi pendidikan kepada orang tua siswa/calon siswa
Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki kurikulum terstandarisasi	Penyelenggaraan pelatihan dan standarisasi kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> Program sertifikasi sekolah

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program
Meningkatnya kualitas infrastruktur pendidikan	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi gedung sekolah rusak • Peningkatan sarana-prasarana sekolah • Peningkatan kualitas laboratorium dan sarana olahraga
Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan bantuan pendidikan gratis • Penurunan Angka Putus Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Program beasiswa tidak mampu • Program Paket C • Program kursus dan lembaga pendidikan informal
Meningkatnya kualitas guru dan tenaga pendidik	Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitas sertifikasi pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kompetensi tenaga pendidik • Penyelenggaraan sertifikasi guru

4.1.5. Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Infrastruktur Dasar

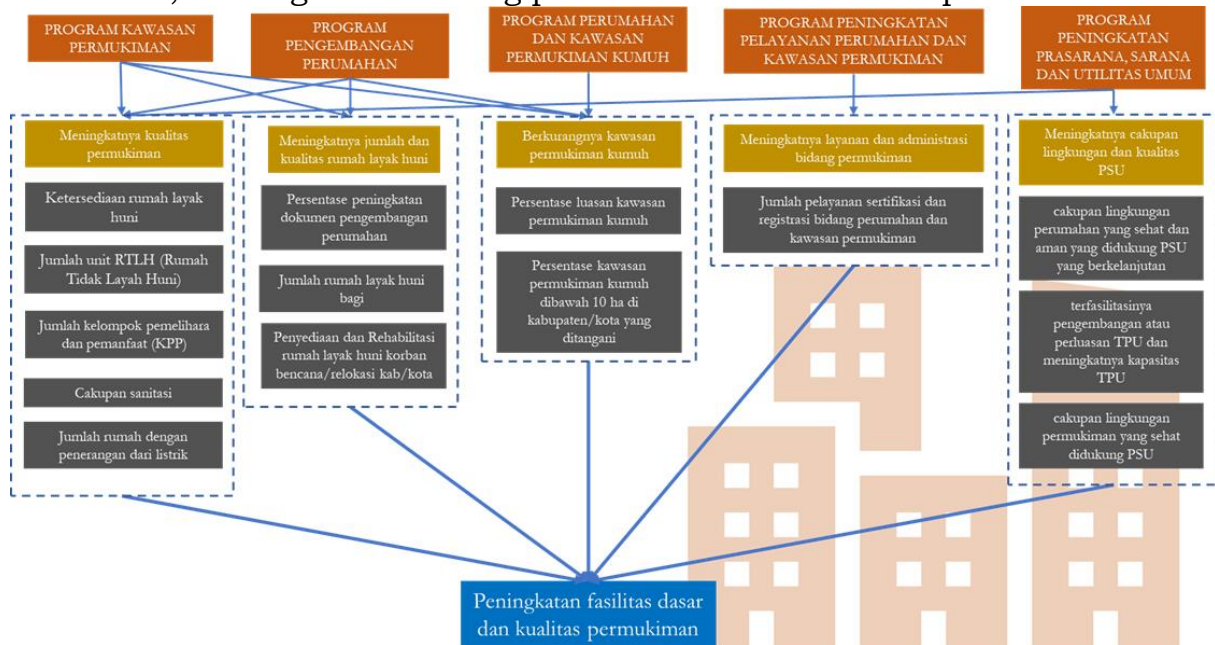
Kemiskinan pada bidang infrastruktur dasar terdiri dari beberapa dimensi yang saling terkait. Analisis yang dilakukan terhadap kemiskinan ini di Bab III menunjukkan bagaimana infrastruktur dasar, khususnya di kawasan atau bidang permukiman menjadi isu yang harus ditangani dalam kerangka kemiskinan secara menyeluruh. Analisa yang dilakukan menunjukkan kualitas infrastruktur dasar yang terdiri atas sanitasi, sumber air minum, sumber penerangan, dan kualitas hunian menjadi sub-aspek yang harus ditangani dalam kaitannya dengan kemiskinan.

Secara umum, untuk setiap indikator tersebut, Kota Salatiga mencatatkan fluktuasi dan angka yang berbeda-beda antara satu sama lain dan dalam periode yang berbeda. Untuk sanitasi, indikator yang diambil adalah prosentase rumah dengan sanitasi layak dan Kota Salatiga mencatatkan prosentase terbaik di atas prosentase nasional dan menjadi daerah dengan persentase tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Untuk sumber air minum, indikator yang digunakan adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Secara peringkat, Kota Salatiga menempati peringkat ke-4 di Provinsi dan memiliki persentase di atas angka nasional. Dalam hal sumber penerangan dan kualitas hunian, indikator yang digunakan kembali adalah persentase rumah tangga dengan akses ke penerangan dan rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Kota Salatiga mencatatkan prosentase lebih tinggi dan angka nasional maupun provinsi untuk dua indikator ini.

Analisis Intervensi

Untuk semakin menekan angka kemiskinan di bidang infrastruktur dasar, Pemerintah Kota Salatiga dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 mencanangkan beberapa program yang secara terfokus menysasar peningkatan kualitas permukiman dan perumahan di Kota Salatiga. Program-program tersebut melingkup peningkatan dan perbaikan fisik hingga peningkatan tata kelola administrasi dan bidan permukiman di Kota Salatiga.

Terdapat lima program yang tercantum dalam RPD yang terkait dengan urusan pemerintah dan berkorelasi langsung dengan kemiskinan di bidang infrastruktur dasar yakni: (i) program pengembangan perumahan, (ii) program kawasan permukiman, (iii) program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, (iv) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dan (v) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman



Gambar 4.5 Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Infrastruktur Dasar
Tabel 4. 8 Identifikasi Modus Intervensi Kemiskinan Infrastruktur Dasar Kota Salatiga

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program
Meningkatnya kualitas permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan penambahan infrastruktur sanitasi dasar • Perluasan jaringan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan sarana prasarana sanitasi • Pembuatan IPAL komunal • Penyediaan jaringan air layak minum • Pendataan kelompok pemelihara dan pemanfaat • Perluasan jaringan listrik
Meningkatnya jumlah dan kualitas rumah layak huni	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas permukiman dan kualitas rumah layak huni • Peningkatan penerima manfaat dan bantuan rumah layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan perumahan sesuai standar yang berlaku • Program pendataan penerima bantuan rumah layak huni/bedah rumah
Meningkatnya layanan registrasi dan administrasi bidang perumahan	Peningkatan pelayanan administrasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi berbasis <i>web</i>
Penurunan persentase kawasan kumuh	Perbaikan sarana dan prasarana permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan kualitas permukiman • Program land consolidation
Meningkatnya sarana dan prasarana dan utilitas umum (PSU)	Peningkatan kualitas PSU penambahan jumlah PSU	<ul style="list-style-type: none"> • Program penambahan sarana penerangan jalan • Program revitalisasi dan penambahan ruang publik/RTH

4.1.6. Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Ketahanan Pangan

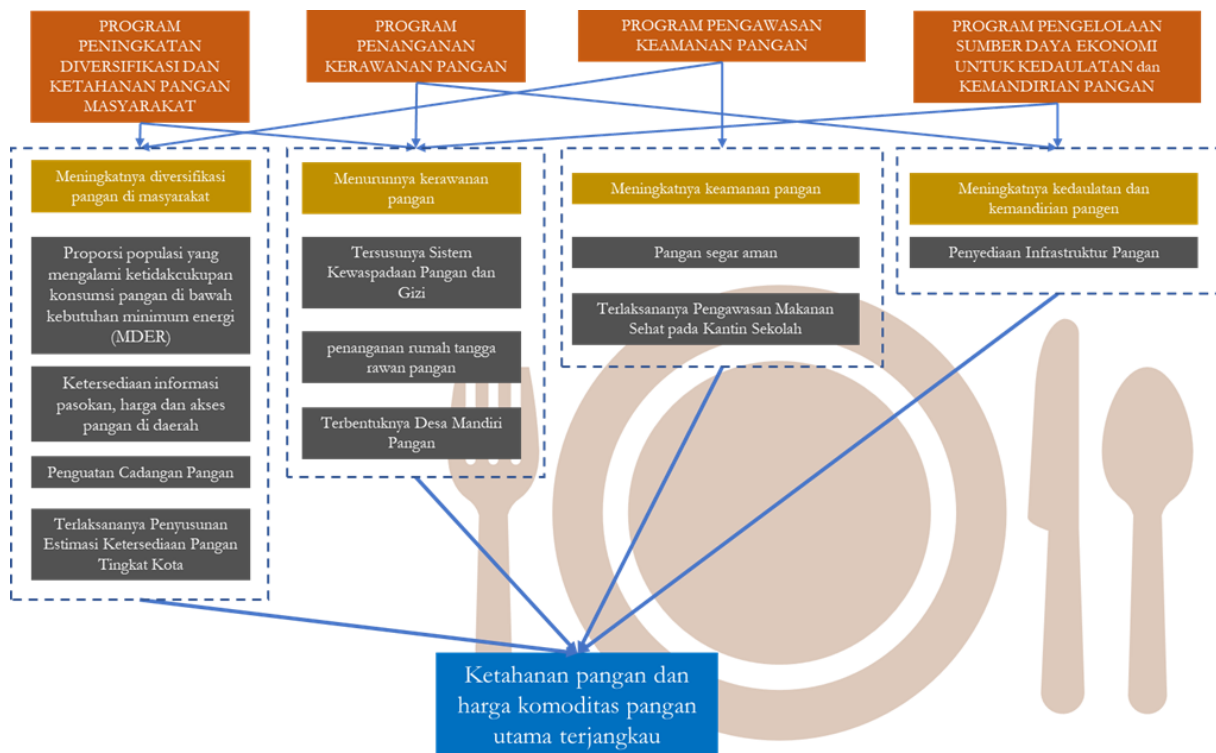
Analisa terhadap isu kemiskinan di aspek ketahanan pangan di Kota Salatiga berhasil mengidentifikasi beberapa hal yang terkait dengan ketahanan pangan dan secara khusus berhubungan dengan harga dan ketersediaan bahan pangan di Kota Salatiga. Terdapat tiga komoditas pangan utama yang menjadi perhatian dalam hal ketahanan pangan yakni beras, daging ayam, dan telur ayam. Ketiga komoditas tersebut mengalami fluktuasi harga yang mempengaruhi masyarakat untuk membeli dan mendapatkannya.

Di hulu, isu ketahanan pangan yang menjadi perhatian adalah produktivitas padi. Produktivitas padi sendiri terkait langsung dengan intensifikasi pertanian dan ketersediaan lahan pertanian. Produktivitas padi di Kota Salatiga sendiri tercatat sebesar 57,6 kuintal/hektar yang produktivitasnya relatif lebih tinggi dibandingkan pada tingkat nasional sebesar 52,26 kuintal/hektar.

Analisis Intervensi

Dalam program yang tertuang di RPD, isu dan aspek yang menjadi fokus tersendiri adalah ketahanan dan kerawanan pangan yang menyangkut tata kelola pangan melingkupi diversifikasi, kedaulatan, dan kemandirian pangan. Berdasarkan uraian permasalahan pada Bab III tersebut, diperlukan upaya dalam melakukan diversifikasi pangan terutama untuk mengganti beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, permasalahan pertanian dan fluktuasi harga beras dapat diminimalisasi. Selain itu, perlu juga dilakukan perbaikan tata kelola lahan pertanian dengan menjaga luas lahan sawah dan peningkatan kesejahteraan petani. Secara umum, program untuk bidang kemiskinan ketahanan pangan juga perlu diharmonisasi dengan agenda-agenda reforma agraria.

Secara ringkas, intervensi terhadap kemiskinan di bidang pangan diperlukan untuk mencapai sasaran berupa meningkatnya diversifikasi pangan, kemandirian pangan, serta keamanan pangan di masyarakat. Oleh sebab itu, program yang diperlukan antara lain adalah: (i) meningkatnya diversifikasi pangan di masyarakat, (ii) menurunnya kerawanan pangan, (iii) meningkatnya keamanan pangan, dan (iv) meningkatnya kedaulatan dan kemandirian pangan



Gambar 4.6 Analisis Intervensi Bidang Ketahanan Pangan

Tabel 4.9 Modus Intervensi Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan Kota Salatiga

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program
Meningkatnya diversifikasi pangan di masyarakat	Promosi pangan utama pengganti beras	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan bibit non padi bagi petani Pendampingan tanaman pangan pengganti nasi untuk petani Promosi makanan pengganti beras di masyarakat Program <i>Urban Farming</i>/Rumah Pangan Lestari
Menurunnya kerawanan pangan	Penyelenggaraan desa mandiri pangan	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan petani untuk desa mandiri pangan Pengendalian alih fungsi lahan persawahan
Meningkatnya keamanan pangan	Pengawasan kualitas pangan	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan tim pengawas pangan
Meningkatnya kedaulatan dan kemandirian pangan	Penyelenggaraan bantuan infrastruktur dan alat pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Program bantuan alat tani bagi petani Program reforma agraria

4.2. ANALISIS KONDISI FISKAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.2.1. Kondisi Umum Fiskal di Kota Salatiga

Analisis kondisi fiskal memberikan gambaran pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kota Salatiga secara menyeluruh. Kondisi fiskal memiliki peranan yang sangat sentral dalam pendanaan

beragam program dan kegiatan yang diselenggarakan terutama terkait Visi dan Misi Pemerintah Kota Salatiga. Kemampuan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan, alokasi jumlah anggaran serta implementasi dan pengawasan anggaran menjadi faktor penting keberhasilan kinerja (keuangan) pemerintah yang antara lain direfleksikan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran daerah.

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD; dan (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 21 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Untuk menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Perumusan strategi paket kebijakan mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Pemerintah tersebut mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan berbasis kinerja. Pendekatan berbasis kinerja merupakan penganggaran terkait dengan pendanaan yang dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan dengan output dan hasil sesuai dengan tujuan serta terkait dengan efisiensi dalam mencapai hasil keluaran. Implementasi anggaran berbasis kinerja, Pemerintah Kota Salatiga menyadari sepenuhnya isu berkaitan dengan pengendalian dan optimalisasi aset daerah. Manajemen aset daerah mempunyai peran sentral dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Adanya manajemen aset yang baik akan mendorong pemerintah daerah lebih selektif dalam perencanaan pengadaan aset-aset baru (misal mencegah pemborosan dalam pengadaan aset), lebih efisien dan efektif dalam penggunaan aset daerah, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Sementara itu, dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Adapun dalam pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk

laporan keuangan sebagai wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal, gambaran perkembangan kinerja pendapatan asli daerah ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah kota untuk mengambil kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, khususnya menyangkut kebijakan belanja pemerintah. Kebijakan (alokasi) belanja menjadi bagian penting untuk melihat rasionalitas perkembangan pencapaian pendapatan (asli) daerah dan juga untuk menjadi pertimbangan (prioritas) alokasi dimasa mendatang dalam rangka pencapaian target pendapatan (asli) daerah yang ditetapkan. Selain evaluasi terhadap pendapatan dan belanja, kebijakan terkait dengan pembiayaan daerah juga perlu dicermati mengingat potensi penerimaan dan pengeluaran di masa mendatang. Kebijakan pembiayaan secara singkat terkait dengan upaya pemerintah kota untuk menutup defisit anggaran ataupun mengoptimalkan surplus yang dimiliki, sehingga bisa berimplikasi pada kewajiban pengeluaran atau adanya penerimaan dimasa mendatang.

Berdasarkan tabel APBD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa pendapatan daerah mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019 dan mengalami penurunan pendapatan di tahun 2020 serta kembali meningkat di Tahun 2021. Hal ini diindikasikan pendapatan daerah menurun karena adanya pandemi Covid-19. Pendapatan daerah tersebut diikuti dengan belanja daerah dan pembiayaan daerah pada tahun 2017-2022 yang mengalami fase fluktuatif selama kurun 5 tahun. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 APBD Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (dalam rupiah)

No.	APBD	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan Daerah	870.408.510.00	967.988.473.800	931.351.872.000	885.561.351.000	916.251.265.000
2.	Belanja Daerah	890.348.819.00	957.988.473.800	1.165.421.773.000	1.096.019.087.000	1.068.992.597.512
3.	Pembiayaan Daerah	265.528.816.825	291.800.636.661	258.310.171.926	219.471.861.483	155.418.532.450

Sumber: BKD Kota Salatiga, 2012-2021

Secara keseluruhan belanja APBD Pemerintah Kota Salatiga dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Dari komposisi belanja Pemerintah Provinsi yaitu persentase Belanja Tidak Langsung dengan persentase Belanja Langsung dari tahun 2017 – 2021 menunjukkan bahwa secara keseluruhan persentase Belanja Langsung lebih besar daripada Belanja Tidak Langsung. Kondisi tersebut dapat dilihat pada

Tabel 4.11 yang menunjukkan bahwa tiap tahunnya nominal dan persentase Belanja Langsung selalu lebih besar.

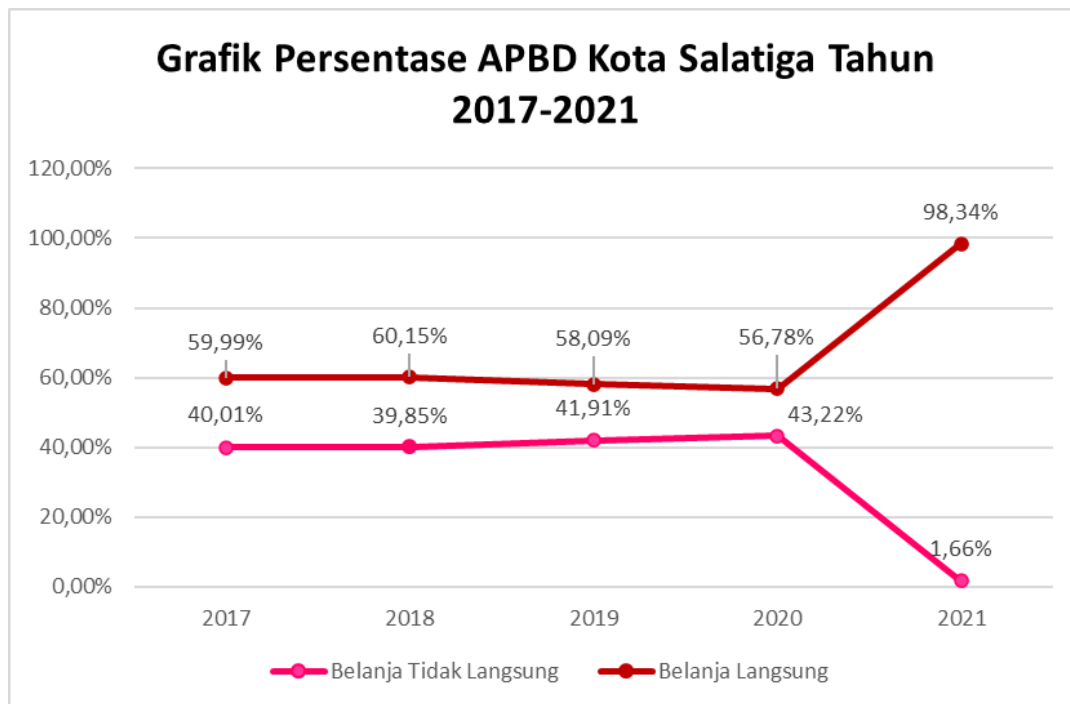
Tabel 4.11 Belanja APBD Kota Salatiga Tahun (dalam rupiah) 2017-2021

No.	APBD	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Belanja Tidak Langsung	339.857.021.091	368.016.095.795	394.807.219.917	408.100.906.896	29.658.767.873
2.	Belanja Langsung	509.617.241.184	555.522.142.690	547.246.311.440	536.195.262.044	1.751.993.383.099
Jumlah		849.474.262.275	923.538.238.485	942.687.426.593	944.954.212.904	1.781.652.150.972

Sumber: BKD Kota Salatiga, 2012-2021

Tabel 4.11 Belanja APBD Kota Salatiga pada tahun 2017– 2021 menunjukkan bahwa persentase Belanja Tidak Langsung yang paling besar pada tahun 2020 sekitar 43,22 % atau sebesar 408.100.906.896 dan persentase Belanja Tidak Langsung yang paling kecil pada tahun 2021 yaitu sekitar 1,66% atau sebesar 1.751.993.383.099. Berdasarkan Tabel 4.11 secara keseluruhan persentase Belanja Tidak Langsung Kota Salatiga pada tahun 2017 – 2021 cukup mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan jumlah dan persentase tiap tahunnya yang memiliki selisih cukup jauh antara tahun. Persentase Belanja Langsung Kota Salatiga tahun 2017 – 2021 yang paling besar pada tahun 2021 yaitu sekitar 98,34%, sedangkan persentase yang paling kecil adalah pada tahun 2020 yaitu sekitar 56,78%.

Berdasarkan Gambar 4.7. menunjukkan bahwa persentase Belanja Langsung selalu berada diatas Belanja Tidak Langsung pada tahun 2017-2021. Selain itu, kondisi tren antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung tahun 2017-2021 bertolak belakang/terbalik. Dapat dilihat bahwa tahun 2017-2018 Belanja Langsung naik sedikit , sedangkan Belanja Tidak Langsung turun sedikit. Tahun 2018-2019 Belanja Langsung turun sedikit sedangkan Belanja Tidak Langsung naik sedikit yang nilainya hampir mendekati tahun 2017. Tahun 2019-2021 Belanja Langsung turun sekitar 2%, sedangkan Belanja Tidak Langsung naik sekitar 2%. Tahun 2020-2021 menunjukkan tren yang sangat drastis, yaitu Belanja Langsung naik hingga 41,56%, sedangkan Belanja Tidak Langsung turun hingga 41,56% pula. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi belanja APBD akan terpengaruh satu sama lain secara berbanding terbalik.



Gambar 4.7 Persentase Belanja APBD Kota Salatiga Tahun 2017-2021
 Sumber: BKD Kota Salatiga, 2012-2021

Komposisi anggaran Belanja Tidak Langsung untuk tahun anggaran 2017 – 2021 Kota Salatiga, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 – 2021 persentase anggaran Belanja Tidak Langsung didominasi untuk belanja Pegawai. Persentase belanja Pegawai terbesar yakni tahun 2017 sebesar 95,39% atau 324.197.827.494, sedangkan yang paling kecil yakni tahun 2021 sebesar 50,36% atau 14.934.956.909. Namun, walaupun persentase tahun 2021 tersebut paling kecil, tetap realisasi pada Belanja Pegawai tetap yang paling besar diantara belanja lainnya. Secara keseluruhan, total Belanja Tidak Langsung tahun 2017-2021 yang paling besar berada pada tahun 2019, yaitu 394.807.219.917. Kondisi belanja pegawai dari tahun 2017-2021 mengalami tren penurunan. Tahun 2020-2021 menunjukkan kondisi penurunan yang sangat drastis, yaitu turun sebesar 37,23% dari 87,59% tahun 2020. Belanja Tidak Langsung Kota Salatiga tahun 2017-2021 hanya meliputi komponen Belanja Pegawai, Belanja Hibah kecuali tahun 2021, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa hanya tahun 2021, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa kecuali 2019-2021, dan Belanja Tidak Terduga.

Adapun di Tahun 2021 persentase jumlah Belanja Bantuan Sosial menempati anggaran belanja daerah tidak langsung sebesar 43,68%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan masa Pandemi Covid-19 maupun arah kebijakan penganggaran Kota Salatiga melalui *refocusing* anggaran berimplikasi pada arah penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan atau *pro poor budgeting*. Implikasi tersebut berkaitan dengan berbagai hal antara lain adalah pergeseran prioritas program penanggulangan kemiskinan, terutama dari 4 kelompok program dalam penanggulangan kemiskinan. Jenis dan sumber dana program percepatan penanggulangan

kemiskinan di Kota Salatiga yang terdiri dari Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga, Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, dan Kelompok Program Pemberdayaan UMKM berasal dari APBD Kota Salatiga, APBD Provinsi Jawa Tengah, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) dan APBN. Secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4. 12 Belanja Tidak Langsung Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	APBD	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Belanja Pegawai	324.197.827.494	95,39	347.280.147.108	94,37	365.764.585.917	92,64	357.469.552.291	87,59	14.934.956.909	50,36
2.	Belanja Bunga	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3.	Belanja Subsidi	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4.	Belanja Hibah	9.363.600.000	2,76	12.347.600.000	3,36	23.131.093.000	5,86	18.602.331.000	4,56	-	0,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	5.552.720.000	1,63	3.714.131.000	1,01	5.866.241.000	1,49	2.632.655.000	0,65	12.955.460.964	43,68
6.	Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.768.350.000	5,96
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	616.646.144	0,18	616.646.144	0,17	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8.	Belanja Tidak Terduga	126.227.453	0,04	4.057.571.543	1,10	45.300.000	0,01	29.396.368.605	7,20	-	0,00
Jumlah		339.857.021.091	100,00	368.016.095.795	100,00	394.807.219.917	100	408.100.906.896	100,00	29.658.767.873	100,00

Sumber: BKD Kota Salatiga, 2012-2021

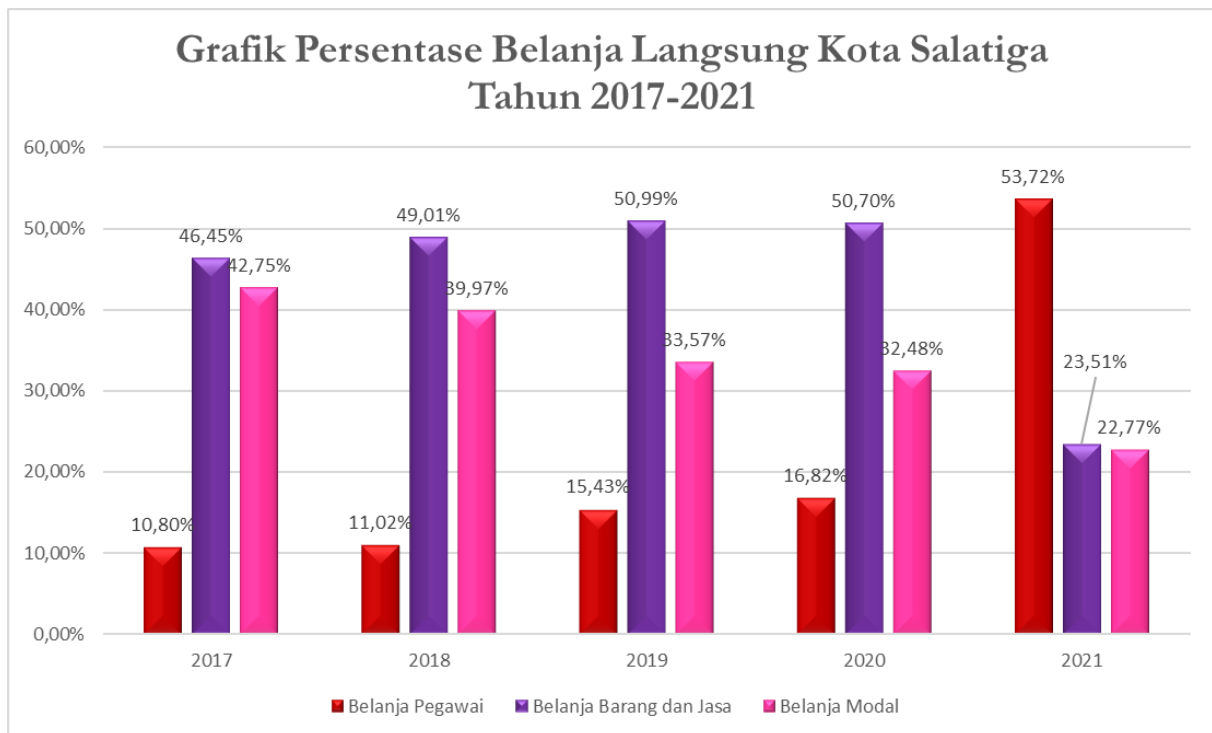
Komposisi anggaran Belanja Langsung untuk tahun anggaran 2017 – 2021 Kota Salatiga, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 – 2021 persentase realisasi Belanja Langsung didominasi untuk Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal menempati urutan kedua, dan terakhir adalah Belanja Pegawai. Belanja Pegawai memiliki persentase paling besar pada tahun 2021 yakni 54% atau 941.127.761.754, sedangkan persentase paling kecil pada tahun 2017 sebesar 10,8% atau 55.048.186.681. Belanja Barang dan Jasa memiliki persentase paling besar pada tahun 2019 yakni 50,99% atau 279.058.494.680, sedangkan persentase paling kecil pada tahun 2021 sebesar 23,51% atau 411.930.430.505. Belanja Modal memiliki persentase paling besar pada tahun 2017 yakni 42,75% atau 217.847.988.544, sedangkan persentase paling kecil pada tahun 2021 sebesar 22,77% atau 398.935.190.840. Secara keseluruhan, Belanja Langsung memiliki jumlah paling besar pada tahun 2021, yaitu mencapai Rp1.751.993.383.099 dan paling kecil tahun 2017 sebesar 509.617.241.184.

Berdasarkan Gambar 4.8 Persentase Belanja Langsung menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki tren yang cenderung naik dari rentang tahun 2017-2021, sedang belanja barang dan jasa serta belanja modal memiliki tren yang cenderung turun. Tahun 2017-2020 realisasi belanja langsung didominasi pada belanja barang dan jasa. Namun, berbeda dengan tahun 2021 yang didominasi dengan Belanja Pegawai. Adapun persentase Belanja Pegawai tahun 2021 memiliki selisih atau peningkatan yang sangat drastis dari tahun 2020, yakni meningkat sebesar 36,9%.

Tabel 4.13 Belanja Langsung Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No.	APBD	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Belanja Pegawai	55.048.186.681	61.222.578.917	84.463.175.340	90.201.804.669	941.127.761.754
2.	Belanja Barang dan Jasa	236.721.065.959	272.277.581.785	279.058.494.680	271.862.126.785	411.930.430.505
3.	Belanja Modal	217.847.988.544	222.021.981.988	183.724.641.420	174.131.330.590	398.935.190.840
Jumlah		509.617.241.184	555.522.142.690	547.246.311.440	536.195.262.044	1.751.993.383.099

Sumber: BKD Kota Salatiga, 2012-2021



Gambar 4.8 Grafik Persentase Belanja Langsung Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Sumber: BKD Kota Salatiga, 2012-2021

Refocusing kegiatan dan alokasi anggaran yang dilakukan pada APBD Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 di Kota Salatiga dengan mengalihkan anggaran belanja langsung Perangkat Daerah ke dalam belanja tidak terduga sebesar 53 miliar dan *refocusing* kegiatan Perangkat Daerah untuk penanganan Covid-19 sebesar 18 milyar rupiah, sehingga total anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 sebesar 71 miliar rupiah (Bappeda, 2020).

4.2.2. Analisis Kemandirian Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Salah satu konsekuensi dari otonomi daerah yaitu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah, sehingga otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Faktor dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah yaitu perluasan desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkuat dan diperluas. Hal ini diatur dan disahkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan terdapat peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah.

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan

pemerintah daerah, tanpa tergantung pada bantuan dari luar termasuk dari pemerintah pusat. Adapun kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Oleh karena itu kemandirian fiskal dipandang perlu agar kemandirian fiskal daerah dapat dipetakan. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada pemerintah Daerah, termasuk kewenangan keuangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka setiap daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi yang dikembangkan secara transparan dan akuntabel. Pemberian kewenangan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah dihadapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

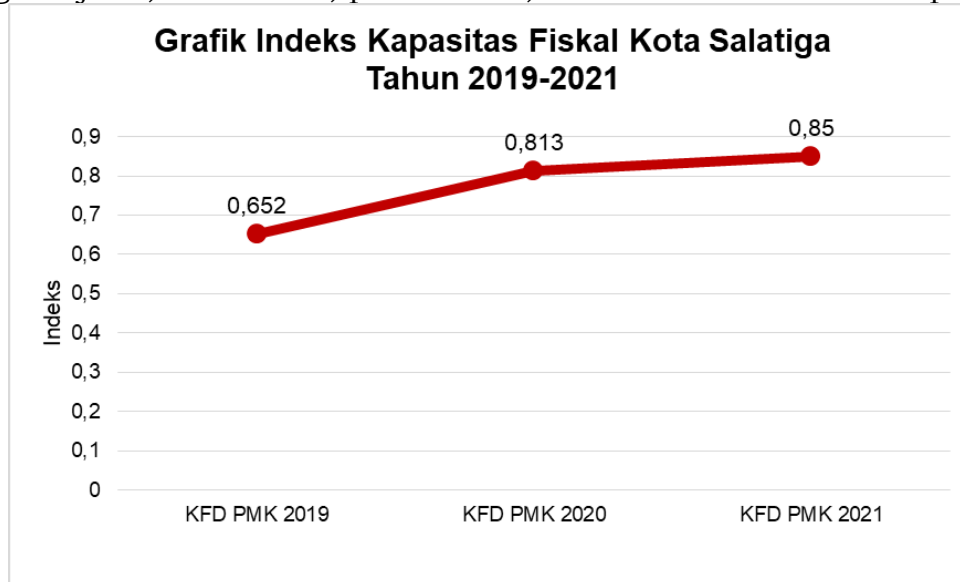
Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana Pemerintah Kota Salatiga mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah yang relatif kecil menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi PAD. Komponen PAD antara lain Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pada Tabel 4.14 tampak bahwa komponen PAD yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PAD adalah lain-lain PAD yang Sah dan Pajak Daerah. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi terkecil lain-lain PAD yang Sah yaitu sebesar Rp.138.771.430.212 pada tahun 2019 dan terbesar pada tahun 2021 dan PAD terkecil pada tahun 2017. Adapun secara menyeluruh, tiap komponen PAD mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali terjadi pemulihan ekonomi di tahun 2021. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2022

No.	APBD	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pajak Daerah	49.698.268.618	55.520.176.329	66.367.826.348	54.374.473.089	65.041.971.971
2.	Retribusi Daerah	10.436.391.897	10.658.079.170	11.032.737.575	9.296.946.836	14.978.116.330
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.187.798.441	13.731.835.187	15.931.465.280	17.096.550.195	18.824.426.644
4.	Lain-lain PAD yang sah	149.920.902.176	129.015.966.346	142.754.869.169	138.771.430.212	181.823.190.765
Jumlah		220.243.361.132	208.926.057.032	236.086.898.372	219.539.400.332	280.667.705.710

Sumber: BKD Kota Salatiga, 2012-2021

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kapasitas fiskal daerah dari Peraturan Menteri Keuangan tentang Kapasitas Fiskal tahun 2018-2022 memiliki kemampuan keuangan sedang dalam periode 2018-2021 yaitu lebih dari 0,6. Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan kemandirian fiskal yaitu kemampuan Pemerintah Kota Salatiga untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar. Pemerintah daerah dalam hal ini setidaknya memiliki posisi tawar untuk dapat meningkatkan porsi penerimaan yang daerah kumpulkan dan diiringi dengan terjadinya peningkatan belanja lebih cepat dibandingkan di tingkat pusat. Hal ini diartikan Kota Salatiga memiliki peran PAD yang cukup baik daripada dana transfer Pemerintah Pusat dan dapat benar benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Angka indeks kapasitas Kota Salatiga menunjukkan kategori sedang. Artinya Kota Salatiga mengalami peningkatan untuk mendanai belanja prioritas terutama belanja para pihak untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Adapun APBD disalurkan untuk Pemerintah Daerah Urusan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan pangan.



Keterangan :

IKFD Nasional tahun 2019 kategori sedang memiliki rentang $0,445 \leq \text{IKFD} \leq 0,808$

IKFD Nasional tahun 2020 kategori sedang memiliki rentang $0,564 \leq \text{IKFD} \leq 0,934$

IKFD Nasional tahun 2021 kategori sedang memiliki rentang $0,727 \leq \text{IKFD} \leq 1,053$

Gambar 4.9 Indeks Kapasitas Fiskal Kota Salatiga 2018-2022

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan tentang Kapasitas Fiskal, 2018-2022

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa dukungan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada warga miskin. Perencanaan anggaran yang berpihak pada warga miskin perlu koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan (*pro poor budgeting*) tersebut berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kota Salatiga dan DBHCHT, dengan rincian dilihat pada Tabel 4.15. Terkait

dengan hal tersebut sebagai gambaran awal dapat dilihat pada *pro poor budgeting* Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2018 mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga pada tahun 2018 sebesar Rp.153.764.560.000. Sementara total alokasi anggaran untuk masyarakat miskin di tahun 2019 dan 2020 menurun hingga Rp46-36 Miliar. Alokasi dana program penanggulangan kemiskinan (*pro poor budgeting*) Kota Salatiga tahun 2019 sebesar Rp.117.242.275.000 atau 10,08% dari total APBD tahun 2019 yaitu sebesar Rp.1.162.667.248.000,-. Adapun di tahun 2020, alokasi dana program penanggulangan kemiskinan menurun menjadi 106.991.336.500, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.15 Alokasi Anggaran Untuk Kemiskinan (*Pro poor budgeting*) Kota Salatiga Tahun 2018-2020)

No.	Sumber Dana	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	APBN	63.994.726.000	49,840	48.290.566.000	41,190	37.184.477.400	34,750
2.	APBD Provinsi Jawa Tengah	3.141.000.000	0,420	3.993.000.000	3,410	3.332.977.000	3,120
3.	APBD Kota Salatiga	85.351.934.000	49,620	63.670.204.000	54,310	65.243.603.100	60,980
4.	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	1.276.900.000	0,008	1.288.505.000	1,100	1.230.279.000	1,150
Total		153.765.560.000	100	117.242.275.000	100	106.991.336.500	100

Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2021

Total belanja daerah Kota Salatiga pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.187.171.790.000 yang digunakan untuk mendanai seluruh proses pembangunan baik Belanja Langsung maupun tidak Langsung. Adapun, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 153.550.054.000 digalokasikan untuk 4 (empat) program penanggulangan kemiskinan antara lain Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial berbasis Keluarga, dan Kelompok Program pemberdayaan UMKM. Secara lebih detail rincian anggaran program penanggulangan kemiskinan di Tahun 2018 dijelaskan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Distribusi anggaran per kelompok program *pro poor budgeting* Tahun 2018

No.	Program	Alokasi Dana (Rp)
1.	Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat	618.400.000
2.	Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial berbasis Keluarga	27.124.797.000
3.	Kelompok Program pemberdayaan UMKM	1.098.625.000
4.	Kelompok program pendukung lainnya	124.922.738.000
Total		153.550.054.000

Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2018

Pada tahun 2019, alokasi anggaran *pro poor budgeting* terbagi menjadi 4 kelompok program penanggulangan kemiskinan yaitu Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Individu, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, dan Kelompok Program Lainnya yang diampu oleh 21 OPD namun Kecamatan Tingkir data nihil karena sasaran tidak kepada masyarakat miskin. Berikut merupakan tabel distribusi anggaran per kelompok program. Berikut secara lebih jelas pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Distribusi anggaran per kelompok program *pro poor budgeting* Tahun 2019

No.	Program	Alokasi Dana (Rp)	OPD
1.	Kelompok Program Bantuan Sosial Berbasis Rumah Tangga	18.306.575.000	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; dan Dinas Sosial
2.	Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat	2.223.396.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kecamatan Sidorejo, Dinas Persip, Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidomukti dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Kecil	1.021.000.000	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Bappeda.
4.	Kelompok Program Lainnya	95.691.304.000	Dinas Kesehatan, Dinas PKP, Dinas Pangan, Kecamatan Sidorejo, Dinas Pendidikan, DP3A, Dinas Pertanian, DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan Kecamatan Sidomukti
Jumlah		117.242.275.000	

Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2019

Sementara itu, alokasi dan realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan tahun 2020 sebesar Rp.35.119.479.864,- tersebar di 17 OPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut

Tabel 4.18. Sebaran *Pro poor budgeting* Kota Salatiga Tahun 2020 Berdasarkan Kelompok Program dan Perangkat Daerah Pengampu (Tabel 4.18).

Tabel 4.18 Distribusi anggaran per kelompok program *pro poor budgeting* Tahun 2020

No.	Program	Alokasi Dana (Rp)	OPD
1.	Bantuan Sosial Berbasis Keluarga	29.849.554.000	Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kecamatan Tingkir
2.	Pemberdayaan Masyarakat	702.745.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Pemberdayaan UMKM	2.134.960.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bappeda, Dinas Perdagangan
4.	Pendukung Lainnya	74.304.077.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah		106.991.336.500	

Sumber: LP2KD Kota Salatiga, 2021

Selain itu sebagaimana fokus anggaran untuk penanganan dampak Covid-19, alokasi anggaran *pro poor budgeting* tahun 2020 memiliki fokus penanggulangan kemiskinan pada kesehatan, pemulihan ekonomi/penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Secara lebih detail dijelaskan pada Tabel 4.19 berikut.

Tabel 4.19 Sebaran Fokus Anggaran Berdasarkan Prioritas Dampak Covid Kota Salatiga Tahun 2020

No.	Fokus	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Kesehatan	45.806.936.750	Dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar. 14.006.600
2.	Pemulihan Ekonomi/Penanganan Dampak Ekonomi	16.877.235.000	Dengan BTT sebesar 13.512.417.000
3.	Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>)	27.536.717.000	Dengan BTT sebesar 25.988.846.000
Total		90.220.888.750	

Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2020

Selaras dengan prinsip dalam penentuan penganggaran untuk penanggulangan kemiskinan (*pro poor budgeting*), maka anggaran bagi warga miskin, baik yang merujuk pada program penanggulangan kemiskinan tahun 2020, maupun dikaitkan ketiga program prioritas anggaran bagi warga terdampak Covid-19 yang berpotensi memunculkan kelompok miskin baru, proses penganggaran bagi program penanggulangan kemiskinan sudah memperhatikan prinsip-prinsip dalam *pro poor budgeting*, sebagai berikut:

1. Sasaran adalah warga/kelompok miskin

Dalam masa pandemi, *pro poor budgeting* terutama ditujukan kepada masyarakat miskin maupun warga terdampak Covid-19 yang secara tidak langsung mempunyai potensi menjadi warga miskin. Hal ini sejalan dengan prinsip *pro poor budgeting*, dimana Orang miskin ditargetkan untuk mendapat perhatian khusus, sehingga proporsi orang miskin yang menerima manfaat lebih besar dari proporsi orang miskin dalam populasi.

2. Fokus pada akar masalah kemiskinan

Dampak dari Covid-19 sudah tentu berkaitan dengan banyak hal, Pemerintah setidaknya mengeluarkan kebijakan yang memfokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu perlindungan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, maupun penguatan jaringan pengaman sosial sebagaimana tertuang pada Tabel tersebut diatas. Ketiga prioritas ini lah yang selanjutnya juga menjadi fokus dalam penanganan dampak Covid-19 di Kota Salatiga, termasuk dikaitkan dengan anggaran yang ditujukan bagi kelompok terdampak dan warga miskin.

Dapat diketahui pula bahwa sejatinya pengelompokan klaster atau kelompok program (Pokgram) dalam Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu upaya untuk menemukenali akar masalah dari kemiskinan, serta memberikan kemampuan pada orang miskin agar dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang dapat membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian maka anggaran yang berpihak pada warga miskin/kelompok miskin/kelompok terdampak Covid-19 dirumuskan dengan merujuk pada akar permasalahan penyebab kemiskinan, baik yang berpedoman pada 4 (empat) klaster atau kelompok program (Pokgram) ataupun yang berpijak pada 3 (tiga) program prioritas penanganan dampak Covid-19.

3. Memaksimal manfaat bagi orang miskin.

Penguatan program penanggulangan kemiskinan melalui *pro poor budgeting* di masa pandemi yang merujuk pada akar permasalahan penyebab kemiskinan tersebut diharapkan juga akan memaksimalkan manfaat bagi warga miskin. Kemanfaatan tersebut didasarkan pada data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota salatiga, baik DTKS maupun masyarakat/kelompok terdampak Covid-19 yang dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah, setelah dilakukan validasi dan verifikasi.

4. Melibatkan partisipasi/peran serta warga miskin.

Proses keterlibatan warga miskin atau kelompok terdampak diawali dalam proses musrenbang, meskipun keterlibatan dalam proses tersebut tidak dilakukan secara langsung. Dalam konteks masa pandemi Covid-19, keterlibatan tersebut juga dilakukan oleh aparatur di tingkat lokal (kelurahan) maupun pengurus RT/RW terutama dalam proses pendataan

masyarakat terdampak dan usulan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

4.3. ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT INTERVENSI

Dari dimensi kemiskinan konsumsi, persentase penduduk miskin di Kota Salatiga di bawah nasional dan provinsi. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin Kota Salatiga menduduki peringkat 4 terbawah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kota Salatiga lebih baik dari Nasional dan kota/kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan di Kota Salatiga juga mengalami penurunan setiap tahunnya sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2017-2019 terbukti efektif menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, tingkat kemiskinan di Kota Salatiga naik pada saat pandemi (2020-2021). Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan meningkat.

Dari dimensi ketenagakerjaan, permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Salatiga perlu diperhatikan. Kota Salatiga menduduki peringkat ke-7 TPT tertinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Tengah dan lebih tinggi dari nasional. Terlebih, TPT di Kota Salatiga cenderung naik dalam kurun waktu 2017-2021. Peningkatan TPT paling signifikan tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Penurunan TPT pada tahun 2021 dibandingkan TPT tahun 2022 menunjukkan program pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan di Kota Salatiga akibat pandemi COVID-19 dinilai cukup efektif menurunkan angka pengangguran. Namun demikian, mengingat secara umum TPT di Kota Salatiga tahun 2017-2019 cenderung naik, sedangkan TPT provinsi dan nasional cenderung menurun, dapat disimpulkan pembangunan sektor ekonomi (UMKM) dan IKM pada tahun 2017-2019 masih kurang efektif untuk menurunkan angka pengangguran. Selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 Kota Salatiga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian TPAK Nasional. Berbagai program pembangunan meliputi pembangunan sektor ekonomi (UMKM) dan IKM, serta pemberdayaan di Kota Salatiga cukup efektif untuk meningkatkan TPAK di Kota Salatiga. Namun demikian, perlu diperhatikan, perkembangan TPAK Kota Salatiga pada kurun waktu 2017-2021 mengalami kondisi yang sangat fluktuatif dan tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat tajam.

Dari Dimensi Kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga lebih baik dari Nasional, namun masih jauh dari target SDGs. Pandemi COVID 19 juga berkontribusi pada penambahan AKI. Pada tahun 2021, 80% kematian ibu hamil/bersalin disebabkan oleh COVID 19. Namun demikian, kebijakan dan program untuk mengatasi AKI di Kota Salatiga cukup berhasil yang ditandai dengan penurunan AKI setiap tahunnya. Di sisi lain, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga telah melampaui target *Sustainable Development Goals* Tahun 2030. Namun, AKB di Kota Salatiga pada kurun waktu 2017-2021 masih mengalami kondisi yang fluktuatif. Bahkan selama kurun waktu tahun 2018-2021 AKB cenderung meningkat karena meningkatnya kelahiran prematur, kurang sadarnya ibu untuk melakukan

KB dan penanganan persalinan yang kurang tepat. Selanjutnya, Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Salatiga berada di atas capaian AHH Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Angka Harapan Hidup yang cenderung naik terus menunjukkan kebijakan yang dilakukan oleh Kota Salatiga berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian pula kondisi *stunting* di Kota Salatiga lebih baik dibanding provinsi dan nasional. Program daerah berupa program upaya kesehatan masyarakat cukup efektif untuk menurunkan persentase atau nilai intervensi *stunting* di Kota Salatiga.

Dari Dimensi Pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kota Salatiga berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional namun tren-nya masih fluktuatif dan cenderung turun. Sebaliknya, APK SMP/MTs Kota Salatiga lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan perkembangannya cenderung fluktuatif. Selanjutnya, APK SMA/MA Kota Salatiga lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional dan tertinggi di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, namun trennya menurun pada tahun 2019-2021. Di sisi lain, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kota Salatiga pada tahun 2021 lebih tinggi dari capaian nasional dan provinsi, namun tren-nya sangat fluktuatif sehingga perlu monitoring dan evaluasi program pendidikan. Seperti halnya APK, APM SMP/MTs Kota Salatiga lebih rendah daripada tingkat Provinsi dan Nasional. Sebaliknya, perkembangan APM SMA/MA Kota Salatiga tahun 2016-2021 menunjukkan performa yang sangat baik. Peringkat APM SMA/MA Kota Salatiga menduduki peringkat ke 14 (empat belas) dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang lain. Berbagai program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam upaya peningkatan APM SMA/MA, seperti berbagai program/kegiatan pendidikan seperti beasiswa miskin, bantuan operasional sekolah dan pemenuhan prasarana sarana penunjang pendidikan telah efektif. Sementara itu capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga tahun 2021 lebih baik daripada capaian nasional dan menduduki peringkat pertama di provinsi sekaligus berada di atas rata-rata capaian provinsi dan trennya meningkat. HLS di Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 15,42 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,42 tahun atau setara dengan Diploma I.

Dari Dimensi Infrastruktur, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kota Salatiga menunjukkan berada di peringkat 1 dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan lebih tinggi dari persentase di tingkat nasional dan provinsi. Kota Salatiga terindikasi telah mewujudkan sarana dan prasarana perumahan, permukiman dan sanitasi perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak di Kota Salatiga berada di atas capaian provinsi atau nasional, dan di tingkat provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki urutan keempat terbaik. Selain itu, sejak tahun 2020 seluruh rumah tangga di Kota Salatiga telah dialiri listrik. Terakhir, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau periode tahun 2017 – 2021 mengalami kecenderungan peningkatan.

Terakhir, dari dimensi ketahanan pangan masih perlu diperbaiki karena harga beras, produktivitas padi, harga telur ayam ras dan harga ayam ras di Kota Salatiga cenderung tidak stabil pada periode waktu tertentu. Adapun indeks ketahanan pangan Kota Salatiga dari tahun 2017-2020 cenderung mengalami fluktuasi pada periode waktu tertentu.

Pemerintah Kota Salatiga tentu telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, khususnya pada keenam dimensi tersebut. Namun demikian, dalam implementasinya tentu mengalami hambatan atau didukung oleh beberapa faktor pendorong yang diidentifikasi dari beberapa dokumen dan ditampilkan dalam Tabel 4.20.

Tabel 4.20 Faktor Pendorong dan Penghambat

No.	Bidang/Urusan	Pendorong	Penghambat
1.	Bidang Kemiskinan Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bantuan dasar hidup (sembako rutin) untuk masyarakat miskin dan rentan. • Adanya bantuan dari Dinsos seperti bantuan Covid-19. • Ada beberapa program penanggulangan kemiskinan antara lain: pelatihan kewirausahaan (<i>frozen food</i>, kerajinan sampah plastik, pelatihan media sosial/<i>marketplace</i>), pemberdayaan masyarakat melalui usaha bersama (produksi susu dan keju), pengembangan potensi usaha kopi dan wisata edukasi kebun kopi. • Bantuan alat (pengolahan susu sapi dan keju). • Bantuan untuk kelompok usaha bersama/KUB untuk UMKM. • Terdapat Program penanganan fakir miskin, Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya (seperti Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin) • Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk perlindungan dan jaminan sosial • Adanya program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan daerah (jaminan sosial dan pemberian bantuan bagi PMKS) • Adanya program bantuan pangan non tunai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian khusus secara teknis dalam penanganan PMKS. • Belum optimalnya upaya pemberdayaan PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. • Masih belum sinkron dalam proses pendataan Rumah Tangga Sasaran. • Adanya pandemi Covid-19. • Proses pendataan penerima bantuan Covid-19 yang kurang valid. • Belum optimalnya proses monitoring dan pendampingan secara berkelanjutan, terutama dikaitkan dengan sinkronisasi program antar OPD dan antar pemangku kepentingan.
2.	Bidang Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif (seperti penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan) • Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (FEDEP). • Adanya program pengembangan sistem pendukung bagi pengusaha kecil dan menengah (seperti penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah, penyelenggaraan promosi produk UKM). 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya upaya/inovasi dalam mengatasi dampak Covid-19 dalam pemulihan kondisi ekonomi dan reformasi sosial yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. • Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. • Tingginya jumlah pengangguran terbuka. • Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya.

No.	Bidang/Urusan	Pendorong	Penghambat
		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kawasan industri di Kota Salatiga dan sekitarnya (Kab. Semarang) sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. 	
3.	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan masyarakat • Terselenggaranya jaminan persalinan (seperti terbayarnya jasa perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, KB pasca salin dan perawatan bayi baru lahir dan terlaksananya skrining hipotiroid kongenital). • Terlaksananya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. • Adanya kegiatan perbaikan gizi masyarakat seperti tertanganinya anak gizi buruk standar BB/TB, tersedianya MP-ASI bagi balita keluarga miskin, tertanganinya ibu hamil dan tertanganinya anak yang orang tuanya HIV. • Adanya kegiatan-kegiatan inovasi untuk menarik minat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan SPM. • Adanya bantuan dari Dalduk KB di Dusun Ngronggo yaitu kampung KB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurang optimalnya petugas dalam memberikan KIE dan pelayanan KB, karena keterbatasan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan petugas pemberi pelayanan KB yang belum mendapatkan pelatihan. • Masih adanya kasus balita <i>stunting</i> karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemia dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik. • Masih ditemukannya kasus baru HIV/AIDs, akibat dari perilaku seks masyarakat masih kurang aman, kegiatan VCT <i>mobile</i>, kegiatan komunitas yang merujuk teman/dampingan yang memiliki faktor resiko dan masyarakat mulai sadar untuk periksa dini HIV ketika ada faktor resiko serta Ibu hamil wajib VCT. • Belum optimalnya pelayanan terhadap kelompok lansia, karena kurangnya kader kesehatan posyandu lansia dan kegiatan lansia terhenti selama pandemi. • Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar karena selama pandemi Covid-19 tidak ada penilaian akreditasi, belum dilakukan pembenahan administrasi puskesmas selama pandemi covid, SIMPUS tidak dapat pakai dan vendor menghilang dan ada aturan baru terkait akreditasi puskesmas. • Belum optimalnya mutu pelayanan rujukan ditandai dengan belum terpenuhinya sarana prasarana dan SDM yang sesuai dengan standar, belum terpenuhinya alat kesehatan, sarana dan prasarana, belum optimalnya penggunaan teknologi

No.	Bidang/Urusan	Pendorong	Penghambat
			<p>informasi dalam pelayanan kesehatan dan belum optimalnya promosi pelayanan kesehatan RSUD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tercapainya UHC akibat dari masyarakat mampu masih banyak yang belum mengikuti JKN secara mandiri dan verifikasi masyarakat miskin dilakukan secara bertahap oleh Dinsos. • Belum optimalnya implementasi GERMAS, masih diperlukan upaya meningkatkan pengetahuan dan kemauan dalam melaksanakan pola hidup sehat, belum optimalnya peran stakeholder dalam penggerakan GERMAS, belum optimalnya distribusi tenaga promosi kesehatan di masyarakat dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aktivitas fisik di instansi.
4.	Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemberian beasiswa kurang mampu. • Terdapat penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs. • Terlaksananya program pengembangan Pendidikan Non Formal seperti penyelenggaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. • Tersedianya alokasi dana untuk peningkatan kualitas sarpras di satuan pendidikan. • Alokasi dana hibah di satuan PAUD, alokasi dana untuk peningkatan sarpras di PNF, bantuan sarpras PAUD dan pengembangan PAUD. • Fasilitasi kegiatan pendidikan keluarga. • Target Kota Salatiga untuk mencapai target hingga 100 persen APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya motivasi diri anak untuk sekolah yang disebabkan faktor keluarga serta kurang maksimalnya pendataan ATS. • Kurangnya kesadaran Orang Tua untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD . • Rendahnya persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA. • Masih terdapatnya anak putus sekolah pada layanan pendidikan dasar terutama pada tingkat SMP/MTs, tahun 2021 terdapat 0,44 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs. • Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana belajar. • Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. • Belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka yang menjadi tuntutan rangkaian program merdeka belajar. • Masih terbatasnya pendidik menjadi guru penggerak, yang disebabkan masih sedikitnya pendidik yang lolos untuk mengikuti pelatihan guru penggerak. • Adanya anak putus sekolah karena pernikahan dini. • Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

No.	Bidang/Urusan	Pendorong	Penghambat
5.	Bidang Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya program penyediaan rumah layak dan sehat yang terjangkau bagi warga miskin ● Adanya program penyediaan dan peningkatan sanitasi dasar yang layak dan sehat (seperti kegiatan peningkatan distribusi penyediaan air baku)Adanya program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah ● Adanya program pengembangan perumahan seperti kegiatan pembangunan utilitas dan rehabilitasi RUSUNAWA. ● Adanya program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatan penataan lingkungan permukiman penduduk perkotaan. ● Infrastruktur masih menjadi acuan masyarakat dalam menilai keberhasilan pembangunan, sehingga usulan masyarakat maupun pendanaan untuk kegiatan infrastruktur menjadi prioritas strategis. ● Pendataan jaringan irigasi serta alokasi APBD untuk pemeliharaan/rehabilitasi dan pembangunan Jaringan Irigasi. ● Program Pengelolaan Persampahan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. ● Adanya program Bantuan RTLH bagi masyarakat miskin. ● Terdapat bantuan dari Dinas Perkim seperti bedah rumah. ● Terdapat bantuan pembangunan irigasi dan penataan kawasan kumuh dari Program KOTAKU. ● Terdapat program pavingisasi sebagai resapan air agar tidak terjadi banjir. ● Program Eco Enzim untuk bersih sungai. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan. ● Belum ada kelurahan yang menerapkan 5 pilar STBM, terkait dengan Cakupan SPAL masih rendah dan Pengelolaan sampah di masyarakat belum optimal. ● Beberapa lokasi/perkampungan di Kota Salatiga belum memiliki fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sehat karena keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan PSU yang sehat dan baik pada kawasan permukiman yang kondisi PSU masih rendah dalam hal ini masih ada 24 persen yang masih membutuhkan. ● Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana. ● Beberapa lokasi pemukiman penduduk di Kota Salatiga berada di lokasi rawan bencana sehingga diperlukan tempat untuk memindahkan penduduk tinggal di wilayah tersebut, dan belum menyediakan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. ● Masih minimnya penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga. ● Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu gedung kantor dan alat berat pendukung fungsi pekerjaan umum ● Belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur antar bidang sehingga upaya untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan menjadi terhambat, termasuk belum tersedianya Dokumen Tata Bangunan dan Lingkungan yang berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

No.	Bidang/Urusan	Pendorong	Penghambat
6.	Bidang Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program peningkatan produksi pertanian/perkebunan yaitu penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan • Adanya bantuan untuk kelompok tani seperti alat-alat pertanian, bantuan sapi, bantuan bibit dan juga pemberdayaan kelompok tani dan pengadaan bahan bangunan rehab kandang, pengadaan sarpras usaha pertanian dan rehab unit pengolah pakan ternak. • Adanya program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (seperti pengembangan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan penanganan daerah rawan pangan, pengembangan cadangan pangan daerah, pengembangan desa mandiri pangan dan pengembangan lumbung pangan desa) • Penggunaan SDA berupa pemanfaatan Program Pangan Lestari yang di <i>back up</i> dana dekon dan dana APBN melalui DAK Non Fisik pada lokasi percepatan penanganan kerawanan pangan di Kota Salatiga. • Adanya KUD yang menentukan harga produksi susu sapi • Terdapat interaksi antar wilayah untuk supply kebutuhan pokok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga miskin yang masuk dalam daftar penerima beras sejahtera di Kota Salatiga adalah ±6.000 kepala keluarga. Di luar jumlah tersebut masih ada rumah tangga lain yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. • Adanya ancaman kejadian rawan pangan. • Harga dan pasokan pangan di Kota Salatiga berpotensi mudah dikendalikan oleh distributor • Nilai tawar petani dalam memasarkan hasil produksi sangat rendah terutama pada saat panen raya, petani belum mampu menentukan harga dari komoditas yang dihasilkan. • Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kota Salatiga, hasil produksi padi di Kota Salatiga hanya memenuhi + 70 persen kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pangan lainnya diperoleh dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Kota Salatiga merupakan daerah yang belum mandiri pangan dan rawan pangan. • Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). • Belum ada regulasi turunan dalam urusan pangan sehingga menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat kota. • Belum ada lumbung pangan tingkat kota, masih dititipkan di gapoktan (Prima Agung). • Karena cara perhitungan yang berbeda, maka keterpautan angka dengan tahun sebelumnya menjadi faktor utama padahal sebenarnya sebenarnya capaian kinerja sudah memenuhi target RPJMD .

Sumber: Matriks Pronakis Tw. IV. 2019, Surat Hasil MONEV SDGs Tahun 2021, LP2KD Tahun 2021, RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, *In-depth Interview* dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul dan Kumpulrejo.

4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.4.1. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Pada Tahun 2021 berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Rapat Terbatas tanggal 21 Juni 2021 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat 0% (nol persen) pada 2024. Kondisi pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Sementara, total angka kemiskinan nasional menurut BPS pada tahun 2021, adalah 10,14% atau 27,54 juta jiwa.

A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2020-2024 yang dilegal formalkan di Perpres 18/2020. Secara umum, terdapat dua kerangka kebijakan untuk tujuan penanggulangan kemiskinan yakni kerangka kebijakan makro dan kerangka kebijakan mikro. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah sasaran dan skala dari strategi yang hendak diimplementasikan. Dalam skala kebijakan makro, pemerintah berperan dalam beberapa hal yakni:

1. Menjaga stabilitas inflasi
2. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3. Menciptakan lapangan kerja produktif
4. Menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan
5. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian,
6. Mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

Sedangkan dalam kerangka mikro, sasaran utamanya ditujukan langsung ke masyarakat. Upaya mengurangi kemiskinan dalam skala mikro dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu: (a) penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan (b) peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

B. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dalam skala nasional, salah satu kerangka yang digunakan sebagai justifikasi adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana target tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. SDGs sendiri menentukan ketercapaian target pada tahun 2030 namun kemudian Presiden menginstruksikan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dipercepat menjadi tahun 2024, lebih awal dari target SDGs di tahun 2030. Instruksi

tersebut dituangkan ke dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022 dan mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kota Salatiga sendiri termasuk ke dalam daerah yang termasuk ke dalam daerah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024

Agar tercapai target yang diharapkan, terdapat tiga kegiatan kunci, yaitu:

1. Melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.
2. Melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem.
3. Membangun infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Dalam level teknis, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama yang kemudian diturunkan ke dalam program-program, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Uraian program untuk setiap strategi dapat dilihat pada bagian berikut.

1. Penurunan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:

- a) Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
- b) Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler.
- c) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- d) Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
3. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.

4. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
 5. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.
3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan
Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
1. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
 2. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

4.4.2. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

- A. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023

Isu kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu fokus prioritas dan dapat dilihat pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai haluan pembangunan utama. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, serta merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2013-2018. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Untuk menuju dan mencapai visi tersebut, terdapat 4 (empat) misi yaitu:

1. membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga NKRI;
2. mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

berdasarkan Misi dari RPJMD tersebut, strategi utama yang hendak diimplementasikan adalah penguatan kapasitas ekonomi rakyat dan perluasan lapangan kerja. Strategi tersebut menjadikan upaya pengentasan atau penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah juga berada pada skala makro dan skala mikro.

Di dalam RPJMD selama lima tahun kedepan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Dalam perspektif tersebut, sumberdaya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun juga ditempatkan sebagai aktor utama dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (*empowering*), serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (*self hood*). Hal ini juga

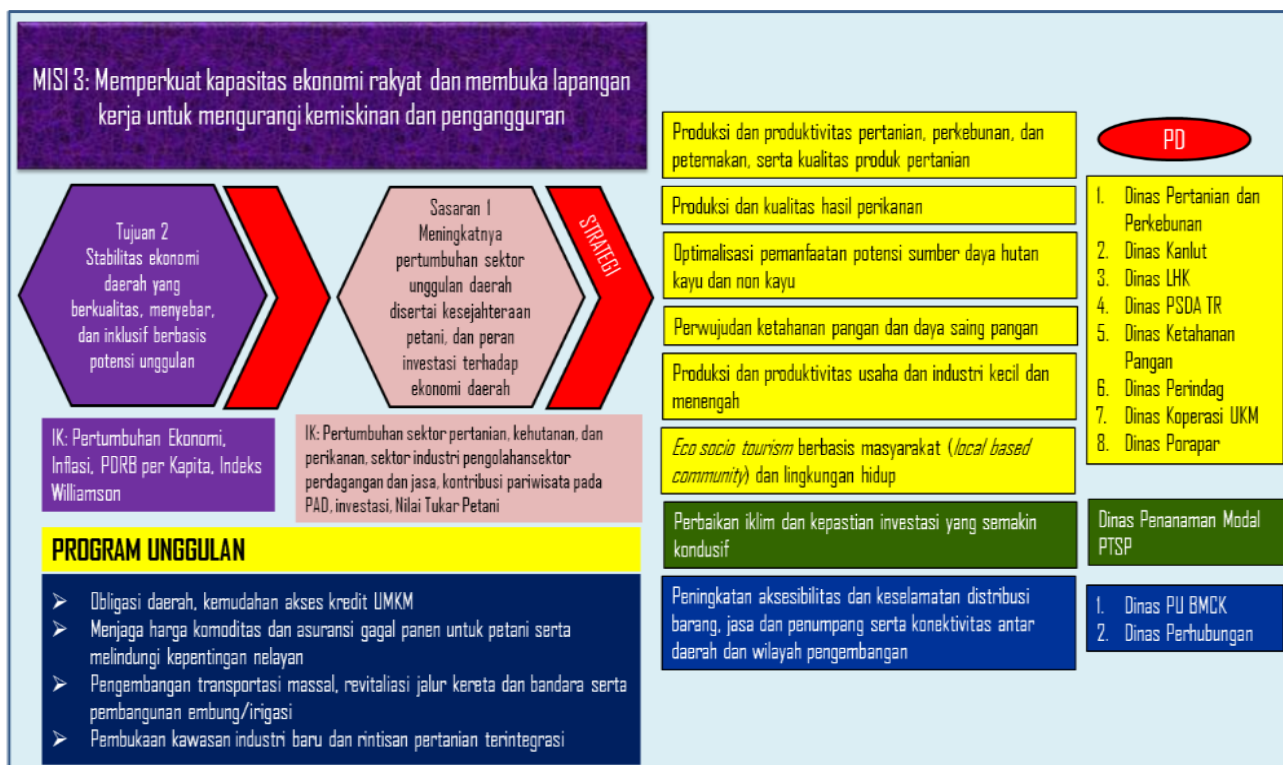
menjadi landasan dalam melaksanakan pembangunan sebagai upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Selain secara langsung ditempatkan di dalam visi-misi pembangunan daerah, kemiskinan juga termasuk ke dalam salah satu dari lima isu strategis di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai turunan dari Misi ketiga, program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktik ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah.

Misi ketiga ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu: 1) kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata dan terbagi atas dua sasaran yakni peningkatan kualitas hidup dan menurunnya pengangguran terbuka; dan 2) menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan yang menyasar sektor unggulan daerah. Sebagai indikator, ukuran keberhasilan yang diharapkan dari tujuan ini adalah angka kemiskinan, Indeks Gini, pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Williamson. Penjabaran tujuan dalam Misi ketiga tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.10 dan Gambar 4.11.



Gambar 4.10 Misi Ke-3 RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah



Gambar 4.11 Misi Ke-3 RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah

B. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2019. Di dalam dokumen kebijakan tersebut, aspek kemiskinan dan strategi serta program secara detail dituliskan dan dijadikan acuan dalam eksekusi program dan penganggaran. Di dalam dokumen tersebut juga secara umum terdapat Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan kemiskinan yang merupakan rencana intervensi prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan. RAD penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah diprioritaskan pada dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), peningkatan pendapatan (ketenagakerjaan), serta dimensi yang berkaitan dengan prasarana dasar dan ketahanan pangan. Dari RAD tersebut, kemudian dihasilkan fokus dan prioritas intervensi yang menjadi cikal bakal program dalam pengentasan kemiskinan. Uraian mengenai RAD tersebut untuk setiap dimensinya dapat dicermati sebagai berikut.

1. Dimensi Ketenagakerjaan

RAD pada dimensi ini berfokus pada penurunan angka pengangguran dan dilakukan melalui prioritas intervensi:

a. Penambahan kesempatan kerja baru pada sektor formal melalui:

- 1) Bursa kerja dengan prioritas wilayah di 7 kabupaten yaitu Kabupaten Tegal, Cilacap, Demak, Brebes, Pemalang, Purbalingga, dan Kebumen.
- 2) Wirausaha baru dengan prioritas wilayah di 5 kab/kota yaitu Kabupaten Kendal, Kebumen, Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Magelang.

b. Pengurangan risiko kehilangan pekerjaan bagi kelompok rentan dengan prioritas wilayah di 7 kabupaten yaitu Kabupaten Tegal, Cilacap, Brebes, Demak, Pemalang, Purbalingga, dan Kebumen.

Prioritas intervensi tersebut diwujudkan melalui program peningkatan kesempatan kerja, program pembinaan dan pengembangan pemuda, program pendidikan perkoperasian dan UKM, program pengembangan produk tekstil dan alas kaki, program penguatan dan pengembangan industri agro, program penguatan dan pengembangan industri non agro, dan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

2. Dimensi Kesehatan

RAD pada dimensi kesehatan difokuskan untuk memenuhi tujuan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Prioritas intervensi pada dimensi ini mencakup:

1. Peningkatan akses mutu layanan kesehatan yang merata dengan prioritas wilayah di 12 kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Pemalang, Wonosobo, Brebes, Purbalingga, Batang, Cilacap, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Kendal, dan Purworejo.
2. Penurunan angka kematian, kesakitan, dan kecacatan terutama dilakukan untuk :
 - a. Mengendalikan penyebaran TB dengan prioritas wilayah di 7 kab/kota yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kendal, Brebes, Tegal, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.
 - b. Mengendalikan penyebaran HIV dengan prioritas wilayah di 9 kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Grobogan, Pemalang, Kebumen, Wonosobo, Brebes, Tegal, Blora, dan Batang.
 - c. Mengurangi *stunting* dengan prioritas wilayah di 13 kab/kota yaitu Kabupaten Magelang, Tegal, Banjarnegara, Pekalongan, Rembang, Pemalang, Wonosobo, Brebes, Kendal, Banyumas, Purbalingga, Blora, dan Kota Tegal.

Prioritas intervensi tersebut diwujudkan melalui program pelayanan kesehatan, program sumber daya manusia kesehatan, program promosi dan pemberdayaan, program kesehatan lingkungan, serta program pencegahan dan pengendalian penyakit.

3. Dimensi Pendidikan

RAD pada dimensi ini difokuskan pada peningkatan akses layanan pendidikan SMA/MA/ Sederajat dan dilakukan melalui prioritas intervensi :

1. Mendekatkan akses dan memadainya sarpras pendidikan dengan prioritas wilayah di 9 kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo, Purbalingga, Cilacap, Temanggung, Pekalongan, Pemalang, Magelang, Batang dan Brebes.
2. Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin untuk mengikuti pendidikan dengan prioritas wilayah di 12 kabupaten yaitu Kabupaten Batang, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Temanggung, Cilacap, Jepara, Semarang, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Brebes.

Prioritas intervensi tersebut diwujudkan dalam program pembinaan SMA, program pembinaan SMK, dan program pendidikan khusus.

4. Dimensi Infrastruktur Dasar

RAD ini berfokus pada peningkatan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dengan prioritas intervensi :

1. Peningkatan pelayanan air minum dengan prioritas wilayah di 10 kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Grobogan, Blora, Jepara, Temanggung, dan Pekalongan
2. Pengembangan sumber-sumber air minum dengan prioritas wilayah di 12 kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Jepara, Pemalang, Tegal, dan Brebes.
3. Peningkatan kepemilikan jamban dengan prioritas wilayah di 8 kabupaten yaitu Kabupaten Brebes, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Tegal, Magelang, Purbalingga, dan Jepara.

Prioritas intervensi tersebut diwujudkan melalui program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi, program pengembangan kegeologian, dan program kesehatan masyarakat.

5. Dimensi Ketahanan Pangan

RAD pada dimensi ketahanan pangan berfokus pada peningkatan konsumsi pangan masyarakat miskin dan dilakukan melalui prioritas intervensi:

1. Peningkatan produksi padi dengan prioritas wilayah di 12 kab/kota yaitu Kabupaten Boyolali, Purworejo, Purbalingga, Jepara, Kendal, Temanggung, Semarang, Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta dan Kota Magelang.
2. Menjaga stabilitas harga beras dengan prioritas wilayah di 6 kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen, Boyolali, Sukoharjo, Cilacap, Purbalingga dan Kudus.

Prioritas intervensi tersebut diwujudkan melalui program peningkatan agribisnis, program peningkatan ketahanan pangan (SISLOGDA), serta program peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UMKM.

RAD penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah selain diprioritaskan melalui intervensi pada 5 dimensi tersebut, juga dilakukan melalui program program lain yang mendukung penanggulangan kemiskinan antara lain penanganan RTLH, sambungan listrik murah, pembangunan sumur bor, bantuan modal usaha, pelayanan panti, baik melalui pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah maupun dukungan pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota dan CSR).

4.4.3. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Salatiga

A. Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga termaktub dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kota Salatiga antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. Selama kurun waktu RPJPD tersebut, pembangunan di Kota Salatiga dirumuskan untuk menuju Visi “Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan *Stunting* dan Penanggulan Kemiskinan”. RPJPD Kota Salatiga tertuang ke dalam 4 tahapan. Pada saat laporan ini disusun, eksekusi RPJPD

telah masuk kepada tahap 4 dan di detailkan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Berdasarkan hasil kajian prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN dan Provinsi Jawa Tengah serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 maka pada tahun 2023 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

1. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan Daya Saing.
2. Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan & *Stunting*.
4. Pemantapan Kualitas Pendidikan & Kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.
5. Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik melalui transformasi teknologi.
6. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

B. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu Di Kota Salatiga

Isu kemiskinan menjadi salah satu isu pembangunan utama di Kota Salatiga. Dalam tingkatan pelaksanaan, Kota Salatiga menggunakan konsep penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu. Pendekatan ini digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut krusial mengingat terdapat target dan capaian pada skala waktu tertentu yang harus dicapai di tengah berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu hambatan yang mendorong perlunya percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini dilakukan melalui Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu yang merupakan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Kehadiran percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu yang tertuang dalam Perwali 45/2021 adalah upaya inovatif untuk menembus berbagai halangan yang memperlambat upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu fungsinya adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu berdasarkan kondisi di Daerah. Selain itu, konsep ini juga dimaksudkan untuk membangun koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu dilakukan melalui dua eksekusi yakni strategi dan program. Strategi dan program untuk kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.21 berikut.

Tabel 4.21 Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu

Strategi	Program
<ol style="list-style-type: none"> 1. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; 2. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil 4. sinergi kebijakan dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; 2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan 3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kelurahan.

C. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Salatiga

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dengan kompleksitas karakteristik dan memerlukan prioritas pendekatan dan penanganan secara sistematis, prioritas, terpadu dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan derajat serta kualitas hidup manusia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kemiskinan diupayakan untuk mengurangi terbatasnya kesempatan kerja/berusaha, terbatasnya akses terhadap faktor produksi, kurangnya akses terhadap biaya pendidikan, kurangnya akses terhadap biaya kesehatan, lemahnya penyelenggaraan perlindungan sosial dan terbatasnya akses terhadap sarana/prasarana lingkungan yang sehat dan layak.

Adapun penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu oleh lintas pelaku dan lintas program dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kota Salatiga. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga memandang perlunya membentuk Peraturan Daerah terkait Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga yang disahkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 dengan tujuan terwujudnya kondisi dan lingkungan sosial dan ekonomi yang memungkinkan penduduk miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan secara berkelanjutan; tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan berusaha penduduk miskin; dan terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas pelaku yang membidangi kemiskinan dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

Arah kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berpedoman pada RPJMD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan dilakukan melalui strategi dan program. Strategi dan program untuk kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut.

Tabel 4.22 Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Strategi	Program
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar 2. Memperbaiki program perlindungan sosial 3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan 4. Menciptakan pembangunan inklusif 	<p>Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan potensi diri 2. Bantuan pangan dan sandang 3. Penyediaan pelayanan perumahan 4. Penyediaan pelayanan kesehatan 5. Penyediaan pelayanan pendidikan 6. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha 7. Pelayanan sosial <p>Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat 2. Peningkatan kapasitas keluarga miskin dan penduduk miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha 3. Jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi keluarga miskin dan penduduk miskin 4. Kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan 5. Koordinasi antara kementerian/lembaga dan Peraturan Daerah.

4.4.4. Program Penanggulangan Kemiskinan

Pada level nasional, program penanggulangan kemiskinan termaktub dalam Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Program penanggulangan kemiskinan sendiri dibagi menjadi 3 garis besar yakni:

- 1) Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- 2) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- 3) Program lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kelurahan/desa.

Secara khusus untuk Kota Salatiga, program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menyesuaikan teknis pelaksanaan dengan kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berada di level lebih tinggi. Mengacu kepada LP2KD Kota Salatiga tahun 2019, program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga menysasar 3 (tiga) Kelompok Program, yaitu Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga,

Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, dan Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Ringkasan cakupan dan jenis program dapat dilihat pada Tabel 4.23 berikut.

Tabel 4.23 Ringkasan Cakupan dan Jenis Program

Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga		Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat		Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil	
Cakupan Program	Jenis Program	Cakupan Program	Jenis Program	Cakupan Program	Jenis Program
<p>1) Bantuan sosial langsung kepada keluarga sasaran, bantuan langsung dapat berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), Bantuan Langsung Bersyarat (conditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk barang, misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan, seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya;</p> <p>2) Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini;</p> <p>3) Bantuan kesehatan termasuk penyuluhan bagi orang tua</p>	<p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya, dengan kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin. Program dan kegiatan ini dilaksanakan dan diampu oleh Dinas Sosial.</p> <p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah</p> <p>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</p> <p>Program Penanganan Fakir Miskin, dengan kegiatan Penangan Fakir Miskin Perkotaan</p> <p>Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan Pemberian beasiswa kurang mampu</p> <p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan kegiatan Pengembangan</p>	<p>1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat kelurahan;</p> <p>2) Peningkatan kapasitas bagi keluarga miskin dan penduduk miskin yaitu upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha keluarga miskin dan penduduk miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui kelompok usaha bersama (KUBE).</p>	<p>1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.</p> <p>2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat.</p> <p>3) Program Pengembangan dan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</p> <p>4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Masyarakat/Pelatihan Merajut.</p> <p>5) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa.</p> <p>6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</p> <p>7) Program Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa</p>	<p>1) Penguatan kelembagaan ekonomi mikro dan kecil yaitu penguatan kelembagaan yang dilakukan melalui :</p> <p>a) Pendataan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Kecil bukan bank dan bukan koperasi;</p> <p>b) Pendampingan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum; dan</p> <p>c) Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM).</p> <p>2) Perluasan akses permodalan bagi keluarga miskin dan penduduk miskin pelaku usaha mikro dan kecil melalui upaya meningkatkan jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil.</p>	<p>1) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</p> <p>2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.</p> <p>3) Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif, dengan kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Pengentasan Kemiskinan.</p> <p>4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.</p>

Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga		Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat		Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil	
Cakupan Program	Jenis Program	Cakupan Program	Jenis Program	Cakupan Program	Jenis Program
berkaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk.	Cadangan Pangan Daerah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak, dengan kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Persalinan.				

selain program yang menysasar tiga kelompok tersebut, Kota Salatiga juga memiliki program yang menysasar kelompok lainnya bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat marginal terhadap ketersediaan pelayanan dasar perkotaan yang tidak termasuk dalam ketiga kelompok program lainnya. Secara garis besar, program ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan mencakup:

1. Pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan
2. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi/saluran drainase
3. Pembangunan Rumah Tidak Layak huni
4. Penyediaan sanitasi

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga, secara khusus kemiskinan disasar pada isu-isu strategis dan dimasukkan ke dalam indikasi program pro-poor. program-program yang termasuk ke dalam kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.24 berikut.

Tabel 4.24 Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2023-2027

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Sosial			
Kegiatan 1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kota	Dinas Sosial
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		
PROGRAM 2: Program Rehabilitasi Sosial			
Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		APBD Kota	Dinas Sosial
1	Penyediaan Permakanan		
2	Penyediaan Alat Bantu		
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		
5	Pemberian Layanan Kedaruratan		
Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		APBD Kota	Dinas Sosial
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
2	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		
PROGRAM 4: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kota	Dinas Sosial
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 5: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		APBD Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		
PROGRAM 6: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		APBD Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni		
PROGRAM 7: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	APBD Kota	
PROGRAM 8: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		
3	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik		
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		
5	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		
PROGRAM 9: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		
15	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
16	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		
17	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
18	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
19	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
20	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
21	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
PROGRAM 10: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Kegiatan 1 : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		APBD Kota	Dinas Pangan dan Pertanian
1	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		
2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
3	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		
Kegiatan 2 : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		APBD Kota	Dinas Pangan dan Pertanian
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
PROGRAM 12: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan 1 : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		APBD Kota	Dinas Pangan dan Pertanian
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
PROGRAM 13: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Kegiatan 1 : Pembangunan Prasarana Pertanian			Dinas Pangan dan Pertanian
1	pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani		
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		
5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		
PROGRAM 14: PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Kegiatan 1 : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah kabupaten/Kota		APBD Kota	Dinas Pangan dan Pertanian
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		
PROGRAM 15: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Kegiatan 1 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota		
PROGRAM 16: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		APBD Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
2	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro		
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		
PROGRAM 17: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		APBD Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran, SDM serta desain dan teknologi		
PROGRAM 18: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Kegiatan 1 : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		APBD Kota	BAPPEDA
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)		
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)		
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Manusia		
PROGRAM 19: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
PROGRAM 20: PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Kegiatan 1 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		APBD Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
PROGRAM 21: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		APBD Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		
5	Advokasi dan Promosi IPK		
PROGRAM 22: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
Kegiatan 1 : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
2	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK		
PROGRAM 23: PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		
3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		
4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
5	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
6	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		
Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK	
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		
4	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		
5	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
6	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		
7	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		
8	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		
9	Peningkatan Kesertaan KB Pria		
PROGRAM 25: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Dinas Pendidikan
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
5	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		
6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
2	Pengadaan Perlengkapan PAUD		
3	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		
5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAK	
Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama			
1	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		
4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
5	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
7	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Dinas Pendidikan
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan		
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan		
4	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan		
5	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		
7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		
PROGRAM 26: PROGRAM PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN			
Kegiatan 1 : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
PROGRAM 27: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya			
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
PROGRAM 28: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			Dinas Perdagangan
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
PROGRAM 29: PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja		
PROGRAM 30: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)		
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (
PROGRAM 31: PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Kegiatan 1 : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota		

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota		
PROGRAM 32: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
2	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		
PROGRAM 33: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Kegiatan 1 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		APBD Kota	BPBD
1	pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota		
PROGRAM 34: PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Dinas Dukcapil
1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
PROGRAM 35: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Kecamatan Argomulyo
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kel Tegalrejo)		
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kel Ledok)		
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kel. Cebongan)		
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kel. Noborejo)		
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kel. Randuacir)		
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kel. Kumpulrejo)		
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalrejo)		
11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ledok)		
12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cebongan)		
13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Noborejo)		
14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Randuacir)		

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kumpulrejo)		
PROGRAM 36: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Kecamatan Sidomukti
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kel. Mangunsari)		
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kel. Kecandran)		
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kel. Dukuh)		
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kel. Kalicacing)		
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunsari)		
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecandran)		
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dukuh)		
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalicacing)		
PROGRAM 37: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Kecamatan Sidorejo
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sidorejo Lor)		
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sidorejo Lor)		
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Salatiga)		
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Salatiga)		
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bugel)		
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bugel)		
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pulutan)		
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pulutan)		
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kauman Kidul)		
12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kauman Kidul)		
13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Blotongan)		

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Blotongan)		
PROGRAM 38: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		APBD	Kecamatan Tingkir
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tingkir Lor)		
5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkir Lor)		
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kutowinangun Lor)		
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kutowinangun Lor)		
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sidorejo Kidul)		
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sidorejo Kidul)		
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gendongan)		
11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gendongan)		
12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kalibening)		
13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalibening)		
PROGRAM 39: PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Kegiatan Pengelolaan Persampahan		APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup
1	Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		
2	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
PROGRAM 40: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		APBD Kota	Sekretariat Daerah
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		

PROGRAM/KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 41: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		APBD Kota	Sekretariat Daerah
1	Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		
PROGRAM 42: PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
2	Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		

sumber: Indikatif Program Kegiatan Pro Poor, BAPPEDA Kota Salatiga

4.4.5. Target Penurunan Angka Kemiskinan

Indikator Kinerja Utama: Persentase Penduduk Miskin

Secara eksisting, berdasarkan data yang dihimpun dapat diketahui bahwa Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) di Kota Salatiga pada tahun 2019 relatif cenderung membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan seberapa sulit mengangkat atau mengeluarkan orang miskin dari Garis Kemiskinan (GK), sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan akan menilai sejauh mana GAP atau perbedaan konsumsi antar penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga tahun 2019 adalah 0,83 sedangkan angka Provinsi sebesar 1,53 dan Nasional 1,55. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Salatiga yaitu 0,20 lebih rendah dibanding Provinsi sebesar 0,30 dan Nasional sebesar 0,37.

Angka P1 dan P2 di Kota Salatiga tersebut berada dibawah capaian Provinsi dan Nasional pada tahun 2019 merupakan angka yang sudah menurun dari tahun sebelumnya. Selama kurun waktu terakhir, perkembangan penurunan P1 dan P2 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 mengalami penurunan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, P1 Kota Salatiga turun dari angka 1,07 pada tahun 2015 menjadi 0,60 pada tahun 2016, kemudian mengalami kenaikan lagi menjadi 0,83 pada tahun 2019.

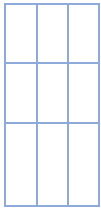
Sementara untuk dinamika jumlah dan persentase penduduk miskin dalam kurun waktu periode 2019-2020, terdapat penambahan persentase penduduk miskin dari 10.8% pada tahun 2019 menjadi 11.41% pada tahun 2020. Jumlah dan persentase penduduk miskin di kota dan miskin juga mengalami kenaikan dengan kenaikan persentase penduduk miskin di kota lebih besar dari yang di desa. Untuk lebih lengkapnya, perubahan persentase kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut.



Gambar 4.12 Perubahan Persentase Penduduk Miskin di Kota Salatiga Dari 2019-2020 Sumber: Buku Profil Kemiskinan Salatiga 2020

Untuk target penurunan angka kemiskinan di Salatiga sendiri dimasukkan ke dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Poin 1 yang mencakup lima sub target. Target pengurangan penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel 4.25 berikut.

Tabel 4.25 Indikator dan Target Penurunan Angka Kemiskinan di Kota Salatiga

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SUMBER DATA	SATUAN	TAHUN						STATUS CAPAIAN	KET	
						BASELINE 2018	2019		2020		2021			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET			REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN														
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.														
1	1.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Angka	4,84	4,94	4,76	4,84	4,94	4,74	5,14		Secara umum tercapai, terjadi penurunan dari target karena kasus pandemi
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansi bagi kelompok miskin dan rentan														
2	1.3.1 (a)	Proporsi peserta	Proporsi peserta	Dinas Kesehata	Persen	89	90	88,34	95	86,61	100	91,36		Secara umum

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SUMBER DATA	SATUAN	TAHUN						STATUS CAPAIAN	KET	
						BASELINE 2018	2019		2020		2021			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET			REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	n										mengalami kenaikan
4	1.3.2 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial	Persen	21,7	14,00	47,24	17,00	53,24	21,00	53,20		Secara umum mengalami kenaikan
5	1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Program Keluarga	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Program	Dinas Sosial	Jumlah	34,36	34,36	34,36	4491	4491	4491	4491		Secara umum mengalami kenaikan


NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SUMBER DATA	SATUAN	TAHUN						STATUS CAPAIAN	KET	
						BASELINE 2018	2019		2020		2021			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET			REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Harapan	Keluarga Harapan											
6		Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana	Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana	Satpol PP	Dokumen	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	1	1		Jadi satu dalam Dokumen RPB
<p>Target 1.4 Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, SDA, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p>														
6	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya	Dinas Kesehatan	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DATA TIDAK TERSEDIA, TAPI DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

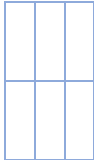
NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SUMBER DATA	SATUAN	TAHUN						STATUS CAPAIAN	KET	
						BASELINE 2018	2019		2020		2021			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET			REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		kesehatan	di fasilitas kesehatan											ADA
7	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
8	1.4.1 (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan	Dinas P3APPKB	Persen	NA	78	72,39	78	75,35	78	71,27		

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SUMBER DATA	SATUAN	TAHUN						STATUS CAPAIAN	KET	
						BASELINE 2018	2019		2020		2021			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET			REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun yang berstatus kawin	Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun yang berstatus kawin										<input type="checkbox"/>	
9	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Dinas PUPR	Persen	93,64	97,43	100	98,52	98,77	99	99,59	<input type="checkbox"/>	
10	1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi	Dinas Kesehatan	Persen	95%	95%	100%	96%	100%	100%	100%	<input type="checkbox"/>	

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SUMBER DATA	SATUAN	TAHUN						STATUS CAPAIAN	KET	
						BASELINE 2018	2019		2020		2021			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET			REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		berkelanjutan	layak dan berkelanjutan											
12	1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Dinas Pendidikan	Angka	95,70	100	96,23	100	96,11	100	82,61		
13	1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan	Angka	78,20	97,5	99,69	100	74,15	100	68,42		
14	1.4.1 (i)	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Murni (APM)	Dinas Pendidikan	Angka	147,85	100	69	100	124,14	100	NA		

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SUMBER DATA	SATUAN	TAHUN						STATUS CAPAIAN	KET	
						BASELINE 2018	2019		2020		2021			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET			REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		SMA/MA/sederajat	SMA/MA/sederajat											
15	1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Dinas Dukcapil	Persen	94,8	94	94,61	94	95,4	95	97,63		
16	1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari	Dinas Sosial	Persen	96,96	PM	97,8	PM	98,92%	PM	NA		

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SUMBER DATA	SATUAN	TAHUN						STATUS CAPAIAN	KET	
						BASELINE 2018	2019		2020		2021			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET			REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		PLN	PLN dan bukan PLN											
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana														
17	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	BNPB	Indeks	91,2	PM	91,2	PM	91,2	PM	91,2		Indeks Risiko Bencana
19	1.5.3*	Dokumen	Dokumen	Bappeda	Dokumen	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum				Jadi satu

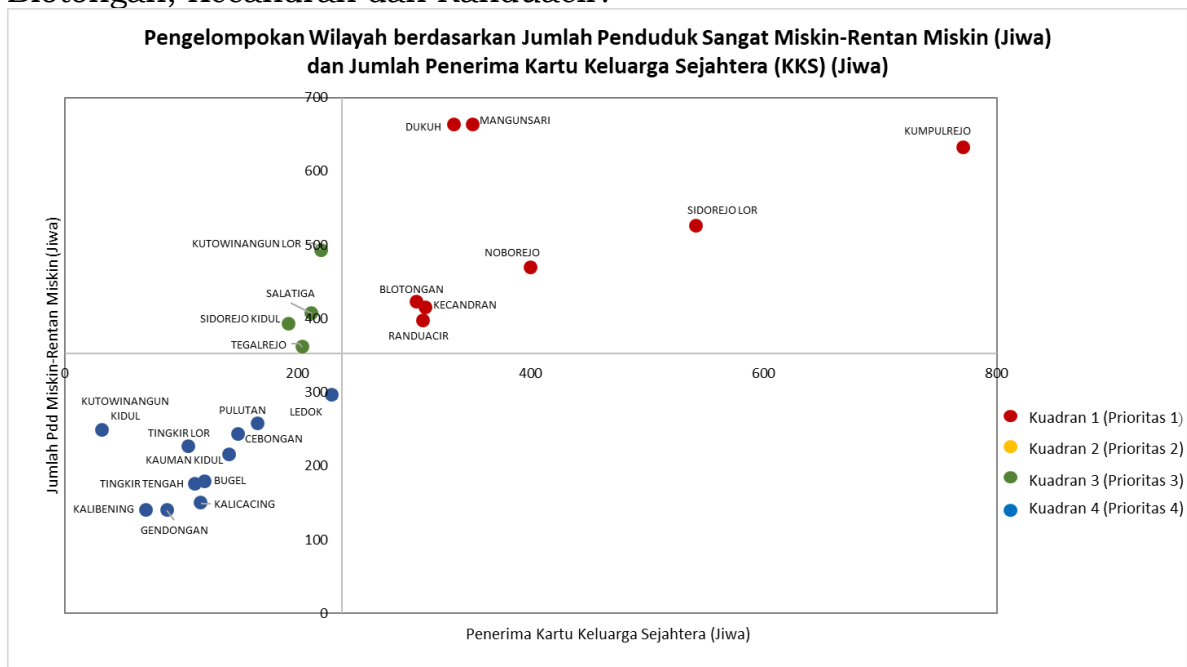
NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SUMBER DATA	SATUAN	TAHUN						STATUS CAPAIAN	KET	
						BASELINE 2018	2019		2020		2021			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET			REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah								1	1		dalam Dokumen RPB

BAB V WILAYAH PRIORITAS

5.1. PRIORITAS WILAYAH BIDANG KEMISKINAN KONSUMSI

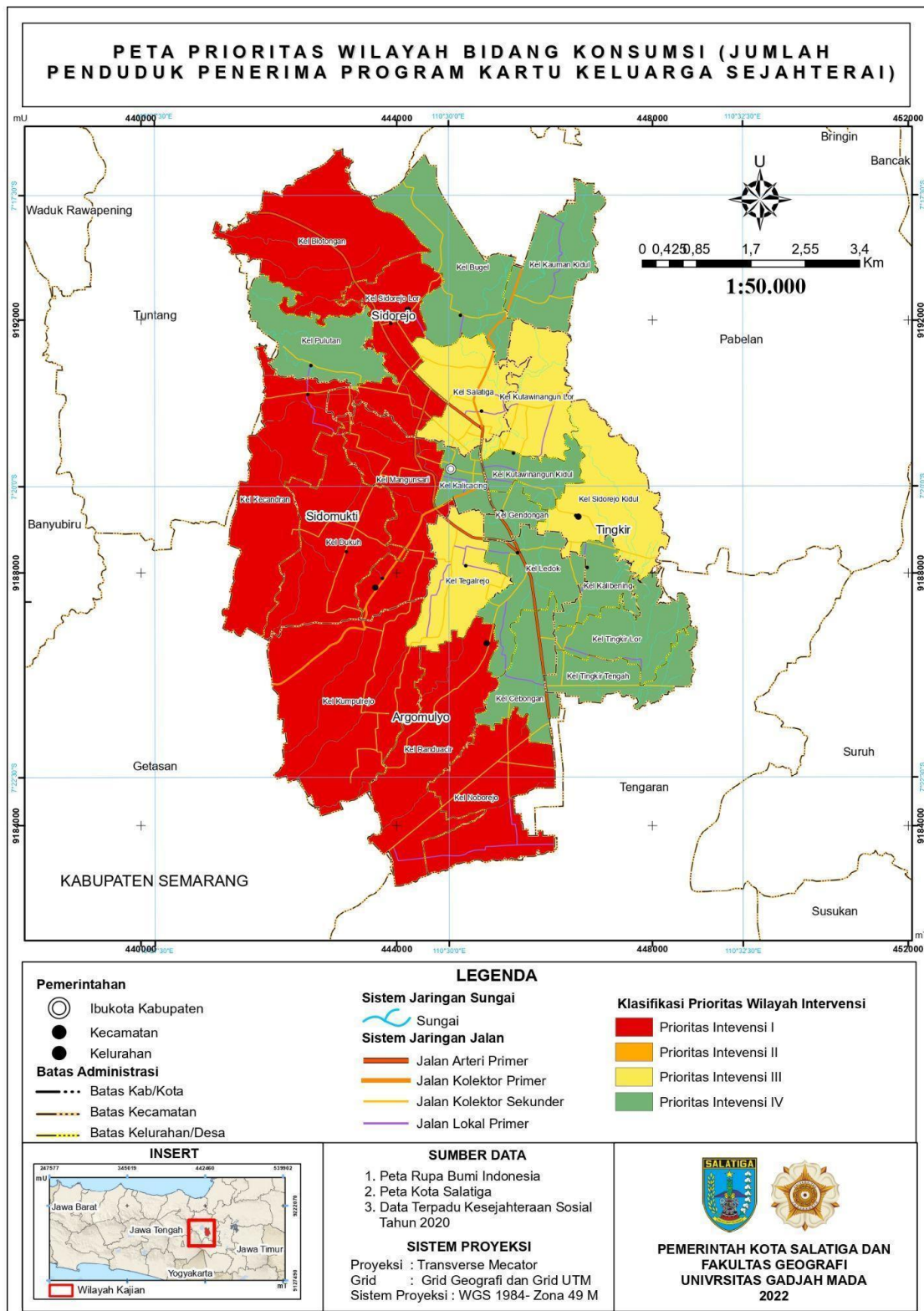
Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah di bidang konsumsi disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Salatiga. Hasil analisis disajikan ke dalam analisis empat kuadran (Gambar 5.1). Kelurahan-kelurahan dengan prioritas 1 adalah kelurahan-kelurahan dengan nilai jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang secara relatif terbesar diantara kelurahan-kelurahan yang berada di Kota Salatiga.

Secara kewilayahan, kelurahan-kelurahan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang konsumsi (Gambar 5.1 analisis kuadran dan Gambar 5.2 peta bidang konsumsi) adalah Kelurahan Mangunsari, Dukuh, Kumpulrejo, Sidorejo Lor, Noborejo, Blotongan, Kecandran dan Randuacir.



Gambar 5.1 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Sangat Miskin-Rentan Miskin (jiwa) dan Jumlah Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (Jiwa)

Sumber: Hasil Olah Data, 2022



Gambar 5.2 Peta Prioritas Wilayah Bidang Konsumsi (Jumlah Penduduk Penerima Program Kartu Keluarga Sejahtera)

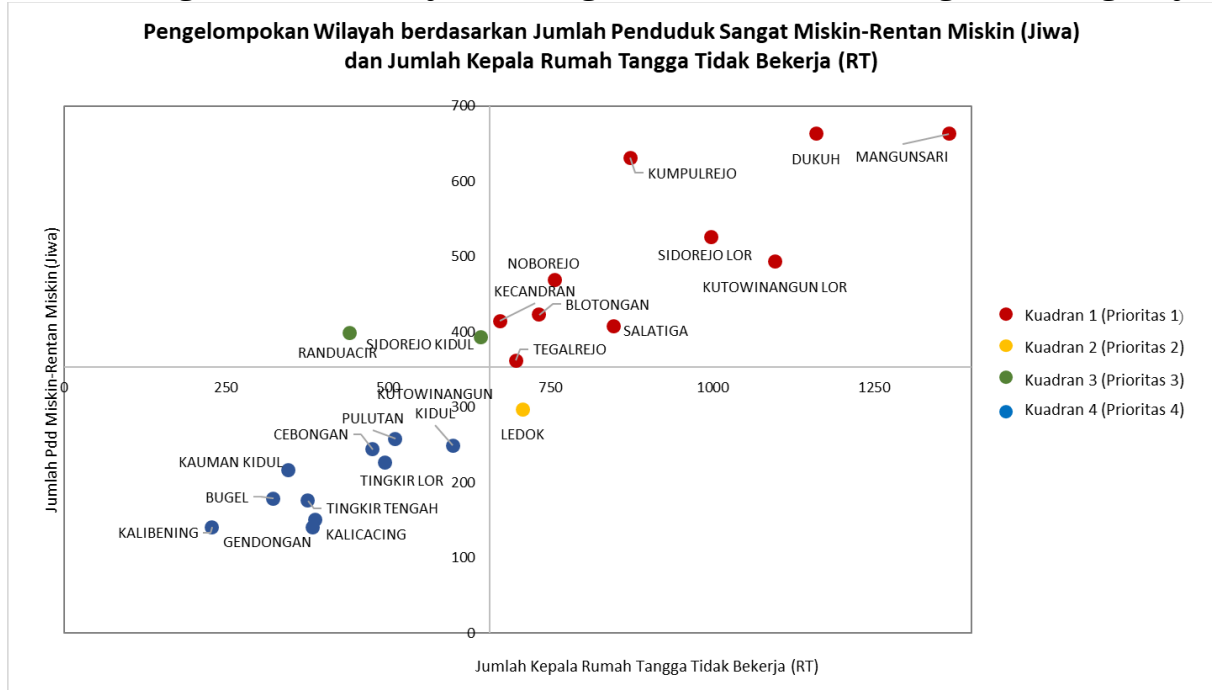
Sumber: Hasil Olah Data, 2022

5.2. PRIORITAS WILAYAH BIDANG KETENAGAKERJAAN

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah di bidang ketenagakerjaan disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah kepala keluarga tidak bekerja di Kota Salatiga. Hasil analisis disajikan

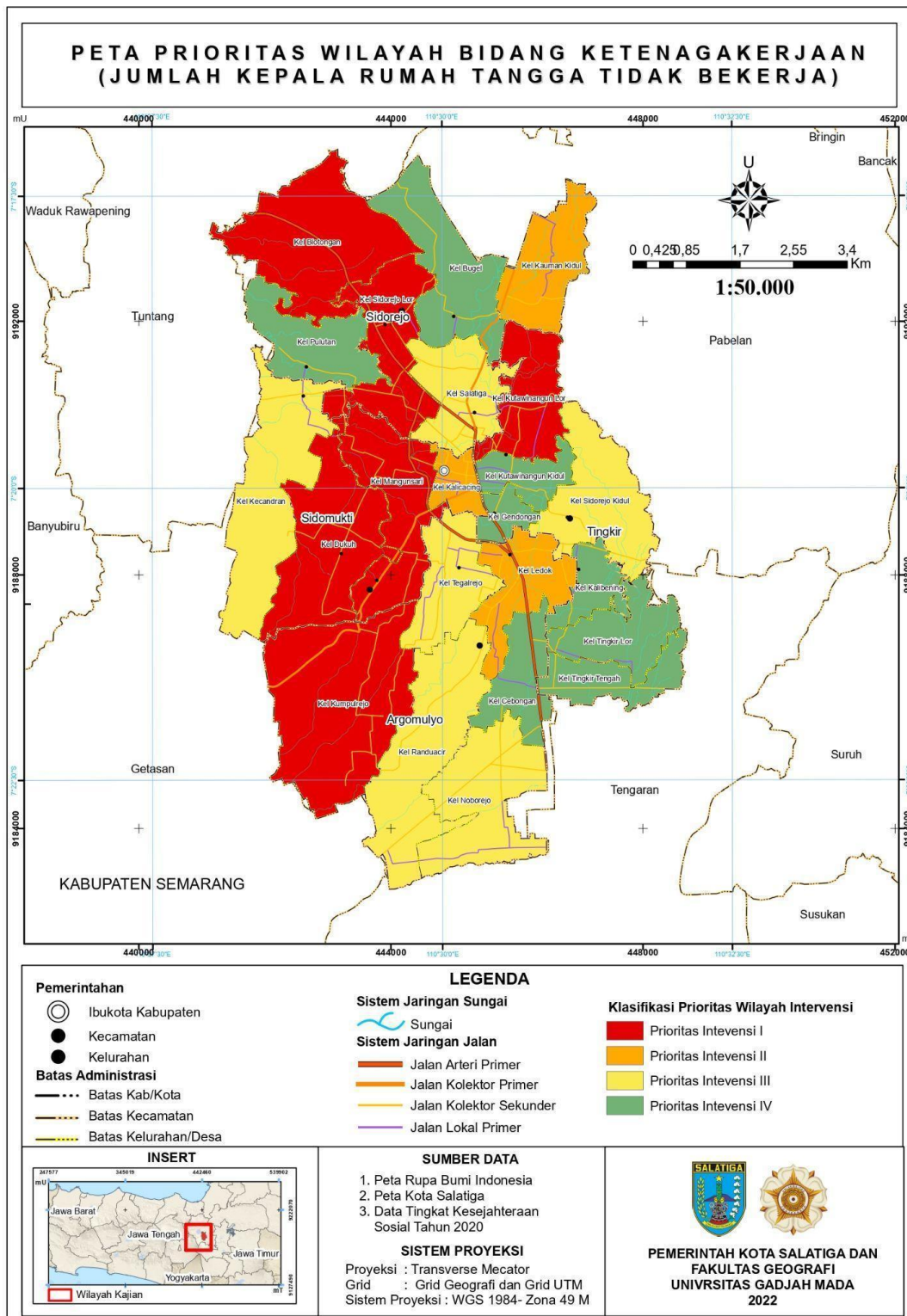
ke dalam analisis empat kuadran (Gambar 5.3). Kelurahan-kelurahan dengan prioritas 1 adalah kelurahan-kelurahan dengan nilai jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah kepala rumah tangga tidak bekerja yang secara relatif terbesar diantara kelurahan-kelurahan yang berada di Kota Salatiga.

Secara kewilayahan, kelurahan-kelurahan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang ketenagakerjaan (Gambar 5.3 analisis kuadran dan Gambar 5.4 peta bidang ketenagakerjaan) adalah Kelurahan Mangunsari, Dukuh, Kumpulrejo, Sidorejo Lor, Kutowinangun Lor, Noborejo, Blotongan, Kecandran, Salatiga, dan Tegalrejo.



Gambar 5.3 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Sangat Miskin-Rentan Miskin (jiwa) dan Jumlah Kepala Rumah Tangga Tidak Bekerja (RT)

Sumber: Hasil Olah Data, 2022



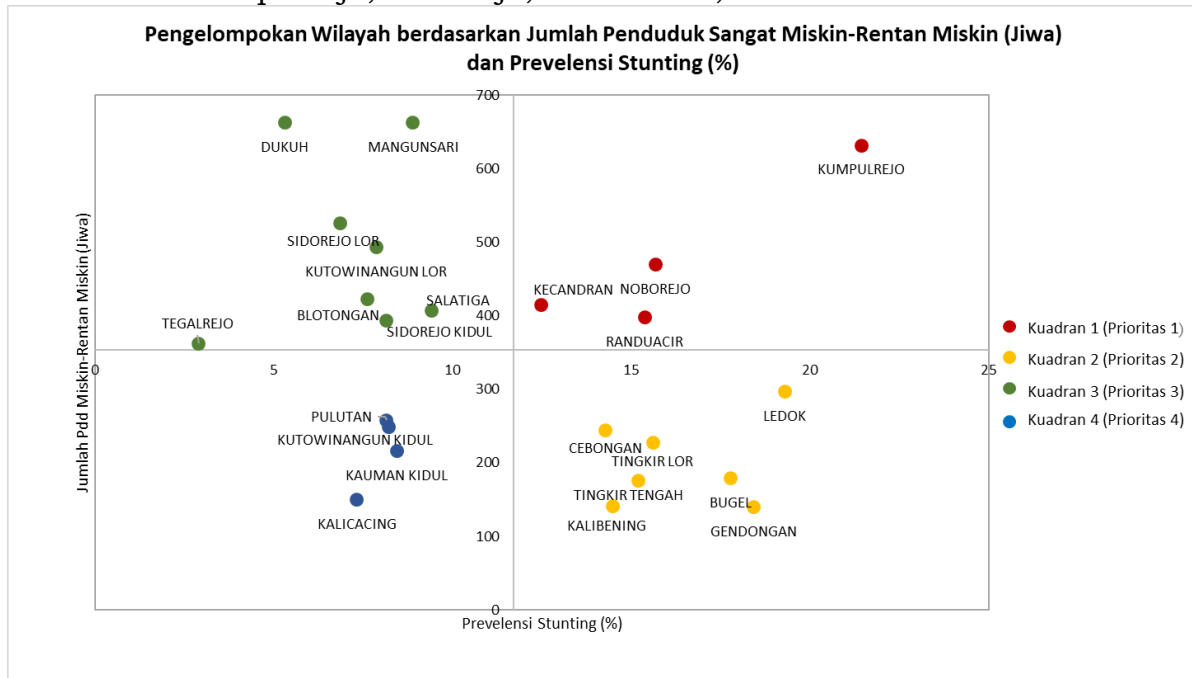
Gambar 5.4. Peta Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan (Jumlah Kepala Rumah Tangga Tidak Bekerja)
Sumber: Hasil Olah Data, 2022

5.3. PRIORITAS WILAYAH BIDANG KESEHATAN

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah di bidang kesehatan disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan prevalensi *stunting* di Kota Salatiga. Hasil analisis disajikan ke dalam analisis empat

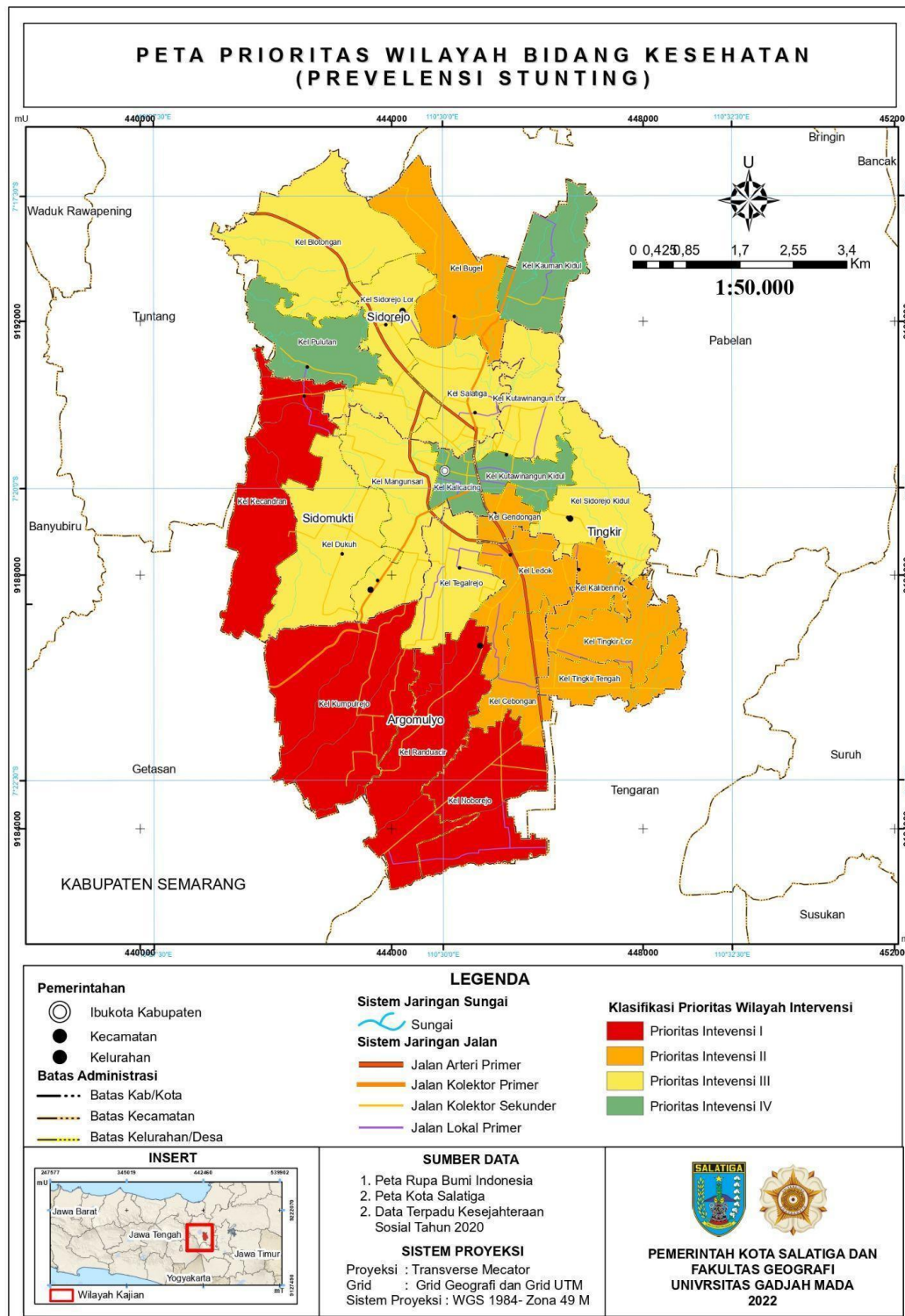
kuadran (Gambar 5.5). Kelurahan-kelurahan dengan prioritas 1 adalah kelurahan-kelurahan dengan nilai jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan prevalensi *stunting* yang secara relatif terbesar diantara kelurahan-kelurahan yang berada di Kota Salatiga.

Secara kewilayahan, kelurahan-kelurahan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang kesehatan (Gambar 5.5 analisis kuadran dan Gambar 5.6: peta bidang kesehatan) adalah Kelurahan Kumpulrejo, Noborejo, Kecandran, dan Randuacir.



Gambar 5.5 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Sangat Miskin-Rentan Miskin (jiwa) dan Prevalensi *Stunting* (%)

Sumber: Hasil Olah Data, 2022



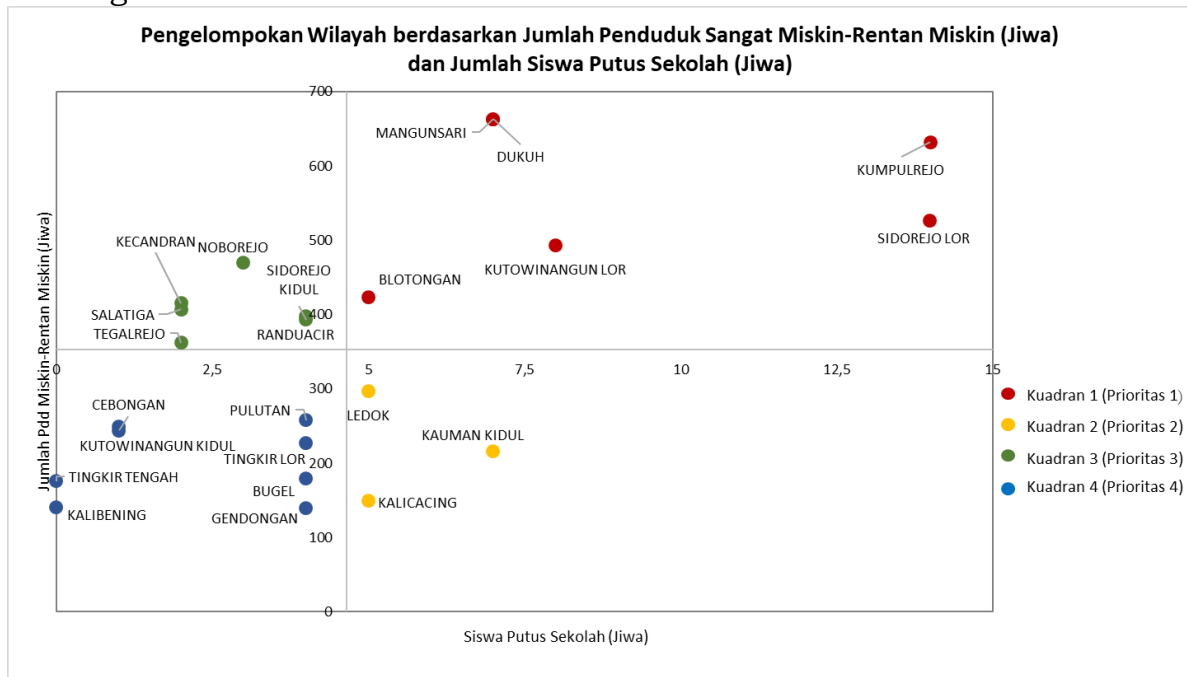
Gambar 5.6 Peta Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan (Prevalensi *Stunting*)
 Sumber: Hasil Olah Data, 2022

5.4. PRIORITAS WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah di bidang pendidikan disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah siswa putus sekolah di Kota Salatiga. Hasil analisis disajikan ke dalam analisis empat kuadran (Gambar 5.7). Kelurahan-kelurahan dengan prioritas 1 adalah kelurahan-kelurahan dengan nilai jumlah penduduk sangat miskin-

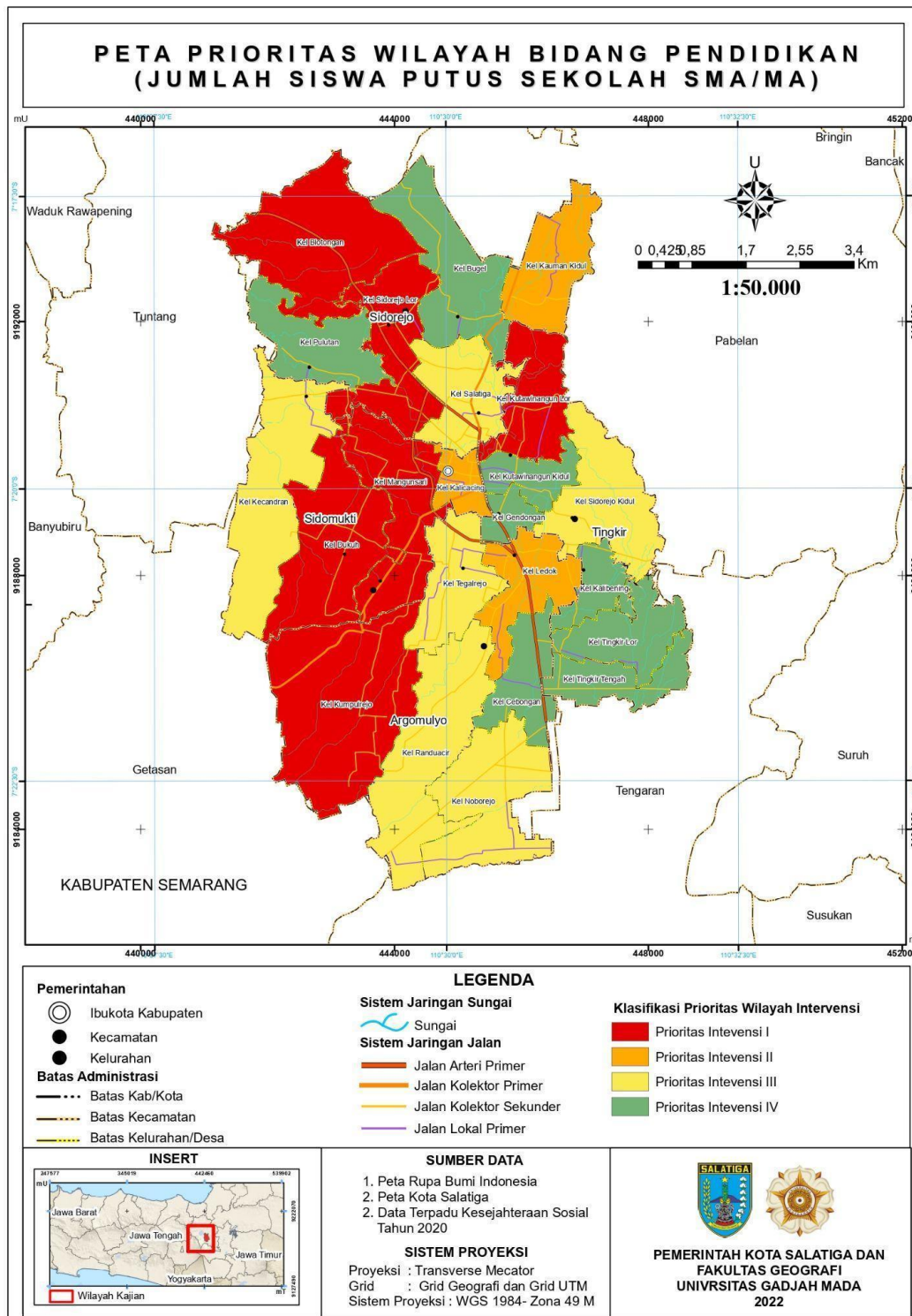
rentan miskin dan jumlah siswa putus sekolah yang secara relatif terbesar diantara kelurahan-kelurahan yang berada di Kota Salatiga.

Secara kewilayahan, kelurahan-kelurahan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang pendidikan (Gambar 5.7 analisis kuadran dan Gambar 5.8: peta bidang pendidikan) adalah Kelurahan Mangunsari, Dukuh, Kumpulrejo, Sidorejo Lor, Kutowinangun Lor, dan Blotongan.



Gambar 5.7 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Sangat Miskin-Rentan Miskin (jiwa) dan Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA/MA (Jiwa)

Sumber: Hasil Olah Data, 2022



Gambar 5.8 Peta Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan (Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA/MA)
 Sumber: Hasil Olah Data, 2022

5.5. PRIORITAS WILAYAH BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

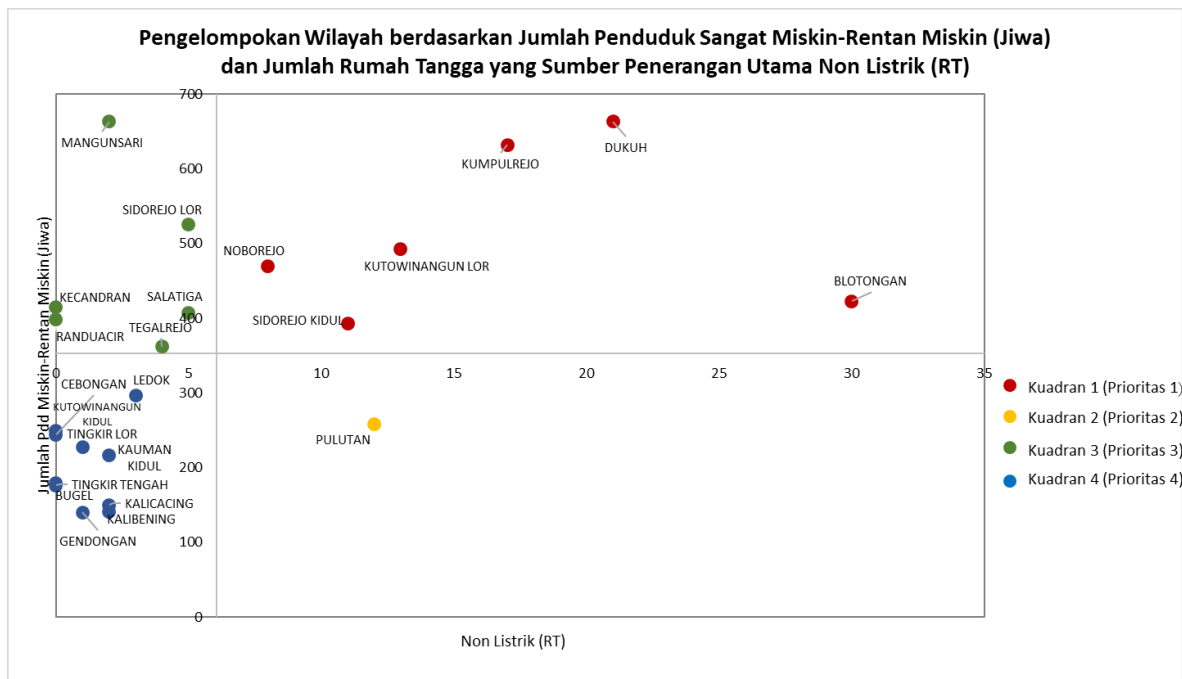
Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah di bidang infrastruktur dasar terdiri atas empat komponen: pertama, disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah rumah tangga yang sumber penerangan utama non listrik di Kota Salatiga. Kedua, lokasi prioritas

wilayah yang disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum tidak layak di Kota Salatiga. Ketiga, lokasi prioritas wilayah yang disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi tidak layak di Kota Salatiga. Keempat, lokasi prioritas wilayah yang disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Salatiga. Selanjutnya, hasil analisis disajikan ke dalam analisis empat kuadran (Gambar 5.9 - Gambar 5.16). Kelurahan-kelurahan dengan prioritas 1 adalah kelurahan-kelurahan dengan nilai jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan indikator bidang infrastruktur dasar terpilih yang secara relatif terbesar diantara kelurahan-kelurahan yang berada di Kota Salatiga.

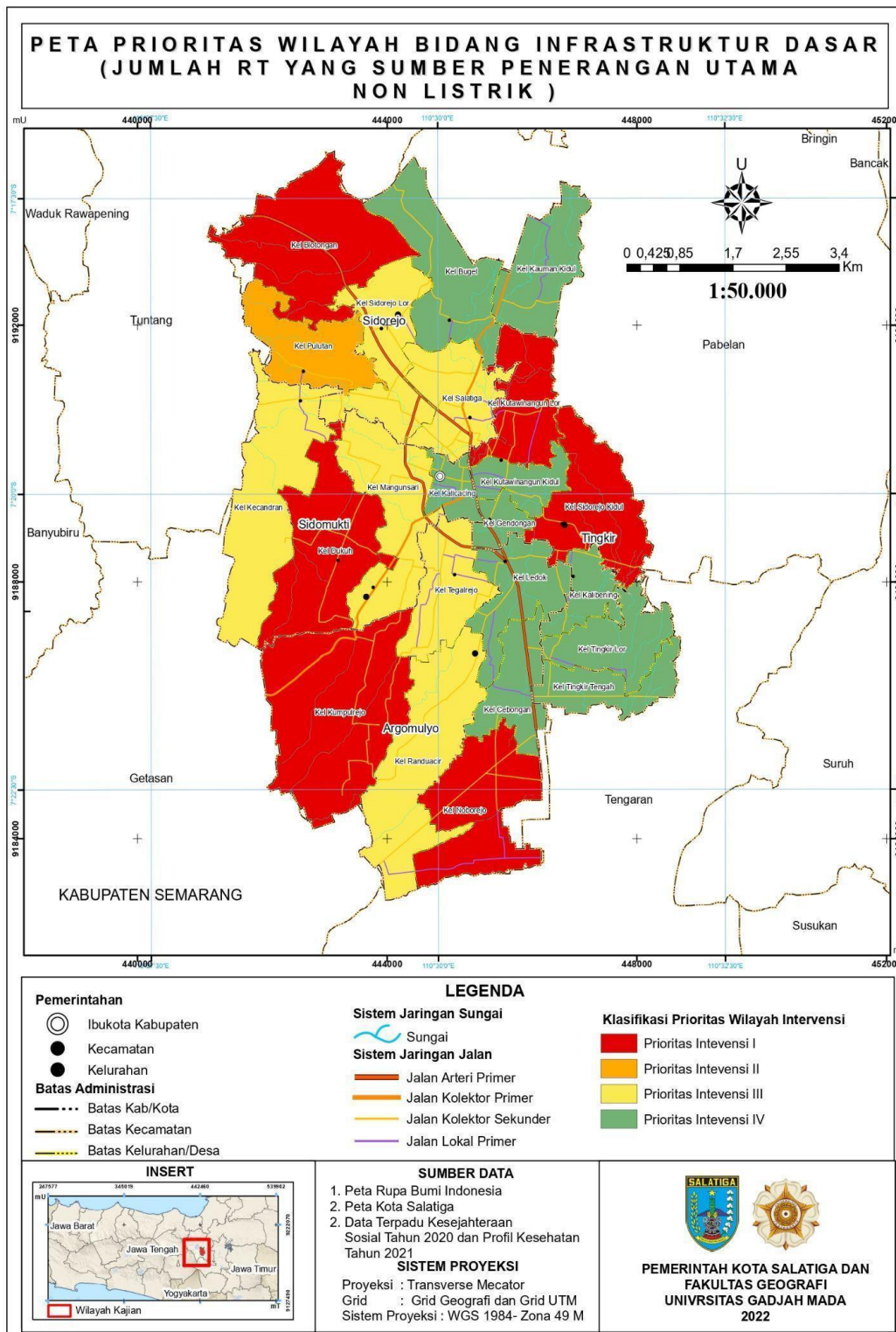
Secara kewilayahan, kelurahan-kelurahan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang infrastruktur dasar disajikan di Gambar 5.9 s/d Gambar 5.16 analisis kuadran dan Gambar 5.9 s/d Gambar 5.16 peta bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada sumber penerangan utama non listrik, akses sumber air minum layak, akses sanitasi tidak layak dan rumah tidak layak huni.

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah di bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada ketersediaan sumber penerangan disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah rumah tangga yang sumber penerangan utama non listrik di Kota Salatiga. Hasil analisis disajikan ke dalam analisis empat kuadran (Gambar 5.9). Kelurahan-kelurahan dengan prioritas 1 adalah kelurahan-kelurahan dengan nilai jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah rumah tangga yang sumber penerangan utama non listrik yang secara relatif terbesar diantara kelurahan-kelurahan yang berada di Kota Salatiga.

Secara kewilayahan, kelurahan-kelurahan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada ketersediaan sumber penerangan (Gambar 5.9 analisis kuadran dan Gambar 5.10 peta bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada sumber penerangan utama non listrik) adalah Kelurahan Dukuh, Kumpulrejo, Kutowinangun, Noborejo, Blotongan, dan Sidorejo Kidul.



Gambar 5.9 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Sangat Miskin-Rentan Miskin (jiwa) dan Rumah Tangga yang Sumber Penerangan Utama Non Listrik (RT)
Sumber: Hasil Olah Data, 2022

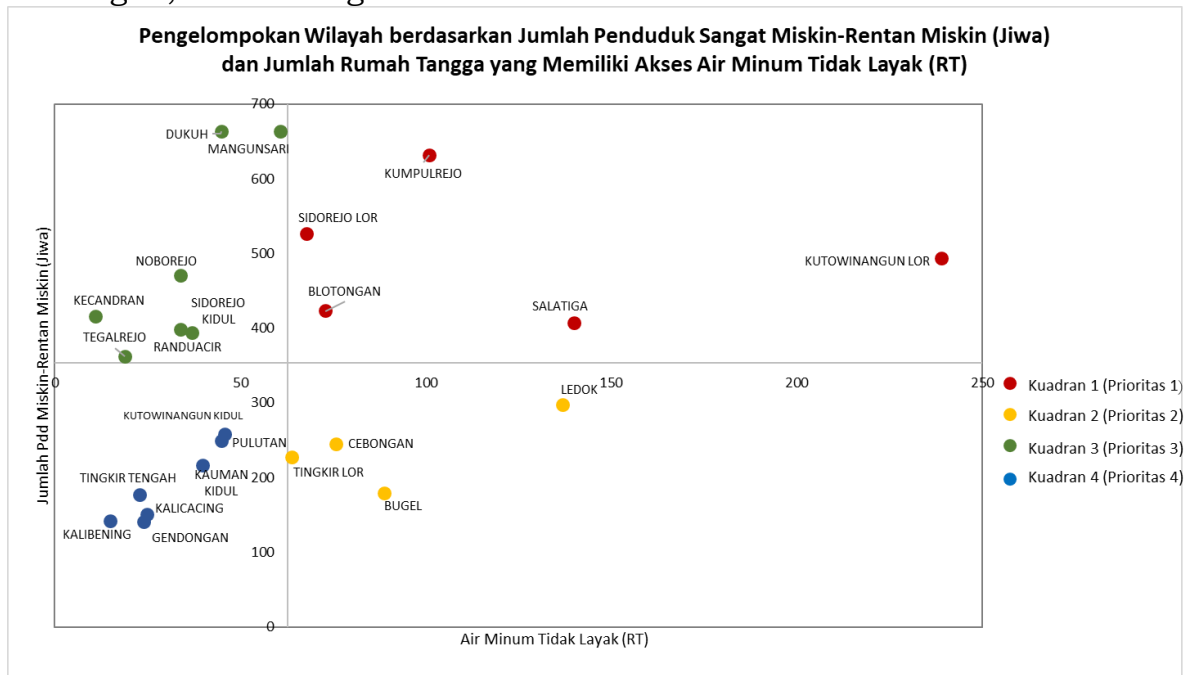


Gambar 5.10 Peta Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar (Jumlah Rumah Tangga yang Sumber Penerangan Utama Non Listrik)
Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah di bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada akses air minum disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-*rentan miskin* dan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum tidak layak di Kota Salatiga. Hasil analisis disajikan

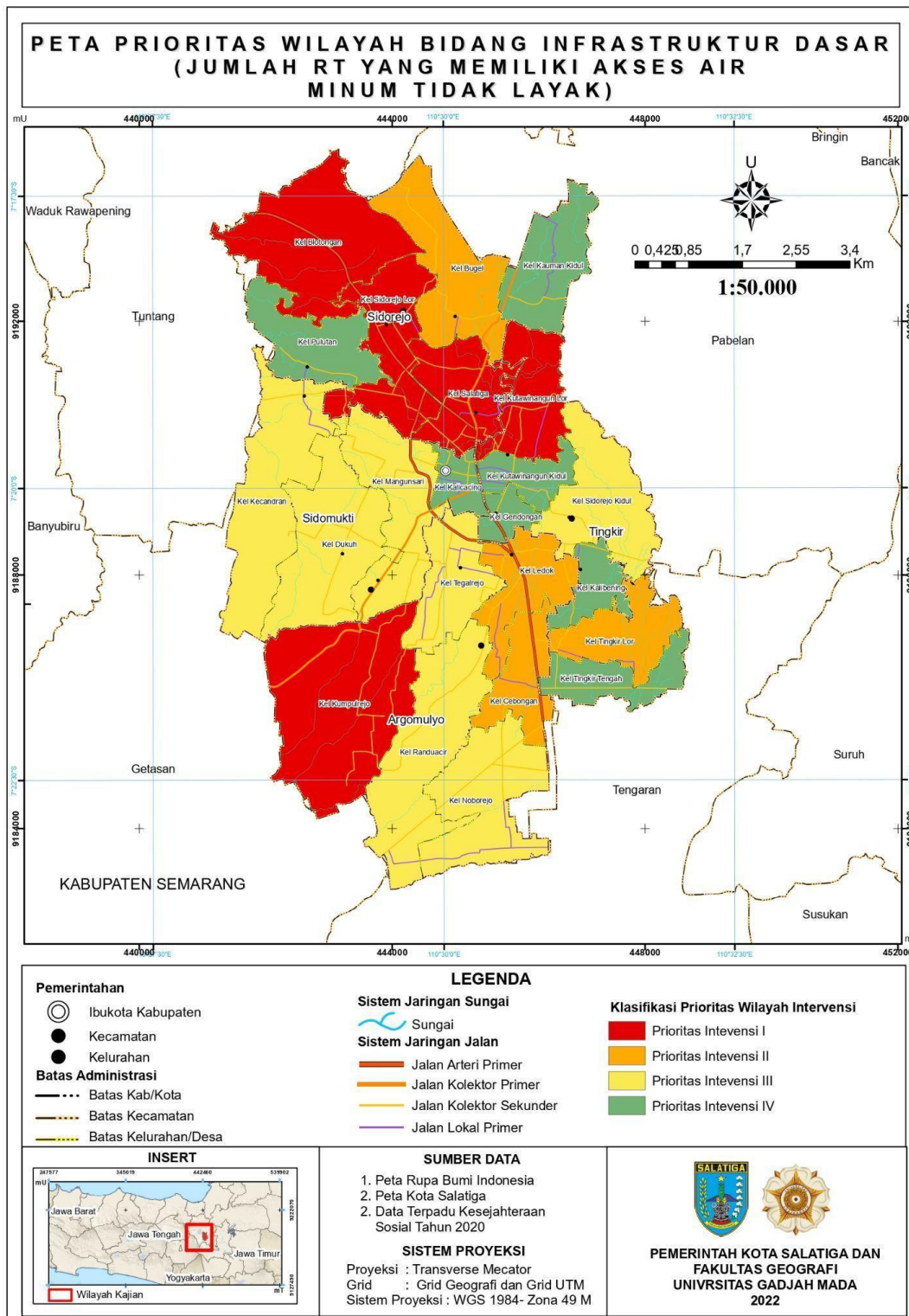
ke dalam analisis empat kuadran (Gambar 5.11). Kelurahan-kelurahan dengan prioritas 1 adalah kelurahan-kelurahan dengan nilai jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum tidak layak yang secara relatif terbesar diantara kelurahan-kelurahan yang berada di Kota Salatiga.

Secara kewilayahan, kelurahan-kelurahan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada akses air minum (Gambar 5.11: analisis kuadran dan Gambar 5.12 peta bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada akses air minum) adalah Kelurahan Kumpulrejo, Sidorejo Lor, Kutowinangun Lor, Blotongan, dan Salatiga.



Gambar 5.11 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Sangat Miskin-Rentan Miskin (jiwa) dan Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Tidak Layak (RT)

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

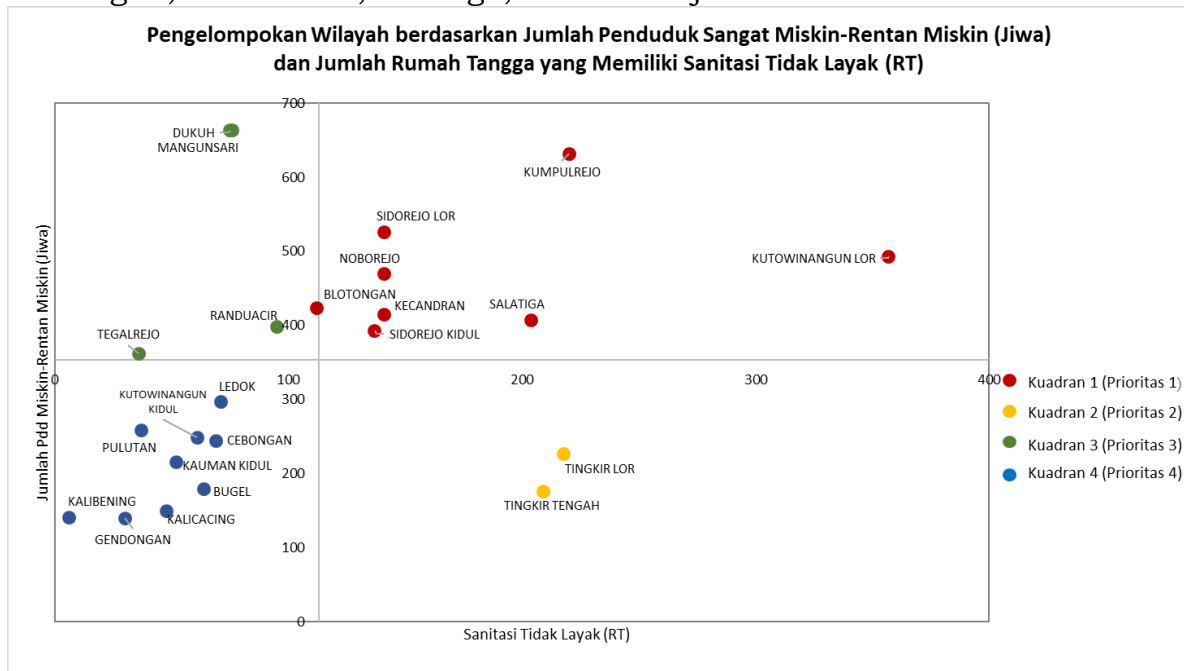


Gambar 5.12 Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar (Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Tidak Layak)
 Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah di bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada sanitasi disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi tidak layak di Kota Salatiga. Hasil analisis disajikan ke dalam analisis

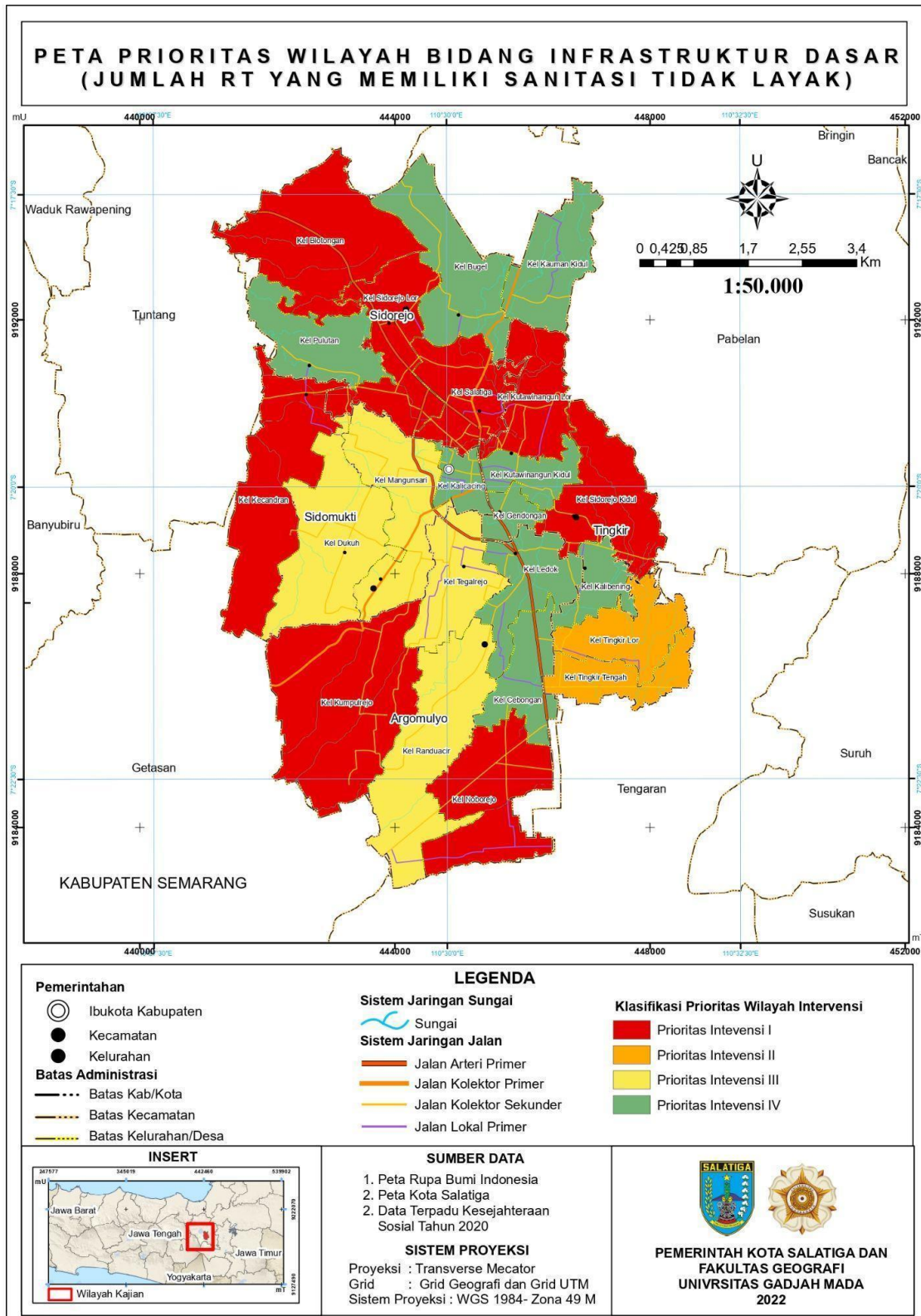
empat kuadran (Gambar 5.13). Kelurahan-kelurahan dengan prioritas 1 adalah kelurahan-kelurahan dengan nilai jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi tidak layak yang secara relatif terbesar diantara kelurahan-kelurahan yang berada di Kota Salatiga.

Secara kewilayahan, kelurahan-kelurahan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada sanitasi (Gambar 5.13 analisis kuadran dan Gambar 5.14 peta bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada sanitasi) adalah Kelurahan Kumpulrejo, Sidorejo Lor, Kutowinangun Lor, Noborejo, Blotongan, Kecandran, Salatiga, dan Sidorejo Kidul.



Gambar 5.13 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Sangat Miskin-Rentan Miskin (jiwa) dan Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Tidak Layak (RT)

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

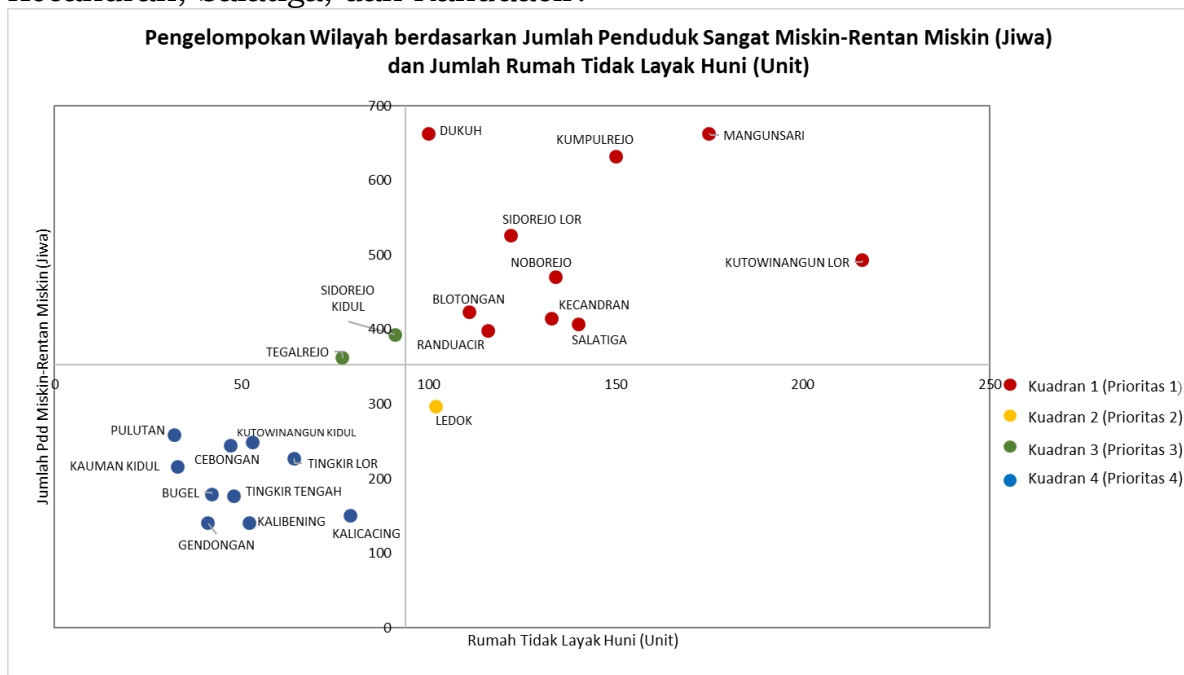


Gambar 5.14 Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar (Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Tidak Layak)
Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah di bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada rumah tidak layak huni disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah rumah tidak layak huni

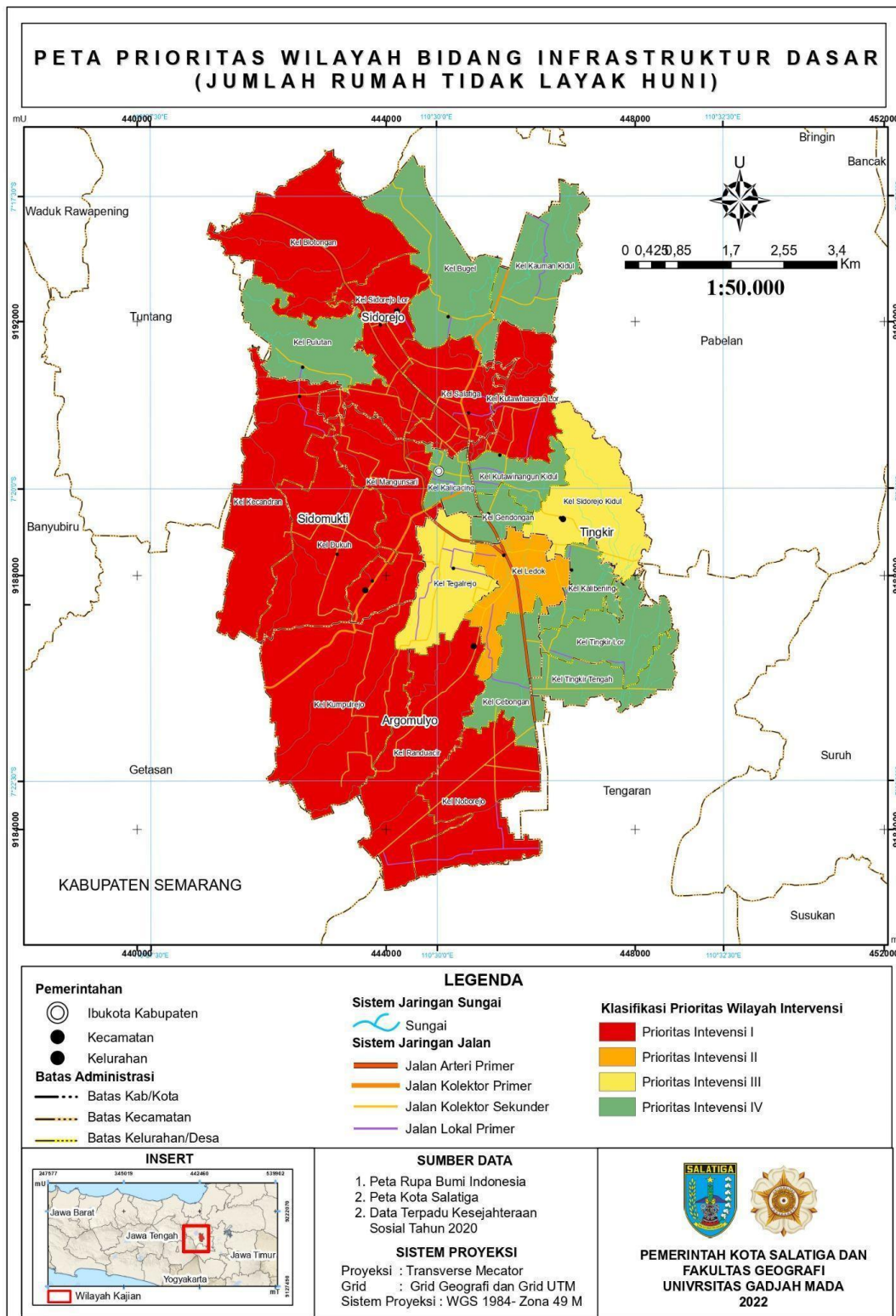
di Kota Salatiga. Hasil analisis disajikan ke dalam analisis empat kuadran (Gambar 5.15). Kelurahan-kelurahan dengan prioritas 1 adalah kelurahan-kelurahan dengan nilai jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah rumah tidak layak huni yang secara relatif terbesar diantara kelurahan-kelurahan yang berada di Kota Salatiga.

Secara kewilayahan, kelurahan-kelurahan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada rumah tidak layak huni (Gambar 5.15 analisis kuadran dan Gambar 5.16 peta bidang infrastruktur dasar yang berfokus kepada rumah tidak layak huni) adalah Kelurahan Mangunsari, Dukuh, Kumpulrejo, Sidorejo Lor, Kutowinangun Lor, Sidorejo Lor, Noborejo, Blotongan, Kecandran, Salatiga, dan Randuacir.



Gambar 5.15 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Sangat Miskin-Rentan Miskin (jiwa) dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)

Sumber: Hasil Olah Data, 2022



Gambar 5.16 Peta Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar (Jumlah Rumah Tidak Layak Huni)
 Sumber: Hasil Olah Data, 2022

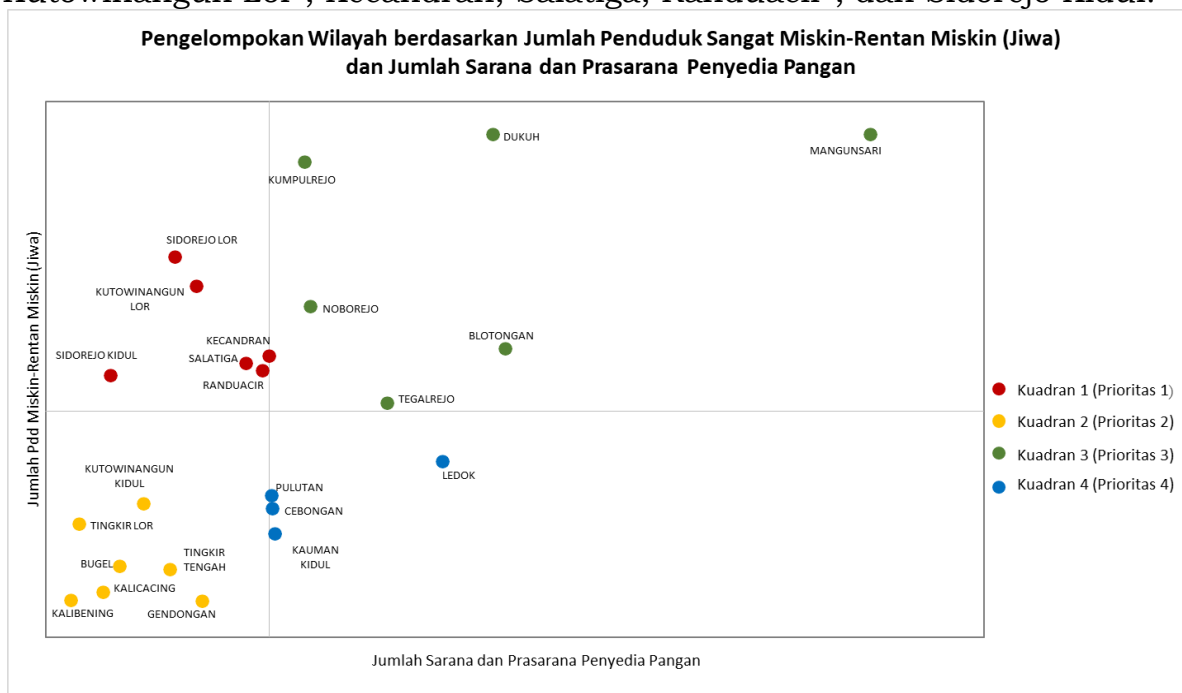
5.6. PRIORITAS WILAYAH BIDANG KETAHANAN PANGAN

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah di bidang ketahanan pangan disusun dari indikator jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan di Kota Salatiga. Hasil analisis

disajikan ke dalam analisis empat kuadran (Gambar 5.17). Kelurahan-kelurahan dengan prioritas 1 adalah kelurahan-kelurahan dengan nilai jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin dan jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan rendah. Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur indeks komposit kerentanan dan ketahanan pangan. Data tersebut diperoleh dari *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2021* dengan menggunakan aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan aspek pemanfaatan pangan. Data jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan digunakan dengan mempertimbangkan ketersediaan data (unit analisis kelurahan).

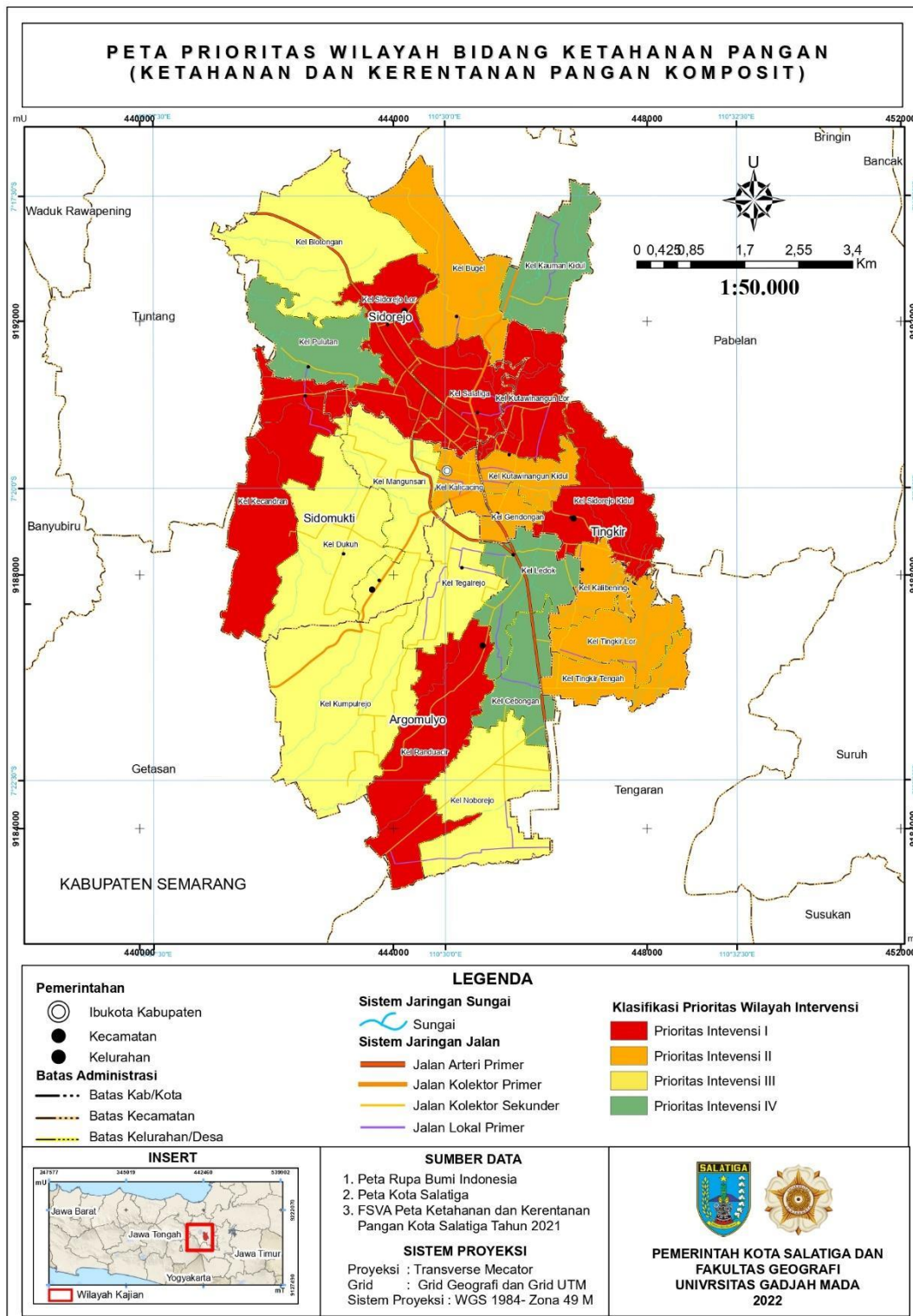
Aspek Ketersediaan Pangan meliputi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, dan rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Aspek Akses terhadap Pangan meliputi rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan, dan kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara dan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan. Aspek Pemanfaatan pangan meliputi rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga Kelurahan, dan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan.

Secara kewilayahan, kelurahan-kelurahan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang ketahanan pangan yaitu jumlah penduduk miskin tertinggi dan jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terendah. (Gambar 5.17 analisis kuadran dan Gambar 5.18 peta bidang ketahanan pangan) adalah Kelurahan Sidorejo Lor, Kutowinangun Lor, Kecandran, Salatiga, Randuacir, dan Sidorejo Kidul.



Gambar 5.17 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Sangat Miskin-Rentan Miskin (jiwa) dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan

Sumber: Hasil Olah Data, 2022



Gambar 5.18 Peta Prioritas Wilayah Bidang Ketahanan Pangan (Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit)
 Sumber: Hasil Olah Data, 2022

5.7 HASIL KOMPOSIT PRIORITAS WILAYAH

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, percepatan penanggulangan kemiskinan dpaat dilihat dari jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin serta kondisi tiap bidang kemiskinan. Penentuan hasil

komposit prioritas wilayah ditentukan dari bidang konsumsi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Dengan adanya wilayah prioritas intervensi yang mempresentasikan distribusi penduduk sangat miskin-rentan miskin maka perlunya upaya yang dilakukan melalui kolaborasi intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Hasil komposit prioritas wilayah percepatan penanggulangan kemiskinan tiap bidang kemiskinan di Kota Salatiga membagi klasifikasi menjadi tiga yaitu wilayah prioritas intervensi I, II dan III. Kelurahan-kelurahan dengan prioritas 1 adalah kelurahan dengan kondisi tiap bidang relatif berada pada kuadran 1 atau prioritas 1 (Tabel 5.1).

Secara kewilayahan, kelurahan-kelurahan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan (Tabel 5.1 Hasil komposit prioritas wilayah percepatan penanggulangan kemiskinan tiap bidang kemiskinan dan Gambar 5.19 Peta prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan (hasil komposit bidang kemiskinan) adalah Kelurahan Kumpulrejo, Randuacir, Noborejo, Kecandran, Kutowinangun Lor, Blotongan, dan Sidorejo Lor.

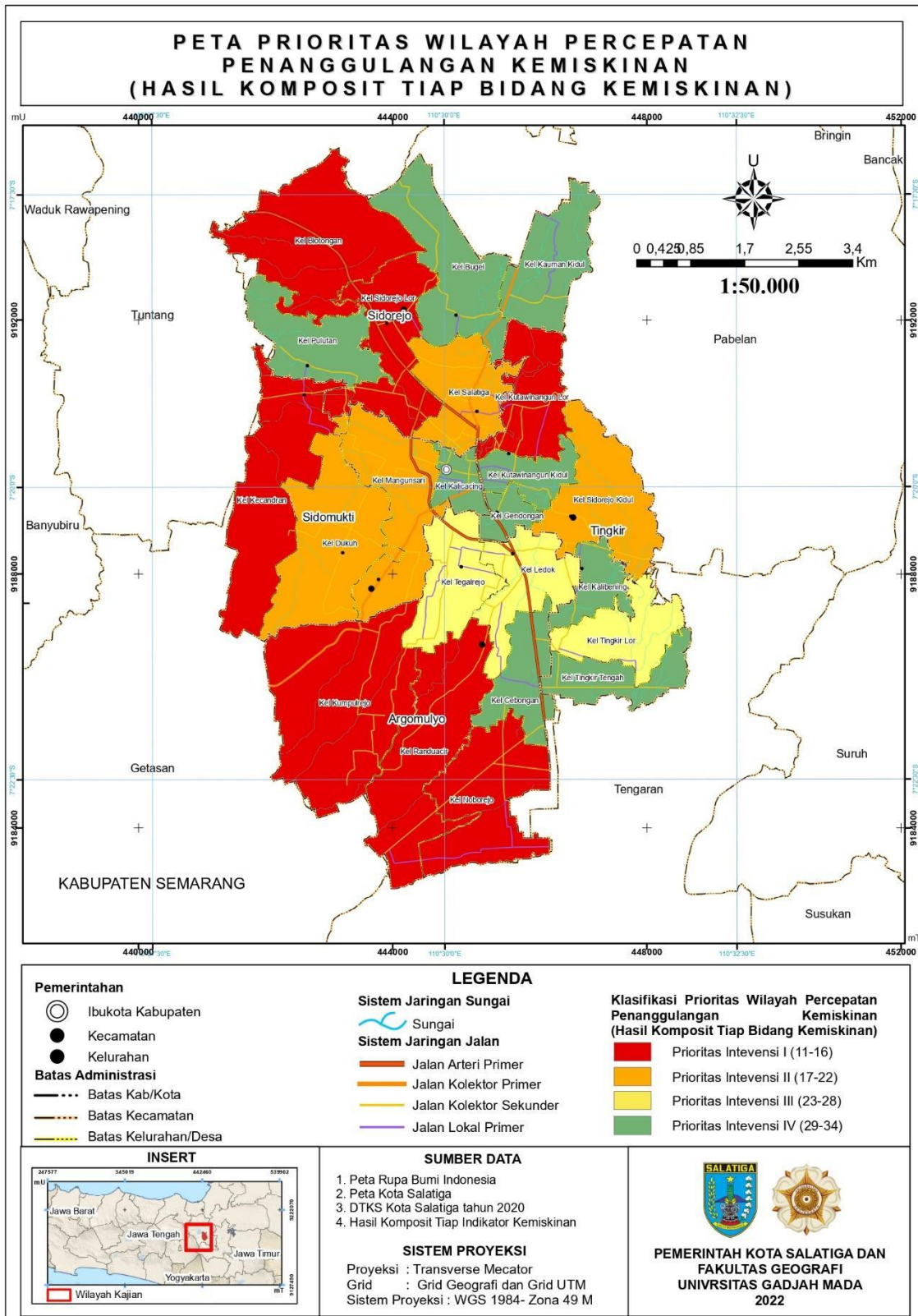
Tabel 5.1 Hasil Komposit Prioritas Wilayah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tiap Bidang Kemiskinan

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan <40%	Bidang Konsumsi	Bidang Kesehatan	Bidang Ketenagakerjaan	Bidang Pendidikan	Bidang Infrastruktur Dasar				Bidang Ketahanan Pangan	Hasil Komposit
							Sumber Air Minum Tidak Layak	Sanitasi Tidak Layak	Liistrik Non PLN	Rumah Tidak Layak Huni		
Argomulyo	Kumpulrejo	632	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I
Sidorejo	Blotongan	423	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I
Sidorejo	Sidorejo Lor	526	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I
Tingkir	Kutowinangun Lor	493	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I
Argomulyo	Noborejo	470	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I
Sidomukti	Kecandran	415	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I
Argomulyo	Randuacir	398	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I
Sidorejo	Salatiga	407	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi II

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan <40%	Bidang Konsumsi	Bidang Kesehatan	Bidang Ketenagakerjaan	Bidang Pendidikan	Bidang Infrastruktur Dasar				Bidang Ketahanan Pangan	Hasil Komposit
							Sumber Air Minum Tidak Layak	Sanitasi Tidak Layak	Liistrik Non PLN	Rumah Tidak Layak Huni		
Sidomukti	Mangunsari	663	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi II
Sidomukti	Dukuh	663	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi II
Tingkir	Sidorejo Kidul	393	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi II
Argomulyo	Tegalrejo	362	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi I	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III	Prioritas Intervensi III
Argomulyo	Ledok	297	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi III
Tingkir	Tingkir Lor	227	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi III
Sidorejo	Bugel	179	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV
Tingkir	Tingkir Tengah	176	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan <40%	Bidang Konsumsi	Bidang Kesehatan	Bidang Ketenagakerjaan	Bidang Pendidikan	Bidang Infrastruktur Dasar				Bidang Ketahanan Pangan	Hasil Komposit
							Sumber Air Minum Tidak Layak	Sanitasi Tidak Layak	Liistrik Non PLN	Rumah Tidak Layak Huni		
Argomulyo	Cebongan	244	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV
Sidomukti	Kalicacing	150	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV
Tingkir	Gendongan	140	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV
Tingkir	Kalibening	141	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV
Sidorejo	Kauman Kidul	216	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV
Sidorejo	Pulutan	258	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV
Tingkir	Kutowinangun Kidul	249	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi IV	Prioritas Intervensi II	Prioritas Intervensi IV

Sumber: Hasil Olah Data, 2022



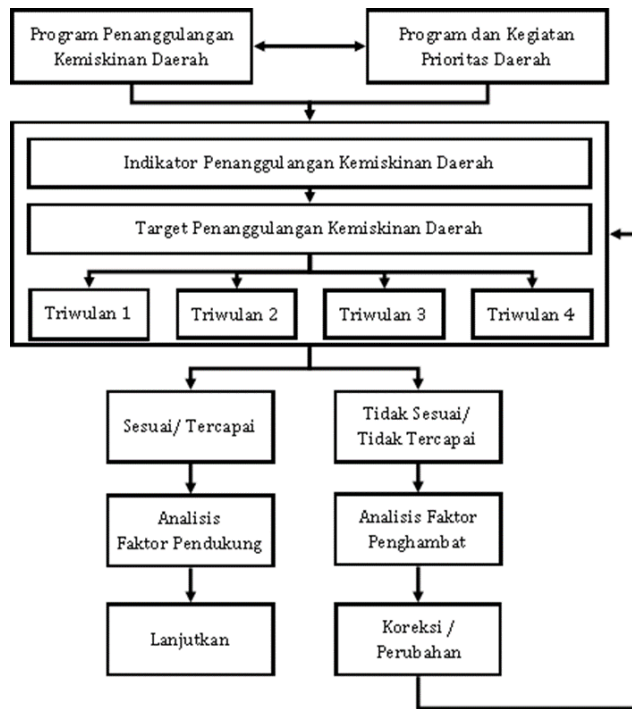
Gambar 5.19 Peta Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan
(Hasil Komposit Tiap Bidang Kemiskinan)
Sumber: Hasil Olah Data, 2022

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

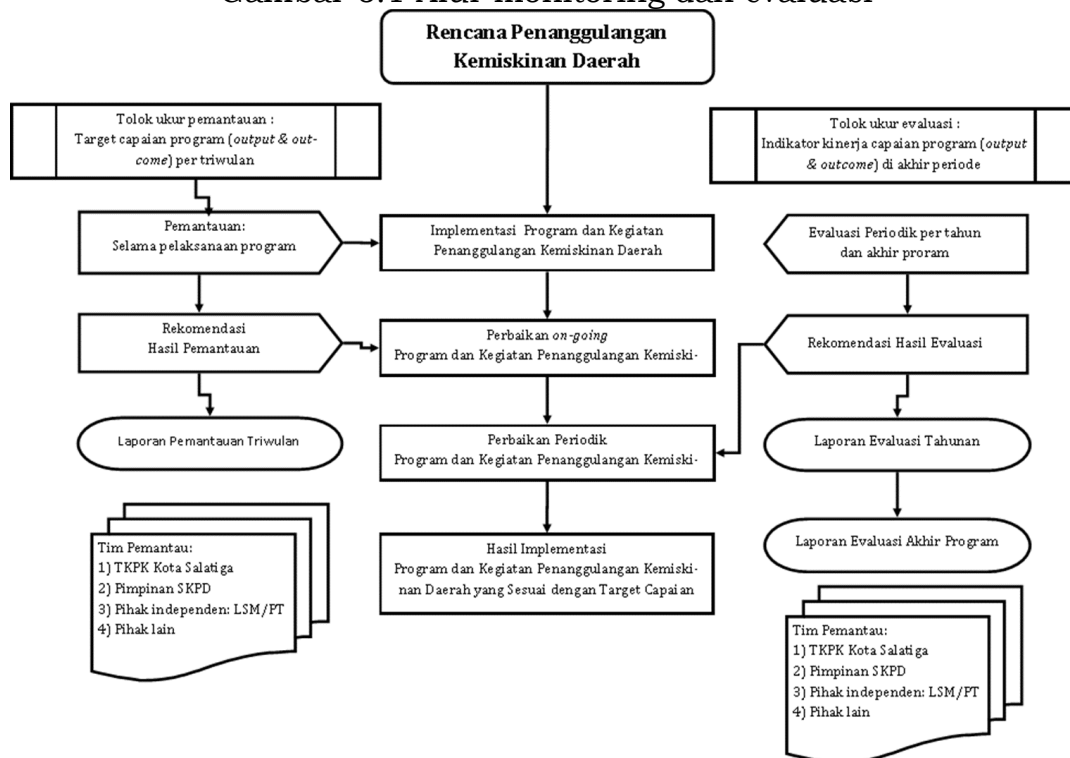
Monitoring dan evaluasi implementasi rencana penanggulangan kemiskinan daerah dibutuhkan sebagai upaya untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan ketepatan, keakuratan dan kelengkapan data dan informasi. Tujuan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kemajuan maupun kualitas pelaksanaan program kegiatan, selain itu juga untuk mengidentifikasi masalah maupun potensi masalah yang dapat terjadi, serta untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan baik dari sisi keluaran (*output*), kegunaan dan dampaknya, serta menilai capaian kinerja penanggulangan kemiskinan. Monitoring diartikan sebagai aktivitas untuk mengidentifikasi umpan balik secara terus-menerus pada setiap program dari program atau kegiatan yang direncanakan baik untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kegiatan, keluaran maupun dampak positif maupun negatif dari pelaksanaan kegiatan. Adapun evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program dan kegiatan yang kemudian dipakai untuk perbaikan di masa depan.

6.1. ALUR MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dibagi menjadi beberapa tahapan: (i) persiapan, (ii) pelaksanaan, dan (iii) pelaporan, serta (iv) tindak lanjut. Dalam tahapan persiapan, penyiapan instrumen monitoring disesuaikan dengan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan capaian indikator per periode (dapat dilakukan per triwulan) bersamaan dengan monitoring terhadap capaian program dan kegiatan prioritas perangkat daerah. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan mengecek capaian kinerja masing-masing indikator pada setiap program dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu (triwulan). Pada tahap pelaporan akan muncul kesesuaian dan ketercapaian program dengan target dan diikuti dengan analisis mengenai faktor pendukung maupun penghambatnya, untuk kemudian dilakukan tindak lanjut dari keberhasilan maupun ketidakberhasilan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Evaluasi dilakukan per tahun dengan membandingkan target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Tingkat ketercapaian dianalisis untuk masing-masing program dan kegiatan, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian, ditelaah lebih jauh faktor-faktor penghambat dan pendukung pencapaian target tersebut (Gambar 6.1).



Gambar 6.1 Alur monitoring dan evaluasi



Gambar 6.2 Alur monitoring dan evaluasi

Secara umum, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada semua kebijakan dan program terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga. Adapun sarana monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan.

6.2. INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

Secara sederhana, instrumen monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana tertera pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Instrumen Monitoring

No	Masalah	Program / Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Target Akhir Tahun	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tindak lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Keterangan:

Kolom (1) : berisi nomor

Kolom (2) : berisi uraian masalah determinan per bidang

Kolom (3) : berisi nomenklatur program dan kegiatan OPD yang mendukung program penanggulangan kemiskinan

Kolom (4) : berisi indikator kinerja program dan kegiatan OPD yang sesuai dengan RPKD dan APBD

Kolom (5) : berisi satuan indikator kinerja program dan kegiatan OPD

Kolom (6) : berisi target kinerja triwulan yang telah direncanakan di awal tahun anggaran (sesuai dengan pelaksanaan triwulan)

Kolom (7) : berisi realisasi kinerja triwulan

Kolom (8) : berisi target kinerja sampai akhir tahun perencanaan

Kolom (9) : berisi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan

Kolom (10) : berisi faktor pendorong pelaksanaan kegiatan

Kolom (11) : berisi saran untuk tindak lanjut kegiatan

Adapun instrumen evaluasi seperti tertera berikut 6.2.

Tabel 6.2 Instrumen Evaluasi

No	Masalah	Program / Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Realisasi Program / Kegiatan pada Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Ketercapaian Program/ Kegiatan	Faktor Penghambat / Pendorong	Tindak lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12°)

Keterangan:

Kolom (1) : berisi nomor

Kolom (2) : berisi uraian masalah determinan per bidang

Kolom (3) : berisi nomenklatur program dan kegiatan OPD yang mendukung program penanggulangan kemiskinan

Kolom (4) : berisi indikator kinerja program dan kegiatan OPD yang sesuai dengan RPKD dan APBD

Kolom (5) : berisi satuan indikator kinerja program dan kegiatan OPD

Kolom (6) : berisi target kinerja triwulan yang telah direncanakan di awal tahun anggaran (sesuai dengan pelaksanaan triwulan)

Kolom (7) : berisi realisasi program/kegiatan pada tahun n

Kolom (8) : berisi target anggaran sampai akhir tahun perencanaan

Kolom (9) : berisi realisasi anggaran sampai akhir tahun perencanaan

Kolom (10) : berisi tingkat ketercapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dibagi menjadi tiga kelas:

(i) tinggi, jika ketercapaian lebih atau sama dengan 100%

(ii) sedang, jika ketercapaian antara 80-99%

(iii) rendah, jika ketercapaian kurang dari 80%

Kolom (11) : berisi identifikasi faktor penghambat dan/atau faktor pendorong

Kolom (12) : berisi saran untuk tindak lanjut kegiatan

6.3. PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh TKPK Kota Salatiga bersama dengan instansi terkait dari setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan cakupan:

1. Monitoring terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masing-masing bidang organisasi perangkat daerah,
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masing-masing bidang organisasi perangkat daerah,
3. Evaluasi terhadap capaian indikator-indikator kemiskinan.

TKPK Kota Salatiga berkoordinasi dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, partisipatif, akuntabel, efisien, efektif, ketepatan waktu, ketersinambungan, dan bertumpu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

6.4. MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tentunya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai sasaran penerima program. Untuk itu, aspirasi, masukan dan timbal balik dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai salah satu umpan dalam upaya perbaikan program dan kegiatan penanganan kemiskinan. Masyarakat dapat menyampaikan saran, aspirasi maupun masukan melalui mekanisme pengaduan masyarakat. Dalam hal ini, proses menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi maupun memberikan solusi kepada masyarakat, mendokumentasikan secara tersistem dan mensosialisasikan hasil penanganan pengaduan agar permasalahan yang dialami dapat segera dicarikan alternatif solusi terbaik

bagi seluruh pihak. Mekanisme ini tentunya akan berfungsi sebagai alat monitoring program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara eksternal. Adapun mekanismenya meliputi:

- 1) Masyarakat baik secara individu, rumah tangga, kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat program maupun bukan penerima manfaat program dapat menyampaikan pengaduan kepada TKPK Kota Salatiga apabila menjumpai permasalahan dan ketidaksesuaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- 2) Setelah adanya aduan dari masyarakat, pelaksana program melakukan analisis terhadap informasi dan melakukan kajian solusi secara berjenjang.
- 3) Hasil penanganan pengaduan disampaikan secara berkala kepada Walikota sebagai penanggung jawab TKPK.

BAB VII PENUTUP

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat maupun akademisi. Melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2027 yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026 diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, terarah dengan semangat kolaborasi antar *stakeholders* untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. Kota Salatiga berusaha untuk mewujudkan penanganan atas permasalahan kemiskinan yang sesuai dengan visi Pemerintah Kota Salatiga yang Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat.

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI